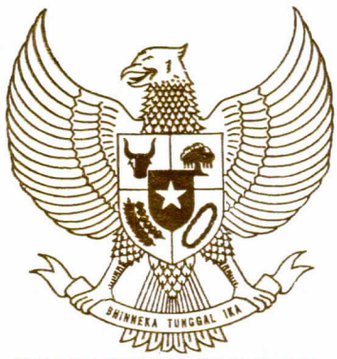
PEMERINTAH
KOTA BOGOR



# RPD
# KOTA BOGOR

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2026

Tahun
2025 - 2026



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode tahun 2025-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota untuk periode Tahun 2025-2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan melaksanakan pembangunan pada Tahun 2025-2026.

Pasal 3

Maksud penetapan RPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi:

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
b. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
c. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB II
ISI DAN URAIAN RPD

Pasal 4

(1) Isi dan uraian dokumen RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : Pendahuluan
   b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
   c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
   d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis
   e. BAB V : Tujuan dan Sasaran
   f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas
   g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
   h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
   i. BAB IX : Penutup

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebijakan perencanaan RPD;
   b. pelaksanaan RPD; dan
   c. hasil RPD.
(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bapperida.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) RPD Tahun 2025-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; dan/atau
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.

(2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RPD dapat diubah tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi.

(3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Februari 2024

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 6

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... 1
DAFTAR GAMBAR ..... 4
DAFTAR TABEL ..... 6
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... 6
1.4 Maksud dan Tujuan ..... 7
1.4.1 Maksud ..... 7
1.4.2 Tujuan ..... 7
1.5 Sistematika Dokumen RPD ..... 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... 10
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... 10
2.1.1 Karakteristik lokasi dan Wilayah ..... 10
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana ..... 15
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah ..... 16
2.1.4 Demografi ..... 23
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... 24
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... 24
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ..... 40
2.3 Aspek Daya Saing Daerah ..... 44
2.3.1 Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) ..... 44
2.3.2 Pengeluaran per Kapita ..... 45
2.3.3 Angka Kriminalitas ..... 47
2.3.4 Indeks Pemberdayaan Gender ..... 48
2.4 Aspek Pelayanan Umum ..... 49
2.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar ..... 49
2.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... 61

2.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan ..... 93
2.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ..... 99
2.4.5 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2020-2023 ..... 111
2.4.6 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2020-2021 ..... 113
2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bogor .... 125
2.5.1 Pendidikan ..... 126
2.5.2 Kesehatan ..... 127
2.5.3 Pekerjaan Umum ..... 130
2.5.4 Perumahan Rakyat ..... 131
2.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ..... 132
2.5.6 Sosial ..... 133
2.6 Evaluasi Capaian RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 .. 138
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... 212
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... 212
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..... 212
3.1.2 Neraca Daerah ..... 238
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... 247
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ..... 247
3.2.2 Analisis Pembiayaan ..... 252
3.3 Kerangka Pendanaan ..... 257
3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 ..... 262
3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024-2026 ..... 266
3.3.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah ..... 268
3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan ..... 269
3.4.1 Alternatif Pendanaan Pembangunan ..... 270
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... 272
4.1 Permasalahan Pembangunan ..... 272
4.2 Isu Strategis ..... 319
4.2.1 Isu Internasional ..... 319
4.2.2 Isu Nasional ..... 334

4.2.3 Isu Regional ..... 342
BAB V TUJUAN DAN SASARAN ..... 362
5.1 Visi dan Misi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 ..... 363
5.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 ..... 365
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS ..... 383
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan ..... 383
6.2 Program Prioritas ..... 410
6.2.1 Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1) ..... 410
6.2.2 Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi (P2) 411
6.2.3 Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan (P3) ..... 412
6.2.4 Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik (P4) ..... 413
6.3 Program Pembangunan Berbasis Spasial ..... 470
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... 489
7.1 Kerangka Pendanaan ..... 489
7.2 Proyeksi Pendanaan Program ..... 490
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... 619
8.1 Indikator Kinerja Makro ..... 619
8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... 621
8.3 Indikator Kinerja Daerah ..... 628
BAB IX PENUTUP ..... 661
9.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 661
9.2 Kaidah Transisi ..... 662

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. 1 Peta Wilayah Kota Bogor ..... 12
Gambar 2.1. 2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bogor ..... 22
Gambar 2.1. 3 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bogor ..... 23
Gambar 2.1. 4 Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor..... 24
Gambar 2.2. 1 Perkembangan Inflasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023..... 35
Gambar 2.2. 2 Perkembangan Rasio Gini di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023..... 36
Gambar 2.2. 3 Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 ..... 38
Gambar 2.2. 4 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2019-2023 ..... 39
Gambar 2.2. 5Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor Tahun 2019-2023 ..... 41
Gambar 2.2. 6 Angka Harapan Hidup di Kota Bogor Tahun 2019-2023 ..... 42
Gambar 2.3. 1 Perbandingan Rasio Ketergantungan ..... 45
Gambar 2.3. 2 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita (Rp 000) ..... 46
Gambar 2.3. 3 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender ..... 49
Gambar 2.4. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor ..... 64
Gambar 2.4. 2 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat..... 66
Gambar 2.4. 3 Kekerasan dalam Rumah Tangga..... 67
Gambar 2.4. 4 Pertumbuhan Industri di Provinsi Jawa Barat ..... 98
Gambar 3.1. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor 2019-2023 ..... 213
Gambar 3.1. 2 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bogor 2019-2023..... 214
Gambar 3.1. 3 Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor 2019-2023 ... 228
Gambar 3.1. 4 Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bogor 2019-2023..... 228
Gambar 3.1. 5 Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kota Bogor 2019-2023..... 233
Gambar 3.1. 6 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bogor 2019-2023 ..... 234
Gambar 5.2. 1 Tujuan 1 RPD Kota Bogor 2025-2026 ..... 374

Gambar 5.2. 2 Tujuan 2 RPD Kota Bogor 2025-2026 ..... 374
Gambar 5.2. 3 Tujuan 3 RPD RPD Kota Bogor 2025-2026..... 375
Gambar 5.2. 4 Tujuan 4 RPD RPD Kota Bogor 2025-2026..... 375
Gambar 6.1. 1 Tema Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026..... 405
Gambar 6.1. 2 Fokus Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026 ..... 407

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan, RT dan RW Menurut Kecamatan ..... 11
Tabel 2.1. 2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (ribu juwa)..... 23
Tabel 2.2. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (juta rupiah), Tahun 2019–2023 ..... 25
Tabel 2.2. 2 PDRB ADHK Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah) ..... 26
Tabel 2.2. 3 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah)..... 26
Tabel 2.2. 4 PDRB ADHB Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah) ..... 27
Tabel 2.2. 5 Kontribusi PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam persen), 2019-2023 ..... 28
Tabel 2.2. 6 Penentuan Sektor Basis dan Non Basis Sektor Unggulan di Kota Bogor Tahun 2019-2023..... 29
Tabel 2.2. 7 Penentuan Prospek Lapangan Usaha Kota Bogor berdasarkan Analisis DLQ Tahun 2019-2023 ..... 31
Tabel 2.2. 8 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kota Bogor Tahun 2019–2023 Berdasarkan Tipologi Klasem ..... 33
Tabel 2.2. 9 Patokan Rasio Gini..... 36
Tabel 2.2. 10Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023..... 37
Tabel 2.2. 11 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2019-2023 ..... 39
Tabel 2.2. 12 Angka Melek Huruf di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 ..... 41
Tabel 2.2. 13 Jumlah Balita yang Diukur dan yang Terindikasi Gizi Buruk di Kota Bogor Tahun 2019-2023..... 43
Tabel 2.3. 1 Rasio Ketergantungan ..... 44
Tabel 2.3. 2 Pengeluaran per Kapita (Rp 000) ..... 45
Tabel 2.3. 3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita ..... 47
Tabel 2.3. 4 Angka Kriminalitas yang Tertangani..... 47
Tabel 2.3. 5 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bogor ..... 48

Tabel 2.4. 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bogor Tahun 2019-2023 ..... 50
Tabel 2.4. 2 Rasio Guru Terhadap Murid Kota Bogor Tahun 2019-2023 ..... 51
Tabel 2.4. 3 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Bogor Tahun 2019-2023 ..... 52
Tabel 2.4. 4 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Bogor Tahun 2019-2023 ..... 52
Tabel 2.4. 5 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kota Bogor Tahun 2019-2023 ..... 53
Tabel 2.4. 6 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk ..... 54
Tabel 2.4. 7 Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum ..... 54
Tabel 2.4. 8 Rasio Jaringan Irigasi ..... 55
Tabel 2.4. 9 Ketersediaan Air Minum ..... 56
Tabel 2.4. 10 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk ..... 56
Tabel 2.4. 11 Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk ..... 57
Tabel 2.4. 12 Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik ..... 57
Tabel 2.4. 13 Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan ..... 58
Tabel 2.4. 14 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ..... 58
Tabel 2.4. 15 Rasio Rumah Layak Huni ..... 59
Tabel 2.4. 16 Penyelesaian Penegakan Perda dan Sidang Tipiring ... 59
Tabel 2.4. 17 Capaian Penanganan PPKS ..... 60
Tabel 2.4. 18 Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya ..... 61
Tabel 2.4. 19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..... 62
Tabel 2.4. 20 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah ... 65
Tabel 2.4. 21 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ..... 68
Tabel 2.4. 22 Persentase Pangan Utama Tahun 2019-2023 ..... 69
Tabel 2.4. 23 Ketersediaan Energi Masyarakat (kg/kapita/hari) ..... 69
Tabel 2.4. 24 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan ..... 70
Tabel 2.4. 25 Penyelesaian Kasus Tanah Negara ..... 71
Tabel 2.4. 26 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air ..... 72
Tabel 2.4. 27 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara ..... 73
Tabel 2.4. 28 Timbulan Sampah yang Ditangani ..... 74
Tabel 2.4. 29 Rasio Penduduk ber-KTP Persatuan Penduduk ..... 75
Tabel 2.4. 30 Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran ..... 75

Tabel 2.4. 31 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK ..... 76
Tabel 2.4. 32 Rasio Akseptor KB..... 77
Tabel 2.4. 33 Tabel Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun ..... 78
Tabel 2.4. 34 Tabel Jumlah Penumpang Angkutan Umum ..... 79
Tabel 2.4. 35 Rasio Izin Trayek..... 80
Tabel 2.4. 36 Jumlah Uji KIR ..... 81
Tabel 2.4. 37 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum ..... 81
Tabel 2.4. 38 Jumlah Terminal..... 82
Tabel 2.4. 39 Persentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik/ Persentase keterbukaan informasi publik (RKPD)..... 83
Tabel 2.4. 40 Persentase Koperasi Aktif 2019-2023 ..... 83
Tabel 2.4. 41 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) ..... 85
Tabel 2.4. 42 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif ..... 85
Tabel 2.4. 43 Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara dengan Baik ..... 87
Tabel 2.4. 44 Penyelenggaraan festival seni dan budaya..... 88
Tabel 2.4. 45 Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) ..... 89
Tabel 2.4. 46 Jumlah Pengunjung Perpustakaan ..... 90
Tabel 2.4. 47 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah 91
Tabel 2.4. 48 Rasio perpustakaan per 1000 penduduk..... 91
Tabel 2.4. 49 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku..... 92
Tabel 2.4. 50 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan ..... 93
Tabel 2.4. 51 Kunjungan Wisata..... 93
Tabel 2.4. 52 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Tahun 2019-2023..... 95
Tabel 2.4. 53 Kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran 96
Tabel 2.4. 54 Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran ..... 97
Tabel 2.4. 55 Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ..... 98
Tabel 2.4. 56 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA ..... 99

Tabel 2.4. 57 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA ..... 100
Tabel 2.4. 58 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA ..... 101
Tabel 2.4. 59 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW .. 102
Tabel 2.4. 60 Persentase SILPA terhadap APBD ..... 103
Tabel 2.4. 61 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana 103
Tabel 2.4. 62 Persentase Belanja Pendidikan ..... 104
Tabel 2.4. 63 Persentase Belanja Kesehatan ..... 104
Tabel 2.4. 64 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan ..... 105
Tabel 2.4. 65 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal ..... 106
Tabel 2.4. 66 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural ..... 106
Tabel 2.4. 67 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah ..... 107
Tabel 2.4. 68 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah ..... 107
Tabel 2.4. 69 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintahan ..... 107
Tabel 2.4. 70 Persentase temuan yang ditindaklanjuti ..... 108
Tabel 2.4. 71 Persentase implementasi rencana kelitbangan ..... 108
Tabel 2.4. 72 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan ..... 109
Tabel 2.4. 73 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah ..... 109
Tabel 2.4. 74 Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah ..... 109
Tabel 2.4. 75 Nilai SAKIP ..... 110
Tabel 2.4. 76 Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah . 110
Tabel 2.4. 77 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bogor ..... 111
Tabel 2.4. 78 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2020-2023 ..... 111
Tabel 2.4. 79 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Bogor Tahun 2020-2021 ..... 116
Tabel 2.5. 1 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan ..... 126
Tabel 2.5. 2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan ..... 127

Tabel 2.5. 3 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum (%) ..... 130
Tabel 2.5. 4 Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat ..... 131
Tabel 2.5. 5 Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ..... 132
Tabel 2.5. 6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial ..... 134
Tabel 2.6. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024..... 138
Tabel 2.6. 2 Capaian Indikator Keberhasilan Kunci RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024..... 141
Tabel 3.1. 1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019-2023..... 215
Tabel 3.1. 2 Target dan Realisasi Bagian Laba Pemerintah Kota Bogor atas Penyertaan Modal pada BUMD 2019-2022 ..... 220
Tabel 3.1. 3 Persentase Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Kota Bogor 2019-2022 ..... 225
Tabel 3.1. 4 Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019-2023..... 229
Tabel 3.1. 5 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019-2023..... 235
Tabel 3.1. 6 Rasio Likuiditas Keuangan Kota Bogor..... 239
Tabel 3.1. 7 Rasio Solvabilitas Keuangan Kota Bogor 2019-2023 .. 239
Tabel 3.1. 8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019-2022..... 240
Tabel 3.2. 1 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor 2019-2022..... 248
Tabel 3.2. 2 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor Tahun 2019-2022 ..... 249
Tabel 3.2. 3 Realisasi Pengeluaran Kebutuhan Wajib dan Mengikat Kota Bogor 2019-2022..... 251
Tabel 3.2. 4 Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2019-2022 ... 253
Tabel 3.2. 5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2019-2022..... 253
Tabel 3.2. 6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 2019-2022..... 254
Tabel 3.2. 7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 2019-2021..... 256
Tabel 3.3. 1 Proyeksi APBD Kota Bogor 2025-2026 ..... 258

Tabel 3.3. 2 Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bogor 263
Tabel 3.4. 1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bogor ..... 269
Tabel 3.4. 2 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bogor ..... 270
Tabel 4.1. 1 Analisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... 272
Tabel 4.2. 1 Keterkaitan Isu-isu Strategis Internasional dengan Kota Bogor ..... 321
Tabel 4.2. 2 Keterkaitan Isu World Economic Forum dengan Isu Kota Bogor ..... 331
Tabel 4.2. 3 Isu G20 dengan Isu Kota Bogor ..... 333
Tabel 4.2. 4 Keterkaitan Isu Internasional, Nasional, dan Regional dengan Kota Bogor ..... 355
Tabel 4.2. 5 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang ..... 358
Tabel 4.2. 6 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota Bogor ..... 361
Tabel 5.2 1 Perumusan Tujuan RPD Kota Bogor 2025-2026..... 366
Tabel 5.2 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026..... 376
Tabel 5.2 3 Keterkaitan Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026..... 380
Tabel 6.1. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor 2025-2026..... 384
Tabel 6.2. 1 Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2026..... 410
Tabel 6.2. 2 Keterkaitan Prioritas RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dan Prioritas RPD Kota Bogor 2025-2026..... 414
Tabel 6.2. 3 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2026..... 415
Tabel 6.2. 4 Program Pembangunan Daerah RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026..... 421
Tabel 6.3. 1 Sinkronisasi Program RPD Kota Bogor Tahun 2025 -2026 dengan Indikasi Program Perwujudan RTRW Kota Bogor 2011-2031 ..... 470
Tabel 7.1. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah..... 490
Tabel 7.2. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor..... 492

Tabel 7.2. 2 Akomodasi Hasil FKP dalam Program Prioritas Pembangunan RPD Kota Bogor 2025-2026..... 617
Tabel 8.1. 1 Indikator Kinerja Makro Kota Bogor Tahun 2025-2026 ..... 620
Tabel 8.2. 1 Indikator Kinerja Utama Kota Bogor..... 621
Tabel 8.3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... 629

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah, serta usaha untuk meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui urusan pilihan yang melibatkan berbagai macam unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan di setiap daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Bogor yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 memiliki masa periode berakhir pada tahun 2024. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2023 di

atas, maka Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

RPD Tahun 2025-2026 tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kota Bogor, pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026, dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Diharapkan, dokumen ini menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bogor.

Sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, RPD tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kedudukan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 khususnya periode keempat, yaitu tahun 2021-2025. Dengan begitu tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2025-2026 mengacu pada target RPJPD Kota Bogor di tahun yang berkenan. Selain itu juga, arah kebijakan pembangunan RPD tetap memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan dengan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, penyusunan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini senantiasa memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 serta hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan yang berlaku. Dalam proses penyusunan RPD ini dilakukan dengan pendekatan Teknokratik, pendekatan ini menggunakan metode, asumsi dan kerangka berpikir untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga, penyusunan RPD Tahun 2025-2026 ini senantiasa mengedepankan keterlibatan beberapa pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai upaya mengintegrasikan sumber daya daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu yang dihadapi. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas maka tema pembangunan Kota Bogor tahun 2025-2026 adalah “Memperkokoh Kemandirian Daerah”.

### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021); dan
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2026 sebagai tahun peralihan akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024, RPD memiliki hubungan dengan

dokumen perencanaan yang lain baik vertikal maupun horizontal. Oleh sebab itu, penyusunan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 berpedoman pada RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 dan dijabarkan ke dalam RKPD yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Maksud dalam penyusunan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode tahun 2025-2026 dan selanjutnya dipakai sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

### 1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini adalah:

1. Untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah.
2. Menggambarkan tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konteks regional dan nasional sekaligus sebagai arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan alokasi pendanaan;
4. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
5. Mempermudah seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur Pemerintah Daerah serta DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya

mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.

## 1.5 Sistematika Dokumen RPD

Dokumen RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RPD.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dianggap prioritas untuk diselesaikan.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran daerah yang akan dicapai dalam periode jangka menengah daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi dan program prioritas sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan program perangkat daerah

dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode perencanaan pembangunan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam menerapkan RPD, aturan transisi dan perubahan RPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RPD sebagai acuan untuk penyusunan/penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memberikan informasi yang relevan dan penting terkait kondisi daerah Kota Bogor. Informasi yang relevan dan penting tersebut selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan. Dengan demikian gambaran umum kondisi daerah merupakan bagian yang sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis. Gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Bogor.

## 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografis dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Aspek geografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kota Bogor yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kota/kecamatan/desa.

Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kota Bogor dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

### 2.1.1 Karakteristik lokasi dan Wilayah

#### A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 111,3858 km$^2$ yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Selatan mempunyai

luas wilayah terbesar yaitu 30,50 km$^2$, sedangkan Kecamatan Bogor Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 8,37 km$^2$.

**Tabel 2.1. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan, RT dan RW Menurut Kecamatan**

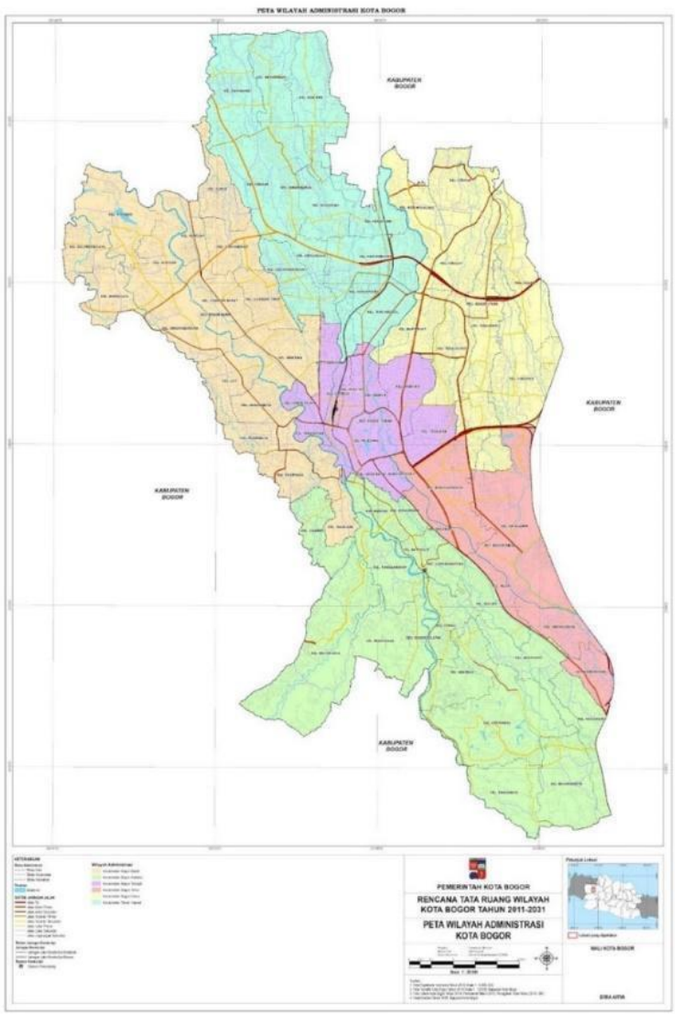
| No | Kecamatan | Luas (km$^2$) | Kelurahan | Jumlah RT/RW | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RT | RW |
| 1 | Bogor Selatan | 30,5021 | 16 | 764 | 190 |
| 2 | Bogor Timur | 10,464 | 6 | 357 | 67 |
| 3 | Bogor Utara | 18,1374 | 8 | 558 | 109 |
| 4 | Bogor Tengah | 8,3667 | 11 | 433 | 99 |
| 5 | Bogor Barat | 23,3155 | 16 | 853 | 197 |
| 6 | Tanah Sareal | 20,6001 | 11 | 687 | 139 |
| Total | | 111,3858 | 68 | 3642 | 801 |

*Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031*

Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

**Gambar 2.1. 1 Peta Wilayah Kota Bogor**




*Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031*

## B. Topografi

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 m dan ketinggian maksimum 330 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0–8 persen, untuk luasan lahan datar seluas 10.415,03 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 651,57 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 9–15 persen, seluas 63,88 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 16–25 persen, seluas 7,10 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 26–40 persen dan lahan sangat curam seluas 0,84 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Lahan dengan kemiringan lebih dari 40% tersebar di Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal. Sedangkan

untuk Kecamatan Bogor Utara tidak memiliki lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen. Kecamatan Bogor Barat merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat rawan terhadap bencana longsor, karena mempunyai lahan terluas dengan kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam yaitu 0,31 Ha, sehingga daerah tersebut sangat rawan terhadap bahaya longsor. Kemudian setelah Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah juga memiliki luasan lahan sangat curam sebesar 0,25 Ha. Dengan luasan tersebut, dua kecamatan tersebut juga tergolong kawasan yang rawan terhadap bahaya longsor. Untuk Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal masing-masing memiliki lahan sangat curam 0,02 Ha dan 0,01 Ha.

**C. Geologi/Jenis Tanah**

Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Jenis tanah lain yang juga menyebar di enam kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar.

Kondisi geologi di Kota Bogor umumnya tersusun oleh batuan vulkanik dari Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Batuan vulkanik dari gunung tersebut tersebar di bagian selatan Kota Bogor, sedangkan bagian utara tersusun oleh material hasil pelapukan batuan vulkanik. Kemudian untuk batuan di sekitar aliran sungai utama berupa endapan aluvium yang terdiri dari kerikil dan pasir.

**D. Klimatologi**

Berdasarkan data BMKG, kondisi iklim di Kota Bogor tahun 2022 cukup sejuk dengan suhu rata-rata tiap 25,6°-26,4°C dengan suhu terendah 25,6°C di bulan Desember dan suhu tertinggi 26,8°C di bulan Juni. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi oleh curah hujan. Curah hujan dengan intensitas tertinggi yaitu 499,6 mm, dan terendah di 106,6 mm dengan rata rata hujan terendah 13 hari per bulan dan paling tinggi 24 hari per bulan dengan kelembaban udara rata-rata 83% - 87%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 1,5 - 2 km/jam.

**E. Hidrogeologi**

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa

digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini lantaran lahan potensial kritis di Kecamatan Bogor Selatan dan di Kecamatan Bogor Barat menunjukkan semakin berkurangnya resapan air, karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor.

Beberapa danau, situ, dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi, dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang, Situ Anggalena dan Situ Leutik difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

Di wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai panjang aliran sungai utama hampir 126 km dan Sungai Ciliwung mempunyai panjang aliran sungai utama sepanjang 120 km. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai sumber air yang diproduksi PDAM Tirta Pakuan Bogor. Dengan kondisi debit air permukaan diperoleh dari aliran Sungai Ciliwung sebesar 76.000 liter/detik dan Sungai Cisadane sebesar 24.000 liter/detik (*Review Masterplan Drainase TA 2018*).

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri e-colli di atas kriteria yang disyaratkan.

**F. Penggunaan Lahan**

Wilayah Kota Bogor memiliki lahan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian. Karakteristik lahan pertanian inilah yang sangat menentukan naik turunnya produksi hasil pertanian dan juga keragamannya.

Penggunaan lahan tertinggi di Kota Bogor Sebesar 5.023,59 Hektar atau 45,10 %, merupakan kawasan perumahan dan permukiman. Sedangkan untuk lahan pertanian seluas 2.910,97 hektar (26,13%), industri seluas 112,07 hektar (1,006%), perdagangan

dan jasa seluas 138,79 hektar (1,24%). Lahan lainnya masih berupa hutan kota seluas 141,13 hektar (1,26%), kebun raya seluas 72,12 hektar (0,61%), serta tempat pemakaman umum seluas 137,87 hektar (1,23%), serta sungai/situ seluas 171,69 hektar (1,54%).

Luas kawasan lahan pertanian tanaman pangan di enam kecamatan pada tahun 2021 yaitu 127,42 hektar. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luasan kawasan lahan pertanian tanaman pangan terbesar yaitu 77,99 hektar.

### 2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bogor Tahun 2022, data historis berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) sampai akhir tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan frekuensi kejadian bencana terkait iklim atau hidrometeorologi. Adanya perubahan iklim global mendorong peningkatan cuaca ekstrem di masa depan dapat menjadi sumber terjadinya bencana hidrometeorologi. Dilihat dari Evaluasi Kajian Risiko Bencana, selama periode tahun 1992 - 2021, bencana tanah longsor adalah bencana yang sering terjadi di Kota Bogor yaitu 53% dari seluruh kejadian bencana yang terjadi. Kemudian bencana angin puting beliung dan banjir masing-masing sebesar 31% dan 14%. Sementara gempa bumi dan kekeringan masing-masing 1% dari seluruh bencana yang terjadi di Kota Bogor.

#### A. Banjir

Kota Bogor berada pada wilayah dengan dataran menengah serta memiliki bentuk lahan berbukit. Rata-rata ketinggian minimum Kota Bogor adalah 190 mdpl dan maksimum 350 mdpl. Kota Bogor juga berada pada posisi perlintasan dua aliran sungai besar yang menjadi bagian dari DAS Ciliwung dan DAS Cisadane. Sehingga dengan kondisi seperti ini, potensi banjir di Kota Bogor sangatlah tinggi.

Berdasarkan hasil analisis dari dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bogor Tahun 2022 ancaman bahaya banjir di Kota Bogor bahwa sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki ancaman sedang. Sebagian lagi memiliki ancaman tinggi dan sebagian kecil lagi sangat tinggi terutama pada wilayah-wilayah di sekitar aliran sungai.

**B. Tanah Longsor**

Kota Bogor berada pada wilayah yang berbukit, sehingga secara kontur memiliki kemiringan lahan yang bervariasi antar wilayah. Kemiringan lereng di Kota Bogor berada antara 0-3%, 4-15%, 16-30% dan di atas 40%. Sehingga, jika dikaitkan dengan kondisi Kota Bogor yang memiliki curah hujan tinggi, kemiringan lahan di atas 40% merupakan wilayah yang memiliki potensi ancaman tanah longsor yang tinggi karena gerakan tanah akan lebih mudah terjadi.

Berdasarkan analisis ancaman bencana tanah longsor di Kota Bogor dari dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bogor Tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki ancaman yang rendah. Namun sebagian wilayah juga memiliki ancaman tanah longsor yang tinggi, serta beberapa wilayah memiliki ancaman bahaya tanah longsor yang sangat tinggi. Ancaman bahaya tanah longsor yang tinggi berada di wilayah Kota Bogor bagian Utara dan bagian Timur. Sedangkan ancaman rendah dominan berada pada wilayah Bogor bagian Tengah dan Selatan.

**C. Angin Puting Beliung/Cuaca Ekstrem**

Berdasarkan data kebencanaan yang tercatat pada BNPB dan BPBD Kota Bogor, wilayah Kota Bogor dan sekitarnya telah mengalami peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem dalam bentuk angin puting beliung. Berdasarkan hasil analisis ancaman bahaya di Kota Bogor, indeks ancaman bahaya angin puting beliung secara umum berada pada ancaman yang tinggi dan beberapa wilayah sangat tinggi. Wilayah Kota Bogor yang memiliki ancaman bahaya angin puting beliung sangat tinggi dan paling banyak adalah Kota Bogor bagian selatan.

### 2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:

a. WP Samida meliputi seluruh Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Babakan, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Gudang, Kelurahan

Kebon Kalapa, Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, Kelurahan Panaragan, Kelurahan Sempur, dan Kelurahan Tegalega), sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Menteng), sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Empang, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Batutulis, dan Kelurahan Lawanggintung), dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari);

b. WP Pasima meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Balungbangjaya, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Gunungbatu, Kelurahan Loji, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Pasirkuda, Kelurahan Pasir Mulya, Kelurahan Sindangbarang, dan Kelurahan Situgede);

c. WP Utara meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Cilendek Barat, Kelurahan Cilendek Timur, Kelurahan Curug, Kelurahan Curug Mekar, dan Kelurahan Semplak) dan seluruh Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Cibadak, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Kedung Badak, Kelurahan Kedungjaya, Kelurahan Kedungwaringin, Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Sukadamai, Kelurahan Sukaresmi, dan Kelurahan Tanah Sareal);

d. WP Purwa meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegalgundil); dan

e. WP Daksina meliputi sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Cikaret, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pakuan, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Rancamaya, dan Kelurahan Ranggamekar) dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Katulampa, Kelurahan Sindangrasa, Kelurahan Sindangsari, dan Kelurahan Tajur).

Pengembangan wilayah melalui strategi penataan ruang Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 terdiri dari:

a. Pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi yang meliputi:

1. Meningkatkan peran Daerah Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang skala regional. pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya;
2. Menyediakan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;
3. Menetapkan dan memantapkan kawasan lindung; dan
4. Mengembangkan kegiatan budi daya secara terpadu serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b. Mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan meliputi:
   1. Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor; dan
   2. Merevitalisasi PPK dengan tetap memperhatikan fungsi, identitas, dan karakter daerah kota sebagai Kota Pusaka.

c. Pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu meliputi:
   1. Mewujudkan pusat pertumbuhan baru sub PPK Pasima melalui pengembangan kawasan campuran;
   2. Mewujudkan Sub PPK Utara sebagai kawasan perkotaan baru melalui pengembangan koridor pusat yang terpadu;
   3. Mewujudkan Sub PPK Purwa sebagai salah satu gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran; dan
   4. Mewujudkan sub PPK Daksina sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan campuran.

d. Pengembangan Pusat Lingkungan untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan melalui mengembangkan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.

e. Mengembangkan 4 (empat) WP sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota meliputi:
   1. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta kawasan wisata pada WP Pasima sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang serta

keberadaan Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan lindung lainnya;

2. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Utara;
3. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Purwa; dan
4. Mengembangkan kegiatan agribisnis, perumahan, serta kegiatan jasa sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Daksina.

f. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor meliputi:
   1. Sinergitas sistem jaringan jalan antara Daerah Kota dengan Kabupaten Bogor;
   2. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar PPK, Sub PPK, dan PL;
   3. Mengembangkan jalan lingkar dan jalan tembus;
   4. Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya PPK, Sub PPK, dan PL;
   5. Mengembangkan sistem transportasi massal berbasis rel dan berbasis jalan;
   6. Mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas;
   7. Mengembangkan sistem jaringan lintas barang dari dan keluar Daerah Kota;
   8. Mengembangkan terminal penumpang dan angkutan barang;
   9. Mengembangkan konsep TOD pada titik pertemuan antar moda; dan
   10. Mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki dan sistem jaringan perkotaan lainnya.

g. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum lainnya meliputi:

1. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
2. Melengkapi perumahan eksisting dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai standar minimal yang ditetapkan;
3. Mengembangkan jaringan energi listrik dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
4. Mengembangkan jaringan gas;
5. Mengembangkan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih belum terjangkau;
6. Mengembangkan jaringan sumber daya air;
7. Mengembangkan sistem jaringan air minum;
8. Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah;
9. Meningkatkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
10. Meningkatkan sistem jaringan persampahan Daerah Kota;
11. Meningkatkan dan mengembangkan sistem drainase; dan
12. Mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana.

h. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi:
   1. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
   2. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah;
   3. Merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi; dan
   4. Meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung.

i. Pelestarian kawasan cagar budaya meliputi:
   1. Menetapkan kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya;
   2. Meningkatkan nilai kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya; dan
   3. Mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.

j. Peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota meliputi:
   1. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
   2. Mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
   3. Meningkatkan ketersediaan RTH melalui bank tanah (*landbanking*); dan
   4. Mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

k. Pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
   1. Mengarahkan kawasan terbangun dengan intensitas kepadatan rendah, sedang, tinggi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   2. Mengendalikan pengembangan kawasan PPK;
   3. Mengoptimalkan pengembangan Sub PPK; dan
   4. Membatasi pengembangan kawasan industri.

l. Pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan meliputi:
   1. Menetapkan delineasi pengembangan kawasan dan/atau fungsi khusus, antara lain kawasan TOD, kawasan wisata ilmu pengetahuan, dan kawasan khusus lainnya;
   2. Mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal pada sebagian PPK dan Sub PPK, kawasan atau bangunan fungsi campuran, superblok dan kawasan TOD; dan
   3. Mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak, efisien, dan berkelanjutan.

m. Pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan adalah:
   1. Mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan lingkungan; dan
   2. Menata kawasan KSK dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan.

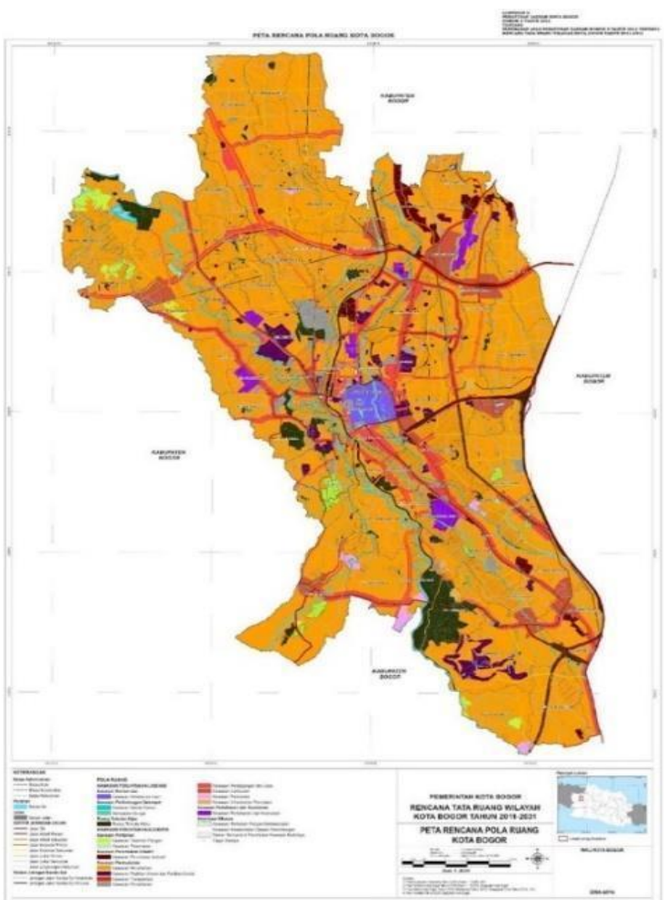
n. Pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya adalah:

1. Mempertahankan, melindungi, dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan sosial budaya;
2. Mempertahankan nilai sejarah kawasan;
3. Menata kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya; dan
4. Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata.

o. Pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi adalah:

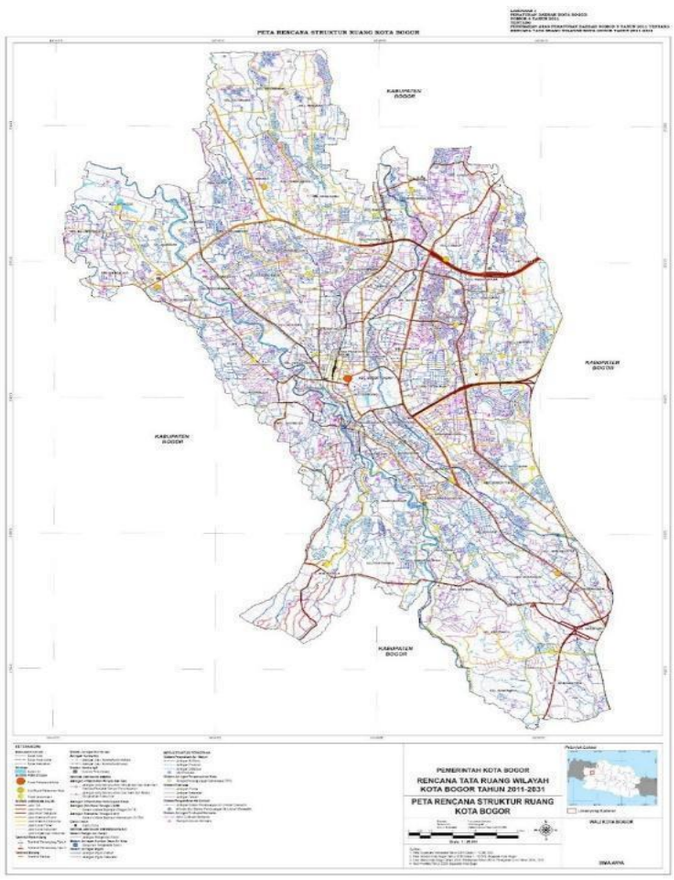
1. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan ekonomi;
2. Menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi;
3. Mengembangkan kawasan tematik; dan
4. Mengintegrasikan konsep guna campuran, *superblock*, dan TOD dengan kegiatan ekonomi.

**Gambar 2.1. 2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bogor**




*Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031*

**Gambar 2.1. 3 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bogor**




*Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031*

### 2.1.4 Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Pada tahun 2022 penduduk Kota Bogor berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor sebanyak 1.114.018 jiwa yang terdiri atas 563.033 jiwa penduduk laki-laki dan 550.985 jiwa penduduk perempuan.

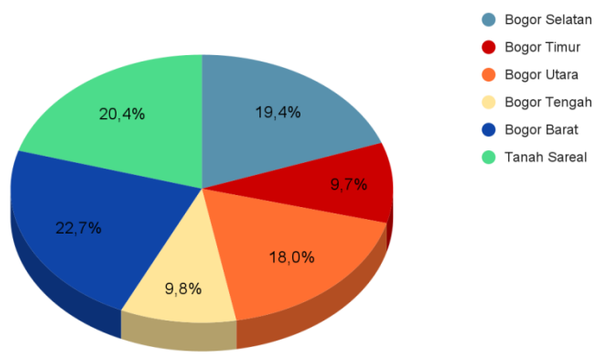
**Tabel 2.1. 2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (ribu juwa)**

| Kecamatan | Penduduk | Kepadatan penduduk/km² |
|---|---|---|
| Bogor Selatan | 216.50 | 7.097,90 |
| Bogor Timur | 108.212 | 10.341,36 |
| Bogor Utara | 200.200 | 11.037,97 |
| Bogor Tengah | 109.331 | 13.067,40 |
| Bogor Barat | 252.433 | 10.826,83 |
| Tanah Sareal | 227.341 | 11.035,92 |

*Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2023*

Dari enam kecamatan, Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah penduduk terbesar yakni 252.433 jiwa (22,66%) dan terkecil adalah Kecamatan Bogor Timur tercatat sebesar 108.212 jiwa (9,71 %). Kepadatan Penduduk pada enam kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Bogor Tengah dengan kepadatan sebesar 13.067,40 jiwa/km$^2$, disusul kecamatan Bogor Utara sebesar 11.037,97 jiwa/km$^2$. Jika dilihat dari komposisi kelompok umur penduduk, kelompok umur 10–14 tahun merupakan kelompok umur terbesar yang tercatat 98.154 jiwa, disusul kelompok umur 5–9 tahun sebesar 97.355 jiwa dan terendah adalah kelompok umur 70–74 tahun sebesar 19.147 jiwa.

**Gambar 2.1. 4 Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor**




*Catatan: (Keadaan per 31 Desember 2022)*
*Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2023*

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik menjadi salah satu tolok ukur terwujudnya keberhasilan pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### A. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami

perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Berikut data PDRB ADHK dan ADHB Kota Bogor berdasarkan lapangan usaha tahun 2019-2023.

**Tabel 2.2. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (juta rupiah), Tahun 2019–2023**

| Lapangan Usaha/Industri | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 239771,40 | 245164,10 | 258713,80 | 267405,73 | |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| C | Industri Pengolahan | 6065723,10 | 6015391,84 | 6283630,90 | 6602998,62 | |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas/ | 771588,30 | 725407,20 | 813132,22 | 893010,19 | |
| E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 32725,60 | 36051,00 | 39770,90 | 42443,50 | 84335,27 |
| F | Konstruksi | 3829210,20 | 3604700,20 | 3659258,00 | 3672500,88 | |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6744719,90 | 6210448,40 | 6379299,80 | 6722524,91 | 1096134,90 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3933690,10 | 3850155,50 | 3961652,00 | 4352348,40 | |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1503114,80 | 1530332,90 | 1550682,62 | 1734174,05 | |
| J | Informasi dan Komunikasi | 2253816,00 | 3047811,20 | 3182270,70 | 3344926,07 | |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2187588,80 | 2214258,50 | 2245471,00 | 2223681,42 | |
| L | Real Estate | 736540,90 | 719168,81 | 821058,20 | 877629,11 | |
| M N | Jasa Perusahaan | 691035,50 | 617578,20 | 598727,40 | 666389,86 | |
| O | Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 726854,50 | 721132,20 | 746399,20 | 730750,28 | |
| P | Jasa Pendidikan | 967826,80 | 1041697,50 | 1096423,00 | 1195603,40 | |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 479727,41 | 485700,00 | 540877,00 | 595552,79 | |
| R S T U | Jasa Lainnya | 1131796,10 | 1097744,80 | 1195107,70 | 1336930,80 | |
| | **Produk Domestik Regional Bruto** | **32295729,41** | **32162742,35** | **33372476,44** | **35258870,02** | **37055365,47** |

*Sumber: bogorkota.bps.go.id, Tahun 2023*

**= Data Tahun 2023 belum keluar dari BPS*

Dari tabel data tersebut, terlihat bahwa PDRB ADHK Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahun. Kontribusi PDRB ADHK Kota Bogor didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; informasi dan komunikasi; serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan kegiatan ekonomi Kota

Bogor ditopang oleh kegiatan ekonomi perkotaan yang berfokus pada perdagangan, industri, dan penyediaan jasa. Perdagangan sebagai tempat jual-beli berbagai produk menjadi sektor ekonomi yang potensial di Kota Bogor, sejalan dengan pencapaian Periode 4 (2019-2024) RPJPD Kota Bogor pula yang hendak menjadikannya kawasan bisnis untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Untuk sektor industri, Kota Bogor didominasi oleh industri kecil dan menengah, dengan jumlah 1.129 unit dari total 1.189 unit (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, 2021). Sedangkan untuk sektor jasa di Kota Bogor, terdapat jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa-jasa lainnya yang telah berjalan dalam perkembangannya. Berikut tabel perbandingan PDRB ADHK Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dalam kurun tahun 2019-2023:

**Tabel 2.2. 2 PDRB ADHK Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah)**

| Wilayah | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bogor | 32.295,73 | 32.162,74 | 33.372,48 | 35.258,87 | 34.608,91 |
| Provinsi Jawa Barat | 1.490.959,69 | 1.453.380,72 | 1.507.746,39 | 1.589.984,93 | |

*Sumber: jabar.bps.go.id, 2023*
**= Data Tahun 2023 belum keluar dari BPS*

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka rata-rata PDRB ADHK Kota Bogor sebesar 2,20% dari rata-rata PDRB ADHK provinsi. Ini menunjukkan kapasitas perekonomian Kota Bogor yang tidak jauh berbeda dengan daerah metropolitan lain di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.2. 3 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah)**

| Lapangan Usaha/Industri | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 305493,20 | 317861,00 | 337588,40 | 373750,86 | |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| C | Industri Pengolahan | 8370600,10 | 8298889,61 | 9256855,50 | 10045536,04 | |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 1925050,10 | 1840664,00 | 2072324,40 | 2365294,98 | |
| E | Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 50770,90 | 57628,30 | 64440,20 | 70046,50 | 47061,06 |

| Lapangan Usaha/Industri | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Konstruksi | 5615544,00 | 5306735,70 | 5429667,40 | 5769602,94 | |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9388980,40 | 8919697,20 | 9287189,20 | 10109475,57 | 6973023,76 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 5985705,32 | 5743779,00 | 5741132,20 | 6538056,65 | |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2199470,40 | 2269202,60 | 2351864,80 | 2706181,20 | |
| J | Informasi dan Komunikasi | 2157434,00 | 2947044,50 | 2907944,90 | 3004885,92 | |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3346217,51 | 3325974,30 | 3486572,51 | 3727399,41 | |
| L | Real Estate | 1010806,60 | 984525,60 | 1129313,10 | 1263588,43 | |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1046281,00 | 935529,42 | 939524,90 | 1105062,70 | |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1239619,00 | 1202430,41 | 1270505,30 | 1241162,13 | |
| P | Jasa Pendidikan | 1435963,50 | 1619798,50 | 1721282,70 | 1908968,76 | |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 641408,90 | 663087,20 | 781427,10 | 863525,64 | |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 1478412,20 | 1479016,80 | 1548012,00 | 1822060,72 | |
| | **Produk Domestik Regional Bruto** | **46197757,13** | **45911864,14** | **48325644,61** | **52914598,44** | **57003766,34** |

*Sumber: bogorkota.bps.go id, Tahun 2023*

**= Data belum keluar dari BPS*

Dari tabel data tersebut, terlihat bahwa PDRB ADHB Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahun. Kontribusi PDRB ADHB Kota Bogor didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; informasi dan komunikasi; serta jasa keuangan dan asuransi. Terlihat bahwa perekonomian Kota Bogor, baik dengan pengaruh inflasi maupun tidak, memiliki karakteristik ekonomi perkotaan, utamanya perdagangan, industri, dan penyediaan jasa, dengan potensi yang telah dijelaskan pada bagian PDRB ADHK.

**Tabel 2.2. 4 PDRB ADHB Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah)**

| Wilayah | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bogor | 42.403,30 | 44.099,68 | 45.921,25 | 49.754,54 | 53.239,07 |
| Provinsi Jawa Barat | 2.123.153,71 | 2.082.107,26 | 2.204.660,23 | 2.422.782,32 | 2.625.221.,39 |

*Sumber: bogorkota.bps.go.id (2023), jabar.bps.go.id (2023)*

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, maka rata-rata PDRB ADHB Kota Bogor terhadap rata-rata PDRB provinsi sebesar 2,06%. Ini menunjukkan kontribusi PDRB Kota Bogor dengan kapasitas ekonomi perkotaan terhadap Provinsi Jawa Barat. Berikut tabel persentase kontribusi PDRB ADHB Kota Bogor menurut lapangan usaha tahun 2019-2023:

**Tabel 2.2. 5 Kontribusi PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam persen), 2019-2023**

| Lapangan Usaha | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,66 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,68 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,00 | 0,00 | N/A | N/A | |
| C | Industri Pengolahan | 18,12 | 18,08 | 19,16 | 18,98 | 18,53 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 4,17 | 4,01 | 4,29 | 4,47 | |
| E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| F | Konstruksi | 12,16 | 11,56 | 11,24 | 10,90 | |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,32 | 19,43 | 19,22 | 19,11 | 19,23 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 12,96 | 12,51 | 11,88 | 12,36 | |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,76 | 4,94 | 4,87 | 5,11 | |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4,67 | 6,42 | 6,02 | 5,68 | |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,24 | 7,24 | 7,21 | 7,04 | |
| L | Real Estate | 2,19 | 2,14 | 2,34 | 2,39 | |
| M,N | Jasa Perusahaan | 2,26 | 2,04 | 1,94 | 2,09 | |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 2,68 | 2,62 | 2,63 | 2,35 | |
| P | Jasa Pendidikan | 3,11 | 3,53 | 3,56 | 3,61 | |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,39 | 1,44 | 1,62 | 1,63 | |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 3,20 | 3,22 | 3,20 | 3,44 | |
| | **Produk Domestik Regional Bruto** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*
**= Data belum keluar dari BPS*

Setelah diketahui PDRB Kota Bogor, baik dalam harga berlaku dan harga konstan, data-data PDRB tersebut diolah dan dianalisis untuk mengetahui keunggulan komparatif ekonomi Kota Bogor. Metode analisis yang digunakan adalah *Location Quotient* (LQ) atau analisis basis, analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) dan analisis gabungan LQ dan DLQ. Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor ekonomi di Kota Bogor yang menjadi komoditas unggulan. Hasil perhitungan LQ ini akan menghasilkan informasi sektor mana saja yang memiliki peranan besar dalam menunjang perekonomian Kota Bogor melalui identifikasi

sektor basis dan sektor non basis. Analisis LQ ini menggunakan data PDRB ADHK Kota Bogor yang selanjutnya akan dibandingkan dengan PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat.

Analisis LQ merupakan perbandingan subsektor PDRB terhadap total PDRB Kota Bogor dengan subsektor PDRB terhadap total PDRB Provinsi Jawa Barat. Apabila nilai LQ lebih besar dari 1 (LQ > 1), maka subsektor tersebut adalah sektor basis, yang artinya tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat Kota Bogor lebih tinggi dari tingkat Provinsi Jawa Barat. Sedangkan nilai LQ lebih kecil dari 1 (LQ < 1) menunjukkan bahwa subsektor tersebut adalah sektor non basis, yang artinya tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat Kota Bogor lebih rendah dari tingkat Provinsi Jawa Barat. Indikator suatu sektor dapat dikatakan menjadi sektor unggulan daerah di mana ketika sektor tersebut menjadi sektor basis, yakni memiliki nilai LQ lebih dari 1 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2. 6 Penentuan Sektor Basis dan Non Basis Sektor Unggulan di Kota Bogor Tahun 2019-2023**

| No. | Uraian | Rata-Rata | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,09 | Sektor Nonbasis |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,000 | Sektor Nonbasis |
| 3 | Industri Pengolahan | 0,45 | Sektor Nonbasis |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 4,78 | Sektor Basis |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1,12 | Sektor Basis |
| 6 | Konstruksi | 1,32 | Sektor Basis |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1,35 | Sektor Basis |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 2,25 | Sektor Basis |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,68 | Sektor Basis |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 2,43 | Sektor Basis |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,38 | Sektor Basis |
| 12 | Real Estate | 2,08 | Sektor Basis |
| 13 | Jasa Perusahaan | 4,57 | Sektor Basis |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,04 | Sektor Basis |
| 15 | Jasa Pendidikan | 0,95 | Sektor Nonbasis |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,97 | Sektor Basis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Jasa lainnya | 1,67 | Sektor Basis |

*Sumber: Laporan Antara Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor (2023)*

Hasil perhitungan analisis LQ di Kota Bogor menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2022, terdapat 13 sektor ekonomi yang memiliki nilai LQ lebih dari satu (LQ > 1) dan 4 sektor ekonomi yang memiliki nilai LQ kurang dari satu (LQ < 1). Artinya, hampir seluruh sektor ekonomi di Kota Bogor merupakan sektor basis, yang mana sektor-sektor ekonomi tersebut memiliki tingkat spesialisasi lebih tinggi di Kota Bogor daripada di tingkat Jawa Barat.

Besarnya nilai LQ rata-rata pada setiap sektor basis di Kota Bogor terdiri dari: sektor pengadaan listrik dan gas (4,78); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (1,12); konstruksi (1,32); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (1,35); transportasi dan pergudangan (2,25); penyediaan akomodasi dan makan minum (1,68); informasi dan komunikasi (2,43); jasa keuangan dan asuransi (2,38); real estat (2,08); jasa perusahaan (4,57); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,04); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,97); jasa lainnya (1,67).

Sedangkan sektor yang bukan basis atau yang bukan sektor unggulan di Kota Bogor adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; dan sektor jasa pendidikan. Artinya, keempat sektor tersebut tingkat spesialisasinya di Kota Bogor lebih rendah dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Barat dan dikategorikan ke dalam sektor non basis.

Apabila ditelaah dari hasil analisis LQ, maka sektor pengadaan listrik dan gas, jasa perusahaan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta transportasi dan pergudangan mendominasi perekonomian Kota Bogor. Ini menunjukkan potensi Kota Bogor sebagai kawasan bisnis yang mengandalkan kegiatan jasa beserta infrastruktur pendukungnya berupa listrik, gas, dan transportasi.

Selanjutnya, dilakukan analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ). DLQ atau LQ dinamis merupakan analisis yang melihat perubahan LQ dari waktu ke waktu. DLQ merupakan analisis LQ dalam bentuk deret waktu yaitu naik turunnya LQ dilihat pada lapangan usaha tertentu pada kurun waktu yang berbeda (Tarigan, 2005). DLQ adalah perumusan ulang LQ *analysis* dengan

memperhatikan faktor kecepatan naik atau turunnya keluaran lapangan usaha pada bidang ekonomi yang diamati dalam kurun waktu tertentu (Widianingsih, 2015). Menurut Nugroho (2000) formula LQ dinamis adalah:

DLQ=(1+hij)/(1+hj)(1+Hi)/(1+Hp)t

DLQ =

Keterangan:

- hij : rerata kecepatan naik turunnya keluaran pada lapangan usaha i di daerah
- hj : rerata kecepatan naik turunnya *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto pada level kota/kabupaten
- Hi : rerata kecepatan naik turunnya keluaran pada lapangan usaha i pada tingkat provinsi
- Hp : rerata kecepatan naik turunnya PDB pada tingkat provinsi
- t : lama waktu dilakukannya penelitian

Kriteria yang digunakan dalam analisis DLQ adalah DLQ lebih dari 1 menunjukkan peluang lapangan usaha i pada level kota/kabupaten berkembang lebih cepat daripada lapangan usaha yang sama pada tingkat provinsi di mana kota/kabupaten tersebut berada, dengan kata lain lapangan usaha tersebut potensial untuk dikembangkan atau bersifat prospektif. Sebaliknya dengan nilai DLQ kurang dari 1, peluang perkembangan suatu lapangan usaha pada kota/kabupaten yang diamati lebih lambat dibandingkan lapangan usaha yang sama pada tingkat provinsi, atau dengan kata lain lapangan usaha tersebut tidak prospektif. Sementara itu, dengan nilai DLQ sama dengan mengindikasikan peluang naik turunnya keluaran lapangan usaha pada tingkat kota/kabupaten tidak berbeda dengan lapangan usaha yang sama pada tingkat provinsi. Hasil analisis DLQ Kota Bogor Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2. 7 Penentuan Prospek Lapangan Usaha Kota Bogor berdasarkan Analisis DLQ Tahun 2019-2023**

| No. | Uraian | DLQ | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,04 | Tidak Prospektif |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | - | - |
| 3 | Industri Pengolahan | 0,80 | Tidak Prospektif |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.24 | Prospektif |

| No. | Uraian | DLQ | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2,42 | Prospektif |
| 6 | Konstruksi | 0,14 | Tidak Prospektif |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,10 | Tidak Prospektif |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 3,23 | Tidak Prospektif |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,38 | Prospektif |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 2,16 | Prospektif |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,12 | Tidak Prospektif |
| 12 | Real Estate | 1,40 | Prospektif |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,06 | Tidak Prospektif |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 156,62 | Prospektif |
| 15 | Jasa Pendidikan | 2,33 | Prospektif |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,17 | Prospektif |
| 17 | Jasa lainnya | 2,39 | Prospektif |

*Sumber: Laporan Antara Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor (2023)*

Berdasarkan hasil analisis DLQ dari 17 sektor ekonomi di Kota Bogor, terdapat 10 sektor yang mengalami laju pertumbuhan yang cepat dengan nilai DLQ >1, atau merupakan sektor ekonomi yang prospektif di Kota Bogor. Sektor ekonomi prospektif yang memiliki nilai DLQ > 1 adalah pengadaan listrik dan gas (2,24); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (2,42); transportasi dan pergudangan (3,23); penyediaan akomodasi dan makan minum (1,38); informasi dan komunikasi (2,16); real estat (1,40); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (156,62); jasa pendidikan (2,33); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (4,17); jasa lainnya (2,39).

Dari hasil penghitungan LQ dan DLQ, dapat diklasifikasikan sektor basis atau unggulan Kota Bogor yang bersifat prospektif maupun non prospektif. Sektor yang prospektif berarti sektor tersebut memiliki kecenderungan atau potensial untuk berkembang di masa yang akan datang. Sektor basis yang prospektif maupun nonbasis yang prospektif ini dapat menjadi target pengembangan bagi pemerintah daerah sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor dapat lebih meningkat di masa mendatang. Sektor yang prospektif merupakan sektor yang berpotensi untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi jika mendapatkan perhatian dan dukungan pengembangan

lebih lanjut. Hasil interpretasi nilai Gabungan Indeks *Statistik Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) Kota Bogor untuk melihat prospek dari masing-masing sektor ekonomi disusun ke dalam bagan tipologi Klasem yang disajikan pada gambar berikut:

**Tabel 2.2. 8 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kota Bogor Tahun 2019–2023 Berdasarkan Tipologi Klasem**

| | |
|---|---|
| **Kuadran I**<br>**Sektor Basis Prospektif**<br>1. Pengadaan listrik dan gas<br>2. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang<br>3. Transportasi dan pergudangan<br>4. Penyediaan akomodasi dan makan minum<br>5. Informasi dan komunikasi<br>6. Real estat<br>7. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib<br>8. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial<br>9. Jasa lainnya | **Kuadran II**<br>**Sektor Basis Tidak Prospektif**<br>1. Konstruksi<br>2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor<br>3. Jasa keuangan dan asuransi<br>4. Jasa perusahaan |
| **Kuadran III**<br>**Sektor Nonbasis Prospektif**<br>1. Jasa Pendidikan | **Kuadran IV**<br>**Sektor Nonbasis Tidak Prospektif**<br>1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan<br>2. Pertambangan dan penggalian<br>3. Industri pengolahan |

*Sumber: Laporan Antara Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor (2023)*

Berdasarkan analisis sektor unggulan tersebut, pertumbuhan dan kontribusi sektor terbesar ada pada subsektor ekonomi pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang di dalamnya terdapat subsektor kriya dan *fashion*. Berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ, diketahui bahwa sektor industri pengolahan yang berada pada kuadran IV yang menunjukkan bahwa industri pengolahan merupakan Non-Basis (LQ<1) dan Tidak Prospektif (DLQ<1). Hal ini disebabkan analisis LQ dan DLQ dihitung dengan menggunakan Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah pembanding yang memiliki nilai PDRB industri pengolahan sangat besar (banyaknya kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat yang merupakan penghasil industri pengolahan), sehingga membuat hasil perhitungan analisis LQ dan DLQ sektor industri pengolahan di Kota Bogor kecil (bukan basis bahkan tidak prospektif). Namun, jika dilihat dari sisi *share* atau

pangsa sektor industri pengolahan di Kota Bogor, diketahui bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor perekonomian terbesar kedua di Kota Bogor setelah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini menunjukkan tingginya potensi sektor industri pengolahan di Kota Bogor yang mana di dalamnya terdapat sub sektor ekonomi kreatif terutama kriya dan *fashion*.

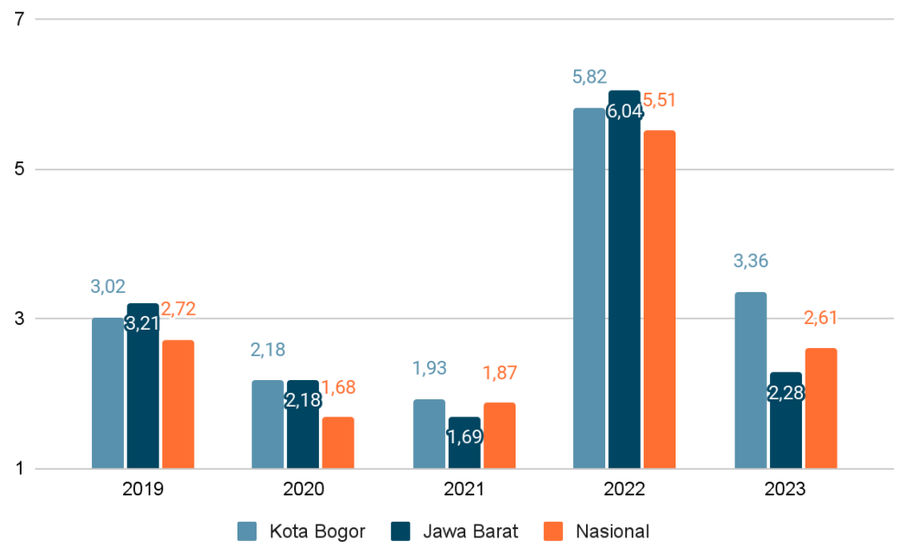
Hingga saat ini belum ada data berapa besar kontribusi sektor ekonomi kreatif (ekraf) terhadap PDRB Kota Bogor. Namun, sektor ekraf beririsan dengan sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, serta jasa lainnya. Lapangan sektor usaha tersebut sangat erat kaitannya dengan ekonomi kreatif. Hal tersebut menyebabkan potensi unggulan ekonomi kreatif di Kota Bogor tumbuh positif. Ini juga sejalan dengan 3 subsektor utama ekonomi kreatif di Kota Bogor yaitu: kuliner, kriya dan *fashion*. Berdasarkan hasil survei dalam kajian Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor (2023), diketahui bahwa proporsi subsektor kuliner sebesar 47,7 persen, subsektor kriya sebesar 17,6 persen dan subsektor *fashion* sebesar 13,5 persen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Bogor telah ditopang dari sektor perdagangan dan jasa. Namun untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, diperlukan integrasi berbagai sektor perekonomian untuk mengisi potensi-potensi lapangan usaha. Untuk Kota Bogor, selain meningkatkan sarana dan prasarana sektor perdagangan, diperlukan pula peningkatan sektor industri pengolahan dengan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif. Banyaknya industri kecil dan menengah, serta pangsa pasar potensial berupa sektor kuliner, kriya, dan *fashion.* Potensi ini juga didukung oleh posisi Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek dengan lalu-lintas antar kota yang padat, sehingga permintaan potensialnya pun cukup tinggi.

**B. Laju Inflasi**

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan maupun penurunan harga barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi perlu untuk diperhatikan sebagai bagian dari penilaian daya beli masyarakat. Berikut data perkembangan inflasi Kota Bogor dan perbandingannya dengan inflasi Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2023.

**Gambar 2.2. 1 Perkembangan Inflasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023**




*Sumber: jabar.bps.go.id (2023), bps.go.id (2023)*

Terlihat bahwa laju inflasi Kota Bogor mengalami fluktuasi yang sejalan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Barat. Laju inflasi Kota Bogor mengalami penurunan hingga tahun 2021. Kemudian laju inflasi meningkat tinggi pada tahun 2022. Kenaikan inflasi pada tahun 2022 ini disebabkan oleh utamanya kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan di pasar, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Pemerintah Kota Bogor telah berupaya mengatasi penyebab inflasi tersebut, di antaranya menyelenggarakan operasi pasar terbuka, inspeksi mendadak atas harga barang komoditas, penggalakan gerakan menanam tanaman pangan tertentu, subsidi transportasi, dan kerja sama dengan daerah lain untuk penyediaan komoditas dengan harga murah.

## C. Indeks Gini

Indeks Gini, atau yang disebut juga Rasio Gini atau Koefisien Gini, adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Rasio Gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sedangkan nilai 1 berarti menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Berikut tabel patokan nilai Rasio Gini.

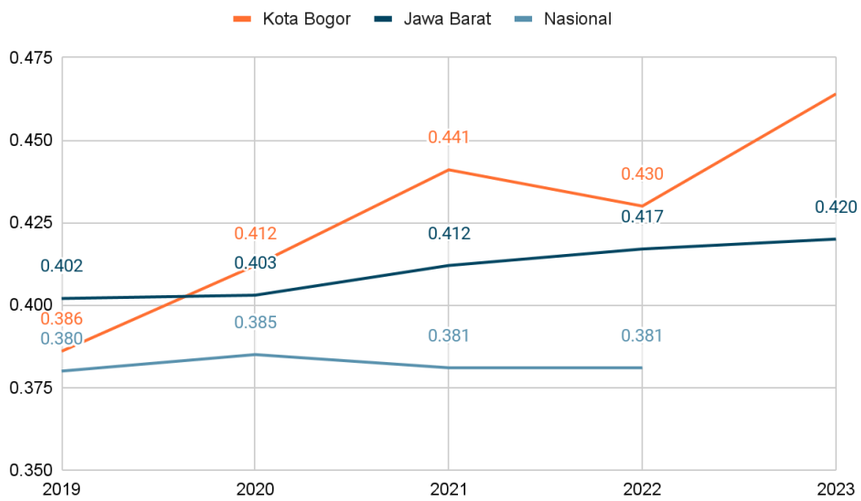
**Tabel 2.2. 9 Patokan Rasio Gini**

| Nilai Koefisien | Distribusi Pendapatan |
|---|---|
| < 0,4 | Tingkat ketimpangan rendah |
| 0,4 - 0,5 | Tingkat ketimpangan sedang |
| >0,5 | Tingkat ketimpangan tinggi |

*Sumber: berkas.dpr.go.id (2017)*

Berikut data Rasio Gini Kota Bogor dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.

**Gambar 2.2. 2 Perkembangan Rasio Gini di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023**




*Sumber: jabar.bps.go.id (2023), bps.go.id (2023)*

Dari data tersebut, Kota Bogor menunjukkan peningkatan kesenjangan ekonomi. Pada tahun 2019, ketimpangan Kota Bogor masih terbilang rendah. Selanjutnya pada tahun 2020 hingga 2022, ketimpangan Kota Bogor terbilang sedang. Meningkatnya ketimpangan ini sejalan dengan dampak dari pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021, di mana melemahnya kegiatan ekonomi berpengaruh pada kemampuan penduduk Kota Bogor dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian Rasio Gini mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 dengan selisih 0,011 poin. Ini menunjukkan adanya penurunan kesenjangan ekonomi. Namun karena 0,430 masih tergolong ketimpangan sedang, maka Kota Bogor masih memiliki permasalahan yang perlu dipecahkan terkait kesenjangan ekonomi. Walaupun PDRB meningkat setiap tahun, kesejahteraan ekonomi secara umum belum tercapai yang disertai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor pada tahun 2020-2022 yang berada di atas 10%. Hal ini menandakan perlunya strategi penanggulangan ketimpangan yang

menyasar pada aspek ketenagakerjaan dan produktivitas sektor informal.

Dilihat dari tabel perbandingan di atas, tren peningkatan Rasio Gini Kota Bogor mengikuti tren Provinsi Jawa Barat. Kedua wilayah ini sama-sama menunjukkan peningkatan kesenjangan ekonomi. Selain itu, baik Kota Bogor maupun Provinsi Jawa Barat belum bisa menyamai tingkat kesenjangan nasional yang terbilang lebih rendah.

**D. Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan**

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Berikut disajikan tabel Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2019-2023, dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2. 10Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023**

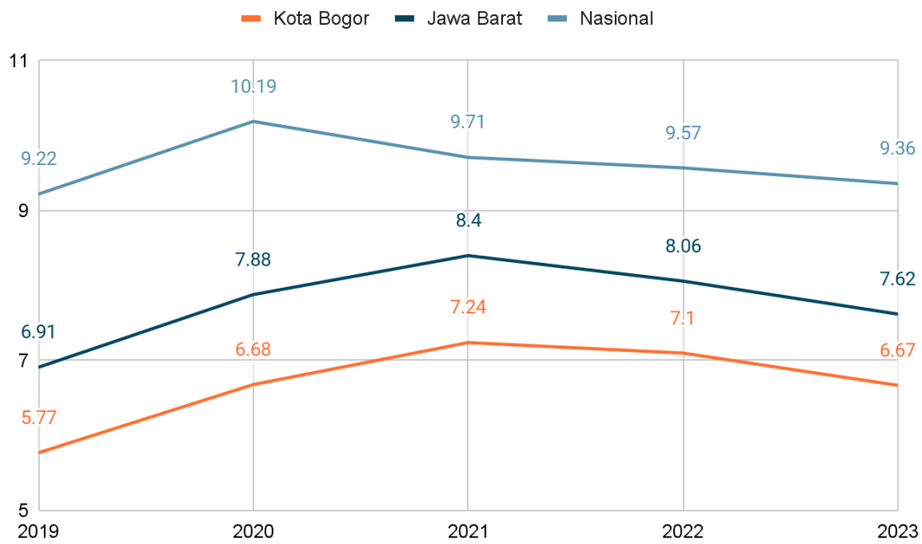
| Deskripsi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Kota Bogor | 63,97 | 75,04 | 80,09 | 79,15 | 75,00 |
| Persentase penduduk miskin (%) Kota Bogor | 5,77 | 6,68 | 7,24 | 7,10 | 6,67 |
| Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Jawa Barat | 3.399,2 | 3.920,2 | 4.195,3 | 4.071,0 | 3.888,6 |
| Persentase penduduk miskin (%) Jawa Barat | 6,91 | 7,88 | 8,40 | 8,06 | 7,62 |
| Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Indonesia | 24.785,87 | 27.549,69 | 26.503,65 | 26.363,27 | 75.000 |
| Persentase penduduk miskin (%) Indonesia | 9,22 | 10,19 | 9,71 | 9,57 | 9,36 |

*Sumber: bogorkota.bps.go.id (2023), jabar.bps.go.id (2023), bps.go.id (2023)*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Bogor mengalami tren peningkatan. Walaupun pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,43%, jumlah penduduk miskin Kota Bogor yang sebesar 75 ribu jiwa masih terbilang tinggi. Dengan naiknya PDRB, Indeks Gini, dan jumlah penduduk miskin Kota Bogor,

menandakan perlunya upaya khusus untuk menekan angka kemiskinan melalui redistribusi pendapatan.

**Gambar 2.2. 3 Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023**




*Sumber: bogorkota.bps.go.id (2023), jabar.bps.go.id (2023), bps.go.id (2023)*

Apabila ditinjau dari PDRB dengan pendekatan pengeluaran, maka investasi menjadi aspek penting untuk menciptakan lapangan kerja, yang nantinya akan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Namun, karakteristik Kota Bogor menyebabkannya sulit untuk menumpukan pertumbuhan ekonominya dari sisi investasi untuk mengembangkan industri-industri besar padat modal. Berbeda dengan daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi, Kota Bogor memiliki keterbatasan dan kompatibilitas ruang untuk mengembangkan kawasan industri yang dimaksud.

Ini dapat dilihat dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai komponen PDRB pendekatan pengeluaran. Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yaitu dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2022 Kota Bogor menempati urutan terakhir di antara daerah Bodetabek dalam PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 17.441,68 miliar. Sedangkan PMTB Kabupaten Bogor sebesar Rp 56.272,49 miliar, Kota Depok Rp

43.144,95 miliar, Kota Bekasi Rp 37.125,99 miliar, dan tertinggi adalah Kabupaten Bekasi dengan Rp 79.217,23 miliar.

## E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berikut data Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor dalam lima tahun terakhir.

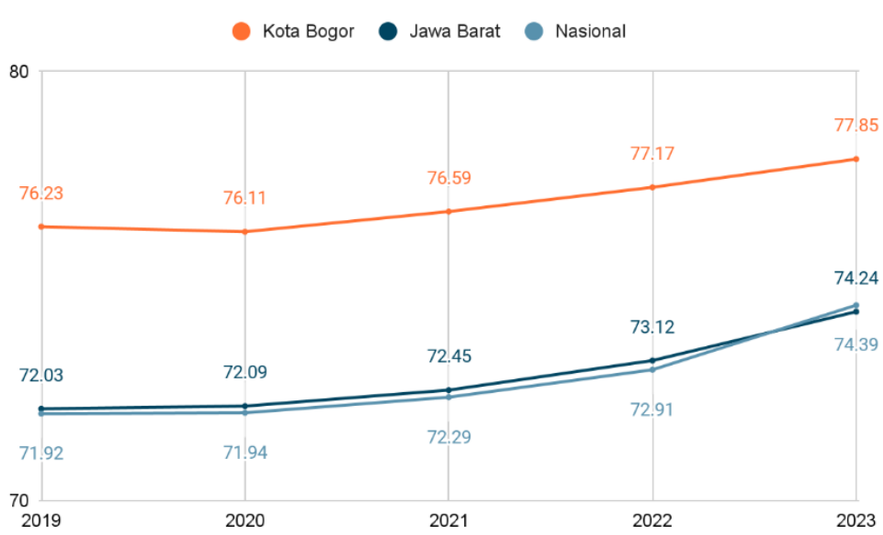
**Tabel 2.2. 11 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2019-2023**

| Komponen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat lahir (UHH/Tahun) | 73,41 | 73,61 | 73,82 | 74,13 | 74,45 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS/Tahun) | 13,40 | 13,41 | 13,42 | 13,43 | 13,45 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Tahun) | 10,32 | 10,33 | 10,53 | 10,63 | 10,64 |
| Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP/Rupiah) | 11.825 | 11.564 | 11.716 | 12.058 | 12.656 |
| **IPM** | **76,23** | **76,11** | **76,59** | **77,17** | **77,85** |

*Sumber: bogorkota.bps.go.id (2023)*

Dari data tersebut, tampak bahwa Kota Bogor mengalami peningkatan IPM. Apabila perhitungan IPM tersebut dijabarkan pada aspek UHH, HLS, RLS, dan pengeluaran per kapita, maka penduduk Kota Bogor pada umumnya telah mengalami peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

**Gambar 2.2. 4 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2019-2023**




*Sumber: jabar.bps.go.id (2023), bps.go.id (2023)*

Tabel di atas memuat perbandingan IPM Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2019-2023. Terlihat bahwa pada lima tahun terakhir, baik IPM Kota Bogor, IPM Jawa Barat, maupun IPM Nasional menunjukkan tren peningkatan. IPM Kota Bogor rata-rata lebih tinggi 4 poin daripada IPM Jawa Barat dan lebih tinggi 5 poin dari IPM Nasional. Ini menunjukkan Kota Bogor memiliki kapasitas pembangunan manusia yang lebih baik daripada wilayah kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, maupun wilayah Nasional secara umum.

Apabila dilihat dari evaluasi capaian RPJPD Kota Bogor 2005-2025, capaian IPM meraih nilai realisasi kinerja "Sangat Tinggi" untuk periode pertama RPJPD (2005-2009), namun kemudian menurun menjadi "Tinggi" untuk tiga periode berikutnya. Perkiraan faktor-faktor penghambatnya meliputi kepadatan penduduk akibat migrasi masuk, kemiskinan, dan pendidikan. Migrasi masuk ke Kota Bogor dalam periode 2005-2023 dicirikan oleh penduduk yang relatif miskin. Penduduk miskin yang masuk ke dalam Kota Bogor dominan bermata pencaharian di sektor informal yang tampaknya belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan peningkatan usaha-usaha ekonomi produktif dan pendidikan. Oleh karena itu, dalam periode tersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, termasuk dari dampak pandemi COVID-19, yang cenderung memperlambat kenaikan IPM Kota Bogor.

Pada aspek pendidikan, faktor yang diidentifikasi menjadi penghambat adalah perlambatan Angka RLS (Rata-rata Lama Sekolah). Indikator RLS ini bahkan mendapatkan nilai realisasi kinerja yang menurun pada periode keempat menjadi "Sedang" dari sebelumnya berpredikat "Tinggi". Kondisi ini disebabkan masih terdapat kelompok masyarakat lapisan bawah dari usia 15 tahun ke atas yang menempuh jenjang pendidikan hanya sampai lulus SD atau sampai SMP sehingga masih ada penduduk berusia > 25 tahun yang tidak tamat SMP dan SMA.

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

#### A. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator pencapaian program pendidikan di Indonesia. Berikut adalah data perbandingan Angka Melek Huruf di Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.2. 12 Angka Melek Huruf di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023**

| Angka Melek Huruf | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bogor | 99,35 | 99,63 | 99,68 | 99,78 | 99,98 |
| Provinsi Jawa Barat | N/A | 99,63 | 98,62 | 98,49 | * |

*Sumber: jabar.bps.go.id (2023)*

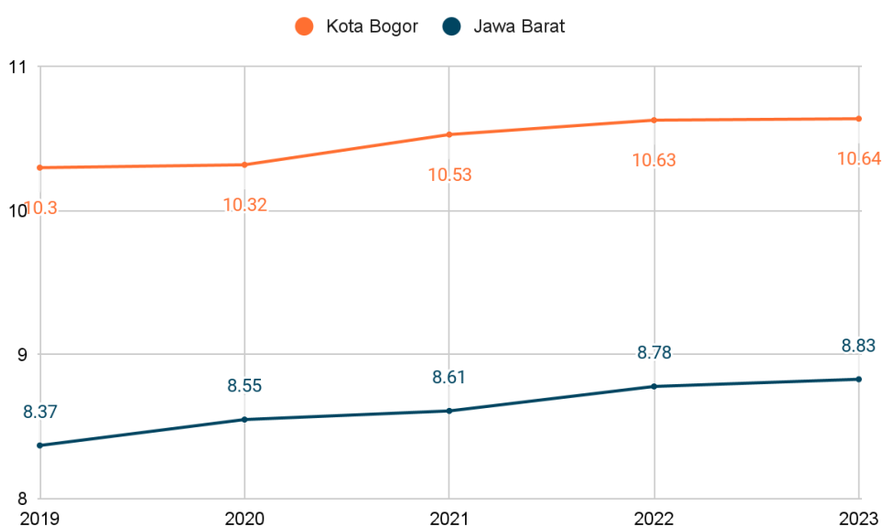
**= Data belum keluar dari BPS*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa AMH Kota Bogor meningkat setiap tahun, sedangkan AMH Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, Kota Bogor memiliki lebih banyak penduduk yang mampu mengakses informasi secara tertulis. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk generasi muda yang diiringi oleh kemudahan akses pendidikan untuk memperoleh kemampuan membaca.

## B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Berikut data RLS Kota Bogor dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

**Gambar 2.2. 5Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor Tahun 2019-2023**



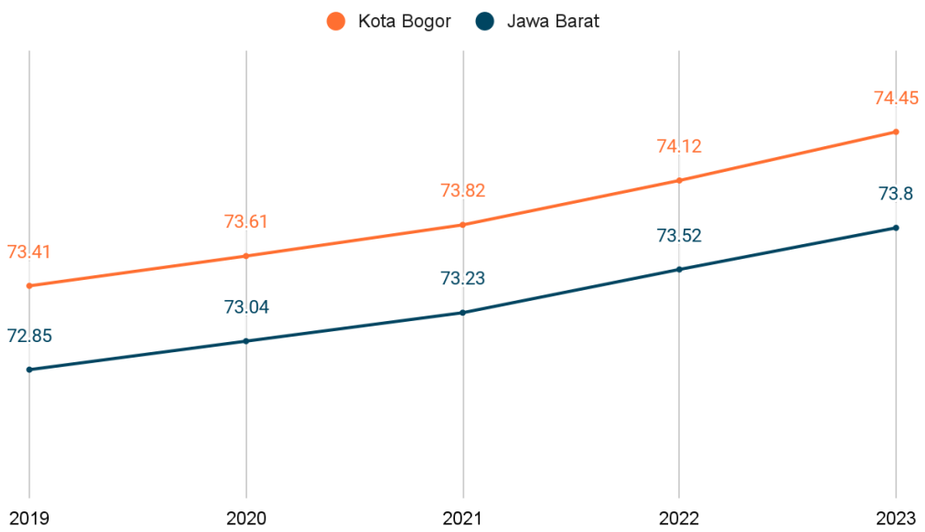

*Sumber: jabar.bps.go.id (2023)*

RLS penduduk Kota Bogor lebih tinggi daripada RLS Provinsi Jawa Barat. RLS Kota Bogor juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan makin banyak penduduk Kota Bogor yang mampu menjangkau pendidikan dengan jenjang lebih tinggi. Di sisi lain, RLS yang berkisar di angka 10 menunjukkan bahwa pendidikan tertinggi rata-rata penduduk Kota Bogor yang telah berusia 15 tahun ke atas adalah setingkat kelas 10 SMA. Ini berarti rata-rata kualitas SDM Kota Bogor masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

### C. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup digunakan untuk mengukur indeks kesehatan, sementara indeks kesehatan merupakan salah satu komponen dasar dalam pengukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berikut adalah data AHH Kota Bogor dalam lima tahun terakhir.

**Gambar 2.2. 6 Angka Harapan Hidup di Kota Bogor Tahun 2019-2023**




*Sumber: jabar.bps.go.id (2023)*

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa AHH Kota Bogor dan AHH Provinsi Jawa Barat tidak jauh berbeda. Kedua wilayah tersebut juga menunjukkan tren peningkatan AHH setiap tahunnya. Peningkatan AHH menandakan kualitas hidup penduduk Kota Bogor maupun penduduk Provinsi Jawa Barat secara umum meningkat. Kualitas hidup yang meningkat salah satunya disebabkan oleh

peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta terjangkaunya informasi dan edukasi kesehatan oleh penduduk.

Meskipun terdapat kenaikan setiap tahunnya, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Bogor dalam upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu sebagai berikut:

- Tingginya angka kematian Ibu dan Bayi.
- Tingginya angka *stunting* dan KEK.
- Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- Rendahnya mutu pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit.
- Jumlahnya SDM Kesehatan yang belum mencukupi kebutuhan.
- Belum optimalnya sediaan farmasi dan alat Kesehatan.

**D. Persentase balita gizi buruk**

Gizi buruk pada balita merupakan kondisi ketika berat badan balita terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi buruk atau *severe wasting* biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah sehingga berisiko terkena penyakit parah, bahkan beresiko meninggal.

**Tabel 2.2. 13 Jumlah Balita yang Diukur dan yang Terindikasi Gizi Buruk di Kota Bogor Tahun 2019-2023**

| Tahun | Jumlah Balita yang Diukur | Jumlah Balita Gizi Buruk | Persentase Balita Gizi Buruk |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83074 | 54 | 0,07 |
| 2020 | 77884 | 188 | 0,24 |
| 2021 | 72647 | 437 | 0,6 |
| 2022 | 72728 | 64 | 0,09 |
| 2023* | | | |

*Sumber: Dinkes Kota Bogor 2019-2023, diolah*

**= Data belum keluar dari Dinas Kesehatan*

Dari data di atas, terlihat bahwa persentase balita dengan gizi buruk di Kota Bogor menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021 menjadi tahun dengan jumlah balita gizi buruk tertinggi. Penyebabnya adalah dampak dari wabah COVID-19 yang berpengaruh pada kesehatan dan kondisi finansial penduduk. Selain itu, masih ada sebagian orangtua yang belum memiliki kesadaran untuk memenuhi makanan balita mereka dengan makanan yang bergizi.

## 2.3 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.3.1 Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk di atas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun).

**Tabel 2.3. 1 Rasio Ketergantungan**

| Rasio Ketergantungan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk Usia <15 tahun | 264.425 | 272.800 | 275.097 | 263.022 |
| Jumlah Penduduk Usia >65 tahun | 60.730 | 54.693 | 57.751 | 70.083 |
| Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun | 722.455 | 737.205 | 742.609 | 780.913 |
| Rasio Ketergantungan Muda | 36,55 | 37,00 | 37,04 | 33,8 |
| Rasio Ketergantungan Tua | 8,39 | 7,42 | 7,77 | 8,8 |

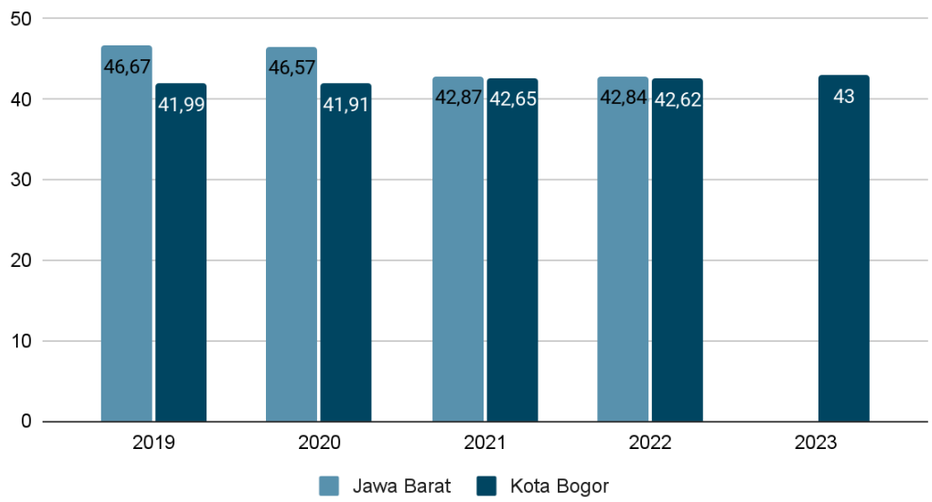
*Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2023*

Berdasarkan data di atas, Rasio Ketergantungan Tua merupakan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan Tua mengalami kenaikan dalam selang waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 Rasio Ketergantungan Tua Kota Bogor berada pada angka 8,39. Di tahun 2020 angka tersebut mengalami penurunan 0,97 menjadi 7,42. Penurunan tersebut tidak bertahan lama, karena di tahun 2021 angka Rasio Ketergantungan Tua kembali mengalami kenaikan 0,35 menjadi 7,77. Tahun 2022, kenaikan RTT Kota Bogor menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu tahun 2019-2023, yakni mencapai 8,8, naik 1,03. Rasio Ketergantungan Tua di Kota Bogor dari tahun 2019-2023 memperlihatkan tren kenaikan walaupun sempat turun di tahun 2020.

Sedangkan, untuk Rasio Ketergantungan Muda di Kota Bogor menunjukkan peningkatan dari 2019 hingga 2021, dengan rasio tertinggi di 2021 sebesar 37,04. Namun pada tahun berikutnya di 2023, Rasio Ketergantungan Muda mengalami penurunan 3,6 menjadi 33,8. Hal tersebut menjadikan capaian rasio ketergantungan muda di 2021 sebagai yang terendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari data di atas, menandakan berkurangnya beban yang ditanggung oleh usia produktif terhadap usia di bawah 15 tahun,

namun beban tanggungan usia produktif terhadap usia 65 tahun mengalami peningkatan.

**Gambar 2.3. 1 Perbandingan Rasio Ketergantungan**




*Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023*

Pada tahun 2023, persentase rasio ketergantungan sebesar 43 persen, setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi. Jika dibandingkan, rasio ketergantungan di Kota Bogor masih lebih baik dari Jawa Barat. Akan tetapi dari tren yang terlihat, rasio ketergantungan Kota Bogor mengalami kenaikan. Walaupun demikian, perkembangan rasio ketergantungan selama 4 (empat) tahun terakhir di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang positif di mana persentase rasio ketergantungan semakin turun. Rasio ketergantungan yang menurun menandakan berkurangnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif di Kota Bogor untuk membiayai penduduk yang non produktif atau tidak produktif lagi.

### 2.3.2 Pengeluaran per Kapita

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

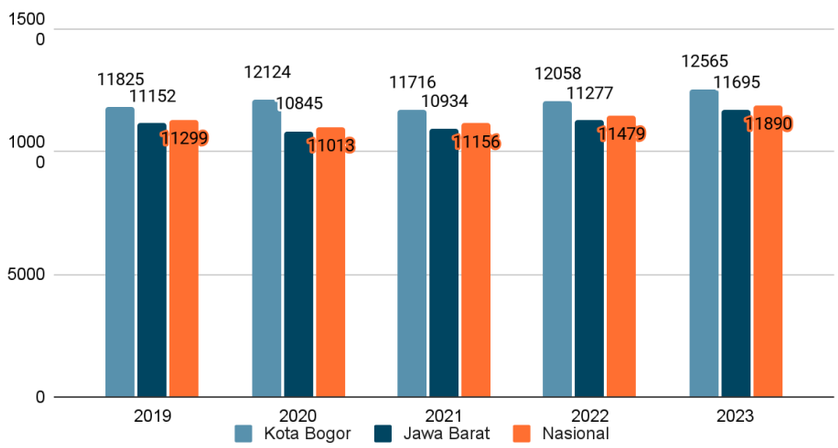
**Tabel 2.3. 2 Pengeluaran per Kapita (Rp 000)**

| Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran per Kapita | 11,825 | 11,564 | 11,716 | 12,058 | 12.656 |

*Sumber: LPPD Kota Bogor 2022*

Pengeluaran per kapita di Kota Bogor cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pendekatan pengeluaran rumah tangga ini yang dijadikan sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat dalam Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) oleh BPS, mengingat sulitnya memperoleh data pendapatan yang akurat. Penurunan terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp. 261,000 sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 naik sebesar Rp. 152,000. Kenaikan pada tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp 342,000.

**Gambar 2.3. 2 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)**




*Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023*

Capaian pengeluaran per kapita rumah tangga Jawa Barat maupun nasional mengalami tren fluktuatif selama periode 5 (lima) tahun (2019-2023). Berdasarkan grafik di atas, data menunjukkan capaian pengeluaran per kapita Kota Bogor lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional. Pada tahun 2023, capaian pengeluaran per kapita Jawa Barat sebesar Rp11.695 ribu, sedangkan untuk Kota Bogor pengeluaran per kapita sebesar Rp12.565 ribu. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut menunjukkan konsumsi per kapita di Kota Bogor lebih tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan PDRB Kota Bogor yang meningkat setiap tahun, meningkatnya PDRB dan pengeluaran per kapita berarti menunjukkan kemampuan daya beli yang cukup tinggi di Kota Bogor, sehingga secara tidak langsung memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pengeluaran per kapita dibedakan atas dua jenis pengeluaran yaitu pengeluaran pangan dan non pangan. Pengeluaran non pangan per kapita Kota Bogor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan teori Hukum *Engel/Engel Law* yaitu semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun,

namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat. Untuk persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita sebagai berikut:

**Tabel 2.3. 3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita**

| Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita | 55.56 | 57.93 | 58.09 | 58.06 | |

*Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2023*

**= Data belum keluar*

Dari tabel di atas terlihat ada capaian yang fluktuatif pada pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Bogor. Kenaikan terjadi di 2021 sebesar 0.16% dan menurun kembali di tahun berikutnya menjadi 58.06%. Akan tetapi jika melihat tren pengeluaran konsumsi non pangan dari tahun 2019 menunjukkan kenaikan. Dari data tabel di atas, menunjukkan pengeluaran konsumsi non pangan menjadi sektor pengeluaran yang lebih tinggi di Kota Bogor dibandingkan konsumsi pangan. Pengeluaran non pangan terbesar dikeluarkan pada komoditi perumahan dan fasilitas perumahan yaitu sebesar 37,05%, disusul aneka barang dan jasa tercatat sebesar 17,99%, dan terkecil pada komoditas keperluan pesta dan upacara dengan tercatat 0,83% (Kota Bogor Dalam Angka 2023) yang berarti pengeluaran masyarakat cenderung lebih besar pada komoditi perumahan dan fasilitas perumahan.

### 2.3.3 Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Iklim berinvestasi dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas. Angka kriminalitas yang tertangani diperoleh dari jumlah kriminalitas yang ada dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut.

**Tabel 2.3. 4 Angka Kriminalitas yang Tertangani**

| Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Kriminalitas yang Tertangani | 0,00048 | 0,00047 | N/A | N/A | N/A |

*Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bogor Tahun 2022*

**= Data belum keluar dari BPS*

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bogor pada tahun 2019 sampai tahun 2020 menunjukan penurunan pada tahun 2020. Data capaian tersebut mengindikasikan penurunan capaian penanganan kriminalitas yang berarti dipengaruhi oleh tindakan kriminal yang menurun, sehingga jika tindakan kriminal menurun menunjukkan keamanan yang meningkat di Kota Bogor.

### 2.3.4 Indeks Pemberdayaan Gender

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

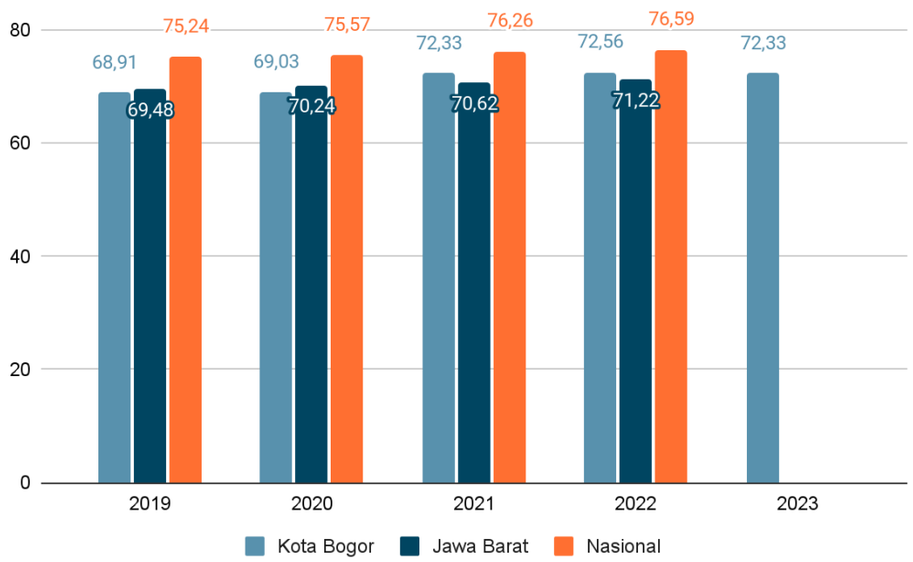
**Tabel 2.3. 5 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bogor**

| Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Pemberdayaan Gender | 68,91 | 69,03 | 72,33 | 72,56 | 72,33 |

*Sumber: BPS Nasional (bps.go.id)*

Jika dilihat dari data tabel di atas, Indeks Pemberdayaan Gender meningkat dari tahun ke tahun, ini membuktikan bahwa peran perempuan dalam hal ekonomi dan politik semakin meningkat sebagai maksud dari indeks pemberdayaan gender tersebut. Namun peningkatan tiap tahunnya belum dirasa memuaskan untuk dianggap baik. Apalagi dilihat dari data tren 2023 terdapat penurunan angka sebesar 0,23. Capaian yang membaik dan berkualitas juga harus disandingkan dengan daerah lainnya, baik yang setara maupun tingkat yang lebih tinggi. Berikut perbandingan indeks pemberdayaan gender antara Kota Bogor dengan Jawa Barat dan Nasional.

**Gambar 2.3. 3 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender**




Sumber: BPS Nasional (*bps.go.id*)

Selama lima tahun berturut-turut (2019-2023) indeks pemberdayaan gender di Provinsi Jawa Barat berada di bawah nasional. Namun demikian, angka Indeks Pemberdayaan Gender di baik di Kota Bogor maupun tingkat provinsi dan nasional menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bogor menunjukkan arah positif, di mana mulai tahun 2021 sudah melampaui capaian pemberdayaan gender di tingkat Provinsi khususnya Jawa Barat. Hal ini menandakan peran perempuan dalam hal ekonomi dan politik di Kota Bogor semakin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Provinsi Jawa Barat. Idealnya, jika pemberdayaan gender semakin meningkat maka disertai juga dengan peningkatan IPG.

## 2.4 Aspek Pelayanan Umum

### 2.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

#### A. Bidang Urusan Pendidikan

#### a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran kemampuan memperoleh pendidikan penduduk usia sekolah. APS adalah indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS dihitung dengan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah (tidak tergantung pada jenjang pendidikan yang ditempuh)

penduduk usia sekolah yang sesuai. Semakin tinggi APS, semakin besar kemungkinan jumlah penduduknya yang mendapatkan fasilitas pendidikan. Untuk mengetahui perkembangan APS Kota Bogor, dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.4. 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bogor Tahun 2019-2023**

| Jenjang Pendidikan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| Penduduk Usia 7-12 Th | 99,53 | 99,91 | 103 | 101,56 | 100 |
| Penduduk Usia 13-15 Th | 94,75 | 95,32 | 89 | 93,26 | 100 |
| Penduduk Usia 16-18 Th | 67,46 | 68,17 | N/A | N/A | |
| Penduduk Usia 19-24 Th | 29,74 | N/A | N/A | N/A | |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

**= Data belum keluar dari BPS*

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah Kota Bogor penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2019 sebesar 99,53. Kelompok usia 13-15 tahun sebesar 94,75, kelompok usia 16-18 tahun sebesar 67,46 tahun, sedangkan penduduk usia 19-24 tahun sebesar 29,74%. Pada tahun 2020 angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun sebesar 99,91, penduduk usia 13-15 tahun sebesar 94,75, penduduk usia 16-18 tahun sebesar 68,17. Pada tahun 2021 angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun sebesar 103, penduduk usia 13-15 tahun sebesar 89. Pada tahun 2022 angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun sebesar 101,56 dan pada penduduk usia 13-15 tahun sebesar 93,26. Pada tahun 2023 angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun sebesar 100 dan pada penduduk usia 13-15 tahun sebesar 100.

Penurunan angka partisipasi sekolah pada usia 13-15 tahun (jenjang pendidikan SMP) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), faktor guru (rasio murid terhadap guru), faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).

**b. Rasio Ketersediaan Sekolah (Penduduk Usia SD dan Menengah)**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan

pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

**c. Rasio Guru terhadap Murid**

Rasio antara guru dengan murid adalah perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Rasio guru murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Rasio ini juga dapat mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Semakin kecil nilai rasionya, maka akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru. Sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

**Tabel 2.4. 2 Rasio Guru Terhadap Murid Kota Bogor Tahun 2019-2023**

| Jenjang Pendidikan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| SD/MI Bogor Barat | 24.1 | 20,234 | 15,12 | 1: 20 | |
| SD/MI Bogor Selatan | 22.06 | 24,276 | 15,61 | 1: 23 | |
| SD/MI Bogor Tengah | 22.61 | 22,210 | 14,56 | 1: 21 | |
| SD/MI Bogor Timur | 22.23 | 22,306 | 15,11 | 1: 21 | |
| SD/MI Bogor Utara | 21.56 | 22,220 | 17,92 | 1: 21 | |
| SD/MI Tanah Sareal | 21.76 | 21,751 | 14,36 | 1: 21 | |
| SMP/MTS Bogor Barat | 20.25 | 17,598 | 16,2 | 1: 21 | |
| SMP/MTS Bogor Selatan | 15.26 | 15,566 | 14,23 | 1: 21 | |
| SMP/MTS Bogor Tengah | 17.09 | 18,964 | 15,43 | 1: 21 | |
| SMP/MTS Bogor Timur | 19.26 | 14,948 | 13,14 | 1: 19 | |
| SMP/MTS Bogor Utara | 20.33 | 16,845 | 15,16 | 1: 16 | |
| SMP/MTS Tanah Sareal | 17.91 | 17,393 | 15,89 | 1: 19 | |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

**= Data belum keluar dari BPS*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota,

bahwa setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, maka rasio guru terhadap murid di Kota Bogor masih dapat dikatakan ideal.

**d. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Berikut disajikan data mengenai angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI di Kota Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2019 - 2023.

**Tabel 2.4. 3 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Bogor Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | 88 | 87 | 86,56 | 79,88 | 92,30 |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

Berdasarkan UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Bagian ke satu pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma IV. Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV tertinggi pada tahun 2023.

**B. Bidang Urusan Kesehatan**

**a. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)**

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.4. 4 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Bogor Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Puskesmas | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Jumlah Puskesmas Pembantu | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Jumlah Penduduk | 1.112.081 | 1.126.927 | 1,052,359 | 1,114,018 | 1.122.772 |
| Rasio Puskesmas | 2.16 | 2.22 | 2.38 | 2.24 | 2,24 |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah puskesmas. Pada tahun 2019 jumlah puskesmas yang terdapat di Kota Bogor sebanyak 24 puskesmas. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat penambahan satu puskesmas sehingga

jumlah puskesmas menjadi 25. Terdapat peningkatan rasio puskesmas dalam setiap tahunnya mulai tahun 2019 hingga tahun 2021. Rasio puskesmas di Kota Bogor pada tahun 2019 sebanyak 2.16, pada tahun 2020 sebanyak 2.22, pada tahun 2021 sebanyak 2.38. Pada tahun 2022 dan 2023 terdapat penurunan rasio puskesmas menjadi 2.24.

**b. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah jumlah Rumah Sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas Rumah Sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

**Tabel 2.4. 5 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kota Bogor Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Rumah Sakit | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Jumlah Penduduk | 1.112.081 | 1.126.927 | 1,052,359 | 1,114,018 | 1.122.772 |
| Rasio Rumah Sakit | 1.71 | 1.77 | 2.09 | 1.97 | 0,02 |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

Terdapat peningkatan jumlah rumah sakit yang terdapat di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 jumlah rumah sakit yang terdapat di Kota Bogor sebanyak 19. Pada tahun 2020 jumlah rumah sakit yang terdapat di Kota Bogor naik menjadi 20 dan pada tahun 2021 hingga 2023 jumlah rumah sakit di Kota Bogor naik menjadi 22 rumah sakit. Rasio rumah sakit di Kota Bogor juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 rasio rumah sakit sebanyak 1.71. Pada tahun 2020 rasio rumah sakit sebanyak 1,77 dan pada tahun 2021 rasio rumah sakit sebanyak 2.09. Pada tahun 2022 rasio rumah sakit mengalami penurunan menjadi 1.97.

**c. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk**

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

**Tabel 2.4. 6 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk | 241 | 480 | 586 | 207 | 2,97 |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

Rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Bogor tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 rasio tenaga medis per satuan penduduk sebanyak 241 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 480. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 586 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 207.

## C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### a. Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum

Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, baik berupa panjang jalan Kota Bogor dalam kondisi baik serta komponen yang mendukungnya seperti drainase jalan dan trotoar jalan. Selain itu yang menjadi fokus pembangunan urusan pekerjaan umum adalah pembangunan turap penahan longsor dan perbaikan jaringan irigasi.

**Tabel 2.4. 7 Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (%) | 89.38 | 83.47 | 84,20 | 88,23 | 88,95% |
| Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%) | 88.79 | 66.7 | 49,11 | 93516,19 (panjang) | 96,121 |
| Persentase rumah tinggal bersanitasi yang aman | 66.59 | 70.90 | 75,12 | 5,43 | |
| Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) | 64.14 | 11.17 | 25,11 | 25,86 | 62,00 |
| Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya | 87.63 | 77.69 | 921 | 985 | 1195 |
| Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik (%) | 46.73 | 56.40 | 51,58 | 52,62 | 53,79% |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

**= Data belum keluar dari BPS*

Persentase jalan kota dalam kondisi baik mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 persentase jalan kota dalam kondisi baik mengalami peningkatan. Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Persentase rumah tinggal bersanitasi yang

aman dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat mengalami fluktuasi di setiap tahunnya.

**b. Rasio Jaringan Irigasi**

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

**Tabel 2.4. 8 Rasio Jaringan Irigasi**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Jaringan Irigasi | 46,73 | 58,75 | 41,5 | 28,10 | 0,360 |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

Proporsi rasio jarongan irigasi dengan luas lahan budidaya di Kota Bogor mengalami fluktuasi setiap tahunnya. pada tahun 2019 rasio jaringan irigasi di Kota Bogor sebanyak 46,73. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 58,75. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sehingga rasio jaringan irigasi menjadi 41,5. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yang signifikan sehingga menjadi 28,10. Dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan yang signifikan sehingga menjadi 0,360.

**c. Ketersediaan Air Minum**

Ketersediaan air, terutama air minum, menjadi salah satu penentu kualitas hidup suatu masyarakat. Capaian kinerja pelayanan air minum di Kota Bogor dari tahun 2019-2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 2.4. 9 Ketersediaan Air Minum**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang aman | 92,58 | 76,98 | 68.49 | 68.68 | 76,79 |
| Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum PDAM | 92,58 | 72,67 | 68,49 | 68,68 | 69,04 |
| Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum Non PDAM | 0,85 | 4,31 | 15,34 | 15,36 | |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

**= Data belum keluar dari BPS*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dan mengalami peningkatan di tahun 2023. Persentase rumah tangga yang dilayani air minum PDAM mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023. Persentase rumah tangga yang dilayani air minum non PDAM mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2022.

### d. Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah.

**Tabel 2.4. 10 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk | 12,25 | 12,00 | 11,92 | 11,98 | 9,42 |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang terdapat di Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali.

### e. Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk

Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

**Tabel 2.4. 11 Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk | 0,019 | 0,02 | 0,021 | 1,49 | |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

**= Data belum keluar dari BPS*

Rasio tempat beribadah per satuan penduduk yang terdapat di Kota Bogor mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tercatat pada tahun 2021 jumlah masjid yang terdapat di Kota Bogor sebanyak 753. Di tahun yang sama yakni tahun 2021 jumlah mushola yang terdapat di Kota Bogor sebanyak 358. Jumlah gereja kristen di Kota Bogor pada tahun 2021 sebanyak 29, hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya berjumlah 24 gereja kristen. Gereja katolik di Kota Bogor tahun 2021 sebanyak 3. Pura di Kota Bogor pada tahun 2021 sebanyak 5, hal tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya yaitu tahun 2020 yang berjumlah 3 pura. Vihara di Kota Bogor pada tahun 2021 berjumlah 16.

**f. Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik**

Dalam rangka mendukung sasaran strategis, maka terdapat langkah yang dilakukan dalam peningkatan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas taman kota dan taman lingkungan.

**Tabel 2.4. 12 Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik | 540,778 | 23.055 | 4.682.840 | 4.704.040 | 1,01 Ha |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

Capaian luasan ruang terbuka hijau publik pada tahun 2019 sebanyak 540,778. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 23.055. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 4.682.840 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 4.704.040. Sedangkan, pada tahun 2023 seluas 1,01 Ha.

**g. Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan**

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk

hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

**Tabel 2.4. 13 Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesesuaian Bangunan dengan IMB yang telah terbangun | 99,40 | 94,18 | 99,88 | 99,59 | 99,7 |
| Pencegahan Bangunan tidak Ber-IMB | 72,80 | 87,15 | 88,46 | 95,18 | 86,9 |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

Kesesuaian bangunan dengan IMB yang telah dibangun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 94,18 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan total 99,40. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 99,88 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 99,59. Sedangkan, tahun 2023 mengalami kenaikan kembali. Kemudian, pencegahan bangunan tidak ber-IMB di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pencegahan bangunan tidak ber-IMB sebanyak 72,80. Pada tahun 2020 sebanyak 87,15. Pada tahun 2021 sebanyak 88,46, pada tahun 2022 sebanyak 95,18, dan pada tahun 2023 sebanyak 86,9.

**h. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

**Tabel 2.4. 14 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | 99,84 | 89,4 | N/A | N/A | 60 |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kota Bogor sejak di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 89,4 dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang berjumlah 99,84. Sedangkan, tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup drastis.

## D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

### a. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 18,37 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang berjumlah 17,07. Pada tahun 2021 rasio rumah layak huni mengalami penurunan menjadi 17,36, pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 18,52, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 19,3.

**Tabel 2.4. 15 Rasio Rumah Layak Huni**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio rumah layak huni (Rumah Layak Huni per Satuan Penduduk) | 17,07 | 18,37 | 17,36 | 18,52 | 19,3 |
| Rasio pemukiman layak huni | 95,53 | 95,51 | 90,99 | 96,31 | 92,82 |
| Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 73,02 | 75,00 | 80,02 | 82,19 | 83,76 |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

Rasio pemukiman layak huni di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 rasio pemukiman layak huni di Kota Bogor sebanyak 95,53 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95,51. Pada tahun 2021 kembali menurun sehingga menjadi 90,99 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 96,31. Sedangkan, tahun 2023 mengalami penurunan kembali. Cakupan ketersediaan rumah layak huni dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

## E. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

### a. Penyelesaian Penegakan Perda dan Sidang Tipiring

Capaian Kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dari tahun 2019 sampai tahun 2023, yang meliputi penegakan Perda dan capaian angka kriminalitas ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4. 16 Penyelesaian Penegakan Perda dan Sidang Tipiring**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase penegakan perda KTR | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase bangunan melanggar yang di tertibkan | 95 | N/A | N/A | N/A | |
| Tingkat penegakan Perda ketertiban umum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Angka kriminalitas | 0,0005 | 0,00047 | N/A | N/A | |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024 *= Data belum keluar dari BPS*

Capaian penegakan perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari tahun 2019 mencapai 93 dan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai 100. Hal tersebut menunjukkan peningkatan terhadap capaian penegakan perda kawasan tanpa rokok (KTR).

**F. Sosial**

**a. Capaian Penanganan PPKS**

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

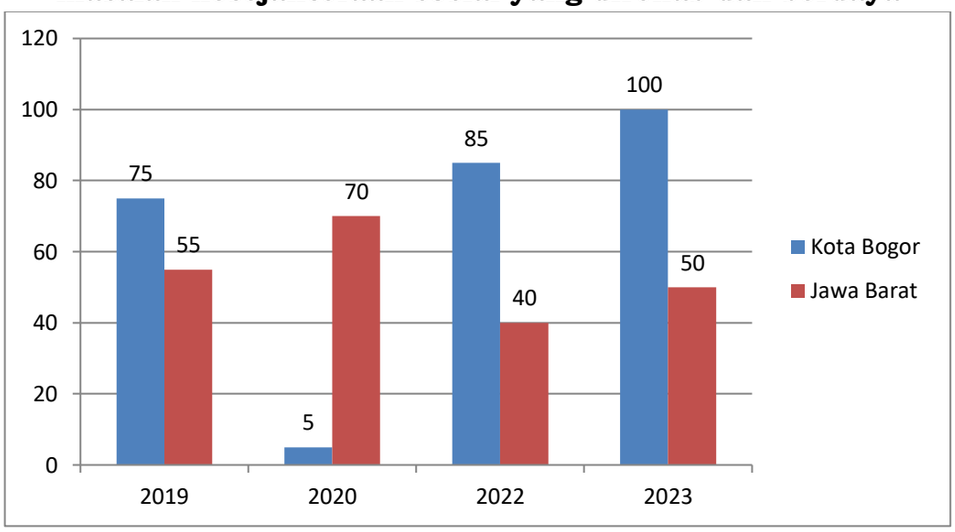
**Tabel 2.4. 17 Capaian Penanganan PPKS**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya | 75,32 | 5,98 | 7,24 | 85,09 | 100 |
| Persentase jumlah anak terlantar /anak jalanan yang dibina | 36,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Prosentase penyandang cacat trauma yang dibina | 17,52 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah PMKS/PPKS yang terbina | 302 | 86 | 148 | 125 | 100 |

*Sumber: RPJMD Perubahan 2019-2024*

Selain tabel di atas, terdapat perbandingan antara persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya di tingkat Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Perbandingan persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya dapat dilihat pada grafik berikut:

**Tabel 2.4. 18 Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya**




*Sumber: RPD Prov. Jawa Barat Tahun 2024-2026*

Berdasarkan tabel 2.4.17 terlihat bahwa Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya di Kota Bogor pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya di Kota Bogor mencapai 75,32 dan menurun di tahun 2020 menjadi 5,98. Pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 7,24 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 85,09 dan tahun 2023 mencapai 100. Fenomena tersebut juga terjadi pada persentase jumlah anak terlantar / anak jalanan yang di bina, persentase penyandang cacat trauma yang di bina, dan jumlah PMKS / PPKS yang terbina.

### 2.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### A. Tenaga Kerja

#### a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan penduduk usia kerja di atas 15 tahun yang menjadi bagian dari pasar tenaga kerja. Persentase penduduk usia kerja yang aktif pada suatu wilayah secara ekonomi mencerminkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang besar. Semakin besar pasokan tenaga kerja yang tersedia dalam proses produksi barang dan jasa pada perekonomian, semakin tinggi nilai TPAK. Berikut data terkait tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bogor:

**Tabel 2.4. 19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 63,73 | 67,77 | 61,77 | 64,21 | 64,81 |

*Sumber: RKPD Kota Bogor Tahun 2024*

Pada tabel tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan adanya fluktuasi nilai pada Tahun 2019 hingga 2023. Nilai paling rendah yaitu pada tahun 2021, dengan nilai paling tinggi tahun 2020. Kenaikan angka partisipasi angkatan kerja tertinggi pada tahun 2019-2020 yaitu sebesar 4,04%, di mana kondisi pasca pandemi Covid-19 menarik banyak masyarakat untuk mencari pekerjaan karena sulitnya kondisi ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia di Kota Bogor untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sementara pada tahun 2020 hingga 2021 cenderung mengalami penurunan sebesar 6%, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali sebesar 2,44%. Sedangkan, tahun 2023 mengalami kenaikan kembali.

Pengaruh besaran Upah Minimum Regional, rata-rata lama sekolah, dan Produk Domestik Bruto dinilai menjadi faktor penyebab besaran partisipasi angkatan kerja di Kota Bogor. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan kebijakan dan peluang kreasi dan inovasi dari pemerintah daerah bagi penduduk usia produktif di Kota Bogor. Hal ini bisa dilakukan dengan mengedepankan pada perekonomian yang bersifat *labor intensive* melalui penyusunan peraturan yang mengatur persentase penggunaan teknologi dalam sebuah perusahaan, sehingga lebih banyak mengedepankan pada penggunaan tenaga kerja dari pada penggunaan mesin.

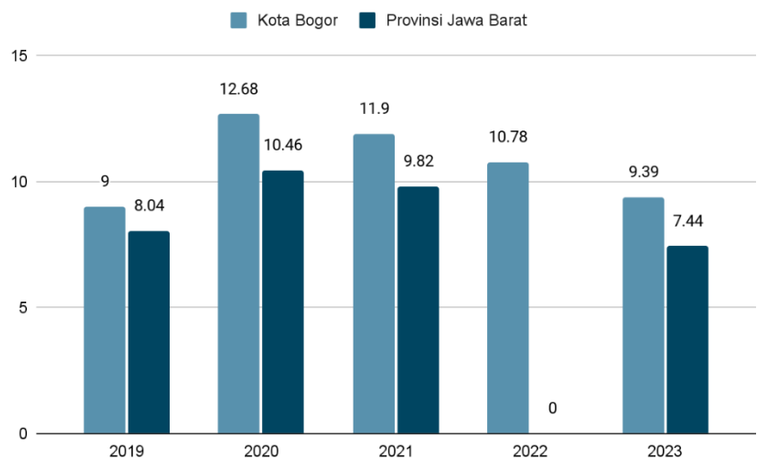
Adanya penyusunan dan perumusan upah minimum yang berkeadilan bagi pelaku usaha (perusahaaan) dan tenaga kerja, dengan mengedepankan pada kesejahteraan dan daya beli masyarakat juga dapat mendukung tingkat partisipasi tenaga kerja. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas pendidikan melalui penyederhanaan sistem pendidikan melalui pemilihan minat bakat sejak dini, serta adanya peningkatan pelatihan kerja bagi mahasiswa untuk mencegah adanya pengangguran.

**b. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka merupakan jumlah persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan Angkatan

Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

**Gambar 2.4. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor**




*Sumber: RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat*

Berdasarkan data terkait Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Kenaikan dan angka tertinggi pada data tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor dan Jawa Barat terjadi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Adanya pemutusan hubungan kerja, pelemahan ekonomi, pergeseran pola bisnis, dan menurunya daya beli masyarakat menyebabkan kerugian di sektor ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat hingga saat ini masih berada dalam fase pemantapan ekonomi setelah dampak pandemi Covid-19. Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi global dan nasional. Selain tiga sektor tersebut, sektor informasi dan komunikasi, real estate dan jasa perusahaan.

Data tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat memiliki korelasi dengan di Kota Bogor, hal ini karena kenaikan dan penurunannya selaras. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor salah satunya disebabkan oleh pengaruh kinerja pasar kerja dan kondisi ekonomi di Kota Bogor. Karakteristik Kota Bogor yang tidak memungkin untuk adanya pengembangan industri-industri besar yang padat modal seperti daerah kawasan industri besar lain yaitu Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi juga menjadi faktor adanya pengangguran terbuka di Kota Bogor. Kondisi ini menjadikan penciptaan lapangan kerja

melalui aktivitas investasi menjadi terbatas, apalagi jika jenis investasinya adalah investasi yang padat modal dan bukan padat karya.

Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan industri padat karya yang mampu memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja, serta perlunya mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainya seperti peningkatan agrobisnis dan agro industri karena potensi geografi Kota Bogor yang cukup baik dalam pengembangan pertanian. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta menjadi penggerak perkembangan pembangunan daerah, yang juga membuka peluang perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

**B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**a. Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah**

Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah berperan penting dalam pembangunan. Hal tersebut juga menjadi upaya pemberdayaan melalui kesetaraan gender bagi perempuan. Berikut adalah tabel indikator partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah di Kota Bogor:

**Tabel 2.4. 20 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
| Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah | 5,63 | 2,2 | 0,52 | 0,02 | |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor 2023*

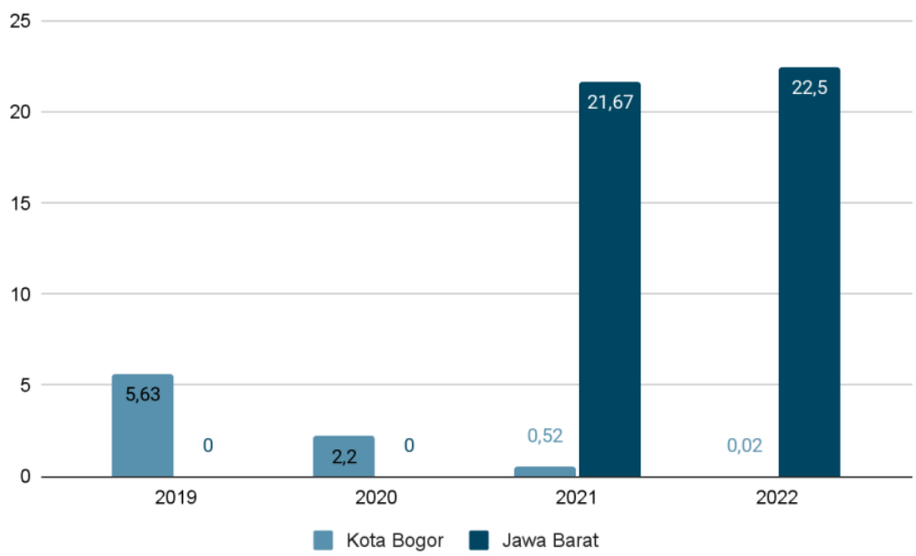
**Data belum keluar*

Berdasarkan tabel partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah di Kota Bogor mengalami penurunan di Tahun 2019 hingga 2022, rata-rata penurunan yang terjadi sebesar 1,87%. Penurunan tertinggi yaitu pada Tahun 2020 sebesar 3,43%. Partisipasi perempuan dalam hal memilih pemimpin daerah sering dihalangi oleh sejumlah rintangan politis, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Ketersediaan sumber daya memang relatif lebih rendah bagi perempuan, misalnya sumber daya waktu dan ekonomi. Selain itu, angka kemiskinan dan kurangnya kendali terhadap sumber daya ekonomi membatasi kemampuan perempuan untuk bergerak sebagai pemilih, kandidat, juru kampanye partai, petugas pemilu, ataupun pengawas pemilu.

Kendali terbatas terhadap aset ekonomi juga membatasi kemampuan perempuan untuk mencalonkan diri karena dalam

banyak kasus mereka memiliki lebih sedikit sumber daya yang dapat digunakan untuk kampanye jika dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan ketercapaian partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah belum optimal. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah di Kota Bogor masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesempatan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan berupa keikutsertaan dalam pemilihan umum harus ditingkatkan karena keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan cara mewakili, mengawal, meningkatkan pengetahuan pemahaman dan kesadaran perempuan tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum.

**Gambar 2.4. 2 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat**




*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat*

Berdasarkan grafik terkait partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan di Provinsi Jawa Barat diketahui tergolong masih rendah meskipun adanya peningkatan. Pada Tahun 2021 hingga Tahun 2022 kenaikan terjadi sebesar 9,83%. Meskipun angka nya masih relatif kecil, namun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu salah satunya melalui audiensi kaukus perempuan politik Indonesia bekerjasama dengan KPU; Pemilih Perempuan serta Data Peserta Perempuan dari setiap Partai Politik pada Pemilu 2019. Selain itu juga disampaikan Keterpilihan Calon Perempuan dalam Pemilu Tahun 2019 adalah sebesar 22% (11 anggota DPRD Kota Bogor). Dalam politik, eksistensi perempuan akan

mempengaruhi kebijakan yang lebih ramah dan pro keluarga, anak dan perempuan.

**b. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan di lingkungan rumah tangga yang berakibat pada kerugian fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berikut merupakan tabel indikator kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bogor.

**Gambar 2.4. 3 Kekerasan dalam Rumah Tangga**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
| Kekerasan dalam Rumah Tangga | 0,04 | 0,01 | 0,0007 | 0,0001 | |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2023*

**= Data belum keluar dari BPS*

Berdasarkan tabel kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bogor pada Tahun 2019 hingga 2021 cenderung mengalami fluktuasi, meskipun angkanya masih rendah. Angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bogor paling rendah yaitu Tahun 2020 sebesar 0,03, dengan angka paling tinggi yaitu pada Tahun 2021 yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,07% (0,1). Faktor-faktor yang mempengaruhi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain karena adanya peningkatan kasus kekerasan akibat epidemi, munculnya kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kasus terhadap anak kepada pihak berwajib, dan terbentuknya jalur pengaduan sehingga lebih mudah sehingga memudahkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diselesaikan.

Dalam meminimalisasi masalah pelanggaran hak anak dan perlindungan perempuan, pemerintah daerah Kota Bogor perlu untuk mengoptimalkan berbagai program sesuai amanat Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui 5 (lima) arahan khusus yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak.

### c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap persentase penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas. Meningkatnya minat dan partisipasi perempuan untuk berkontribusi dalam pasar kerja meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan di pasar kerja. Berikut merupakan tabel indikator partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bogor:

**Tabel 2.4. 21 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 26,88 | 50,77 | 36,23 | 42,40 | 36,56 |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor 2023*

Berdasarkan tabel di atas partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bogor mengalami penurunan di Tahun 2019 hingga 2021, hal ini menunjukkan ketercapaian partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bogor perlu ditingkatkan. Partisipasi angkatan kerja perempuan kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 23,88% (50,77%), sedangkan angka terendah pada Tahun 2021 yaitu sebesar 36,23 persen atau mengalami penurunan 14,54%. Hal ini dimungkinkan merupakan dampak dari pandemi Covid-19, namun pada Tahun 2022 peningkatan terjadi sebagai wujud kebangkitan ekonomi di Kota Bogor. Sedangkan, terdapat penurunan pada tahun 2023. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Bogor perlu meningkatkan kesempatan pendidikan yang layak bagi perempuan dan kesempatan kerja yang lebih luas melalui pemberdayaan dan juga upaya dalam menjamin keamanan dan perlindungan kerja.

## C. Pangan

### a. Persentase Pangan Utama

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kota Bogor telah memastikan ketersediaan pangan daerah dalam kondisi yang optimal, sehingga setiap masyarakat dapat menikmati pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupannya.

**Tabel 2.4. 22 Persentase Pangan Utama Tahun 2019-2023**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase Pangan Utama | 231,01 | 231,20 | 156,18 | 164,92 | 97,8 |

*Sumber: Dokumen RKPD 2024 dan RPJMD 2019-2024 Kota Bogor*

Berdasarkan data tabel di atas ketersediaan pangan utama Kota Bogor mengalami penurunan di Tahun 2019 hingga 2023, hal ini menunjukkan ketercapaian ketersediaan pangan utama yang belum optimal. Ketersediaan pangan utama tertinggi terjadi pada Tahun 2020 yang mencapai 231,20 kg/kap/tahun, sedangkan ketersediaan pangan utama terendah pada Tahun 2023 yaitu sebesar 97,8 kg/kap/tahun. Ketersediaan pangan utama Kota Bogor mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk, semakin minimnya lahan pertanian sehingga harga komoditi di pasar lebih mahal karena pedagang membeli pasokan melalui pengepul dari luar kota. Sehingga diperlukan upaya peningkatan pembudayaan pertanian organik. Semakin berkurangnya jumlah petani juga menjadi faktor penurunan ketersediaan pangan di Kota Bogor. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bogor salah satunya yaitu melalui pembinaan Kebun Organik Herbal Bejo di 68 kelurahan se-Kota Bogor.

**b. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita**

Ketersediaan energi dan protein merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein menggambarkan konsumsi energi dan protein oleh masyarakat.

**Tabel 2.4. 23 Ketersediaan Energi Masyarakat (kg/kapita/hari)**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
| Ketersediaan energi dan protein perkapita | 2.703,2 | 2443 | 2293,6 | 2403 | |

*Sumber: Dokumen RKPD 2024 dan RPJMD 2019-2024 Kota Bogor*

**= Data belum keluar dari BPS*

Berdasarkan tabel di atas ketersediaan energi dan protein masyarakat Kota Bogor mengalami fluktuasi pada Tahun 2019 hingga 2022. Ketersediaan energi masyarakat tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 2.592,9 kg/kap/tahun, sedangkan ketersediaan energi masyarakat terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 2.230 kg/kap/tahun. Meskipun demikian mulai tahun 2021 hingga tahun

2022 mulai mengalami peningkatan. Tingkat ketersediaan energi aktual tahun 2021 berdasarkan NBM tahun 2022 per kelompok pangan yaitu diantaranya kelompok padi-padian 1.509 g/kap/hr, umbi-umbian 43 g/kap/hr, pangan hewani 302 g/kap/hr, minyak dan lemak 293 g/kap/hr, kacang-kacangan 128 g/kap/hr, buah/biji berminyak 1 g/kap/hr, gula 36 g/kap/hr, sayur dan buah 90 g/kap/hr. Ketersediaan energi 2.403 kkal/kap/hari dan skor PPH 84,5 yang artinya cukup baik namun perlu terus ditingkatkan.

Sedangkan pada data terkait konsumsi protein masyarakat Kota Bogor pada Tahun 2019 hingga Tahun 2022 mengalami fluktuasi nilai. Ketersediaan protein masyarakat tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yang mencapai 110,3 kg/kap/tahun, sedangkan ketersediaan protein masyarakat terendah pada Tahun 2021 yaitu sebesar 63,6 kg/kap/tahun dan terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2022 sebesar 81,2. Ketersediaan protein telah melebihi angka kecukupan energi ideal yaitu 63 gram/kap/hari. Kebutuhan konsumsi protein bagi masyarakat di Kota Bogor pangan Kota Bogor didukung oleh adanya regulasi ketahanan pangan.

**c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan ditujukan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia. Pengawasan keamanan pangan dilakukan secara insidentil, apabila ada informasi kasus keamanan pangan yang perlu ditindak lanjuti. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi ke tempat kejadian, penelusuran terhadap asal produk, pengambilan contoh dan pengujian keamanan pangan.

**Tabel 2.4. 24 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 86,37 | 87,1 | 93,75 | 94,68 | 92,96 |

*Sumber: Dokumen RKPD 2024 dan RPJMD 2019-2024 Kota Bogor*

Berdasarkan data tabel di atas persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Tahun 2019 hingga Tahun 2023

mengalami fluktuasi nilai. Persentase terendah yaitu pada Tahun 2019 sebesar 86,37%, dan kemudian terjadi peningkatan secara konsisten hingga Tahun 2022 mencapai 94,8%. Konsistensi dalam upaya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan perlu terus dilakukan untuk membangun komitmen dalam upaya mewujudkan peredaran pangan yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Bogor melalui peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor berupaya mengkaji isu ketahanan pangan dan pertanian, di mana memunculkan isu strategis yang akan dijadikan bahan penentu kebijakan, hal tersebut diantaranya dengan melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan komitmen produk pertanian dan perikanan dalam menghadapi persaingan global, peningkatan kemampuan SDM pertanian dan perikanan, peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan, pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).

**D. Pertanahan**

**a. Penyelesaian Kasus Tanah Negara**

Penyelesaian kasus tanah negara menjadi cerminan dalam melihat peran badan pertanahan dalam menyelesaikan sengketa tanah negara. Berikut tabel terkait penyelesaian kasus tanah negara di Kota Bogor:

**Tabel 2.4. 25 Penyelesaian Kasus Tanah Negara**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Penyelesaian Kasus Tanah Negara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor 2024*

Berdasarkan data terkait penyelesaian kasus tanah negara dapat di Kota Bogor telah dilaksanakan secara penuh. Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 telah dilakukan penyelesaian 100%. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus tanah negara Di Kota Bogor telah membantu dalam mencapai konsensus dan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan. Meskipun demikian upaya untuk melakukan penyelesaian tanah negara di Kota Bogor perlu dilakukan secara optimal baik dalam memperkuat SDM pengelola aset melalui pembentukan tim kelompok kerja optimalisasi aset tingkat K/L, yang bertugas dalam pengamanan yang belum terdapat pembatas pagar, papan nama, dan lainnya, melakukan

pelaporan kepada pengelolaan barang, melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagai tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan barang, dan usaha-usaha lain untuk menjaga aset negara secara administratif. Selain itu perlu dilakukan koordinasi dengan pengelola barang untuk senantiasa melakukan pengawasan pada aset-aset negara yang sudah diberikan izin, dan perlu adanya penguatan fungsi APP pada penelaahan perencanaan kebutuhan baik pada perhitungan SBSK maupun lainnya.

**E. Lingkungan Hidup**

**a. Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan yang terus dilakukan tidak saja oleh Pemerintah Kota Bogor namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Indeks Kualitas Udara (IKU) dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara di Kota Bogor kepada masyarakat. Perkembangan Indeks Kualitas Air dan Udara di Kota Bogor seperti terlihat dalam grafik di bawah ini.

**Tabel 2.4. 26 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air | 51,67 | 56,33 | 64,72 | 51,39 | 46,67 |

*Sumber: RPJMD 2019-2022 dan RKPD 2024*

Berdasarkan data tabel di atas persentase penyelesaian Indeks Kualitas Air Tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2021 menjadi yang tertinggi dengan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air di Kota Bogor 64,72 persen. Sedangkan terendah yaitu pada Tahun 2022. Menurut Badan Pusat Statistik Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Oleh karena itu, kualitas air di Kota Bogor masih cukup baik meskipun semakin berkurangnya resapan air karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor.

Pemantapan layanan dan kualitas air minum pada periode IV RPJMD 2022 ditunjukkan dengan persentase rumah tangga yang terlayani air minum yang berkualitas dan aman mencapai 94,86% (sangat baik) Persentase Rumah Tangga yang dilayani air minum (Disesuaikan dengan dokumen RISPAM) yang layak didukung oleh

kegiatan yang dilaksanakan PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor. Kualitas dan kuantitas air minum yang dikelola oleh PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga sudah memenuhi syarat kesehatan. Kemudian keterpaduan jaringan utilitas ditunjukkan dengan keterpaduan dan kelengkapan utilitas pendukung seperti utilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang sudah mencapai 100%.

**Tabel 2.4. 27 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara | 81,67 | 80,09 | 99,35 | 98,36 | 95,92 |

*Sumber: RPJMD 2019-2022 dan RKPD 2024*

Indeks Kualitas Udara menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Ketahanan Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Udara dihitung dengan menggunakan satuan angka, berdasarkan data di atas Indeks Kualitas Udara di Kota Bogor mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data tabel di atas, Indeks Kualitas Udara mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan angka mencapai 99,35. Peningkatan nilai ini disebabkan oleh adanya masa pandemi sehingga memaksa masyarakat tidak bisa beraktivitas secara bebas diluar ruangan dan berhentinya aktivitas industri untuk sementara. Sehingga indeks kualitas udara mencapai angka yang memuaskan.

Selanjutnya angka Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan meskipun tidak signifikan akan tetapi angka Indeks Kualitas Udara terbilang cukup tinggi pada tahun 2023 dengan berada di angka 95,92. Faktor penurunan ini dikarenakan saat ini masyarakat sudah beraktivitas secara normal, sehingga aktivitas industri dan mobiliasasi masyarakat berpengaruh terhadap penurunan angka Indeks kualitas Udara. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bogor secara umum mengalami kenaikan poin apabila dilihat dari data Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023.

**b. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**

Timbulan sampah merupakan tempat penumpukan sampah yang ditangani oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Timbunan sampah ini dapat terdiri dari beberapa tipe seperti timbunan sampah terbuka atau tertutup. Pengelolaan timbunan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa sampah tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Pemerintah

Kota Bogor telah berupaya optimal untuk menangani masalah sampah agar dapat tertangani dengan baik dan berdampak baik bagi lingkungan secara berkelanjutan.

**Tabel 2.4. 28 Timbulan Sampah yang Ditangani**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani | 77,04 | 77,20 | 88,85 | 89,15 | 79,03 |

*Sumber: Dokumen RKPD 2024*

Pada data tabel tersebut menunjukkan bahwa bahwa persentase jumlah sampah yang tertangani setiap tahunnya relatif meningkat dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Persentase tertinggi yaitu sebesar 89.15% di tahun 2022. Adanya penambahan armada pengangkut sampah, kuantitas TPS 3R yang cukup mengakomodir penanganan sampah menjadi faktor peningkatan ini. Pada tahun 2022 sebanyak TPS di Kota Bogor berjumlah 28 unit, namun jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R hingga tahun 2022 baru mencapai 7,89%. TPS 3R ini melakukan pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos agar lebih efektif dan efisien dengan kapasitas tamping 5 M3 per unit.

Pada tahun 2022, timbulan sampah di Kota Bogor mencapai 659.653 ton/hari dengan volume sampah yang terangkut ke TPAS sebesar 536,403 ton/hari. Artinya, masih ada 18,68% timbulan sampah yang belum tertangani. Pengelolaan sampah di Kota Bogor masih perlu penanganan yang optimal melalui kebijakan dan kerjasama berbagai level. Adanya kesepakatan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah, baik dari pemerintah yang memfasilitasi alat maupun tempat pengelolaan (meningkatkan kuantitas dan kualitas TPS dan TPA), lembaga atau komunitas dan RT/RW yang memberikan edukasi, *reward* dan wadah bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, hingga masyarakat yang turut serta dalam pengelolaan sampah baik secara mandiri maupun kelompok (bank sampah). Pengelolaan sampah yang berjalan semestinya selalu mengutamakan pada sistem 3R *(reduce, reuse, recycle).*

## F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### a. Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk adalah rasio antara jumlah penduduk yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk)

terhadap jumlah penduduk total dalam suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penetrasi KTP di suatu wilayah. Tingkat penetrasi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah sukses dalam memfasilitasi penerbitan KTP dan memastikan bahwa masyarakat memilikinya.

**Tabel 2.4. 29 Rasio Penduduk ber-KTP Persatuan Penduduk**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | 96 | 98 | 98 | 98 | 100 |

*Sumber: Dokumen RKPD 2024 dan RPJMD 2019-2024 Kota Bogor*

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase tertinggi yaitu secara konsisten terjadi pada Tahun 2020 hingga 2023 sebesar 100 persen. Peningkatan rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Bogor terjadi karena adanya kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang semakin membaik, terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait pemenuhan blangko KTP serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Selain itu dalam data RPJPD Kota Bogor terkait capaian kebijakan administrasi kependudukan menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 97% (3,39 dari target 3,5). Meskipun demikian, upaya untuk mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien perlu terus dioptimalkan.

## G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a. Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran

Rasio bayi ber-akte kelahiran merupakan perbandingan jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran dibanding jumlah bayi di tahun perhitungan. Rasio bayi ber-akte di Kota Bogor, sebagai berikut:

**Tabel 2.4. 30 Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rasio bayi ber-akte kelahiran | 98 | 95 | 93 | 93 | 100 |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor 2023*

Berdasarkan tabel rasio bayi ber-akte kelahiran di Kota Bogor Tahun 2022 terdapat penurunan rasio. Jumlah rasio terbanyak yaitu pada Tahun 2019 sebesar 98, kemudian mengalami penurunan

signifikan rata-rata 2,5% pada Tahun 2020 hingga Tahun 2023, dengan angka terendah yaitu pada Tahun 2021 dan Tahun 2023 sebesar 100. Meskipun penurunannya tidak begitu besar, namun peran dinas terkait sangat menentukan dalam mencatat status dan peristiwa kelahiran bayi yang tentunya menjadi data administrasi penduduk.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendataan terhadap kelahiran bayi melalui akte kelahiran oleh pemerintah daerah Kota Bogor. Upaya sosialisasi secara online melalui berbagai iklan layanan masyarakat baik pada media sosial maupun koran, televisi dan radio menjadi media yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendataan penduduk. Selain itu perlu adanya efisiensi dan efektifitas pelayanan melalui integrasi pelayanan online dengan digitalisasi dokumen dan arsip hasil pelayanan administrasi kependudukan.

Bagi pencatatan akta kelahiran yang terlambat dapat dilakukan upaya pelayanan langsung di kelurahan atau secara jemput bola. Upaya untuk pemberian *feedback* atau pelayanan pendataan kependudukan akta kelahiran dapat selalu ditingkatkan melalui pembentukan saluran hotline pengaduan dan pembentukan dispenduk agen yang bertugas melakukan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi kepada warga masyarakat khususnya di kelurahan di mana dispenduk agent ditugaskan.

**b. Persentase PKK Aktif**

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Persentase PKK aktif mengukur efektivitas program PKK. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa program PKK efektif dan masyarakat memanfaatkan PKK sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar turut serta dalam pembangunan, sedangkan angka yang rendah menunjukkan bahwa ada hambatan dalam program atau kendala yang menghalangi masyarakat dari memanfaatkan layanannya.

**Tabel 2.4. 31 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rata rata jumlah kelompok binaan PKK | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

*Sumber: Dokumen RKPD 2024 dan RPJMD 2019-2024 Kota Bogor*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa PKK aktif di Kota Bogor telah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat melalui PKK di Kota Bogor telah sesuai dengan target yang diharapkan. Jumlah kelompok binaan PKK dan LPM di Kota Bogor pada tahun 2023 sebanyak 75 kelompok, dengan persentase PKK aktif sebesar 100%. Artinya, target di tahun 2023 sudah tercapai. Hal ini terbukti dengan perolehan 329 penghargaan dalam 10 tahun terakhir. Kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah Kota Bogor dalam berbagai program sosial dan keagamaan. Selain itu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui upaya pemberian pemahaman kepada masyarakat dan sebagai bentuk program pendampingan dari DKP melalui kegiatan pemberdayaan sosialisasi dan pembentukan KSM Pengelola Sampah 3R dengan kerjasama PKK Kota Bogor. Peran PKK di Kota Bogor dalam hal ini telah menunjukkan partisipasi yang cukup baik, sehingga diharapkan dapat semakin dioptimalkan, bukan hanya terkait pembangunan fisik.

## H. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

### a. Rasio akseptor KB

Rasio Akseptor KB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi atau penerimaan program Keluarga Berencana (KB) oleh masyarakat. Berikut merupakan tabel rasio akseptor KB pada masyarakat di Kota Bogor

**Tabel 2.4. 32 Rasio Akseptor KB**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rasio akseptor KB | 77,01 | 77,42 | 78,63 | 78,66 | 78,86 |

*Sumber: Dokumen RKPD 2024*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa rasio akseptor KB di Kota Bogor meningkat pada Tahun 2019 hingga 2023. Rasio paling tinggi yaitu pada Tahun 2023 sebesar 78,86, sedangkan rasio paling rendah yaitu pada Tahun 2019 sebesar 77,01. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kota Bogor dalam penerimaan program KB di Kota Bogor cukup tinggi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan pemahaman masyarakat pada program-program KB dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan adanya pembentukan dan pengembangan kampung-kampung KB di Kota Bogor, apresiasi Kampung KB, berbagai kompetisi terkait ketahanan keluarga, pembentukan duta dan berbagai kegiatan

pelatihan dan pembinaan terkait remaja dalam generasi berencana tingkat kota Bogor. Upaya dalam mengembangkan kampung KB yaitu untuk menciptakan keluarga berkualitas tinggi yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup di tingkat kota melalui perencanaan kependudukan, keluarga berencana, dan pengembangan keluarga.

**b. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun**

Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun di Kota Bogor menjadi upaya dalam pengendalian penduduk. Berikut merupakan data terkait Angka pemakaian CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun di Kota Bogor:

**Tabel 2.4. 33 Tabel Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun | 77,01 | 77,42 | 78,63 | 78,66 | 78,86 |

*Sumber: Dokumen RKPD 2024*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun di Kota Bogor meningkat pada Tahun 2019 hingga 2023. Rasio paling tinggi yaitu pada Tahun 2023 sebesar 78,86, sedangkan rasio paling rendah yaitu pada Tahun 2019 sebesar 77,01. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian kontrasepsi/CPR perempuan menikah usia 15-49 Tahun di Kota Bogor cukup tinggi, hal ini ditujukan untuk bisa berdampak pada penurunan angka kepadatan penduduk, penanggulangan kesehatan reproduksi, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

**I. Perhubungan**

**a. Jumlah penumpang angkutan umum di Kota Bogor**

Angkutan Umum menjadi moda transportasi masyarakat. Fasilitasi penyelenggaraan angkutan umum di Kota Bogor perlu dioptimalisasi sebagai perwujudan dalam pelayanan publik. Berikut adalah tabel jumlah penumpang angkutan umum di Kota Bogor:

**Tabel 2.4. 34 Tabel Jumlah Penumpang Angkutan Umum**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah Penumpang Angkutan Umum | 24.060.642 | 22.442.108 | 12.201.950 | 23.069.825 | 30.469.356 |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2024*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penumpang di Kota Bogor menurun pada Tahun 2019 hingga 2021, namun meningkat kembali pada Tahun 2023. Jumlah penumpang paling tinggi yaitu pada Tahun 2019 sebesar 24.060.642, sedangkan jumlah paling rendah yaitu pada Tahun 2021 sebesar 12.201.950. Jumlah penumpang angkutan umum perlu ditingkatkan, untuk meminimalisir kemacetan akibat meningkatnya kendaraan pribadi, serta sebagai upaya dalam menciptakan udara bersih dan menjaga lingkungan. Hambatan yang menyebabkan minimnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum antara lain kenyamanan halte angkutan umum yang digunakan untuk perdagangan dan parkir, rambu halte bus yang tidak sesuai dan hilang, cabang bus menutup jalan, halte rusak/tidak sesuai, konflik dengan sarana transportasi yang ada, vandalisme, lubang, gorong-gorong dan konstruksi jalan sempit.

Sementara itu, terdapat kekurangan dalam pengelolaan sistem angkutan umum (GIZ, 2023) yaitu: (1) pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelenggarakan sistem angkutan umum, (2) kurang optimalnya struktur kelembagaan perkotaan yang kompeten tentang integrasi pengembangan dan pengelolaan moda transportasi administratif dan lintas batas di perkotaan, (3) kurang optimalnya rencana mobilitas perkotaan yang terpadu sebagai landasan penyelenggaraan angkutan umum perkotaan, (4) kurang optimalnya keahlian teknis untuk merencanakan, merancang, melaksanakan secara utuh dan mengoperasikan sistem transportasi umum. Oleh karena itu diperlukan dukungan dan inisiatif dari pemerintah pusat secara umum terhadap pemerintah daerah (termasuk pertukaran pengetahuan, dukungan dan dorongan).

Kota Bogor merupakan kota metropolitan dengan tingkat integrasi yang tinggi dengan wilayah lain karena tingginya konsentrasi lapangan kerja dan berbagai sektor usaha. Berdasarkan data tahun 2016, Kota Bogor menduduki peringkat kelima kota paling padat di Indonesia, hal ini berdampak pada peningkatan penggunaan

transportasi pribadi dan menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor perlu memberikan alternatif solusi permasalahan kemacetan di Kota Bogor dengan melakukan pembenahan transportasi perkotaan untuk mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan nyaman melalui integrasi serta proses reformasi struktur lalu lintas dan transportasi untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum di Kota Bogor. Salah satu angkutan umum yang sering digunakan masyarakat di Kota Bogor adalah angkutan umum. Namun saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang berupaya mengurangi jumlah angkot yang dianggap sebagai sumber kemacetan, dengan menata transportasi menuju transportasi terpadu, menyediakan banyak bus kota dan mendukung fasilitasi akses.

**b. Rasio Izin Trayek**

Rasio izin trayek adalah perbandingan jumlah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang pada jaringan trayek dengan jumlah penduduk suatu daerah. Berikut adalah tabel rasio izin trayek di Kota Bogor:

**Tabel 2.4. 35 Rasio Izin Trayek**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rasio Izin Trayek | 450 | 352 | 71 | 147 | 0,01 |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2024*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa rasio Izin Trayek di Kota Bogor mengalami fluktuasi nilai dari Tahun 2019 hingga 2023. Rasio paling tinggi yaitu pada Tahun 2019 sebesar 450, sedangkan rasio paling rendah yaitu pada Tahun 2021 sebesar 71. Jumlah rasio izin trayek perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mereduksi angkutan umum yang sudah tidak layak pakai, serta meningkatkan kualitas angkutan umum sebagai upaya meningkatkan kenyamanan penumpang. Rasio izin trayek di Kota Bogor sebagai izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang perlu dioptimalkan untuk menjamin keselamatan penumpang.

**c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**

Jumlah uji kir angkutan umum serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta

gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Berikut merupakan data tabel jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Bogor:

Tabel 2.4. 36 Jumlah Uji KIR

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | 5.851 | 4.504 | 5.304 | 2.836 | 2.015 |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2024*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Bogor mengalami fluktuasi nilai dari Tahun 2019 hingga 2023. Jumlah paling tinggi yaitu pada Tahun 2019 sebesar 5.851, sedangkan rasio paling rendah yaitu pada Tahun 2023 sebesar 2.015. Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Bogor masih cukup rendah, sehingga perlu adanya kebijakan terkait implementasi uji KIR angkutan umum yang lebih konsisten sehingga diharapkan dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum, serta sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang diakibatkan asap kendaraan.

**d. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum**

Data ini menganalisis terkait jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Bogor. Data terkait Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum, sebagai berikut:

**Tabel 2.4. 37 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum | 24,261,237 | 16,466,814 | 285.298 | 4.997.09 | 30.469.356 |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2024*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Bogor mengalami fluktuasi pada Tahun 2019 hingga 2023. Jumlah paling tinggi yaitu pada Tahun 2023 sebesar 30.469.356, sedangkan rasio paling rendah yaitu pada Tahun 2022 sebesar 4.997.09. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor berupaya untuk mereduksi angkutan umum yang sudah tidak layak pakai, serta meningkatkan kualitas angkutan umum guna memberikan kenyamanan bagi penumpang dan keamanan bagi barang yang terangkut angkutan umum.

**e. Terminal**

Terminal adalah tempat berhentinya kendaraan bus untuk menaik turunkan penumpang. Umumnya penumpang dapat menaiki bus melalui terminal atau halte bus yang bangunanannya lebih kecil di tepi jalan. Berikut adalah data tabel jumlah terminal di Kota Bogor:

**Tabel 2.4. 38 Jumlah Terminal**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah Terminal | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2024*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah terminal di Kota Bogor menurun. Penurunan jumlah terminal ini dikarenakan adanya penurunan penggunaan dan jumlah transportasi bus di Kota Bogor, oleh karena itu diperlukan optimalisasi fasilitas terminal dan pembenahan transportasi bus kota sebagai transportasi perkotaan yang ramah lingkungan dan nyaman melalui integrasi struktur lalu lintas dan transportasi, serta untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas terminal di Kota Bogor. Pada data capaian arah kebijakan sistem transportasi RPJPD Kota Bogor menunjukkan bahwa upaya rehabilitas dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) sebesar 75%. Oleh karena itu, optimalisasi pemeliharaan terminal memang perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan sistem transportasi di Kota Bogor.

**J. Komunikasi dan Informasi**

**a. Persentase PD yang Menyediakan Data dan Informasi Melalui Media Elektronik/ Persentase Keterbukaan Informasi Publik (RKPD)**

Persentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik/ Persentase keterbukaan informasi publik (RKPD) di Kota Bogor sebagai faktor yang mendukung dalam proses komunikasi dan informasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan optimalisasi. Berikut tabel terkait persentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik/ Persentase keterbukaan informasi publik (RKPD):

**Tabel 2.4. 39 Persentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik/ Persentase keterbukaan informasi publik (RKPD)**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik/ Persentase keterbukaan informasi publik (RKPD) | 100 | 55 | 63 | 95 | 79,8 |

*Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024*

Pada data tabel di atas menunjukkan fluktuasi angka persentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik/ Persentase keterbukaan informasi publik (RKPD) di Kota Bogor Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2019 (100%) menjadi angka paling tinggi persentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik/ persentase keterbukaan informasi publik (RKPD). Sedangkan selanjutnya mengalami penurunan sebesar 45% pada Tahun 2020, namun terjadi kenaikan pada Tahun 2021 sebesar 8%, dan kembali naik pesan sebesar 32% pada Tahun 2022. Sedangkan, tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 79,8. Upaya pemerintah daerah Kota Bogor dalam menyediakan data dan informasi melalui elektronik atau upaya dalam keterbukaan informasi publik semakin tinggi, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya akuntabilitas data.

## K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

### a. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif merupakan perbandingan antara koperasi yang aktif dengan keseluruhan koperasi yang terdaftar. Peran koperasi dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya melalui partisipasi aktif dalam ekonomi. Koperasi dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Tabel 2.4. 40 Persentase Koperasi Aktif 2019-2023**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase Koperasi Aktif (%) | 64,29 | 65,21 | 66,19 | 67,27 | 21,40 |

*Sumber: Dokumen RKPD, 2024*

Data tabel di atas menunjukkan persentase koperasi yang aktif di Kota Bogor. Berdasarkan data tabel di atas angka koperasi yang aktif pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami tren positif, di mana kenaikan rata-rata sebesar 0,994% dalam 4 Tahun. Angka

tersebut menunjukkan bahwa koperasi yang ada di Kota Bogor rata-rata cukup aktif. Peran pemerintah Kota Bogor dalam mendukung keaktifan koperasi melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pembinaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga pemerintah kota telah memiliki payung hukum untuk melakukan pemberdayaan, mengembangkan, dan melindungi koperasi di masyarakat. Namun, pada tahun 2023 persentasenya mengalami penurunan hanya sebesar 21,40.

Pemerintah Kota Bogor tidak hanya memandu kegiatan RAT dan mendorong kemajuan dan perkembangan koperasi secara bertahap, namun juga terus membangun jaringan untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan penting. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi mempunyai prinsip-prinsip yang harus dijalankan antara lain kesukarelaan, demokrasi, transparansi, keadilan dan menjadi solusi kesejahteraan. Panduan pelatihan digitalisasi pelaporan sehingga terbuka akses bagi seluruh anggota. Tantangan yang harus dihadapi koperasi ke depan adalah memasuki era digital. Guna menjawab tantangan era digital, Pemerintah Kota Bogor terus menjalin kerja sama dan percepatan pembangunan dengan Dekopinda, dengan memberikan bimbingan teknis atau pelatihan digital di bidang pembukuan, pemasaran produk, dan lain-lain. Sehingga tujuan koperasi dapat dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, secara tidak langsung dapat mendongkrak perekonomian di Kota Bogor dengan banyaknya koperasi aktif.

## L. Penanaman Modal

### a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi berskala nasional adalah investasi yang dilakukan dalam skala besar di tingkat nasional, yang melibatkan dana yang cukup besar dan memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi suatu negara. Investasi berskala nasional dapat dilakukan oleh berbagai jenis investor, termasuk perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Investasi berskala nasional memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, investasi semacam itu juga memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, serta regulasi dan pengawasan yang memadai untuk memastikan investasi tersebut dilakukan dengan transparan, adil, dan bertanggung jawab.

**Tabel 2.4. 41 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 2.641.381.312.523,23 | 1.603.215.590.165,2 | 618.472.107.486 | 1.571.444.371.677 | 1.175.000.000.000 |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Bogor. Berdasarkan grafik di atas jumlah nilai investasi mencapai angka yang cukup tinggi pada tahun 2019 mencapai angka 2.641.381.312.523 Milyar Rupiah. Selanjutnya pada Tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan, yang dimungkinkan karena pandemi Covid-19 yang berakibat pada sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Namun pada Tahun 2023 mulai terjadi peningkatan kembali. Perkembangan nilai investasi tersebut menunjukkan pada banyak investor yang mulai berinvestasi di Kota Bogor. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi iklim investasi yang baik dan kondusif di Kota Bogor itu sendiri.

## M. Kepemudaan dan Olahraga

### a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Indikator organisasi pemuda yang aktif penting untuk mengevaluasi kinerja dan dampak dari organisasi pemuda tersebut dalam mencapai tujuannya. Indikator-indikator tersebut dapat memberikan gambaran tentang seberapa aktif organisasi pemuda tersebut dalam melakukan kegiatan, seberapa besar dampak yang telah dicapai, serta seberapa besar kontribusinya terhadap pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator organisasi pemuda yang aktif juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekurangan atau potensi perbaikan dalam kinerja organisasi pemuda tersebut dan membantu mengembangkan rencana strategis untuk meningkatkan kinerja dan dampaknya.

**Tabel 2.4. 42 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | 68 | 76 | 18,78 | 20 | 20 |

*Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024*

Data tabel di atas menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Bogor. Berdasarkan grafik di atas angka organisasi pemuda yang aktif di Kota Bogor mengalami fluktuasi nilai dari Tahun 2018 hingga 2021, namun cenderung mengalami penurunan tinggi Tahun 2020 sebesar 57,22% dan naik kembali sebesar 1,22%. Penurunan jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Bogor mengindikasikan bahwa peran pemuda dalam mendukung dan terlibat dalam organisasi atau komunitas di Kota Bogor masih kurang. Serta fasilitasi dari pemerintah Kota Bogor dalam mendukung keaktifan organisasi pemuda belum optimal dilaksanakan.

Oleh karena itu, perlu untuk adanya program atau kebijakan terkait bimbingan pelatihan untuk pemuda baik dalam program pelatihan kerja, pelatihan kepemimpinan, pemberdayaan, dan peningkatan keterampilan. Di sisi lain, partisipasi dalam organisasi sosial kemasyarakatan memungkinkan pemuda untuk berperan aktif dalam membantu masyarakat, memecahkan masalah sosial, dan meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bogor.

**N. Statistik**

Dokumen Kota Bogor dalam angka dan PDRB Kota Bogor menjadi gambaran untuk menganalisis data statistik berbagai sektor. Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kota Bogor Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kota Bogor”. Kedua dokumen tersebut ada di Kota Bogor, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Dalam penyusunan kebijakan dan penyusunan program kegiatan, baik pemerintah, akademisi, lembaga, dan masyarakat bisa menjadikan kedua buku tersebut sebagai rujukan. Ketersediaan dokumen perencanaan Kota Bogor dengan indikator Kota Bogor dalam angka dan PDRB Kota Bogor sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan adanya ketersediaan dokumen tersebut yang akan digunakan sebagai rujukan dalam merancang dan penyusunan program kegiatan.

Selain itu, Metadata Statistik sudah disusun khususnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata Kota Bogor. Di tahun 2022 sebanyak 15 metadata indikator, 32 metadata variabel dan, 3 metadata kegiatan. Sedangkan tahun 2023 sebanyak 54 metadata yang disusun oleh produsen data sektoral di Kota Bogor yang terdiri dari 38 metadata variabel, 13 metadata indikator, dan 3 metadata kegiatan.

## O. Persandian

### a. Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara dengan Baik

Pengamanan Informasi Daerah menjadi komitmen pemerintah Kota Bogor dalam menjamin keamanan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah data pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik:

Tabel 2.4. 43 Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara dengan Baik

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
| Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara dengan Baik | 100 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 77,00 |

*Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024*

Pada data tabel diatas menunjukkan bahwa angka pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik (persandian) di Kota Bogor mengalami fluktuasi data pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Tahun 2019 menjadi persentase paling tinggi pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik (persandian) sejumlah 100. Sedangkan Tahun 2023 menjadi persentase paling rendah yaitu 77,00. Adanya kemungkinan prioritas program penanganan Covid, sehingga berpengaruh pada anggaran dalam pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik (persandian) menjadi faktor penurunan persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik (persandian) di Kota Bogor. Berdasarkan hasil pemetaan arsitektur keamanan di lingkungan Kota Bogor terhadap kebutuhan Metadata Arsitektur Keamanan SPBE, diperoleh keadaan yang menunjukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan keamanan SPBE, diantaranya yaitu standar keamanan serta peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sudah ada namun belum diketahui dan dipetakan sebagai acuan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).

Sementara untuk standar keamanan internasional yang digunakan sebagai pendukung peningkatan penerapan keamanan SPBE belum ditemukan. Regulasi lainnya dari beberapa peraturan pemerintah terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sudah ada namun belum diketahui sejauh mana penerapannya di lingkungan Kota Bogor, selain itu dalam penerapan keamanan informasi, kegiatan penerapan keamanan hanya ditemukan dua

kegiatan pada sosialisasi edukasi kesadaran keamanan dan kerentanan keamanan SPBE. Belum ditemukan bentuk kegiatan lain untuk meningkatkan keamanan serta penanganan insiden keamanan SPBE. Oleh karena itu pemerintah Kota Bogor perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi sistem di pemerintahan Kota Bogor.

**P. Kebudayaan**

**a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Festival seni dan budaya di Kota Bogor sebagai ajang promosi budaya yang harus terus dikembangkan. Kolaborasi dan kerjasama berbagai sektor dalam mengembangkan budaya melalui peran masing-masing dalam perkembangan budaya menjadi faktor pendukung berkembangnya budaya di Kota Bogor. Berikut adalah data terkait penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Bogor:

**Tabel 2.4. 44 Penyelenggaraan festival seni dan budaya**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 59 | 24 | 21 | 36 | 41 |

*Sumber: Dokumen RKPD Tahun 2024 Kota Bogor*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa angka penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami fluktuasi data pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Tahun 2019 menjadi angka paling tinggi penyelenggaraan festival seni dan budaya sejumlah 59, lalu turun rata-rata sebesar 19 pada Tahun 2020 hingga Tahun 2021, dan naik kembali pada Tahun 2022 sebesar 15. Penurunan angka pada 2 tahun, yaitu 2020 hingga 2021 menunjukkan perlunya pengembangan budaya melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya, namun pada Tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan. Artinya, pengembangan budaya melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Bogor harus dioptimalkan untuk mempertahankan karakter daerah, dan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat melalui wisata seni dan budaya. Festival Cap Go Meh dan Helaran Budaya dalam rangka Hari Jadi Bogor menjadi agenda rutin setiap tahunnya.

**b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)**

Benda, situs dan kawasan cagar budaya harus dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan

potensi budaya daerah. Berikut adalah data benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) di Kota Bogor:

**Tabel 2.4. 45 Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) | 24 | 32 | 32 | 32 | 25 |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Tahun 2024 Bogor*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan mengalami peningkatan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2022. Tahun 2020 hingga Tahun 2022 menjadi angka paling tinggi penyelenggaraan festival seni dan budaya dengan kenaikan sebesar 8. Konsistensi data terkait benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Kota Bogor menunjukkan bahwa ada upaya untuk melindungi dari kemusnahan, kerusakan, kehancuran baik melalui pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan, dan pemugaran. Pemantapan penataan kota yang beridentitas dan berbudaya ditunjukkan dengan program pengembangan kebudayaan melalui event atau festival serta karya seni dengan tingkat ketercapaian pada paruh waktu periode IV (2022) sebesar 21 event dari 17 target vent atau 124% (sangat baik), kemudian program pelestarian dan pengelolaan cagar dengan ketercapaian 100%. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 25%.

## Q. Perpustakaan

### a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Kunjungan ke perpustakaan bisa menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan, namun tidak satunya-satunya indikator untuk menilai kualitas perpustakaan. Beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas perpustakaan antara lain koleksi buku dan materi lainnya, ketersediaan dan kemudahan akses ke sumber daya digital, kualitas layanan dan program yang ditawarkan, kecukupan dan keterampilan staf, ketersediaan dan kualitas fasilitas dan lingkungan perpustakaan, serta sejauh mana perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan penggunanya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang holistik untuk menilai kualitas perpustakaan yang mencakup beberapa aspek tersebut.

**Tabel 2.4. 46 Jumlah Pengunjung Perpustakaan**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 28.790 | 9.601 | 1.084 | 5.249 | 99.615 |

*Sumber: Dokumen RKPD Tahun 2024 Kota Bogor*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami penurunan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021. Rata-rata penurunan yang terjadi pada Tahun 2020 hingga Tahun 2021 yaitu sebesar 13.853 hal ini menunjukkan adanya penurunan pengunjung secara drastis dikarenakan adanya regulasi terkait pandemi Covid 19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu dimungkinkan masih rendahnya minat baca masyarakat, keragaman buku baru koleksi perpustakaan belum mampu memenuhi permintaan pengunjung, dampak perkembangan teknologi informasi. Meskipun pada tahun 2023 berikutnya mengalami peningkatan, namun upaya untuk meningkatkan kunjungan di perpustakaan perlu dilakukan. Keberadaan Gedung Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor yang dibangun Tahun 2022 diharapkan dapat menambah kunjungan ke Perpustakaan Kota Bogor. Selain itu diperlukan fasilitasi dalam penambahan koleksi buku, layanan internet, kemudahan akses digital baik e-book, jurnal, dan lainnya. Program-program penunjang untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan perlu ditingkatkan baik di lingkungan perpustakaan daerah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

**b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah bisa menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan, namun tidak satunya-satunya indikator untuk menilai kualitas perpustakaan. Beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas perpustakaan antara lain koleksi buku dan materi lainnya, kemudahan akses ke sumber daya digital, kualitas layanan dan program yang ditawarkan, kecukupan dan keterampilan staf, ketersediaan dan kualitas fasilitas dan lingkungan perpustakaan, serta sejauh mana perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan penggunanya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang holistik untuk menilai kualitas perpustakaan yang mencakup beberapa aspek tersebut.

**Tabel 2.4. 47 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 75.705 | 77.684 | 77.648 | 78.354 | 80.834 |

*Sumber: Dokumen RPJMD dan RKPD Kota Bogor*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Tahun 2023 menjadi angka paling tinggi jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sejumlah 80.834. Sedangkan nilai paling rendah yaitu Tahun 2019 sejumlah 75.705. Peningkatan tersebut sebagai wujud dalam usaha meningkatkan bahan literasi bagi masyarakat dan meningkatkan kunjungan di perpustakaan. Untuk koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Bogor diantaranya yaitu karya umum, filsafat, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan, seni dan olahraga, kesastraan, sejarah dan geografi, kanak- kanak, referensi, fiksi, sumbangan, dan hibah Perpusnas.

**c. Rasio Perpustakaan per 1000 Penduduk**

Data terkait rasio perpustakaan per 1000 penduduk menjadi analisa dalam melihat ketersediaan perpustakaan dalam melayani masyarakat Kota Bogor per 1000 orang, di mana ketersediaan perpustakaan ini secara kuantitas idealnya bisa menjadi pelayanan publik yang merata bagi masyarakat di Kota Bogor untuk mendapatkan akses pendidikan di luar pendidikan formal.

**Tabel 2.4. 48 Rasio perpustakaan per 1000 penduduk**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rasio perpustakaan per 1000 penduduk | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 8,96 | 0,44 |

*Sumber: Dokumen RPJMD dan RKPD Kota Bogor*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa rasio perpustakaan per 1000 penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Tahun 2019 sejumlah 0,001, Tahun 2020 sejumlah 0,001, tahun 2021 sejumlah 0,0001 dan naik pada Tahun 2022 sejumlah 8,69. Kenaikan angka ketersediaan perpustakaan per 1000 penduduk menunjukkan adanya keseriusan dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM masyarakat Kota Bogor. Ketersediaan perpustakaan harus dibarengi oleh peningkatan fasilitas dan program untuk

efektifitas dan efisiensi pelayanan perpustakaan di Kota Bogor. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,44.

**R. Kearsipan**

**a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku**

Pengelolaan arsip secara baku merujuk pada proses atau sistematisasi yang konsisten dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dengan mengikuti standar atau pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, keamanan, dan aksesibilitas arsip dalam jangka waktu yang lama. Standar-standar tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis arsip dan kebutuhan organisasi atau instansi yang melakukan pengelolaan arsip.

**Tabel 2.4. 49 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%) | 70 | 13 | N/A | 58 | 41,7 |

*Sumber: Dokumen RKPD Tahun 2023-2024 Kota Bogor*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa angka perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Bogor mengalami fluktuasi pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Penurunan terjadi pada tahun 2019 sebesar 70%, lalu mengalami penurunan pada hingga tahun 2023 sebesar 41,7%. Hal ini menjadi angka paling tinggi dalam persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Adanya penurunan pada Tahun 2020 akibat kondisi pandemi yang menyebabkan terganggunya pelayanan kearsipan.

Untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik maka diperlukan pengelolaan kearsipan elektronik secara menyeluruh, untuk menghindari kerusakan, kehilangan, dan lamanya pencarian arsip yang tersimpan secara manual. Selain itu pengelolaan kearsipan secara elektronik dapat meningkatkan keamanan karena mekanisme kontrol secara jelas dicantumkan pada buku pedoman pengarsipan secara elektronis, maka orang yang tidak mempunyai otorisasi relatif sulit untuk mengaksesnya.

**b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**

Sumber Daya manusia pengelola kearsipan perlu untuk ditingkatkan agar menunjang dan meningkatkan kualitas kinerja.

Tidak tersedianya sumber daya Arsiparis yang kompeten menjadi salah satu permasalahan yang ada di di bidang urusan kearsipan Kota Bogor. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui program pelatihan SDM pengelola kearsipan agar mampu mengelola arsip sesuai standar dan berkualitas.

**Tabel 2.4. 50 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan) | 109 | 75 | 2 | 43 | 100 |

*Sumber: Dokumen RKPD Tahun 2023-2024 Kota Bogor*

Berdasarkan data tabel terkait peningkatan SDM pengelola Kearsipan di Kota Bogor cenderung mengalami penurunan drastis dari Tahun 2019 hyaitu sebesar 109 SDM, menjadi 43 SDM tahun 2022. Peningkatan jumlah SDM pengelola kearsipan di Kota Bogor pada Tahun terakhir yaitu Tahun 2023 menunjukkan bahwa upaya untuk optimalisasi pengelolaan kearsipan di Pemerintah Daerah Kota Bogor, sehingga diharapkan lebih efektif dan efisien. Perlu adanya kerjasama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip elektronik dan alih media arsip, meliputi Unit Kerja yang memiliki tugas melakukan urusan tata usaha, Unit Pengolah, Unit Kearsipan, Pejabat Fungsional Arsiparis. Peningkatan pemahaman dan inovasi SDM pengelola kearsipan perlu dilakukan melalui berbagai pelatihan, sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja dalam pengelolaan kearsipan.

### 2.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

### A. Pariwisata

### a. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah, atau kegiatan rekreasi lainnya.

**Tabel 2.4. 51 Kunjungan Wisata**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan | 6,367,303 | 2.500,000 | 3,734,340 | 5,174,317 | 5.650.637 |

*Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2024*

Berdasarkan data tabel terkait kunjungan wisata di Kota Bogor memiliki angka fluktuatif. Kunjungan paling tinggi yaitu terjadi pada Tahun 2019, dengan kunjungan paling rendah pada Tahun 2020 dengan penurunan diakibatkan pandemi COVID-19, di mana adanya kebijakan *lockdown* di berbagai lokasi, dan adanya kebijakan jaga jarak hal. Pertumbuhan jumlah wisatawan semakin berkembang pada Tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bogor memiliki potensi pariwisata yang dapat mendukung pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat di Kota Bogor. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan fasilitas dan pengembangan daya tarik wisata dengan mengoptimalkan peran serta para pengusaha pariwisata Kota Bogor (ODTW). Pengembangan pariwisata dilakukan oleh Dinas Seni, Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan PHRI, ASITA, HPI. Pengelola ODTW Istana Bogor, Kebun Raya Bogor, Sanggar Seni, BKKNI. Museum dan instansi terkait bertujuan untuk meningkatkan fasilitas, mengembangkan daya tarik wisata, dan mempromosikan daya tarik wisata.

Tempat wisata utama di Kota Bogor antara lain Kebun Raya, Museum Zoologi dan Istana Bogor. Hal ini diukur dari kunjungan wisatawan ke tempat-tempat tersebut yang relatif lebih tinggi dibandingkan kunjungan ke tempat wisata lainnya. Selain tempat wisata utama di Kota Bogor, ada beberapa tempat yang dapat dikembangkan menjadi tempat wisata, antara lain Wisata Perdesaan di Desa Cikaret Pancasan Bogor, Taman Penelitian Tanaman Obat Industri Cimanggu, Kawasan Perdesaan Situ Gede dan pusat penelitian lainnya. Pengembangan Kampung Wisata seperti Kampung Wisata Mulyaharja dan Kampung Wisata Perca menjadi data tarik wisata baru. Selain mengunjungi tempat wisata tersebut, wisatawan di Kota Bogor juga memiliki potensi ekonomi pada pusat kuliner jajanan dan buah-buahan serta factory outlet pakaian dan koper seperti Jalan Suryakencana, Siliwangi, Pajajaran dan Tajur, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu Idul Fitri dan hari libur. Oleh karena itu pengembangan sektor pariwisata di Kota Bogor perlu ditingkatkan untuk menambah pendapatan masyarakat dan daerah.

**B. Pertanian**

**a. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB**

Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk dalam menentukan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara. Berikut adalah beberapa kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB:

Tabel 2.4. 52 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Tahun 2019-2023

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kontribusi Sub Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB | 0,66 | 0,69 | 0,70 | 0,706 | 0,68 |

*Sumber: BPS Kota Bogor, 2023*

Berdasarkan tabel data kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Meskipun mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, nilai kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB masih sangat kecil. Hal tersebut karena terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian yang terjadi di Kota Bogor yaitu Tingkat sosialisasi dan pelatihan masyarakat mengenai pengolahan pangan subtanaman dan tepung umbi lokal masih rendah, ketersediaan benih berkualitas rendah, ketersediaan sarana produksi pertanian dan peternakan rendah, ketersediaan air dan lahan pertanian masih tinggi, risiko hama dan penyakit tanaman, mutu dan daya saing produk pertanian masih rendah, surveilans penyakit hewan masih rendah, jumlah dokter hewan dan perawat hewan serta pelayanan kesehatan hewan masih rendah, mutu produk hewan masih rendah, dan kemampuan tenaga utama dan badan usaha di bidang pertanian masih rendah, serta tingkat pengelolaan balai penyuluhan teknologi pertanian masih rendah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah daerah Kota Bogor dan kerjasama pentahelix untuk meningkatkan kontribusi pertanian dan perikanan dalam pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi rencana pertanian organik secara keseluruhan, mengatur penggunaan lahan dengan menetapkan kawasan lahan permanen yang dilindungi secara hukum, memperkuat sistem kelembagaan pertanian dan pendidikan petani, termasuk program insentif pertanian, program bank pertanian, mengembangkan pasar dan jaringan pemasaran untuk mendukung petani, mengembangkan industrialisasi pertanian/pedesaan, dan mendorong akses terhadap sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memperbaiki infrastruktur pertanian dan meningkatkan teknologi tepat guna, memperoleh wawasan kearifan lokal, dan memaksimalkan pemanfaatan temuan penelitian dari ilmuwan lokal, meningkatkan

kualitas dan kesejahteraan penyuluh pertanian, dan adanya pelatihan dan pemagangan (retoling) keterampilan hidup, keterampilan kewirausahaan dan kemandirian pertanian bagi generasi muda dan masyarakat luas.

## C. Perdagangan

### a. Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Sub sektor perdagangan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara. Berikut adalah beberapa kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB:

**Tabel 2.4. 53 Kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran | 20,31 | 19,52 | 19,22 | 19,11 | 19,23 |

*Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dan RKPD Kota Bogor Tahun 2024*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa angka kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran di Kota Bogor pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Tahun 2019 menjadi angka paling tinggi kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran yang kemudian turun sebesar 0,79% (19,52) pada Tahun 2020, dan selanjutnya mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,3% (19,22) pada Tahun 2021, 0,11 (19,11) pada Tahun 2022, dan 0,12 (19,23) pada Tahun 2023. Adanya tren penurunan kontribusi terhadap PDRB oleh sektor perdagangan yang memiliki karakteristik daya saing rendah dan pertumbuhan yang lambat. Pada subsektor perdagangan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat Kota Bogor sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga berimplikasi pada angka produksi dan daya beli masyarakat Kota Bogor. Oleh karena itu untuk memaksimalkan kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran diperlukan peningkatan ekspor dan investasi, serta adanya peningkatan konsumsi rumah tangga.

**b. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran**

Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran menjadi peran penting dalam mendukung sektor ekonomi. Berikut adalah beberapa laju PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran:

**Tabel 2.4. 54 Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran | 3,85 | -7,77 | 2,72 | 5,38 | 3,20 |

*Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan RKPD Kota Bogor Tahun 2024*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran di Kota Bogor mengalami fluktuasi nilai pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Tahun 2022 menjadi angka paling tinggi pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan kenaikan 2,66% (5,38). Sedangkan pada Tahun 2020 menjadi nilai paling rendah dengan adanya penurunan 11,62% (-7,77), hal ini dikarenakan pengaruh pandemi Covid-19 yang menyebabkan berbagai sektor, termasuk ekonomi mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor menunjukkan kategori sektor ekonomi tersier di mana bertumpu pada sektor-sektor non produksi, terutama mengandalkan perekonomian pada kategori jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Sektor industri dan perdagangan ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan PDRB di Kota Bogor.

**D. Perindustrian**

**a. Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB**

Sub sektor industri pengolahan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara. Berikut adalah beberapa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB:

**Tabel 2.4. 55 Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB**

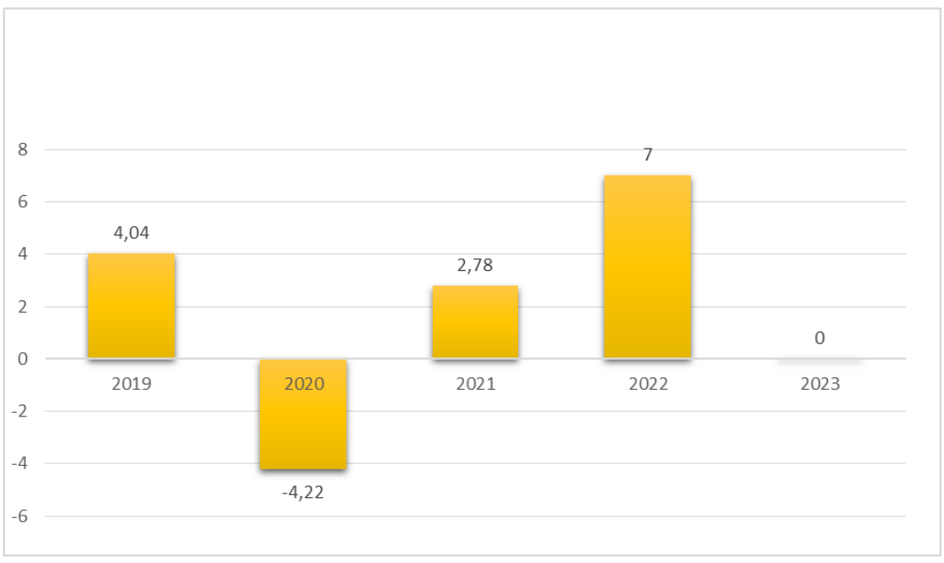
| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB | 18,07 | 18,04 | 19,16 | 18,98 | 18,53 |

*Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan RKPD Kota Bogor Tahun 2024*

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan di Kota Bogor cenderung fluktuatif pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Tahun 2021 menjadi angka paling tinggi kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan dengan kenaikan 1,12% (19,16). Selanjutnya pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 18,53. Penguatan sub sektor industri terhadap penerimaan PDRB di Kota Bogor perlu terus diupayakan dengan membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah) di Kota Bogor.

Data terkait kontribusi sub sektor industri pengolahan di Kota Bogor dapat dilihat pada indikator capaian kinerja daerah pada laju pertumbuhan industri Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan gambar diagram laju pertumbuhan industri Provinsi Jawa Barat:

**Gambar 2.4. 4 Pertumbuhan Industri di Provinsi Jawa Barat**




*Sumber: RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026*

Data terkait laju pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi. Angka laju pertumbuhan paling tinggi yaitu pada Tahun 2022 yaitu sebesar 7 persen. Sedangkan paling rendah yaitu pada Tahun 2019 sebesar -4,22 persen. Dampak pandemi masih

menjadi faktor turunnya laju pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Barat, namun hingga Tahun 2022 terus berkembang karena pertumbuhan industri, dan daya dukung pada letak geografis, dan infrastruktur yang lebih baik, dan sumber daya manusia yang unggul di Provinsi Jawa Barat.

### 2.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

#### A. Perencanaan Pembangunan

#### a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

**Tabel 2.4. 56 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa salah satu indikator perencanaan pembangunan di Kota Bogor pada tahun 2019 hingga tahun 2023 tentang tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA telah terpenuhi, yaitu Perda No. 7 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Bogor Tahun 2005 – 2025.

#### b. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penting

bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa RPJMD dan PERDA/PERKADA tersebut tersedia bagi masyarakat dan mudah diakses. Ini membantu masyarakat dalam memahami visi dan misi pembangunan daerah, dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

**Tabel 2.4. 57 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | N/A |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa salah satu indikator perencanaan pembangunan di Kota Bogor pada tahun 2019 hingga tahun 2023 tentang tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA telah terpenuhi, yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

**c. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA**

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan RPJMD. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa RKPD dan PERKADA tersebut tersedia bagi masyarakat dan mudah diakses. Ini membantu masyarakat dalam memahami program dan kegiatan pemerintah daerah, dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

**Tabel 2.4. 58 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian perencanaan pembangunan Kota Bogor tahun 2019 tahun 2023 tentang tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA yakti RKPD Murni dan RKPD Perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Bogor No. 31 Tahun 2019 tentang RKPD Kota Bogor tahun 2020.
2. Peraturan Walikota Bogor No. 70 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor No. 31 Tahun 2019 tentang RKPD Kota Bogor tahun 2020.
3. Peraturan Walikota Bogor No. 62 Tahun 2020 tentang RKPD Kota Bogor tahun 2021.
4. Peraturan Walikota Bogor No. 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor No. 62 Tahun 2020 tentang RKPD Kota Bogor tahun 2021.
5. Peraturan Walikota Bogor No. 83 Tahun 2021 tentang RKPD Kota Bogor tahun 2022.
6. Peraturan Walikota Bogor No. 88 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor No. 83 Tahun 2021 tentang RKPD Kota Bogor tahun 2022.
7. Peraturan Walikota Bogor No. 73 Tahun 2022 tentang RKPD Kota Bogor tahun 2023.
8. Peraturan Walikota Bogor No. 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bogor No. 73 Tahun 2022 tentang RKPD Kota Bogor tahun 2023.

**d. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RTRW yang ditetapkan dengan PERDA memastikan bahwa perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam

memastikan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan RPJMD. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa RTRW dan PERDA tersebut tersedia bagi masyarakat dan mudah diakses. Ini membantu masyarakat dalam memahami arah pembangunan wilayah dan pengelolaan ruang wilayah, dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

**Tabel 2.4. 59 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | 99.84 | 100 | 100 | 64,66 | 60 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kota Bogor tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW sebanyak 99,84. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 naik menjadi 100, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 64,66, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 60.

**B. Keuangan**

**a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam menilai dan memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah. BPK memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini BPK sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, karena memberikan informasi tentang keandalan dan keakuratan laporan keuangan pemerintah. Opini BPK juga memberikan dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi dan memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan capaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2019 hingga 2023 selalu WTP.

**b. Persentase SILPA terhadap APBD**

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rasio antara SILPA dan APBD, yang

menunjukkan seberapa besar sisa anggaran pemerintah setelah penerimaan dan pengeluaran dikurangi.

**Tabel 2.4. 60 Persentase SILPA terhadap APBD**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase SILPA terhadap APBD | 8,84 | 11,90 | 11,31 | 8 | 5,11 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase SILPA terhadap APBD di Kota Bogor pada tahun 2019 hingga tahun 2023 juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 persentase SILPA terhadap APBD sebesar 8,84 dan pada tahun 2020 naik menjadi 11,90. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 11,31 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 5,11.

**c. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana**

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana adalah rasio antara jumlah program/kegiatan yang tidak terlaksana dan jumlah program/kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana harus diperhatikan secara hati-hati oleh pemerintah dan masyarakat, karena dapat mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta dapat mempengaruhi realisasi pembangunan suatu daerah.

**Tabel 2.4. 61 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase program atau kegiatan yang tidak terlaksana di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sebanyak 0. Hal tersebut membuktikan bahwa seluruh program di Kota Bogor sudah terlaksana.

**d. Persentase Belanja Pendidikan**

Belanja pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Dalam hal ini, persentase belanja pendidikan sebesar 20% adalah rasio antara belanja pendidikan dan total belanja pemerintah. Angka ini

menunjukkan seberapa besar prioritas pemerintah dalam mengelola pengeluaran untuk pendidikan. Semakin besar angka ini, menunjukkan bahwa pemerintah memberikan prioritas yang tinggi terhadap pendidikan dan memperhatikan peran pendidikan dalam pembangunan suatu daerah.

**Tabel 2.4. 62 Persentase Belanja Pendidikan**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase belanja Pendidikan | 24,35 | 21,15 | 21,74 | 19 | 20,04 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase belanja pendidikan di Kota Bogor berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2019 persentase belanja pendidikan di Kota Bogor sebanyak 24,35. Pada tahun 2020 sebanyak 21,25. Pada tahun 2021 sebanyak 21,74, pada tahun 2022 sebanyak 19, dan pada tahun 2023 sebanyak 20,04.

**e. Persentase Belanja Kesehatan**

Belanja kesehatan merupakan salah satu kategori belanja dalam APBD yang memiliki andil 10% dalam total belanja pemerintah. Belanja kesehatan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan kesehatan, seperti penyediaan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain.

**Tabel 2.4. 63 Persentase Belanja Kesehatan**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase belanja Kesehatan | 22,45 | 21,7 | 24,77 | 17,88 | 11,56 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase belanja kesehatan di Kota Bogor berbeda setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 persentase belanja kesehatan sebanyak 22,45. Pada tahun 2020 sebanyak 21,7. Di tahun 2021 mencapai 24,77, tahun 2022 sebanyak 17,88, dan tahun 2023 sebanyak 11,56.

**f. Penetapan APBD**

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu suatu dokumen yang menjabarkan estimasi pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran. APBD juga merupakan alat

perencanaan dan pengendalian keuangan daerah yang digunakan untuk memastikan bahwa sumber daya daerah digunakan dengan efektif dan efisien. Penetapan APBD dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah dan harus disetujui oleh DPRD setempat. Proses penetapan APBD melibatkan beberapa tahapan, seperti perencanaan, penyusunan, dan penyetujuan. Berdasarkan capaian indikator penetapan APBD pada tahun 2019 hingga tahun 2022, yaitu tepat waktu.

## C. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

### a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai formasi dan kompetensi merupakan salah satu indikator kepegawaian yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4. 64 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perubahan. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan pendidikan dan pelatihan di Kota Bogor sebanyak 1 Jam Pelajaran, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 20 Jam Pelajaran.

### b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Berikut merupakan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

**Tabel 2.4. 65 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 93,44 | 94,12 | 94,4 | 95,39 | 89 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 93,44. Pada tahun 2020 sebanyak 94,12. Pada tahun 2021 sebanyak 94,4. Dan pada tahun 2022 sebanyak 95,39. Sedangkan, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 89.

**c. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**

Berikut merupakan tabel persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Bogor pada tahun 2019 hingga tahun 2023.

**Tabel 2.4. 66 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 75 | 52,72 | 60,92 | 51,50 | 93 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Bogor pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perubahan. Pada tahun 2019 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Bogor sebanyak 75. Pada tahun 2020 sebanyak 52,72. Pada tahun 2021 sebanyak 60,92, pada tahun 2022 sebanyak 51,50, pada tahun 2023 sebanyak 93.

**d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**

Berikut merupakan tabel jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

**Tabel 2.4. 67 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sebanyak 35.

**e. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah**

Berikut merupakan tabel jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel 2.4. 68 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | 155 | 157 | 153 | 150 | 150 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami perubahan. Pada tahun 2019 jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kota Bogor sebanyak 155. Pada tahun 2020 sebanyak 157. Pada tahun 2021 sebanyak 153, serta pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 150.

**f. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintahan**

Berikut merupakan tabel jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

**Tabel 2.4. 69 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintahan**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan | 3875 | 3651 | 3759 | 4015 | 4723 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan di

Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perubahan. Dari tahun 2019 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan sebanyak 3875. Pada tahun 2020 sebanyak 3651, pada tahun 2021 sebanyak 3759, pada tahun 2022 sebanyak 4015, pada tahun 2023 sebanyak 4723.

## D. Pengawasan

### a. Persentase Temuan yang Ditidaklanjuti

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.4. 70 Persentase temuan yang ditindaklanjuti

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase temuan yang ditidaklanjuti | 100 | 100 | 100 | 93,81 | 100 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase temuan yang ditindaklanjuti di Kota Bogor pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 93,81 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 hingga tahun 2021 sebanyak 100. Namun, tahun 2023 kembali mengalami kenaikan sebanyak 100.

## E. Penelitian dan Pengembangan

### a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Penelitian dan pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Perkembangan Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan digambarkan seperti tabel berikut

**Tabel 2.4. 71 Persentase implementasi rencana kelitbangan**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase implementasi rencana kelitbangan | 125 | 100 | 100 | 100 | 87,44 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kota Bogor pada tahun 2019 sebanyak 125 dan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebanyak 100. Namun, terdapat tren penurunan pada tahun 2023 menjadi 87,44.

**b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**

Berikut merupakan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

**Tabel 2.4. 72 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | 68 | 100 | 100 | 100 | 96,5 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pemanfataan hasil kelitbangan di Kota Bogor pada tahun 2019 sebanyak 68 dan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 naik menjadi 100. Namun, terdapat tren penurunan pada tahun 2023 menjadi 96,5.

**c. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah**

Berikut merupakan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

**Tabel 2.4. 73 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 45,96 | 78,3 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kota Bogor pada tahun 2019 sebanyak 45,96. Pada tahun 2020 sebanyak 78,3 dan pada tahun 2021 hingga 2023 sebanyak 97,6.

**e. Persentase Kebijakan Inovasi yang Ditetapkan di Daerah**

Berikut merupakan persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

**Tabel 2.4. 74 Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah | 84,45 | 100 | 100 | 100 | 91,24 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah Kota Bogor pada tahun 2019 sebanyak 84,45 dan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebanyak 100. Namun, terdapat tren penurunan pada tahun 2023 menjadi 91,24.

**F. Sekretariat Daerah**

**a. Nilai SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bogor. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

**Tabel 2.4. 75 Nilai SAKIP**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Nilai SAKIP | BB | BB | BB | BB | BB |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Nilai SAKIP yang terdapat di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah BB.

**b. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Hasil evaluasi menggambarkan kinerja dari pemerintah daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

**Tabel 2.4. 76 Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 3,1 | N/A | N/A | N/A | 69,48 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Bogor pada tahun 2019 adalah 3,1. Kemudian pada tahun 2023 menjadi 69,48.

### G. Sekretariat DPRD

Peran pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kerja DPRD secara keseluruhan. Beberapa aspek yang dapat diukur untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD melibatkan fungsi dan layanan yang disediakan oleh lembaga tersebut. Berikut adalah capaian indikator kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Bogor:

Tabel 2.4. 77 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bogor

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Sekretariat DPRD Kota Bogor pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 telah melaksanan capaian fungsi baik pada penyediaan rencana kerja, pengintegrasian program kerja melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, serta dalam pelaksanaan program. Sekretariat DPRD Kota Bogor telah bertanggung jawab dalam menyediakan dukungan administratif dan teknis bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

## 2.4.5 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2020-2023

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah serta untuk mengoptimalkan pembangunan yang terdapat di Kota Bogor, maka perlu diperhatikan capaian indikator makro pembangunan Kota Bogor Tahun 2020-2022.

**Tabel 2.4. 78 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2020-2023**

| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 76.11 | 76.59 | 77.17 | 78,36 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Penduduk | 0.91 | 1.19 | 1.12 | 2,07 |
| 3 | Persentase Penduduk Miskin | 6.68 | 7.24 | 7.10 | 6,67 |

| No | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 12.68 | 11.79 | 10.78 | 9,39 |
| 5 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | -0.41 | 3.76 | 5.65 | 5,65 |
| 6 | Indeks Gini | 0.412 | 0.441 | 0.430 | 0,464 |

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia

   Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bogor pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bogor sejumlah 76,11. Pada tahun 2021 sejumlah 76,59, pada tahun 2022 sejumlah 77,17, dan pada tahun 2023 naik kembali sejumlah 78,36.

0. Laju Pertumbuhan Penduduk

   Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bogor pada tahun 2020 sejumlah 0,91. Pada tahun 2021 sejumlah 1,1, pada tahun 2022 sejumlah 1,12, sedangkan tahun 2023 terdapat peningkatan sejumlah 2,07.

0. Persentase Penduduk Miskin

   Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor pada tahun 2020 sejumlah 6,68. Pada tahun 2021 sejumlah 7,24 dan pada tahun 2022 sejumlah 7,10. Dan pada tahun 2023 Persentase Penduduk Miskin berjumlah 6,67%. Peningkatan penduduk miskin terjadi di tahun 2020 yang pada saat itu terjadi wabah covid19 sehingga berdampak pada seluruh aspek khususnya kesejahteraan masyarakat yang akhirnya berujung pada peningkatan penduduk miskin.

0. Tingkat Pengangguran Terbuka

   Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bogor pada tahun 2020 sejumlah 12,68. Pada tahun 2021 sejumlah 11,79. Dan pada tahun 2022 sejumlah 10,78 dan pada tahun 2023 berada di angka 9,39. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bogor menunjukkan penurunan di setiap tahunnya. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka yang disebabkan adanya pandemi covid19 Indonesia, akan tetapi di tahun 2022 sudah mulai membaik.

0. Laju Pertumbuhan Ekonomi

   Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor pada tahun 2020 sebanyak -0,41. Pada tahun 2021 sejumlah 3,76 dan pada

tahun 2022 dan 2023 sejumlah 5,65. Laju Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya.

0. Indeks Gini

   Indeks Gini di Kota Bogor pada tahun 2020 sejumlah 0.412. Pada tahun 2021 sejumlah 0.441 dan pada tahun 2022 sejumlah 0.430. Sedangkan, pada tahun 2023 sejumlah 0,464. Adanya pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan Indeks Gini meningkat.

### 2.4.6 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2020-2021

Dasar hukum pelaksanaan TPB di Indonesia mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) menjadi acuan pembangunan nasional dan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Tujuan Badan Perencanaan Kota adalah menjaga pertumbuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif, serta melaksanakan tata kelola yang dapat menunjang perbaikan masyarakat. Kualitas hidup dari generasi ke generasi. Implementasi prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu melalui prinsip universal, komprehensif dan inklusif untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal atau “no one is left behind”. TPB terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 sasaran spesifik, yang bertujuan untuk melanjutkan upaya dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDG, diantaranya yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Laporan Evaluasi dan Monitoring SDGs Tahun 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, diperoleh gambaran pelaksanaan SDGs, sebagai berikut:

Pada Tujuan 1, upaya untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun menghadapi tantangan berupa kenaikan penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sebesar 1,46. Selain itu, usaha untuk menekan tingkat kemiskinan telah diupayakan melalui dorongan proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan yang menunjukkan tren capaian kenaikan sebesar 90,31 dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun

berjalan. Selain itu jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan semakin menurun dari tahun 2020 sebesar 30,443 menjadi 29,199 di Tahun 2021, sedangkan pada pembangunan akses sumber daya air minum layak mengalami penurunan dari Tahun 2020 sebesar 81,46 menjadi 68,49 di Tahun 2021, sama halnya pada upaya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi menunjukkan ketercapaian antara target sebesar 70,42 dengan capaian sebesar 75,1.

Tujuan Pembangunan 2 upaya untuk menghilangkan kelaparan, menghadapi tantangan saat kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada Tahun 2020 pada kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan tingkat konsumsi ikan yang menurun pada tahun sebelumnya 75,84 menjadi 70,56 pada Tahun 2021. Sedangkan pada prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2020 sebesar 2,19 menjadi 4,12 pada Tahun 2021. Sedangkan angka prevalensi anemia pada ibu hamil juga mengalami tren kenaikan dari 75,84 menjadi 8,15

Tujuan 3, upaya untuk menjamin kehidupan sehat dan kesejahteraan seluruh penduduk. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan ini akibat adanya pandemi COVID-19. Angka kematian ibu jauh meningkat tinggi menjadi 122,6 pada Tahun 2021, di mana sebelumnya hanya 73,50. Sama halnya pada Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup mengalami peningkatan pesar dari Tahun 2020 sebesar 74,5 menjadi 122,6 pada Tahun 2021. Namun usaha untuk menjamin kesehatan dan kesejateraan masyarakat telah diupayakan melalui Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menunjukkan tren positif pada Tahun 2021 sebesar 90,31%, meskipun masih belum mencapai target sebesar 97%.

Tujuan Pembangunan 4, upaya untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan kenaikan kesempatan belajar telah menunjukkan ketercapaian atau kenaikan positif pada beberapa indikator. Pada penilaian terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat meskipun belum mencapai target 113,05, namun capaiannya masih memiliki tren positif dari tahun tahun sebelumnya sebesar 105,98, kemudian pada Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat Tahun 2020 mengalami ketercapaian target pada Tahun 2021 yaitu sebesar 107,80, dengan realisasi sebesar 106,40.

Sedangkan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami tren kenaikan Tahun 2020 sebesar 39,06 pada Tahun 2021 sebesar 68,99. Lebih rinci mengenai pencapaian setiap indikator SDGs pada tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 2.4. 79 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Bogor Tahun 2020-2021**

| Tujuan Pembangunan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | 6,68 | 5,78 | 7,24 |
| Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | | | | |
| 1.3.1 (a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan | 91,10 | 97 | 90,31 |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | | | 293.329 |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | 30.443 | | 29.199 |
| Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | | | | |
| 1.4.1 (b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah) | | | 89,2 |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | 77,42 | 77,42 | 78,64 |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | 81,46 | 94,86 | 68,49 |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | 70,90 | 70,42 | 75,12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. | 98,06 | 108,1 | 104,89 |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. | 88,01 | 94,20 | 82,54 |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | 95 | 96 | 96,43 |
| Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | | | | |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. (Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana) | 77,50 | 80 | 94 |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | | | 2000 jiwa (500 paket) |
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (Kelurahan Tangguh Bencana) | 16 | 2 | 16 |
| 1.5.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | | | Sedang 0,69 |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | | | Rp. 2.104.775.000 |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | | | ada Kajian Resiko Bencana 2016-2021 Rencana Penanggulangan Bencana 2017-2022 |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | | | | |
| 2.1.1* | Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment) Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan | 25,96 | 15,7 | 16,41 |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita. Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight) | 3,74 | 4,2 | 5,43 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 75,84<br>25,96 (lap KLHS) | 87,9 | 16,41 (lap KLHS) |
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. Konsumsi energi | 2002,55 | 1980 | 2088,72 |
| Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | | | | |
| 2.2.1* | Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita. | 10,66 | 4,70 | 7,44 |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | 2,19 | 1,86 | 4,12 |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | 7,39 | 8,20 | 8,15 |
| 2.2.2.(c) | (i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita | 75,84 | 87,9 | 70,56 |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Seluruh Usia | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | | | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | 73,50 | 50 | 122,60 |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | | | 94,9 |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | | | 94,9 |
| Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1* | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | | | |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup | | | |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | 74,5 | 50 | 122,6 |
| 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | | | 91,5 |
| Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | | | | |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | 0,42 | <0,5 | 0,47 |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Persentase kesembuhan TB Paru | 60,84 | 86 | 5,05 |
| Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | | | | |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | 6,4 | 9 | 4,13 |
| Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. | | | | |
| 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini | 0,00012 | 1E-04 | 0,00010 |
| 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | | | ada (Puskesmas Bogor Timur dan Puskesmas Semplak) |
| Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | | | | |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | | | 78,63 |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | 77,42 | 77,42 | 78,64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). | 20,27 | 22,44 | 21,13 |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | 16,42 | 14,4 | 12,09 |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | | | |
| Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | | | | |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | | | 60,2% |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | | | 90,46 |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | 91,1 | 97% | 90,31% |
| Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. | | | | |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | | | 77 |
| Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. | | | | |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | | | |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | | | | |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | 107,27 | 113,1 | 105,98 |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | 107,80 | 104,8 | 106,40 |
| Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. | | | | |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | 49,06 | 50,55 | 68,99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. | | | | |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | APM SD/MI/Sederajat: 95,74% APM SMP/MTs/Sederajat 74,9% APM SMA/ Sederajat 62,5% | | |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. | | | | |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | | | Ada |
| Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | | | | |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | | | 0,01 |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | | | 100 |
| Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. | | | | |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | | | 12,09% |
| Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | | | | |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | 22% | | 22 |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | 95,5% | | 83,83 |
| Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | | | | |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | 83,4% | | 70,9% |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita | -2,32% | -1,48% | |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita | 39,80 juta | 46 | |
| Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | | | | |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan | | | 11,70% |
| Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | | | | |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | Rp. 26.061,29 /jam | | 4.330.249 |
| Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | | | | |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | 3.457.722 orang | | 3.803.494 |
| Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. | | | | |
| 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit | | | 20% |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. | | | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. | | | | |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | | | |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan | | | | |
| 11.5.1.(a). | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | | | |
| Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | | | | |
| 11.6.1.(a). | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | | | |
| Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. | | | | |
| 11.7.1.(a). | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. | | | |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | | | | |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | | | |
| Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. | | | | |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | | | |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 13 Penanganan Perubahan Iklim | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
|---|---|---|---|---|
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | | | | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | | | |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | | | |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. | | | | |
| 15.9.1.(a). | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | | | |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | | | | |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | | | |
| Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | | | | |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | WTP | WTP |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Minimal BB | 75 | 70,27 | |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | B | B | B |
| Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | | | | |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | | | |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II). | | | |
| Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. | | | | |
| 16.9.1.(b) | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun | 95 | 96 | 96,43 |
| | | | | |
| Tujuan Pembangunan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | | | | |
| Kode Indikator | Nama Indikator SDGs | Angka Dasar (*Baseline 2020*) | Target SDGs 2021 | Capaian SDGs 2021 |
| -3 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | | | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | | | |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | | | |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

## 2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bogor

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. APBD dialokasikan secara tegas dan jelas untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Capaian SPM Kota Bogor meliputi SPM pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance* dan SPM sebagai usaha pemerintah daerah untuk menjawab isu-isu krusial dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin SPM dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah, maka penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

### 2.5.1 Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis layanan dasar tersebut adalah (1) pendidikan anak usia dini; (2) pendidikan dasar; dan (3) pendidikan kesetaraan. Capaian kinerja ketiga jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.5. 1 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**

| Pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Anak Usia Dini | 51,09 | 50,20 | 100 | 100 |
| Pendidikan Dasar | 101,29 | 95.50 | 100 | 100 |
| Pendidikan Kesetaraan | 0,7 | 3.39 | 100 | 100 |

*Sumber: Laporan Penerapan SPM Bidang Pendidikan*

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bogor empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, dengan indikator jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Hal ini disebabkan kenaikan APK PAUD, karenakan masyarakat sudah memahami akan pendidikan Anak pada Usia Dini.

b. Pendidikan Dasar

Jenis pelayanan ini memiliki indikator jumlah warga Kota Bogor usia 7 sampai dengan 15 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan di Kota Bogor. Realisasi capaian melampaui 100% dikarenakan tidak sedikit warga usia 7 s.d. 15 tahun yang bersekolah di Bogor berasal dari luar Kota Bogor.

c. Pendidikan Kesetaraan

Jenis pelayanan dasar ini memiliki indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Tahun 2020 realisasi capaian menurun,

disebabkan adanya penurunan warga belajar di non-formal. Namun pada tahun berikutnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

### 2.5.2 Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat dua belas jenis layanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 2.5. 2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan**

| Kesehatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pelayanan kesehatan ibu hamil | 93,6 | 96,7 | 100 | 100 |
| Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 93,1 | 94,9 | 100 | 100 |
| Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 96,6 | 99,7 | 100 | 100 |
| Pelayanan kesehatan balita | 78,8 | 94,1 | 100 | 99,28 |
| Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 51 | 46,6 | 100 | 96,76 |
| Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 18,8 | 62,36 | 100 | 100 |
| Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 60,2 | 100 | 100 | 97,91 |
| Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 68,8 | 101,9 | 100 | 100 |
| Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 88,5 | 104,5 | 100 | 100 |
| Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat | 88,4 | 76,3 | 100 | 100 |
| Pelayanan kesehatan orang dengan TB | 104,1 | 50,6 | 100 | 100 |
| Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 95,7 | 92,7 | 100 | 100 |

*Sumber: Laporan Penerapan SPM Bidang Kesehatan*

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2020 sebesar 93,60%, belum seratus persen tercapai lantaran pelayanan posyandu tidak ada dan banyak ibu hamil takut untuk datang ke fasilitas kesehatan karena kondisi pandemi.

b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Tahun 2020 pelayanan kesehatan ibu bersalin tercapai sebesar 93,1%. Peningkatan dan upaya-upaya lainnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin selalu diusahakan seperti upaya yang dilakukan adalah meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan, termasuk penanganan kegawatdaruratan kebidanan, tindakan pra rujukan, rujukan efektif dan penanganan di faskes rujukan termasuk fasilitas perawatan intensif (ICU).

c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Seperti pada dua layanan dasar sebelumnya, pelayanan kesehatan bayi baru lahir juga mengalami penurunan capaian di tahun 2020, setelah ditahun sebelumnya melebihi target. Tidak adanya posyandu, tidak maksimalnya kegiatan pelatihan dan pendampingan, serta kelas ASI yang juga tidak dapat dilaksanakan merupakan kendala di masa itu. Perbaikan yang selalu diupayakan merupakan usaha pemenuhan layanan pada masyarakat dengan maksimal yang di mana tercermin pada hasil capaian yang membaik di tahun 2021 dan 2022.

d) Pelayanan kesehatan balita

Pelayanan kesehatan balita capaiannya meningkat di tahun 2021 hingga 2022. Hal tersebut diantaranya karena beberapa upaya seperti peningkatan pelayanan imunisasi dasar lanjutan dengan meningkatkan *sweeping* imunisasi, juga didukung dengan kegiatan bulan pemantauan tumbuh kembang balita.

e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Tahun 2021 capaian pelayanan dasar ini mengalami penurunan dan jadi capaian terendah. Hal itu disebabkan adanya *Covid-19* sehingga tidak adanya pembelajaran tatap muka selama pandemi menyulitkan petugas kesehatan untuk melakukan skrining. Upaya penjaringan secara online belum maksimal.

f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Capaian kinerja pada pelayanan dasar ini turun cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini karena saat pandemi *COVID-19* Posbindu PTM tidak dapat dilakukan, kegiatan skrining hanya dapat dilakukan di puskesmas, serta beberapa kegiatan yang mendukung tidak dapat dilaksanakan.

g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun tahun 2020 berbeda cukup jauh jika disandingkan dngan tahun berikutnya, lantaran pada 2020 sedang terjadi pandemi *Covid-19*. Selama pandemi, banyak masyarakat terutama lansia takut berkunjung ke fasilitas kesehatan, kegiatan

pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan juga terbatas untuk kondisi darurat.

h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Tidak dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan layanan dasar ini, SDM puskesmas yang terbatas, beberapa kegiatan yang mendukung tidak dapat dilaksanakan, dan kondisi masyarakat yang enggan datang ke fasilitas kesehatan selama pandemi adalah beberapa hal yang menyebabkan turunnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di tahun 2020 memperlihatkan capaian yang belum maksimal dibanding 2021 dan 2022. Faktor penyebabnya sama seperti pelayanan sebelumnya, yaitu SDM puskesmas yang terbatas, beberapa kegiatan yang mendukung tidak dapat dilaksanakan, dan kondisi masyarakat yang enggan datang ke fasilitas kesehatan selama pandemi.

j) Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat

Permasalahan disebabkan tidak tercapainya target kinerja terutama di tahun 2020 diantaranya, kondisi pandemi *Covid-19* membuat kegiatan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan sementara ditiadakan, kecuali untuk kondisi darurat. Pelayanan Pasien ODGJ di masa pandemi hanya dilakukan di puskesmas, serta jumlah kunjungan untuk kontrol/terapi obat bagi beberapa pasien menjadi kurang teratur, sehingga menyebabkan kondisi kekambuhan kembali atau putus obat.

k) Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Capaian kinerja pelayanan kesehatan orang dengan TB memenuhi target pada 2020. Namun, tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga hampir dari separuh capaian tahun sebelumnya.

l) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik, namun belum sesuai dengan target yang ditentukan. Akan tetapi kemudian, di tahun 2022 pelayanan kesehatan orang

dengan resiko terinfeksi HIV melampaui target sehingga capaian pelayanan di angka 100%.

### 2.5.3 Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota ada dua (2) pelayanan yaitu sebagai berikut:

A. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
B. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

**Tabel 2.5. 3 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum (%)**

| Pekerjaan Umum | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari | 76,92 | 83,88 | 100 | 78,40 |
| 1. Non Perpipaan | 4,31 | 15,34 | 100 | 15,38 |
| 2. Perpipaan (Perumda Tirta Pakuan) | 72,67 | 68,49 | 100 | 76,79 |
| Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | 71,50 | 75,12 | 100 | 78,89 |

*Sumber: Laporan SPM Kota Bogor*

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase rumah tangga yang terlayani air air minum sampai dengan tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 100%, baik dari layanan perpiaan dan non perpipaan. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tertinggi pada tahun 2022, dan terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 76,92%. Data yang fluktuatif dan permasalahan yang terjadi pada pelayanan ini terkait data dasar penerima manfaat yang belum lengkap memperlihatkan bahwa kendala tersebut masih sering terjadi disetiap tahun. Kemudian, adanya masalah terkait semakin menipisnya keersediaan air baku juga menjadi tantangan dalam pemenuhan layanan kebutuhan air minum sehari-hari di masyarakat.

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Capaian Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik diperoleh melalui SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Setempat) Individu. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 100% dan terendah terjadi pada tahun 2020

yaitu sebesar 71,50%. Hasil capaian yang selalu meningkat disetiap tahunnya memperlihatkan perkembangan yang positif.

### 2.5.4 Perumahan Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29/PRT/M 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis layanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Peruamahan dan Pemukiman terdiri dari:

A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota;

B. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota.

**Tabel 2.5. 4 Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat**

| Perumahan Rakyat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana | 100 | 84.85 | 100 | 100 |
| Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota | 100 | 0 | 100 | 100 |

*Sumber: Laporan SPM Kota Bogor*

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

   Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada layanan dasar tersebut pada tahun 2020 dan 2022 telah mencapai target yaitu sebesar 100%. Walaupun pada 2021 capaian pelayanan dasar ini belum sempurna di angka 84.85%. Dalam pelaksanaan SPM di bidang Perumahan Rakyat ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah data yang kurang akurat dan *update* terkait jumlah rumah yang terdampak bencana dan bantuan yang diterima korban di Kota Bogor.

b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota

   Pada tahun 2020 dan 2022 kinerja pelayanan dasar ini mencapai 100%. Sedangkan pada tahun 2021 tidak tersedia capaian. Hal ini lantaran dalam laporan capaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada tahun tersebut tidak ada program pemerintah kota yang berdampak pada rumah masyarakat.

### 2.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yakni (1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; (2) pelayanan informasi rawan bencana; (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan (5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Namun dikarenakan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan kelima jenis pelayanan dasar tersebut, maka dalam laporan ini masih menjelaskan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, di mana terdapat dua pelayanan dasar yang masih terkait yakni (1) pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan (2) penanggulangan bencana kebakaran. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah:

**Tabel 2.5. 5 Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

| Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pelayanan informasi rawan Bencana | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 | 94.118 | 100 | 100 |

*Sumber: Laporan SPM Kota Bogor*

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum

Jenis pelayanan ini memiliki indikator jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda. Kondisi Kota Bogor yang terdapat banyak PKL yang menggunakan bahu jalan, trotoar maupun tempat yang dilarang digunakan sebagai tempat berjualan adalah salah satu target dari layanan ini. Selama tahun 2019 sampai 2023, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum telah terealisasi dengan capaian 100%.

b. Pelayanan informasi rawan bencana

Jenis pelayanan ini memiliki indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana realisasi capaian 100%. Walaupun dari pencapaian sudah sesuai dengan target. Adanya pemikiran masyarakat terkait bencana khususnya banjir dan tanah longsor yang umumnya melanda Kota Bogor dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi. Akan tetapi, pada saat bencana tersebut terjadi, masyarakat tidak siap. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian dan antusiasme masyarakat ketika adanya sosialisasi dan mitigasi bencana.

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jenis pelayanan ini memiliki indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana realisasi capaian 100%. Adanya masalah terkait kepedulian dan antusias masyarakat dalam sosialisasi dan mitigasi bencana masih menjadi kendala. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih tetap dapat diatasi sehingga pelayanan yang diberikan tetap seuai dengan target yang ditentukan.

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Jenis pelayanan ini memiliki indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana realisasi capaian 100%. Walaupun pada eksekusi dilokasi, belum lengkapnya peralatan *rescue* tidak menghambat ketercapaian layanan tersebut.

e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Jenis pelayanan ini memiliki indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran realisasi capaian 100%. Yang sempat menurun di tahun 2021 di capaian 94.118%. Hal ini lantaran belum tersedianya pos damkar di setiap kecamatan serta kurang refresentatifnya sarana gedung dalam menunjang kegiatan.

### 2.5.6 Sosial

Menurut Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat lima jenis pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni: (1)

rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.5. 6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial**

| Sosial | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti gelandangan dan pengemis di luar panti | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Laporan SPM Kota Bogor*

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

   Tahun 2020, Penyandang disabilitas terlantar yang teridentifikasi sebanyak 75 orang, dan dari jumlah tersebut 75 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti atau dengan kata lain capaian pada tahun 2020 sebesar 100%. Tahun 2021, Penyandang disabilitas yang terlantar sebanyak 75 orang, dan dari jumlah tersebut, seluruhnya telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Tahun 2022 total penyandang disabilitas terlantar yang harus dilayani sebanyak 1.341 orang, dan semuanya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti.

b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

   Tahun 2020 terdapat anak terlantar sebanyak 61 orang, seluruhnya telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Pada tahun 2021 terdapat anak terlantar sebanyak 61 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 61 orang. Dengan begitu capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 100%.

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

   Pada tahun 2020 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 46 orang, dan seluruhnya mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Tahun 2021 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 300 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di

luar panti sebanyak 300 orang. Pada tahun 2022 total lanjut usia terlantar yang harus dilayani sebanyak 884 orang, dan seluruhnya mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis

   Selama tahun 2020 total jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 86 orang, dan seluruhnya telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Pada tahun 2021 terdapat tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 86 orang, dan yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 86 orang. Tahun 2022 total tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang harus dilayani sebanyak 148 orang, seluruhnya telah terlayani rehabilitasi sosialnya.

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap

   Tahun 2020 terdapat 1.040 orang korban bencana, dan seluruhnya telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Tahun 2021 terdapat 2.000 orang korban bencana dan tahun 2022 jumlah korban bencana alam sebanyak 2.361 orang, seluruhnya terpenuhi kebutuhan dasarnya.

## 2.6 Evaluasi Capaian RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024

### Tabel 2.6. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024

| No. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD | Satuan | Kondisi Awal (2019) | TARGET TAHUN 2020-2023 | | | | | | | | Evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 1 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 73,41 | 73.69 | 73,61 | 73,96 | 73,82 | 73,93 | 74,13 | | | Tercapai |
| 2 | Persentase Rumah Tangga ber-PHBS | % | 65,80 | 68 | 66,30 | 69,00 | 69,27 | 70,00 | 70,02 | 71,00 | 71,53 | Tercapai |
| 3 | Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga | Angka | NA | 0,45 | 0,39 | 0,47 | 34,1 | 49 | 56,91 | 57 | 57,3 | |
| 4 | Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman | % | 92,58 | 93,15 | 81,46 | 94,86 | 68,49 | 59,30 | 68,68 | 69,32 | 76,57 | Tercapai |
| 5 | Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman | % | 4,03 | 3,72 | 3,72 | 5,20 | 5,20 | 7,20 | 5,42 | 7,88 | 5,49 | Tidak Tercapai |
| 6 | Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota | % | 2,62 | 2,44 | 2,30 | 2,27 | 2,11 | 2,12 | 2,02 | 1,94 | 2,02 | Tidak Tercapai |
| 7 | Persentase Reduksi Sampah | % | 6,89 | 6,4 | 7,61 | 6,60 | 7,85 | 6,80 | 7,80 | 7,80 | 7,81 | Tercapai |
| 8 | Indeks Kualitas Air | Angka | 51,67 | 49,67 | 56,33 | 49,67 | 64,72 | 36,17 | 51,39 | 37,17 | 46,67 | Tercapai |
| 9 | Indeks Kualitas Udara | Angka | 81,67 | 85,9 | 80,09 | 86,00 | 99,35 | 79,63 | 98,36 | 79,72 | 95,92 | Tercapai |
| 10 | Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik | % | 4,18 | 5,91 | 6,12 | 5,92 | 6,45 | 4,21 | 4,24 | 4,24 | 4,23 | Tidak Tercapai |
| 11 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 10,32 | 10,63 | 10,33 | 10,97 | 10,53 | 10,62 | 10,58 | 10,74 | 10,64 | Tidak Tercapai |
| 12 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,40 | 13,6 | 13,41 | 13,90 | 13,42 | 13,63 | 13,43 | 13,83 | 13,45 | Tidak Tercapai |
| 13 | Nilai rata -rata Ujian Nasional Tingkat SD | Angka | 73,95 | 68,14 | Tidak ada UN Tingkat SD Tahun 2020 | 68,18 | Tidak ada UN Tingkat SD Tahun 2021 | Tidak ada Ujian | Tidak ada UN Tingkat SD Tahun 2022 | Tidak ada Ujian | Tidak ada UN Tingkat SD Tahun 2023 | Tercapai |
| 14 | Nilai rata -rata Ujian Nasional Tingkat SMP | Angka | 61,07 | 58,3 | Tidak ada UN Tingkat SMP Tahun 2020 | 58,32 | Tidak ada UN Tingkat SMP Tahun 2021 | Tidak ada Ujian | Tidak ada UN Tingkat SMP Tahun 2022 | Tidak ada Ujian | Tidak ada UN Tingkat SMP Tahun 2023 | Tercapai |
| 15 | Indeks Pembangunan Pemuda | Poin | | 56,31 | Tidak dilaksanakan kegiatan perhitungan | 59,13 | NA | 62,09 | NA | 65,19 | NA | |

| No. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD | Satuan | Kondisi Awal (2019) | TARGET TAHUN 2020-2023 | | | | | | | | Evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| | | | | | IPP Tahun 2020 karena refocusing anggaran akibat Covid-19 | | | | | | | |
| 16 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | | 600-610 | 5.162 | 611-620 | 57,8 | | | | | |
| | | Kategori | | | | | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Tercapai |
| 17 | Indeks Pemberdayaan Gender | Angka | 68,91 | 69,50 | 69,03 | 70,50 | 72,33 | 71,50 | 72,33 | 72,50 | 72,56 | |
| 18 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | | 70,50 | 68,51 | 71,00 | 79,09 | 71,50 | 79,16 | 79,16 | 79,16 | Tercapai |
| 19 | Indeks Reformasi Birokrasi | Predikat | B (66,10) | BB | B | BB | B | A | BB | A | A | Tercapai |
| 20 | Level Kematangan Smart City | Level | Scattered | Scattered | Integrative | Integrative | Integrative | Integrative | Integrative | Integrative | Integrative | Tercapai |
| 21 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 9,10 | 8,47 | 12,68 | 8,22 | 11,79 | 11,32 | 10,78 | 10,56 | 9,39 | Tercapai |
| 22 | Angka Kemiskinan | % | 5,77 | 5,80 | 6,68 | 5,78 | 7,24 | 6,90 | 7,10 | 6,56 | 6,67 | Tidak Tercapai |
| 23 | Indeks Ketahanan Keluarga | Angka | NA | 73-74 | 85,2 | 74-75 | 85,20 | 75-77 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | Tercapai |
| 24 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,04 | 6,66 | -0,53 | 6,75 | 3,76 | 5,37 | 5,65 | 5,66 | 5,10 | Tidak Tercapai |
| 25 | PDRB Per Kapita | Juta Rp | 46,22 | 40,36 | 40,36 | 42,73 | 45,92 | 45,10 | 49,76 | 49,84 | 53,24 | Tercapai |
| 26 | Pengeluaran Per Kapita | Ribu Rp | 11,825 | 11,124 | 11.564 | 11,219 | 11.716 | 11,534 | 12,058 | 12090 | 12656 | Tercapai |
| 27 | Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit | % | 19,22 | 21,00 | 19,11 | 22,00 | 20,49 | 23,00 | 18,70 | 24,00 | 17,75 | Tidak Tercapai |
| 28 | Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024) | % | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 26,05 | 80 | 49,45 | Tidak Tercapai |
| 29 | Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024) | % | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 38,51 | 80 | 58,76 | Tidak Tercapai |
| 30 | Persentase Jalan Berkondisi Baik | % | 88,79 | 89 | 83,47 | 89,25 | 84,20 | | | | | |
| | Persentase Jalan Berkondisi Mantap | % | | | | | | 86,00 | 88,23 | 88,50 | 88,95 | Tercapai |
| 31 | Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum | % | | 50 | 32 | 60 | 78,99 | 44 | 42,15 | 44 | 60,07 | Tercapai |

*Sumber: Data diolah, 2023*

Dari 31 Indikator Kinerja Umum (IKU) yang telah ditetapkan pada RPJMD 2020-2024, terdapat 21 IKU yang tercapai dan 10 IKU yang tidak tercapai. Untuk IKU persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota belum mencapai target yang ditetapkan dari tahun 2020 hingga 2022. Walaupun demikian, realisasi IKU tersebut menunjukkan tren penurunan pada kurun waktu tersebut, yang berarti terdapat pengurangan kawasan kumuh di Kota Bogor. Untuk IKU persentase Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) telah mencapai target pada tahun 2020 hingga 2022, namun belum berhasil mencapai target kembali di tahun 2023. Untuk IKU Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) belum mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2020-2023, namun mengalami peningkatan dilihat dari realisasi. Begitu pula dengan IKU Harapan Lama Sekolah (HLS).

Untuk IKU Indeks Reformasi Birokrasi belum mencapai target yang ditetapkan dalam kurun waktu 2020-2022, pencapaian nilai A belum diperoleh di tahun-tahun tersebut. Pada akhirnya, realisasi nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023, realisasi menyentuh target A dengan nilai 80,97 . Untuk IKU Angka Kemiskinan juga belum mencapai target yang ditetapkan setiap tahun. Dilihat dari realisasinya, IKU tersebut menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 sebesar 7,24% yang mana merupakan indikasi dari dampak pelesuan kegiatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Untuk IKU Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit belum mencapai target yang ditetapkan setiap tahun dalam kurun waktu 2020-2023. Realisasi tertinggi ada pada tahun 2021 sebesar 20,49%, kemudian menurun menjadi 18,70% di tahun 2022 dan 18,42% di tahun 2023.

## Tabel 2.6. 2 Capaian Indikator Keberhasilan Kunci RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **I** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Laju Inflasi | Persen | 3,69 | 2-4% | 2,18 | 2-4% | 1,93 | 2-4% | 3.36 | 2-4% | 3,36 | 2-4% | 2-4% | Tidak Tercapai | Bapperida |
| 2 | PDRB per kapita | Juta Rp | 37,99 | 40,36 | 40,36 | 42,73 | 45,92 | 45,10 | 49,76 | 49,84 | 53,24 | 50,41 | 50,41 | Tercapai | Bapperida |
| 3 | Indeks gini | Poin | 0,41 | 0,4 | 0,412 | 0,39 | 0,441 | 0,37 | 0.430 | 0,35 | 0,464 | 0,34 | 0,34 | Tidak Tercapai | Bapperida |
| 4 | Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan | Persen | 94,07 | 94,2 | 94,20 | 94,22 | 92,76 | 93,88 | 93.33 | 93,44 | 93,33 | 93,79 | 93,79 | Tidak Tercapai | Bapperida |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 75,66 | 76,67 | 76,11 | 77,22 | 76,59 | 77,22 | 77,85 | 77,78 | 78,36 | 78,89 | 78,31 | Tidak Tercapai | Bapperida |
| 6 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 1.096.828 | 1.131.890 | 1.126.927 | 1.148.968 | 1.052.359 | 1.166.046 | 1,114,018 | 1.183.124 | 1.070.719 | 1.200.202 | 1.200.202 | Tercapai | Bapperida |
| 7 | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persen | 1,39 | 1,51 | 1,33 | 1,47 | 1,19 | 1,46 | 2.07 | 1,46 | 0,96 | 1,44 | 1,44 | Tercapai | Bapperida |
| 8 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 6.14* | 6,66 | -0,53 | 6,75 | 3,76 | 5,37 | 5.65 | 5,66 | 5,1 | 6,04 | 6,04 | Tercapai | Bapperida |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 9 | Angka melek huruf | Persen | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,68 | 99,98 | 99.98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | Tercapai | Disdik |
| 10 | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 10,29 | 10,63 | 10,33 | 10,97 | 10,53 | 10,62 | 10.64 | 10,74 | 10,64 | 10,86 | 10,86 | Tidak Tercapai | Disdik |
| 11 | Harapan lama sekolah | Tahun | 13,37 | 13,60 | 13,41 | 13,90 | 13,42 | 13,63 | 13.45 | 13,83 | 13,45 | 14,83 | 14,83 | Tercapai | Disdik |
| 12 | Angka usia harapan hidup | Tahun | 73,37 | 73,69 | 73,61 | 73,96 | 73,82 | 73,93 | 74.45 | 74,42 | 74,45 | 74,57 | 74,57 | Tercapai | Dinkes |
| 13 | Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs | Persen | 4,8 | 4,75 | 10,66 | 4,7 | 5,33 | 10,10 | 3,25 | 9,80 | 2,59 | 9,70 | 9,70 | Tercapai | Dinkes |
| 14 | Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight) | Persen | 4,53 | 4,31 | 3,74 | 4,2 | 4,77 | 4,09 | 4.16 | 3,98 | 4,16 | 3,98 | 3,98 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 15 | Cakupan desa siaga aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 16 | Tingkat Partisipasi angkatan kerja | Persen | 62,27 | 64,30 | 62,27 | 65,55 | 61,77 | 66,79 | 64.81 | 68,04 | 64,81 | 69,28 | 69,28 | Tidak Tercapai | Disnaker |
| 17 | Tingkat pengangguran terbuka | Opini | 9,57 | 8,47 | 12,68 | 8,22 | 11,79 | 11,32 | 10,78 | 10,56 | 9,39 | 10,37 | 10,37 | Tercapai | Bapperida |
| 18 | Rasio penduduk yang bekerja | Persen | 57,1 | 59,46 | 57,1 | 61,01 | 54,48 | 62,56 | 49.96 | 64,1 | 42,96 | 65,65 | 65,65 | Tidak Tercapai | Disnaker |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 19 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas | Persen | 90,35 | 90,62 | 90,35 | 90,80 | 88,21 | 90,85 | 89.22 | 90,90 | 90,61 | 90,91 | 90,91 | Tidak Tercapai | Disnaker |
| 20 | Keluarga pra sejahtera | Persen | 7,38 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 5,12 | 6,00 | | 5,50 | | 5,00 | 5,00 | | DPPKB |
| 21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 3,39 | 3,32 | 3,34 | 3,43 | 3,40 | 3,40 | 3.57 | 3,52 | 3,57 | 3,55 | 3,55 | Tercapai | Setda |
| 22 | Persentase PAD terhadap pendapatan | Persen | 42,83 | 43,00 | 35,92 | 43,50 | 56,67 | 44,00 | 45.22 | 44,50 | 45,09 | 45,00 | 45,00 | Tidak Tercapai | Bapenda |
| 23 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Tercapai | BKAD |
| 24 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Poin | 84,90 | 86,90 | 75,84 | 87,90 | 70,56 | 71,30 | 81,7 | 82,70 | 83,10 | 83,70 | 83,70 | Tercapai | DKPP |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 25 | Penguatan cadangan pangan | Ton | 5,40 | 30,00 | 8,18 | 26,72 | 0 | 10 | 27.40 | 10 | 27,40 | 10 | 56,72 | Tercapai | DKPP |
| 26 | Kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Persen | 0,730 | 0,696 | 0,69 | 0,681 | 0,70 | 0,666 | 0.706 | 0,651 | 0,68 | 0,636 | 0,636 | Tercapai | DKPP |
| 27 | Kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan | Persen | 0,81 | 0,75 | 0,79 | 0,73 | 5,53 | 0,71 | 0.758 | 0,68 | 0,74 | 0,66 | 0,66 | Tercapai | DKPP |
| 28 | Produksi Pertanian (Padi) | Ton | 5,439 | 5,548 | 4186 | 5,602 | 5.496 | 3367 | 3378 | 3401,20 | 2.831,9 | 3424,40 | 3424,40 | Tercapai | DKPP |
| 29 | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Persen | 18,34 | 18,22 | 18,04 | 18,18 | 19,16 | 18,13 | 18.98 | 18,08 | 18,70 | 18,03 | 18,03 | Tercapai | DKUKMDagin |
| 30 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Persen | 21,21 | 21,07 | 19,52 | 21,00 | 19,22 | 20,95 | 19.11 | 20,9 | 19,23 | 20,85 | 20,85 | Tidak Tercapai | DKUKMDagin |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 31 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Persen | 18,35 | 18,28 | 18,56 | 18,26 | 19,16 | 18,23 | 18.98 | 18,21 | 18,70 | 18,19 | 18,19 | Tercapai | DKUKMDagin |
| 32 | Kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Persen | 0,212 | 0,211 | 19,52 | 0,21 | 19,22 | 0,209 | 19.11 | 0,209 | 19,23 | 0,208 | 0,208 | Tercapai | DKUKMDagin |
| 33 | Kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan | Persen | 0,22 | 0,218 | 19,39 | 0,217 | 19,22 | 0,216 | 19.07 | 0,215 | 33,73 | 0,214 | 0,214 | Tercapai | DKUKMDagin |
| 34 | Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Persen | 12,04 | 12,31 | 12,55 | 12,42 | 11,88 | 12,53 | 12.36 | 12,64 | | 12,75 | 12,75 | Tidak Tercapai | Dishub |
| 35 | Kontribusi sector transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan | Persen | 22 | 21,76 | -1,86 | 21,66 | 2,90 | 21,56 | 12.34 | 12,64 | | 12,75 | 12,75 | Tidak Tercapai | Dishub |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **II** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi perkapita | Ribu Rp. | 10 .940 | 11.396 | 11.564 | 11.533 | 11.716 | 11.534 | 12.058 | 12.090 | 12,656 | 12.290 | 12.290 | Tercapai | Bapperida |
| 2 | Angka kriminalitas | Angka | 0,00048 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00046 | NA | 0,00045 | | 0,00044 | | 0,00043 | 0,00043 | | Satpol PP |
| 3 | Rasio ketergantungan | Persen | 42,28 | 41,54 | 41,54 | 41,17 | NA | 40,8 | 43 | 43 | 43 | 43,5 | 43,5 | Tidak Tercapai | Disdukcapil |
| 4 | Indeks Pemberdayaan Gender | Angka | 67,37 | 69,50 | 69,03 | 70,50 | 72,33 | 71,50 | 72,33 | 72,50 | 72,56 | 73,50 | 73,50 | Tercapai | DP3A |
| 5 | Tingkat Partisipasi angkatan kerja | Persen | 62,27 | 64,30 | 60,68 | 65,55 | 61,77 | 66,79 | 64.81 | 68,04 | 64,81 | 69,28 | 69,28 | Tidak Tercapai | Disnaker |
| **III** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **A** | **FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen | 49,06 | 50,00 | 49,06 | 50,55 | 50.20 | 51,00 | 38.00 | 51,50 | 61,9 | 52,00 | 52,00 | Tidak Tercapai | Disdik |
| 2 | Angka partisipasi sekolah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.75 | 100 | 98,75 | 100 | 100 | Tercapai | Disdik |
| 3 | Angka pendidikan yang ditamatkan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Disdik |
| 4 | | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | | | | | | | Disdik |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Persen | 108,05 | 108,06 | 98,06 | 108,07 | 104,89 | 98,30 | 98,3 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Disdik |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Persen | 94,14 | 94,15 | 88,01 | 94,20 | 82,54 | 77,00 | 77 | 97,00 | 90,00 | 98,00 | 98,00 | Tercapai | Disdik |
| 5 | | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | | | | | | | | Disdik |
| | Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A | Persen | 112,60 | 113,00 | 107,27 | 113,05 | 105,98 | 113,08 | 95.50 | 114,00 | 95,50 | 114,30 | 114,30 | Tidak Tercapai | Disdik |
| | Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | Persen | 104,10 | 104,30 | 107,80 | 104,80 | 106,40 | 105,00 | 95.50 | 105,50 | 95,50 | 106,00 | 106,00 | Tercapai | Disdik |
| 6 | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A | Persen | 115,27 | 115,28 | 99,91 | 115,29 | 103,00 | 100,00 | 91.92 | 100,00 | 91,92 | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Disdik |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B | Persen | 30,93 | 30,94 | 95,32 | 30,95 | 89,00 | 97,00 | 89.48 | 98,00 | 89,48 | 98,50 | 98,50 | Tidak Tercapai | Disdik |
| 7 | Angka Putus Sekolah | | | | | | | | | | | | | | Disdik |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Persen | 0 | 0,06 | 0 | 0,05 | 0 | 0,04 | 0.02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Tercapai | Disdik |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Persen | 0 | 0,06 | 0 | 0,05 | 0 | 0,04 | 0.02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Tercapai | Disdik |
| 8 | Angka Kelulusan | | | | | | | | | | | | | | Disdik |
| | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Disdik |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Disdik |
| 9 | Angka Melanjutkan (AM): | | | | | | | | | | | | | | Disdik |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Persen | 111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Disdik |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Persen | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Disdik |
| 10 | Fasilitas Pendidikan: | | | | | | | | | | | | | | Disdik |
| | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | Persen | 93,70 | 94,50 | 94,50 | 94,80 | 96,00 | 95,00 | 95 | 98,50 | 98,73 | 99,00 | 99,00 | Tercapai | Disdik |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | Sekolah pendidikan SMP/MTs | Persen | 94,70 | 94,80 | 94,50 | 95,00 | 95,80 | 95,20 | 95,2 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | Tercapai | Disdik |
| 11 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Rasio | 33,14 | 33,15 | 39,00 | 33,16 | 46,00 | 33,17 | 33,17 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | Tidak Tercapai | Disdik |
| 12 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | Rasio | 31,26 | 31,25 | 20,25 | 31,22 | 22,00 | 30,55 | 31.00 | 30,25 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | Tercapai | Disdik |
| 13 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | Rasio | 1: 33 | 1: 33 | 1: 45 | 1: 33 | 1:44 | 1: 33 | 0.064583 333 | 1: 32 | 0,064 | 1: 32 | 1: 32 | Tercapai | Disdik |
| 14 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP | Rasio | 1: 23 | 1: 23 | 1: 17 | 1: 23 | 1:19 | 1: 23 | 1:23 | 1: 24 | 1:23 | 1: 24 | 1: 24 | Tercapai | Disdik |
| 15 | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | Persen | 99,73 | 100,73 | 102,02 | 101,05 | 100 | 101,37 | 101,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai | Disdik |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 16 | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | Persen | 99,98 | 99,98 | NA | 99,98 | NA | 99,98 | 99.98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | Tercapai | Disdik |
| 17 | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara) | Persen | 99,98 | 98,15 | NA | 97,80 | NA | 97,46 | 97.46 | 97,50 | 97,50 | 98,00 | 98,00 | Tercapai | Disdik |
| 18 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persen | 87,87 | 88,00 | 86,90 | 88,10 | 89,20 | 88,20 | 88,2 | 90,00 | 92,3 | 90,50 | 90,50 | Tercapai | Disdik |
| 19 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Angka | 49,00 | 50,00 | 48,50 | 50,55 | 50,20 | 49,50 | 48.00 | 50,00 | 61,9 | 50,50 | 50,50 | Tidak Tercapai | Disdik |
| 20 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Angka | 109,80 | 108,60 | 107,50 | 108,70 | 103,00 | 107,70 | 91.92 | 107,80 | 91,92 | 107,90 | 107,90 | Tidak Tercapai | Disdik |
| 21 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Angka | 86,02 | 94,15 | 86,80 | 94,20 | 89,00 | 90,20 | 90,2 | 94,00 | 89,48 | 94,50 | 94,50 | Tercapai | Disdik |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 22 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Angka | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 4,40 | 1,45 | 1,45 | 75,00 | 75,30 | 75,50 | 75,50 | Tercapai | Disdik |
| **2** | **KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | Angka | 60 / 100.000 KH | 55 | 74,50 | 50 | 96,7 | 65 | 73.26 | 60 | 59,89 | 55 | 55 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 2 | Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup | Angka | 2,95 / 1.000 KH | 2,90 | 3,15 | 2,94 | 3,47 | 3,00 | 3.72 | 2,90 | 6,70 | 2,80 | 2,80 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 3 | Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup | Angka | 3,35/1.000 KH | 3,35 | 3,36 | 3,34 | 3,58 | 3,20 | 3.89 | 3,10 | 7,08 | 3,00 | 3,00 | Tidak Tercapai | Dinkes |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 4 | Rasio rumah sakit per satuan penduduk | Rasio | 0,02 | 0,0185 | 0,02 | 0,0191 | 0,20 | 0,02 | 0.02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Tercapai | Dinkes |
| 5 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | Rasio | 0,74 | 0,80 | 1,33 | 0,84 | 1,35 | 0,88 | 2.97 | 0,92 | 1,53 | 0,96 | 0,96 | Tercapai | Dinkes |
| 6 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persen | 96,10 | 97,00 | 93,10 | 98,00 | 94,90 | 99,00 | 97.50 | 100,00 | 97,50 | 100,00 | 100,00 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 7 | Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) | Persen | 80 | 85 | 87 | 90 | 90 | 90 | 92 | 95 | | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 8 | Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk | Per 30.000 penduduk | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,70 | 0.71 | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 0,72 | Tercapai | Dinkes |
| 9 | Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Persen | 98,50 | 99,00 | 63,20 | 99,5 | 72,10 | 92 | 98,53 | 100 | 92,65 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 10 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 11 | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | Persen | 96,50 | 97,00 | 7,9 | 97,5 | 91,50 | 98,00 | 94.10 | 98,50 | 94,10 | 99,00 | 100,00 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 12 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | Non polio AFP rate | 7 Kasus Negatif | 0 | 7 Kasus Negatif | 7 Kasus Negatif | 1 kasus | 7 Kasus Negatif | 24,72 / 100.000 | ≥ 3/100.000 penduduk usia < 15 tahun | 25,12 / 100.000 | ≥ 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun | ≥ 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun | Tercapai | Dinkes |
| 13 | Cakupan pneumonia balita yang ditangani | Persen | 100 | 100 | 24,25 | 100 | 100 | 70 | 0.9831 | 80 | 98,31 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 14 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | Persen | 100 | 100 | 58,88 | 100 | 100 | 80 | 107,12 | 100 | IKD Tidak ada | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 15 | Prevalensi Hipertensi | Persen | 9,67 | 9,30 | 6,40 | 9,00 | 6,62 | 7,20 | 7,25 | 7,90 | 9,66 | 8,40 | 8,40 | Tercapai | Dinkes |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 16 | Prevalensi Diabetes Militus | Persen | 2,40 | 2,35 | 2,08 | 2,30 | 1,58 | 2,00 | 2.05 | 2,05 | 2,5 | 2,05 | 2,05 | Tercapai | Dinkes |
| 17 | Persentase kesembuhan TB Paru | Persen | 81,22 | 86,00 | 60,84 | 86,50 | 44,24 | 84,50 | 0.7428 | 86,5 | 74,28 | 87,5 | 87,5 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 18 | Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk) | Per 100.000 penduduk | 66/100.000 Penduduk | 65,00 | 19,78 | 62,50 | 50 | 62,00 | 128.17 | 61,50 | 128,17 | 60,00 | 60,00 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 19 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 20 | Angka bebas jentik nyamuk DBD | Persen | 95,00 | 95,30 | 50,03 | 95,40 | 92,00 | 95,60 | 0.94 | 95,70 | 94,38 | 96,00 | 96,00 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 21 | Persentase penemuan penderita diare pada balita | Persen | 100 | 100 | 21 | 100 | 18,00 | 100 | 52.27 | 100 | 52,27 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Dinkes |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 22 | Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 23 | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | Persen | 0,42 | <0,5 | 0,42 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0.47 | <0,5 | 0,47 | <0,5 | <0,5 | Tercapai | Dinkes |
| 24 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | Persen | 97,2 | 100 | 100 | 100 | 96,11 | 100 | 102,46 | 100 | 109,9 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 25 | Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80) | Persen | 68 | 80 | 72 | 85 | 85 | 90 | 96 | 95 | 96 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 26 | Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota) | Persen | 0 | 24 | 97,83 | 31 | 91,53 | 38 | 109,47 | 100 | 94 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 27 | Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) | Persen | 95,85 | 96 | 91,1 | 97 | 90,46 | 93 | 96.11 | 96,2 | 99,70 | 96,3 | 96,3 | Tercapai | Dinkes |
| 28 | Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi | Persen | 4 | 8 (2 pusk) | 8 | 16 (4 pusk) | 8 | 100,00 | 104,08 | 100 | 116 | 100 | 100 (25 pusk) | Tercapai | Dinkes |
| 29 | Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU | Persen | 97,60 | 100 | 93,61 | 100 | 96,70 | 100 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 30 | Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU | Persen | 98 | 100 | 93,14 | 100 | 94,90 | 100 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 31 | Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM) | Persen | 90,10 | 100 | 96,63 | 100 | 99,70 | 100 | 101.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Dinkes |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 32 | Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM) | Persen | 98 | 100 | 78,84 | 100 | 94,10 | 100 | 95.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 33 | Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani | Persen | 75 | 75 | 74,30 | 76 | 80,59 | 77 | 80,4 | 80,5 | 85,8 | 81 | 81 | Tercapai | Dinkes |
| 34 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 35 | Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | Persen | 100 | 100 | 84 | 100 | 93,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 36 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 131,3 | 100 | 165,4 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 37 | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 38 | Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 39 | Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk | Persen | 2,40 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 0,19 | 0.29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | Tercapai | Dinkes |
| 40 | Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi | Persen | 85,71 | 90 | 85,71 | 95 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 41 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil | Persen | 100,30 | 100 | 93,61 | 100 | 96,7 | 100 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 42 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin | Persen | 99,10 | 100 | 93,14 | 100 | 94,9 | 100 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Dinkes |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 43 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir | Persen | 103,50 | 100 | 96,63 | 100 | 99,70 | 100 | 101.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 44 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 78,84 | 100 | 94,10 | 100 | 95.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Dinkes |
| 45 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 51,00 | 100 | 46,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 46 | Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 78,67 | 100 | 18,78 | 100 | 65 | 100 | 104,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 47 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 60,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 48 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 69,80 | 100 | 68,80 | 100 | 101,90 | 100 | 103,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 49 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 102,91 | 100 | 88,50 | 100 | 104,50 | 100 | 103,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 50 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 89,20 | 100 | 88,40 | 100 | 76,30 | 100 | 131,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 51 | Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen | 110,80 | 100 | 104,10 | 100 | 50,6 | 100 | 110,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |
| 52 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Persen | 86,38 | 100 | 95,70 | 100 | 92,7 | 100 | 109,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinkes |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **3** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PEKERJAAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 88,79 | 89 | 83,47 | 89,25 | 84,20 | 86,00 | 88.23 | 89,75 | 88,95 | 90 | 90 | Tercapai | PUPR |
| 2 | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Persen | 0,0660997 | 0,0642509 | 0,576 | 0,0634 | 0,1203 | 0,0625 | 0.817 | 0,825 | 0,197 | 0,875 | 0,875 | Tercapai | PUPR |
| 3 | Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam) | Persen | 88,59 | 89,00 | 83,47 | 89,25 | 84,20 | 89,50 | 88.23 | 89,75 | 88,95 | 90,00 | 90,00 | Tidak Tercapai | PUPR |
| 4 | Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | Meter | 66,44 | 67,00 | 66,70 | 67,50 | 507,38 | 68,00 | 518.377 | 520,877 | 96,121 | 523,377 | 523,377 | Tercapai | PUPR |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 5 | Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman | Persen | 67,21 | 67,47 | 3,72 | 70,42 | 75,12 | 7,20 | 5.43 | 7,88 | 5,49 | 8,55 | 8,55 | Tidak Tercapai | PUPR |
| 6 | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | Persen | 11,01 | 21,80 | 11,17 | 32,60 | 25,11 | 43,40 | 25.86 | 54,20 | 62 | 65,00 | 65,00 | Tidak Tercapai | PUPR |
| 7 | Tidak terjadi genangan >2 kali setahun | Persen | 71,57 | 75 | 0,014 | 77,5 | 0,509 | 80 | 60.71 | 82,5 | 0,89 | 85 | 85 | Tidak Tercapai | PUPR |
| 8 | Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya | Lokasi | 745 | 865 | 863 | 985 | 921 | 1,105 | 985 | 1,225 | 191 | 1,345 | 1,345 | Tidak Tercapai | PUPR |
| 9 | Persentase irigasi kota dalam kondisi baik | Persen | 45,83 | 58,75 | 57,50 | 60 | 51,58 | 52,23 | 52.62 | 53,01 | 53,66 | 53,79 | 53,79 | Tercapai | PUPR |
| | Rasio jaringan irigasi | Point | 0,2578 | 0,3304 | 0,2600 | 0,3374 | 0,415 | 0,3445 | 0.3450 | 0,3515 | 0,3600 | 0,3574 | 0,3574 | Tercapai | PUPR |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 10 | Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik | Persen | 90 | 91,03 | 91,04 | 92,06 | 91,71 | 92,54 | 94.81 | 96,77 | 82,46 | 97,62 | 94,23 | Tidak Tercapai | PUPR |
| 11 | Persentase penduduk berakses air minum | Persen | 91,98 | 93,15 | 81,46 | 94,86 | 83,83 | 99,20 | 68.68 | 99,60 | 91,91 | 100 | 100 | Tercapai | PUPR |
| 12 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan | Persen | 91,98 | 93,15 | 81,46 | 94,86 | 83,83 | 99,20 | 68.68 | 99,60 | 91,90 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | PUPR |
| 13 | Persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota | Persen | 2,62 | 2,44 | 2,44 | 2,27 | 2,11 | 2,12 | 2.02 | 1,94 | 2,02 | 1,77 | 1,77 | Tidak Tercapai | Perumkim |
| 14 | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | Persen | 10,00 | 12.5 | 13,90 | 15 | 20,07 | 17,50 | 20.61 | 20,00 | 20,61 | 25,00 | 25,00 | Tercapai | DLH |
| 15 | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | Persen | 11,71 | 12,00 | 12,00 | 12,50 | 11,38 | 13,00 | 11,98 | 13,50 | 9,74 | 14,00 | 14,00 | Tidak Tercapai | Perumkim |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 16 | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | Persen | 0,02 | 0,0190 | 1,03 | 0,0200 | 1,57 | 0,0250 | 1.49 | 0,0300 | 1,52 | 0,0350 | 0,0350 | Tercapai | Perumkim/Kesra |
| | **PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | Persen | 20 | 20 | 4,18* (RTH publik) | 20 | 4,20* (RTH publik) | 20 | 4,24* (RTH publik) | 20 | 4,23* (RTH publik) | 20 | 20 | Tidak Tercapai | PUPR |
| 2 | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan | Persen | 35 | 37 | 0,0046 | 39 | | 0,0055 | 0,323 | 0,0067 | 0,0038 | 0,0073 | 0,0073 | Tercapai | PUPR |
| 3 | Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Persen | 80 | 82 | 82 | 84 | 90 | 86 | 95,18 | 88 | 99,71 | 90 | 90 | Tercapai | PUPR |
| **4** | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 1 | Rasio rumah layak huni | Persen | 17,28 | 16,17 | 18,37 | 16,36 | 17,36 | 16,54 | 18,52 | 18,52 | 21,16 | 23,52 | 23,52 | Tercapai | Perumkim |
| 2 | Rasio pemukiman layak huni | Persen | 95,14 | 95,47 | 95,51 | 95,80 | 90,99 | 96,13 | 96,31 | 96,46 | 89,14 | 96,78 | 96,78 | Tidak Tercapai | Perumkim |
| 3 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Persen | 70,59 | 74,80 | 75,00 | 76,79 | 80,02 | 78,77 | 82,19 | 96,46 | 92,82 | 96,78 | 96,78 | Tidak Tercapai | Perumkim |
| 4 | Persentase lingkungan pemukiman kumuh kewenangan kota | Persen | 2,62 | 2,44 | 3,99 | 2,27 | 2,12 | 2,12 | 2.02 | 1,94 | 2,02 | 1,77 | 1,77 | Tidak Tercapai | Perumkim |
| 5 | Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat) | Persen | 4,31 | 3,77 | 9,78 | 3,32 | 3,90 | 2,82 | 3.78 | 2,27 | 5,68 | 1,73 | 1,73 | Tercapai | Perumkim |
| 6 | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | Persen | 1,09 | 1,07 | 0,64 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | -0,1 | 1,01 | 0,987 | 0,99 | 0,99 | Tercapai | Perumkim |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 7 | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | Persen | 77,33 | 80,67 | 98,72 | 84 | 97,74 | 87,33 | 97,74 | 97,74 | 99,59 | 98,50 | 98,50 | Tercapai | Perumkim |
| 8 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota | Persen | | 100 | 100 | 100 | 84,85 | 85 | 100 | 90 | 100 | 95 | 95 | Tercapai | Perumkim |
| 9 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota | Persen | | 0 | 0 | 100 | NA | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Perumkim |
| 10 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani | Persen | 100 | 93,22 | 94,01 | 86,68 | 86,68 | 80,77 | 76,82 | 74,17 | 72,36 | 67,57 | 67,57 | Tercapai | Perumkim |
| 11 | Berkurangnya jumlah unit RTLH ( Rumah Tidak layak Huni ) | Persen | 26,80 | 25,20 | 24,61 | 23,22 | 19,98 | 21,23 | 17,81 | 19,25 | 7,18 | 17,26 | 17,26 | Tidak Tercapai | Perumkim |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 12 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum ) | Persen | 8,16 | 11,53 | 11,53 | 15,11 | 10,72 | 11,91 | 10,72 | 13,10 | 12,04 | 14,29 | 14,29 | Tidak Tercapai | Perumkim |
| **5** | **KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Rasio (RT/ linmas) | 3739 | 3739 | 3739 | 3739 | 3739 | 3739 | 1049 | 3739 | 15,04 | 3739 | 3739 | Tercapai | Satpol PP |
| 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | Persen | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Satpol PP |
| 3 | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Satpol PP |
| 4 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota | Persen | 68 | 70 | 100 | 72,50 | 100 | 75 | 50.00 | 100,00 | 50,00 | 100 | 100 | Tercapai | DPKP |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 5 | Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana | Persen | 75 | 77,50 | 77,50 | 80,00 | 94,00 | 82,50 | 95.00 | 100 | 35.29 | 100 | 100 | Tercapai | DPKP |
| 6 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Menit | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | Tercapai | DPKP |
| 7 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jiwa | 114.412 | 492.202 | 315.572 | 492.202 | 2.963 | 492.202 | 28,100 | 492.202 | 28.200 | 492.202 | 492.202 | Tidak Tercapai | BPBD |
| 8 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jiwa | 52,099 | 492.202 | 241.188 | 492.202 | 2.963 | 492.202 | 3,869 | 492.202 | 3.869 | 492.202 | 492.202 | Tidak Tercapai | BPBD |
| 9 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jiwa | 12889 | 3000 | 2727 | 3000 | 2963 | 3000 | 12162 | 3.000 | 13.230 | 3.000 | 3.000 | Tidak Tercapai | BPBD |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 10 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 71,70 | 100 | 91,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Satpol PP |
| 11 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Satpol PP |
| 12 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | DPKP |
| 13 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | Persen | 75 | 75 | 87,10 | 87 | 100 | 90 | 82.14 | 95 | 82,14 | 95 | 95 | Tercapai | DPKP |
| **6** | **SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social | Persen | 91,45 | 92 | 92 | 93 | 95 | 94 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinsos |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 2 | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 91,45 | 92 | 92 | 93 | 95 | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinsos |
| 3 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Persen | 91,45 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinsos |
| 4 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social | Persen | 8,90 | 12,80 | 32,00 | 15,50 | 40 | 35,00 | 100 | 38,00 | 100 | 38,00 | 38,00 | Tercapai | Dinsos |
| 5 | Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesos) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | Persen | NA | 3 | 3 | 50 | 60,35 | 86 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | Tercapai | Dinsos |
| 6 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinsos |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 7 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Persen | 24,32 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinsos |
| 8 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social | Persen | 24,32 | 26 | 100 | 27 | 59,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinsos |
| 9 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | Persen | (534/1915 X100%) = 27,88% | 18,60 | 100 | 21,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinsos |
| 10 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang kebutuhan dasarnya terpenuhi pada saat dan | Persen | (3523/3523X100%) = 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dinsos |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| **B** | **FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Kesempatan kerja (%) | Persen | 90,38 | 91,53 | 87,74 | 91,87 | 91,87 | 92,20 | 89,22 | 92,51 | 90,61 | 92,81 | 92,81 | Tidak Tercapai | Disnaker |
| 2 | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja | Orang | 2189 | 2500 | 965 | 2500 | 2440 | 2500 | 7005 | 2500 | 6.729 | 2500 | 12500 | Tercapai | Disnaker |
| 3 | Jumlah Pekerjaan yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan | Orang | 109.416 | 120.358 | 279.361 | 132.393 | 293.329 | 307.995 | 198,301 | 323.395 | 303.941 | 339.564 | 339.564 | Tidak Tercapai | Disnaker |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 4 | Penetapan besaran UMK | Rupiah | 3.557.146 | 4.149.797 | 4.169.806 | 4.169.806 | 4.330.249 | 4.330.249 | 4,634,429 | 4.639.429 | 4.813.988 | 4.659.429 | 4.659.429 | Tercapai | Disnaker |
| 5 | Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Disnaker |
| 6 | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja (%) | Juta/ Pekerja/ Tahun | 63,91 | 65,78 | 64,70 | 68,59 | 71,43 | 65,54 | 67,21 | 74,57 | 76,50 | 77,76 | 77,76 | Tercapai | Disnaker |
| 7 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | Tenaga kerja | 50 | 75 | 40 | 100 | 80 | 125 | 140 | 150 | 176 | 150 | 150 | Tercapai | Disnaker |
| 8 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | Tenaga kerja | 26 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 211 | Tidak Tercapai | Disnaker |
| 9 | Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Persen | 64,71 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 53,57 | 72.73 | 72,73 | 81,82 | 73 | 73 | Tercapai | Disnaker |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 10 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | Persen | 17,49 | 19,48 | 17,48 | 19,88 | 18,28 | 24,69 | 18.37 | 27,09 | 18,62 | 29,49 | 29,49 | Tidak Tercapai | Disnaker |
| 11 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Angka | 66,24 | 65,78 | 64,70 | 68.59 | 71.43 | 65,54 | 67.21 | 71 | 76,5 | 71,5 | 71,5 | Tercapai | Disnaker |
| 12 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ( PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan | Persen | 100 | 100 | 79,96 | 100 | 50,60 | 100 | 56.60 | 100 | 72,05 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Disnaker |
| 13 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri ) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota | Persen | 58,75 | 21,10 | 21,10 | 22,40 | 67,18 | 23,70 | 50.68 | 64,70 | 82,9 | 65,60 | 65,60 | Tercapai | Disnaker |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **2** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 2,2 | 2,30 | 1,87 | 2,40 | 52,3 | 2,50 | NA | 2,60 | 2,0 | 2,70 | 2,70 | | DP3A |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bogor | Persen | 18,18 | 18,18 | 22 | 18,18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Tercapai | DP3A |
| 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Persen | 11,72 | 12,22 | 7,39 | 12,72 | NA | 13,22 | NA | 13,72 | | 14,22 | 14,22 | | DP3A |
| 4 | Rasio KDRT | Persen | 0,05 | 0,1 | 0,00019 | 0,15 | 0,31 | 0,00021 | 0.00013 | 0,00012 | 0,00015 | 0,00011 | 0,00011 | Tercapai | DP3A |
| 5 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 26,88 | 26,95 | 50,77 | 27,08 | 36,23 | 27,18 | 36.56 | 36,56 | 47,66 | 37,10 | 37,10 | Tercapai | DP3A |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 6 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | DP3A |
| 7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | DP3A |
| 8 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | DP3A |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | unit pelayanan terpadu. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 8,9 | 7,1 | 9 | 5,3 | 6 | 3,5 | 48.48 | 1,7 | 48,48 | 1,7 | 1,7 | Tercapai | DP3A |
| 10 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | DP3A |
| 11 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 1,70 | 3,50 | 3,50 | 5,30 | 6,30 | 7,10 | 0.07 | 19,70 | 100 | 23,30 | 23,30 | Tercapai | DP3A |
| 12 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persen | 47,16 | 56,60 | 55,31 | 66,03 | 68,15 | 75,47 | 100.00 | 95,60 | 100,00 | 97,82 | 97,82 | Tercapai | DP3A |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 13 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | Persen | 99,93 | 99,94 | 93,92 | 99,95 | 96,50 | 99,96 | 92.06 | 99,97 | 99,84 | 99,98 | 99,98 | Tidak Tercapai | DP3A |
| 14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP | Persen | 92,48 | 92,58 | 100,68 | 92,73 | 96,2 | 92,82 | 92.34 | 92,97 | 95,94 | 93 | 93 | Tidak Tercapai | DP3A |
| 15 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA | Persen | 97,49 | 97,58 | 100,72 | 97,63 | Provinsi | 97,77 | Provinsi | 97,81 | 92,26 | 98,01 | 98 | Tercapai | DP3A |
| 16 | Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi | Persen | | | | PUSAT | | | | | | | PUSAT | Tercapai | Dp3A |
| 17 | Persentase ARG pada Belanja langsung APBD | Poin | 31,0 | NA | 25,0 | 25,0 | 24,1 | 25,0 | 14.7 | 25,0 | 15,51 | 25,0 | 25,0 | Tidak Tercapai | DP3A |
| 18 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten /kota | Poin | 0,0149 | NA | 0,0119 | 0,0112 | 0,0150 | 0,0107 | 0.2111 | 0,0102 | 0,0236 | 0,0098 | 0,0098 | Tidak Tercapai | DP3A |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 19 | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Poin | 0,0104 | NA | 0,0155 | 0,0090 | 0,1500 | 0,0088 | 0.118 | 0,0087 | 17,27 | 0,0086 | 0,0086 | Tidak Tercapai | DP3A |
| **3** | **PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ketersediaan pangan utama | kg/kap/tahun | 230,61 | 246,61 | 231,20 | 254,87 | 156,18 | 151,84 | 164.92 | 247,04 | 161,00 | 251,81 | 251,81 | Tercapai | DKPP |
| 2 | Ketersediaan energi perkapita | kkal/kap/hr | 2512,80 | 2400 | 2.375 | 2400 | 2230 | 2247 | 2403 | 2.400 | 2318,00 | 2.400 | 2.400 | Tercapai | DKPP |
| 3 | Ketersediaan protein perkapita | gram/kap/hr | 89,40 | 68 | 68 | 63 | 63,6 | 64,30 | 81,2 | 63 | 76,40 | 63 | 63 | Tercapai | DKPP |
| 4 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen | 91,53 | 98,00 | 90,81 | 93,5 | 93,75 | 94,00 | 94,68 | 95,00 | 92,96 | 95,30 | 95,30 | Tercapai | DKPP |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **4** | **PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelesaian kasus tanah Negara | Persen | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | SETDA |
| 2 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | DPMPTSP |
| 3 | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal | Persen | 77 | 70 | 73 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | Tercapai | DPMPTSP |
| **5** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 1 | Tersusunnya RPPLH kota | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Tercapai | DLH |
| 2 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Tercapai | DLH |
| 3 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Tercapai | DLH |
| 4 | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air | Poin | 49 | 40.36 | 56,33 | 40,47 | 64,72 | 49,80 | 51,39 | 37,17 | 46,67 | 38,17 | 50,00 | Tercapai | DLH |
| 5 | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara | Poin | 85,86 | 80.1 | 80,09 | 80,21 | 99,35 | 86,10 | 51,39 | 79,72 | 95,92 | 79,814 | 79,814 | Tercapai | DLH |
| 6 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Persen | 50 | 50 | 50 | 55 | 67,55 | 34 | 54,55 | 54,55 | 57,14 | 55 | 55 | Tercapai | DLH |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | Pelatihan | Ada | ada | ada | ada | ada | ada | Ada | ada | Ada | ada | Ada | Tercapai | DLH |
| 8 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada/tidak | Ada | ada | ada | ada | ada | ada | Ada | ada | Ada | ada | Ada | Tercapai | DLH |
| 9 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti. | Persen | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | DLH |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 10 | Timbulan sampah yang ditangani | Persen | 75,37 | 76 | 77,20 | 76,5 | 81 | 75,00 | 81,32 | 81,32 | 79,03 | 81,40 | 81,40 | Tercapai | DLH |
| 11 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R | Persen | 6,26 | 6.4 | 7,61 | 6,6 | 7,85 | 6,80 | 7.80 | 7,80 | 7,81 | 7,90 | 7,90 | Tercapai | DLH |
| 12 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Persen | 81,47 | 80,10 | 84,81 | 81,5 | 88,85 | 81,80 | 89,15 | 89,15 | 86,84 | 89,95 | 89,95 | Tercapai | DLH |
| 13 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota | Poin | 55,29 | 50,396 | 55,45 | 51,371 | 58,597 | 52,35 | 64,29 | 53,439 | 58,400 | 54,532 | 54,532 | Tercapai | DLH |
| 14 | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota | Poin | 77,04 | 76 | 77,20 | 76,50 | 81,19 | 75 | 81,32 | 81,32 | 79,03 | 81,40 | 81,40 | Tercapai | DLH |
| 15 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | Persen | 26,11 | 26 | 37,37 | 46 | 38,13 | 34 | 54,55 | 38 | 57,14 | 12 | 12 | Tercapai | DLH |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | oleh Pemerintah Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Rasio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | Tercapai | Disdukcapil |
| 2 | Rasio bayi berakte kelahiran | Rasio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 0,98 | 1: 1 | 1: 1 | Tercapai | Disdukcapil |
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah | Rasio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 0,55 | 1: 1 | 1: 1 | Tercapai | Disdukcapil |
| 4 | Ketersediaan database kependudukan skala Kota | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Tercapai | Disdukcapil |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/ belum | sudah | sudah | Sudah | sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Tercapai | Disdukcapil |
| 6 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Persen | 75 | 80 | 98 | 85 | 99,34 | 90 | 99,31 | 99,5 | 100,5 | 100 | 100 | Tercapai | Disdukcapil |
| 7 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | Persen | 75 | 76 | 95 | 80 | 96,43 | 82 | 96,51 | 98 | 98 | 99 | 99 | Tercapai | Disdukcapil |
| 8 | Kepemilikan KTP | Persen | 98 | 99.50 | 98 | 99,8 | 99,34 | 98 | 99,31 | 99,50 | 100,86 | 100 | 100 | Tercapai | Disdukcapil |
| 9 | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun | Persen | 94,07 | 95 | 95 | 96 | 96,43 | 97 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Disdukcapil |
| 10 | Cakupan pasangan non muslim berakte kawin | Persen | 51 | 25 | 31 | 30 | 53,82 | 35 | 52,49 | 55 | 55 | 60 | 60 | Tercapai | Disdukcapil |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **7** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | LPM | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | 75 | 75 | Tercapai | DP3A |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Kelompok | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Tercapai | DP3A |
| **8** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | 1,53 | 1,52 | 1,33 | 1,51 | 1,19 | 1,47 | 2.07 | 1,46 | | 1,44 | 1,44 | Tercapai | DPPKB |
| 2 | Total Fertility Rate (TFR) | Persen | 2,15 | 2,15 | 2,135 | 2,15 | 2,03 | 2,135 | 1.960 | 2,135 | 1,87 | 2,135 | 2,135 | Tercapai | DPPKB |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 3 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB | Persen | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 45,94 | 48,64 | 61,11 | 51,35 | 51,35 | Tercapai | DPPKB |
| 4 | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | Persen | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 35.14 | 35,14 | 44,44 | 40,54 | 40,54 | Tercapai | DPPKB |
| 5 | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Jumlah | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | Tercapai | DPPKB |
| 6 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan | Jumlah | NA | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tercapai | DPPKB |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 7 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Jumlah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.96 | 2 | 1,37 | 2 | 2 | Tercapai | DPPKB |
| 8 | Ratio Akseptor KB | Persen | 77,41 | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 78,64 | 77,51 | 78.86 | 78,66 | 64,70 | 78,68 | 78,68 | Tercapai | DPPKB |
| 9 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 | Persen | 77,41 | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 78,64 | 77,51 | 78.86 | 78,66 | 64,70 | 78,68 | 78,68 | Tercapai | DPPKB |
| 10 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | Persen | 14,42 | 14,41 | 16,23 | 14,40 | 12,09 | 15,75 | 12.10 | 15,00 | 9,30 | 14,50 | 14,50 | Tercapai | DPPKB |
| 11 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | Persen | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0.15 | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | Tidak Tercapai | DPPKB |
| 12 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 11,43 | 11,42 | 13,30 | 11,41 | 12,44 | 11,40 | 12.45 | 11,39 | 15,95 | 11,38 | 11,38 | Tidak Tercapai | DPPKB |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 13 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | 22,36 | 22,40 | 20,27 | 22,44 | 21,13 | 20,35 | 20.40 | 20,40 | 19,79 | 20,45 | 20,45 | Tercapai | DPPKB |
| 14 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 77,41 | 77,41 | 77,42 | 77,42 | 78,64 | 77,51 | 78.66 | 78,66 | 64,70 | 78,68 | 78,68 | Tercapai | DPPKB |
| 15 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persen | 66 | 66,05 | 53,01 | 66,06 | 58,48 | 66,07 | 95,4 | 95,4 | 100 | 95,45 | 95,45 | Tercapai | DPPKB |
| 16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen | 52,73 | 52,74 | 31,97 | 52,75 | 40,57 | 52,76 | 80.07 | 52,77 | 71,9 | 52,78 | 52,78 | Tidak Tercapai | DPPKB |
| 17 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen | 25,75 | 25,76 | 18,03 | 25,77 | 26,51 | 25,78 | 72.95 | 25,79 | 75,93 | 25,80 | 25,80 | Tidak Tercapai | DPPKB |
| 18 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | Jumlah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tercapai | DPPKB |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 19 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | Persen | 40,68 | 42,18 | 49,18 | 43,48 | 50,00 | 44,59 | 50 | 50 | 114,71 | 50,25 | 50,25 | Tercapai | DPPKB |
| 20 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | DPPKB |
| 21 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | Persen | 39,94 | 39,94 | 44,5 | 39,94 | 66,39 | 39,95 | 79.16 | 39,95 | 79,83 | 39,96 | 39,96 | Tidak Tercapai | DPPKB |
| 22 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | DPPKB |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 23 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persen | 93,2 | 93,2 | 30 | 93,2 | 100 | 94,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | DPPKB |
| 24 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | DPPKB |
| 25 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,47 | 0 | 0 | Tercapai | DPPKB |
| 26 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persen | 70 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 100 | 100 | 81,63 | 100 | 100 | Tercapai | DPPKB |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 27 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Persen | 35,13 | 35,30 | 35,30 | 35,47 | 35,47 | 35,64 | 41.07 | 35,81 | 49,89 | 36,00 | 36,00 | Tidak Tercapai | DPPKB |
| 28 | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Tahun | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Tercapai | DPPKB |
| 29 | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) | Persen | 77,41 | 77,41 | 77,42 | 77,42 | 78,64 | 77,51 | 78.66 | 78,66 | 64,37 | 78,68 | 78,68 | Tercapai | DPPKB |
| 30 | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) | Persen | 11,43 | 11,42 | 13,30 | 11,41 | 12,44 | 11,4 | 12.45 | 11,39 | 15,95 | 11,38 | 11,38 | Tidak Tercapai | DPPKB |
| **9** | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Orang | 24.060.642 | 22.442.108 | 22.442.108 | 23.140.448 | 285.298 | 23.890.192 | 30,469,356 | 24.696.261 | 30.841.459 | 25.564.066 | 113953567 | Tidak Tercapai | Dishub |
| 2 | Rasio ijin trayek | Rasio (/Jml Pddk) | 0,000381 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0024 | 0,000152 | 0,000435 | 0.0114894 | 0,000309 | 0,0114894 | 0,000189 | 0,000189 | Tidak Tercapai | Dishub |
| 3 | Jumlah uji kir angkutan umum | Kendaraan | 5,851 | 4.504 | 4.504 | 5094 | 5304 | 5586 | 2015 | 5620 | 5,378 | 5662 | 5662 | Tidak Tercapai | Dishub |
| 4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit terminal bis | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tidak Tercapai | Dishub |
| 5 | Persentase layanan angkutan darat | Persen | 1,11 | 1,36 | 1,36 | 1,22 | 1,11 | 1,11 | 0.04 | 1,02 | 0,04 | 0,94 | 0,94 | Tidak Tercapai | Dishub |
| 6 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Dishub |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 7 | Pemasangan rambu-rambu | Persen | 25,64 | 14,91 | 14,91 | 15,07 | 15,07 | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Dishub |
| 8 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 1,31 | 1,25 | 1,25 | 1,19 | 0,0019 | 1,13 | 1,56 | 1,56 | 1,8 | 1,64 | 1,64 | Tidak Tercapai | Dishub |
| 9 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Penumpang | 24.261.237 | 16.466.814 | 16.466.814 | 21.457.800 | 285.298 | 25.297.272 | 30,469,356 | 27.597.024 | 19,770,026 | 33.580.638 | 33.580.638 | Tidak Tercapai | Dishub |
| 10 | Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal | Penumpang | 4.335.315 | 4.890.991 | 4.890.991 | 5.380.090 | 27.602 | 5.918.099 | 71,948 | 6.509.909 | 848,773 | 7.160.900 | 7.160.900 | Tidak Tercapai | Dishub |
| 11 | Rasio konektivitas Kabupaten / Kota | Rasio | 0,82 | 0,77 | 0,77 | 0,83 | 0,78 | 0,80 | 0.78 | 0,7 | 0,78 | 1 | 1 | Tidak Tercapai | Dishub |
| 12 | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota | Rasio | 0,62 | 0,76 | 0,62 | 0,74 | 0,61 | 0,62 | 0.63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 1 | Tercapai | Dishub |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **10** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persen | 57 | 66 | 59,1 | 74 | 40,5 | 81 | 90 | 95 | 94 | 100 | 100 | Tercapai | Diskominfo |
| 2 | Hasil Penilaian SPBE | Indeks | 2,91 | 2,92 | 2,97 | 2,92 | 3,11 | 2,98 | 2,75 | 2,98 | Bahwa hasil tsb merupakan hasil 2022 dan masih akan direvisi menunggu hasil 2023 dari kemenpan RB | 2,99 | 2,99 | Tercapai | Diskominfo |
| 3 | Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi | Persen | 7 | 14 | 14 | 21 | 26,67 | 28 | 63 | 34 | 63 | 41 | 41 | Tercapai | Diskominfo |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 4 | Persentase Keterbukaan Informasi publik | Persen | 100 | 100 | 98 | 63 | 77,5 | 100 | Hasil dari monev PPID tahun 2023 predikat menuju informatif dengan nilai kumulatif masih di KI jabar | 100 | Hasil dari monev PPID tahun 2023 predikat menuju informatif dengan nilai kumulatif masih di KI jabar | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Diskominfo |
| 5 | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Diskominfo |
| 6 | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Diskominfo |
| 7 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan | Persen | 71,81 | 71,81 | 72,69 | 73,57 | 70 | 74,45 | 81,49 | 74,7 | 86,07 | 74,7 | 74,7 | Tercapai | Diskominfo |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Koperasi Aktif | Persen | 62,26 | 3,44 | 65 | 6,88 | 66,2 | 10,33 | 18.75 | 18,75 | 21,40 | 18,75 | 18,75 | Tercapai | DinKUKMdagin |
| 2 | Persentase Koperasi berkualitas | Persen | 8,30 | 8,70 | 8,70 | 9,20 | 7,00 | 9,80 | 8.96 | 9,00 | 10,14 | 10,00 | 10,00 | Tidak Tercapai | DinKUKMdagin |
| 3 | Jumlah UMKM (wirausaha) baru | UMKM | 0 | 180 | 124 | 180 | 1088 | 180 | 260 | 326 | 370 | 326 | 326 | Tercapai | DinKUKMdagin |
| 4 | Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun | Milyar Rupiah | 2,3 T | 68 M | 41 M | 81 M | 69,5 M | 95 | 65.7 | 70 | 194 | 80 | 80 | Tidak Tercapai | DinKUKMdagin |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 5 | Jumlah PKL yang direlokasi | PKL | 418 | 500 | 1127 | 500 | 0 | 500 | 593 | 621 | 682 | 621 | 621 | Tercapai | DinKUKMdagin |
| 6 | Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM | PKL | 418 | 150 | 50 | 150 | 223 | 150 | 31 | 59 | 87 | 59 | 59 | Tidak Tercapai | DinKUKMdagin |
| 7 | Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar | Produk | 70 | 75 | 40 | 40 | | 40 | 44 | 45 | | 50 | 50 | | Disparbud |
| 8 | Persentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti | Persen | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | - | 85 | - | 90 | 90 | | DinKUKMdagin |
| 9 | Meningkatnya koperasi yang berkualitas | Angka | 44 | 64 | 64 | 84 | 64 | 104 | 76 | 86 | 86 | 96 | 96 | Tidak Tercapai | DinKUKMdagin |
| 10 | Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha | Angka | 108 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | Tercapai | DinKUKMdagin |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **12** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Trilyun rupiah | 3,1 | 2,5 | 1,63 | 2,53 | 0,618 | 2,55 | 1,571 | 2,58 | 1,934 | 2,6 | 2,6 | Tidak Tercapai | DPMPTSP |
| 2 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | Persen | 0 | 1,2 | 0,6 | 0,79 | 0,36 | 1,2 | 1,54 | 1,54 | 22,02 | 1,54 | 1,54 | Tercapai | DPMPTSP |
| 3 | Persentasi peningkatan investasi di Kabupaten / Kota | Persen | 100 | 100 | 46 | 100 | 85 | 90 | 154 | 100 | 20,94 | 100 | 100 | Tercapai | DPMPTSP |
| **13** | **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras | Persen | NA | NA | NA | 5 | NA | 5 | NA | 5 | NA | 5 | 15 | | Dispora |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan | Persen | Jumlah pemuda pelopor yang aktif = 5 | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | Tercapai | Dispora |
| 2 | Wirausaha muda | Orang | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 200 | 200 | 11,07 | 300 | 300 | Tercapai | Dispora |
| 3 | Persentase sarana prasarana Olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal | Persen | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 50,01 | 33,34 | 50,01 | 66.67 | 66,67 | IKD Tidak Ada | 83,33 | 83,33 | Tercapai | Dispora |
| 4 | Rasio ketersediaan SDM Tenaga keolahragaan | Rasio | 0,001511: 2,08 | 0,001552: 2,08 | 0,001552: 2,08 | 0,001661: 2,08 | 0,001661: 2,08 | 0,001734: 2,08 | 0,001773: 2,08 | 0,003264: 2,08 | IKD Tidak Ad | 0,003264: 2,08 | 0,003264: 2,08 | Tercapai | Dispora |
| 5 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Poin | 0,27 | 0,01 | 0,014 | 0,004 | 1,4 | 0,0148 | 0,1128 | 0,0148 | 3,031 | 0,0148 | 0,0148 | Tercapai | Dispora |
| 6 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persen | 24 | 25 | 4,33 | 25 | 4,33 | 5,01 | 21.17 | 5,51 | 21,17 | 6,06 | 6,06 | Tidak Tercapai | Dispora |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 7 | Peningkatan prestasi olahraga | Medali | 18 | 0 | 0 | 68 | 60 | 13 | 241 | 65 | 74 | 15 | 40 | Tercapai | Dispora |
| **14** | **STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/tidak | Ada | N/A | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | ada | Ada | ada | ada | Tercapai | Diskominfo |
| 2 | Data basis pembangunan daerah | Ada/tidak | Ada | N/A | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | ada | Ada | ada | ada | Tercapai | Diskominfo |
| 3 | Buku ”Kota Bogor Dalam Angka” | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | ada | Ada | ada | ada | Tercapai | Diskominfo |
| 4 | Buku ”PDRB” | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | ada | Ada | ada | ada | Tercapai | Diskominfo |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 5 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Diskominfo |
| 6 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persen | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Diskominfo |
| **15** | **PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | Diskominfo |
| 1 | Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah | Persen | NA | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 86,1 | 85 | 86 | 90 | 90 | Tercapai | Diskominfo |
| 2 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 77 | 82 | 77 | 83 | 83 | Tidak Tercapai | Diskominfo |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **16** | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya | Persen | 10 | 10 | 0 | 10 | | 10 | 76.5 | 10 | 76,5 | 10 | 10 | | Disparbud |
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Cagar budaya non bangunan | 32 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Tidak Tercapai | Disparbud |
| 3 | Jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni | Buah | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 17 | 41 | 38 | 41 | 39 | 39 | Tercapai | Disparbud |
| 4 | Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya | Persen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | | Disparbud |
| **17** | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 1 | Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Rasio | 25.421 | 35.000 | 28.530 | 42.000 | 1.084 | 60.000 | 5.249 | 108.000 | 99.615 | 144.000 | 144.000 | | Disarpus |
| 2 | Rasio Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Rasio | 67.999 | 77.370 | 77.684 | 79.870 | 77.684 | 82.370 | 78.354 | 84,87 | 80.834 | 87.37 | 87.37 | | Disarpus |
| 3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Rasio | 6.60 | 7.50 | 8.40 | 7.70 | 7.3 | 8.00 | 8.96 | 8.20 | 0.43 | 8.40 | 8.40 | | Disarpus |
| 4 | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | Jumlah | 25.421 | 35.000 | 28.530 | 42.000 | 42.000 | 60.000 | 5.249 | 108.000 | 99.615 | 144.000 | 144.000 | | Disarpus |
| 5 | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul | 37.017 | 39.517 | 38.255 | 42.017 | 38.255 | 44.517 | 38.528 | 47.017 | 39.615 | 49.517 | 49.517 | | Disarpus |
| 6 | Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Orang | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 12 | 13 | 20 | 15 | 15 | | Diskarpus |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **18** | **KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | Diskarpus |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Instansi | NA | 25 | 67 | 45 | 45.48 | 70 | 70 | 95 | 41.17 | 100 | 100 | | Diskarpus |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | NA | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Diskarpus |
| **C** | **FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kunjungan wisata | Orang | 7.965.987 | 7.004.033 | 3.457.722 | 7.704.436 | 3.803.494 | 4.183.843 | 5,650,637 | 5.174.327 | 5.650.637 | 6.399.090 | 6.399.090 | Tercapai | Disparbud |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 2 | Lama kunjungan Wisata | Hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 2-3 hari | 1-2 hari | 2-3 hari | 2-3 hari | Tercapai | Disparbud |
| 3 | PAD sektor pariwisata | Rupiah | 239.350.000.000 | | | 168.205.200.000 | 185.661.140.961 | 277.530.000.000 | 328,823,584,610 | | 328.823.584.610 | | | Tercapai | Disparbud |
| **2** | **PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Produktivitas padi per hektar | Ton/ha | 7 | 7,14 | 7,18 | 7,21 | 7,28 | 7,20 | 7.28 | 7,33 | 7,28 | 7,38 | 7,38 | Tidak Tercapai | DKPP |
| 2 | Cakupan bina kelompok petani | Persen | 68,97 | 70,25 | 75,08 | 71,43 | 76,37 | 75,87 | 89,4 | 90,21 | 93,08 | 90,46 | 90,46 | Tercapai | DKPP |
| 3 | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persen | -2,72 | - | 19,83 | NA | NA | -2,14 | 2.14 | -2,19 | 79,75 | -2,24 | -2,24 | Tidak Tercapai | DKPP |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 4 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Ton/Ha | 13,14 | - | 13,40 | NA | NA | 13,67 | 12.92 | 13,91 | 10,81 | 13,94 | 13,94 | Tidak Tercapai | DKPP |
| **3** | **PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | DinKUKMdagin |
| 1 | Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor | Persen | 99.283.771,63 USD | 1,1 | -0,09 (90.705.930.244) | 1,35 | 0,59 (99.874.168,96) | 1,60 | 15,16 | 15,16 | 8,70 | 16,00 | 16,00 | Tercapai | DinKUKMdagin |
| 2 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan ( IUUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko/ swalayan ) | Persen | 7,21 | 10 | 21,06 | 13 | | 22 | 26,92 | 22,50 | 76,20 | 30,77 | 30,77 | Tercapai | DinKUKMdagin |
| 3 | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persen | 16,10 | 20 | 87,44 | 22 | | 23 | 28,08 | 23 | 55,43 | 25 | 25 | Tercapai | DinKUKMdagin |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 4 | Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapan nya (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku | Persen | 6,81 | 13,80 | 10,81 | 22,87 | | 11,92 | 24,25 | 12,52 | 38,67 | 13,15 | 13,15 | Tercapai | DinKUKMdagin |
| **4** | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | DinKUKMdagin |
| 1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | Persen | 75 | 77,5 | 77,5 | 80 | 80,2 | 82,5 | 86.66 | 85 | 100 | 85 | 85 | Tercapai | DinKUKMdagin |
| 2 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi | Persen | 130,30 | 8,21 | 7,06 | 9,00 | | 7,06 | 45.60 | 48,98 | | 52,38 | 52,38 | Tercapai | DinKUKMdagin |
| 3 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang yang ditetapkan dalam RPIP | persen | 0 | -2,17 | 30 | 1.83 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tercapai | DinKUKMdagin |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 28,41 | 30 | 29,41 | 32 | | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | Tercapai | DinKUKMdagin |
| 5 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100% | 100% | 100 | 100% | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Tercapai | DinKUKMdagin |
| 6 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten / Kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Tercapai | DinKUKMdagin |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 7 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | Persen | 0 | 8 | 7,14 | 18 | | 7,5 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Tercapai | DinKUKMdagin |
| **5** | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Produksi Ikan Konsumsi | Ton | 4980 | 5129 | 5150,99 | 5179 | 5206 | 4.182,00 | 5,211 | 5.303,70 | 3.364,51 | 5.353,50 | 5.353,50 | Tidak Tercapai | DKPP |
| 2 | Jumlah Konsumsi Ikan | kg | 28.068.674,50 | 30.939.680 | 28.899.474 | 31.553.524 | 29.991.190 | 31.130.160 | 30,076,148 | 31.749.711 | 30.076.148 | 32.378.540 | 32.378.540 | Tidak Tercapai | DKPP |
| 3 | Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) wilayah kabupaten/kota (sumber data: One data KKP) | Ton | 5063,14 | 5.129 | 5150,99 | NA | NA | 4.182,00 | 5,211 | 5.303,70 | 3.364,51 | 5.353,50 | 5.353,50 | Tidak Tercapai | DKPP |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **D** | **FOKUS PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PERENCANAAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/tidak | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | Tercapai | Bapperida |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada/tidak | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | Tercapai | Bapperida |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada/tidak | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | Tercapai | Bapperida |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/tidak | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | Tercapai | Bapperida |
| 5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Persen | 100 | 100 | 95,61 | 100 | 91,97 | 100 | 91.97 | 100 | 99,27 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Bapperida |
| 6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | Persen | 100 | 100 | 97,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Bapperida |
| 7 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64,66* | 100 | 58,85 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Bapperida |
| 8 | Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tercapai | Bapperida |
| 9 | Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tercapai | Bapperida |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 10 | Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Tercapai | Bapperida |
| 11 | Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Tercapai | Bapperida |
| 12 | Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | Persen | 100 | 100 | 95,61 | 100 | 91,97 | 100 | 91.97 | 100 | 99,27 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Bapperida |
| 13 | Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD | Persen | 100 | 100 | 97,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Bapperida |
| 14 | Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64,66* | 100 | 58,85 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | Bapperida |
| | **Inspektorat (Perencanaan dan Keuangan)** | | | | | | | | | | | | | | |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 15 | Maturitas SPIP | Predikat | Level 3 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Tercapai | Inspektorat |
| 16 | Peningkatan kapabilitas APIP | Predikat | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Tercapai | Inspektorat |
| **2** | **KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Tercapai | BKAD |
| 2 | Persentase SILPA | Persen | 10,88 | 10 | 11,90 | 9,5 | 6 | 9 | 5,11 | 8,5 | 1,77 | 8 | 8 | Tercapai | BKAD |
| 3 | Persentase SILPA terhadap APBD | Persen | 10,88 | 10 | 11,90 | 9,5 | 6 | 9 | 5,11 | 8,5 | 1,77 | 8 | 8 | Tercapai | BKAD |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 4 | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tercapai | BKAD |
| 5 | Persentase belanja pendidikan (20%) | Persen | 23,49 | ≥20 | 21,15 | ≥20 | 24,14 | ≥20 | 20,04 | ≥20 | 21,67 | ≥20 | ≥20 | Tercapai | BKAD |
| 6 | Persentase belanja kesehatan (10%) | Persen | 16,54 | ≥10 | 21,7 | ≥10 | 12,18 | ≥10 | 11,56 | ≥10 | 22,89 | ≥10 | ≥10 | Tercapai | BKAD |
| 7 | Penetapan APBD | Tepat Waktu/ Tidak | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tercapai | BKAD |
| 8 | Rasio belanja urusan pemerintahan umum ( dikurangi transfer expenditures) | Persen | 0,05 | 0,15 | 0,21 | 0,17 | 74,58 | 0,18 | 78,39 | 78,50 | 80,61 | 78,70 | 78,70 | Tercapai | BKAD |
| 9 | Opini Laporan keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Tercapai | BKAD |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 10 | Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Persen | 12 | 11 | 12 | 11 | 4 | 10 | 18 | 10 | 4,32 | 10 | 10 | Tidak Tercapai | BKAD |
| 11 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD setahun sebelumnya | Rasio | 10 | 11 | 25 | 11 | 14 | 10 | 14 | 10 | 5,44 | 10 | 10 | Tidak Tercapai | BKAD |
| 12 | Devisiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Persen | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3.32 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | Tidak Tercapai | BKAD |
| 13 | Manajemen Aset | | | | | | | | | | | | | | BKAD |
| 14 | Adanya Daftar Aset Tetap | Predikat | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tercapai | BKAD |
| 15 | Penyusunan Manual daftar aset tetap | Predikat | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tercapai | BKAD |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 16 | Adanya proses inventarisasi aset tahunan | Predikat | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tercapai | BKAD |
| 17 | Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran | Predikat | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tercapai | BKAD |
| **3** | **KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | JP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 22 | 20 | 20 | Tercapai | BKPSDM |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Persen | 91,84 | 92 | 94,12 | 92,5 | 94,4 | 93 | 95,39 | 95,59 | 85,47 | 96 | 96 | Tercapai | BKPSDM |
| 3 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural | Persen | 68 | 75 | 52,72 | 77,5 | 69 | 80 | 51,5 | 82,50 | 35,31 | 85 | 85 | Tidak Tercapai | BKPSDM |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 4 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Orang | 34 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Tercapai | BKPSDM |
| 5 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Orang | 150 | 150 | 157 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Tercapai | BKPSDM |
| 6 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 3690 | 3700 | 3651 | 3710 | 3483 | 3720 | 4015 | 3730 | 4723 | 3740 | 3740 | Tercapai | BKPSDM |
| 7 | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | Persen | 101,53 | 103,73 | 103,73 | 105,16 | 115,73 | 105,42 | 132,78 | 58,00 | 58,83 | 58,00 | 58,00 | Tercapai | BKPSDM |
| 8 | Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | Persen | 9,52 | 10,43 | 10,43 | 11,96 | 11,56 | 24,20 | 21.16 | 25,07 | 21,16 | 25,96 | 25,96 | Tidak Tercapai | BKPSDM |
| 9 | Rasiopegawai fungsional bersetifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57,76 | 100 | 57,76 | 100 | 100 | Tidak Tercapai | BKPSDM |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | guru dan tenaga kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan. | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Bapperida |
| 2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66,70 | 80 | 85 | 100 | 90 | 90 | Tercapai | Bapperida |
| | | Penerapan SIDa: | | | | | | | | | | | | | Bapperida |
| 3 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | Persen | 73,68 | 75 | 78,30 | 77,5 | 97,6 | 58,33 | 97,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai | Bapperida |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| 4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 91,24 | 94 | 63 | 96,50 | 96,50 | Tercapai | Bapperida |
| **5** | **PENGAWASAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pelanggaran pegawai | Persen | 1,3 | 0,075 | 0,3359 | 0,050 | 0,016 | 0,320 | 0,225 | 0,21 | 0.006 | 0,20 | 0,20 | Tercapai | Inspektorat |
| 2 | Persentase tindak lanjut temuan internal | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 55,5 | 90 | 93,81 | 94 | 94,10 | 94,5 | 94,5 | Tercapai | Inspektorat |
| 3 | Persentase tindak lanjut temuan eksternal | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 94,39 | 80 | 91,63 | 91,65 | 90,2 | 92,7 | 92,7 | Tercapai | Inspektorat |
| 4 | Persentase peningkatan kapabilitas APIP | Persen | 70 | 72.5 | 72,5 | 75 | 75 | 77,50 | 84,50 | 85 | 4,14 | 86,50 | 86,50 | Tercapai | Inspektorat |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| **6** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | Ada/tidak | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | Tercapai | Setwan |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/tidak | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | Tercapai | Setwan |
| 3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda | Ada/ tidak | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | Tercapai | Setwan |

| -22 | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018/2019) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd | Evaluasi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | | | |
| | dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

*Sumber: Data diolah, 2023*

Evaluasi capaian RPJMD Kota Bogor, secara umum terbagi atas tiga (3) aspek besar yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, serta dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada aspek kesejahteraan masyarakat secara garis besarnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi di beberapa indikator menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun awal RPJMD. Indikator tersebut seperti laju inflasi dan indeks gini yang menunjukkan angka yang semakin tinggi dibandingkan kondisi di awal periode RPJMD. Kemudian, indikator angka kematian bayi dan angka kematian ibu yang memperlihatkan peningkatan. Indikator-indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat tersebut meningkatkan disebabkan salah satunya yaitu adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia dan tentunya Kota Bogor pada pertengahan periode RPJMD berjalan yang melumpuhkan seluruh aktivitas.

Kedua, aspek pelayanan umum yang terdiri atas beberapa urusan didalamnya. Pada urusan-urusan di dalam aspek pelayanan umum tersebut terdapat beberapa indikator yang menunjukkan penurunan. Seperti pada halnya dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan indikator "persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman dan layak" yang menurun. Penurunan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perubahan standar pengukuran indikator tersebut. Selain itu, penurunan juga ditunjukkan dari urusan penanaman modal dengan indikator "jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)". Terkait penurunan pada indikator tersebut diakibatkan lantaran terjadinya pandemi *Covid-19* yang melemahkan aktivitas pemerintahan khususnya ekonomi.

Ketiga, kaitannya dengan aspek daya saing daerah. Pada beberapa indikator penyerta di dalam aspek tersebut seperti pengeluaran per-kapita dan angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan tren positif. Akan tetapi, keadaan yang sebaliknya terlihat pada indikator rasio ketergantungan tua yang memperlihatkan kenaikan, yang berarti kenaikan nilai ini menunjukkan semakin tinggi ketergantungan usia tua yang ditanggung oleh usia kerja. Selanjutnya, interpretasi yang negatif diperlihatkan pada capaian indikator makro pembangunan dengan indikator persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada capaian standar pelayanan minimal (SPM) hampir seluruhnya sudah menampilkan capaian yang konsisten dan beberapa pelayanan yang menunjukkan peningkatan.

# BAB III
# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung oleh adanya pendanaan yang memadai. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, diharapkan dalam pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pendanaan pada suatu urusan pemerintahan tidak terjadi adanya tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan. Wujud pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam proses analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Bogor Dapat diketahui dari realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan ke depan.

## A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut.

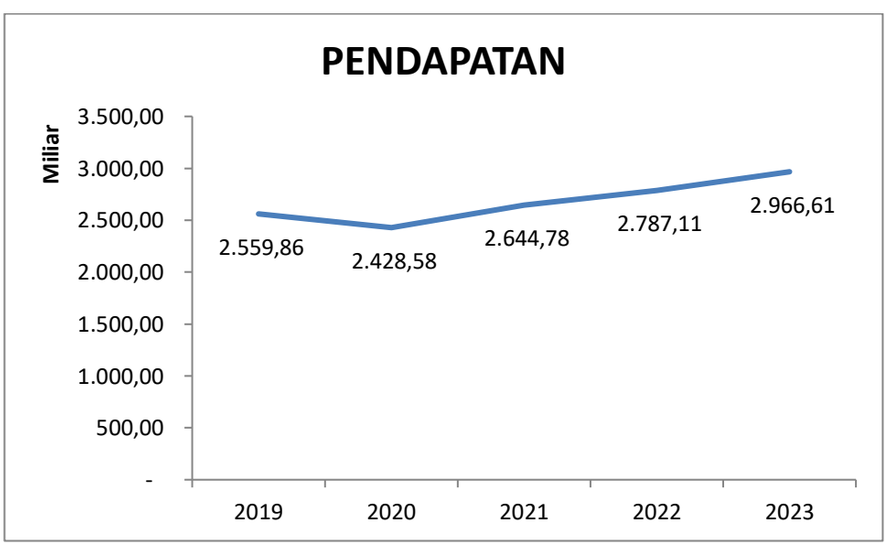
a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
    1. Penerimaan pajak daerah.
    2. Penerimaan retribusi daerah.
    3. Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan.
    4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer, terdiri dari
    1. Transfer pemerintah pusat.
    2. Transfer antar daerah.

c. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:
    1. Hibah.
    2. Dana darurat.
    3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

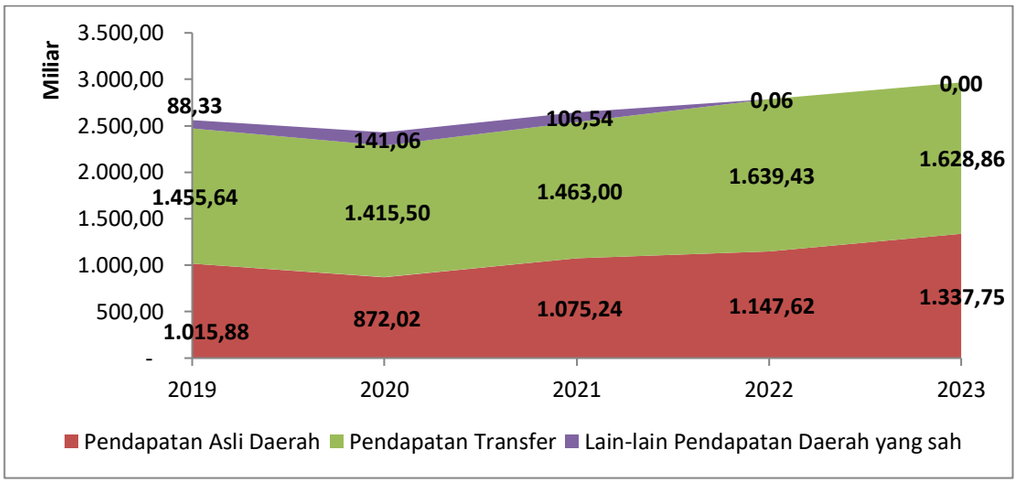
Gambaran umum tentang Pendapatan Daerah Kota Bogor menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019-2023, sebagai berikut:

**Gambar 3.1. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor 2019-2023**




*Sumber: LRA Kota Bogor 2019-2023*

**Gambar 3.1. 2 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bogor 2019-2023**




*Sumber: LRA Kota Bogor 2019-2023*

**Tabel 3.1. 1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019-2023**

| No. | Uraian | Realisasi | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | **PENDAPATAN** | **2.559.857.207.793,86** | **2.428.579.503.649,12** | **2.644.780.935.777,11** | **2.787.105.058.802,92** | **2.966.607.056.081,80** | 3,76% |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **1.015.884.216.919,86** | **872.017.242.152,12** | **1.075.240.926.213,11** | **1.147.623.045.708,92** | **1.337.749.753.710,80** | 7,12% |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 689.543.006.040,00 | 509.039.468.746,00 | 624.784.886.145,00 | 744.960.592.537,00 | 897.753.380.910,00 | 6,82% |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 51.362.153.192,00 | 35.010.375.259,00 | 36.033.010.539,00 | 23.942.828.414,00 | 31.081.390.548,00 | -11,80% |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan | 28.241.844.911,00 | 31.927.293.792,00 | 32.420.552.150,00 | 32.170.048.280,00 | 33.960.776.435,00 | 4,72% |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang sah | 246.737.212.776,86 | 296.040.104.355,12 | 382.002.477.379,11 | 346.549.576.477,92 | 374.954.205.817,80 | 11,03% |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** | **1.455.644.350.874,00** | **1.415.498.666.396,00** | **1.463.000.794.326,00** | **1.639.426.533.844,00** | **1.628.857.302.371,00** | **2,85%** |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 1.147.567.416.814,00 | 1. It,00 | 1.127.139.550.566,00 | 1.249.992.463.277,00 | 1.249.655.329.523,00 | 2,15% |
| 1.2.2 | Transfer antar - daerah | 308.076.934.060,00 | 303.398.115.497,00 | 335.861.243.760,00 | 389.434.070.567,00 | 379.201.972.848,00 | 5,33% |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah** | **88.328.640.000,00** | **141.063.595.101,00** | **106.539.215.238,00** | **55.479.250,00** | 0 | **-100,00%** |
| 1.3.1 | Hibah | 88.328.640.000,00 | 141.063.595.101,00 | 276.000.000,00 | 55.479.250,00 | 0 | -100,00% |

| No. | Uraian | Realisasi | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.3 | Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 0,00 | 0,00 | 106.263.215.238,00 | 0,00 | 0 | 0% |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2019-2023, diolah*
**LRA Unaudited*

Dari tabel 3.1.1 di atas, diketahui bahwa komponen pendapatan Kota Bogor yang mengalami pertumbuhan positif adalah PAD (7,12%) dan pendapatan transfer (2,85%), sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan negatif (-100%). Dilihat dari komponen PAD, pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama mencapai perolehan terendah pada tahun 2020, di mana wabah COVID-19 pertama kali merebak. Kemudian seiring dengan pemulihan dari dampak pandemi, perolehan pajak daerah tumbuh positif sebesar 23% di tahun 2021 dan 19% di tahun 2022. Selama kurun tahun 2019-1023, rata-rata pertumbuhan pajak daerah per tahun sebesar 6,82%.

Namun tren ini tidak dialami oleh retribusi daerah, yang hingga tahun 2023 rerata pertumbuhannya mencapai -11,8%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Piutang dari retribusi penyewaan tanah dan bangunan, terutama pada sewa rumah tinggal. Terdapat 1.102 kode bayar piutang, di mana 1.050 di antaranya adalah piutang sewa rumah tinggal. Upaya penagihan telah dilakukan setiap bulannya, namun terhambat oleh kesadaran penyewa rumah tinggal yang merasa telah memiliki aset rumah tinggal yang disewakan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
2. Belum optimalnya realisasi pendapatan dari retribusi penyewaan tanah dan bangunan, khususnya rusunawa, di mana biaya pengeluaran masih lebih besar dari pendapatan. Rusunawa Kota Bogor diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa. HIngga tahun 2023, terdapat 57 unit kamar yang digunakan sesuai perwali tersebut dan 49 unit kamar yang digunakan sebagai cadangan bagi korban bencana alam. Terdapat pula 26 unit kios yang baru terisi sebanyak 10 unit.
3. Izin mendirikan bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. Undang-undang ini mengubah ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah perihal Retribusi Perizinan Tertentu dan mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur tentang PBG paling lama 6 bulan sejak PP berlaku (bulan Agustus 2021). Dengan berlakunya ketentuan tersebut, sementara peraturan daerah yang mengatur pemungutan retribusi belum ada, terdapat jeda atau penghentian pemungutan terhadap retribusi IMB/PBG. Pemungutan baru dapat dilaksanakan kembali setelah ada surat edaran bersama 4 menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tanggal 25 Februari 2022. Adapun Peraturan Daerah Kota Bogor yang mengatur Perizinan Tertentu, baru ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 November 2022 yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dilakukan penyesuaian nomenklatur dan perhitungan IMB menjadi PBG yang berdampak kepada penurunan pendapatan PBG sebesar 30% dikarenakan penyesuaian indeks sebagai dasar perhitungan nilai retribusi.

4. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal yang menurun dari tahun 2019 sebesar Rp 732.533.000,00 menjadi Rp 110.918.500,00 di tahun 2022. Ini disebabkan oleh adanya kebijakan menghentikan pemungutan Retribusi Angkutan Umum di beberapa ruas jalan (TPR) sejak tanggal 14 Februari 2020 melalui Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor nomor: 552.22/213-UPTD tanggal 21 Februari 2020.
5. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang menurun dari tahun 2019 sebesar Rp 150.281.000,00 menjadi Rp 55.200.000,00 di tahun 2022. Ini disebabkan oleh hilangnya lahan Tempat Khusus Parkir Taman Topi sejak Januari 2020, karena ditutup untuk proses pembongkaran dan pembangunan Alun Alun Kota Bogor
6. Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum yang menurun dari tahun 2019 sebesar Rp 318.137.500,00 menjadi Rp 86.250.000,00 di tahun 2022. Ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kota dalam program penataan angkutan umum melalui Konversi 3:1, Reduksi 2:1, Kompensasi dan Penghapusan Angkutan Perkotaan.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang menurun dari tahun 2019 sebesar Rp

9.129.454.647,00 menjadi Rp 39.730.000,00 di tahun 2022. Pada tahun 2020, perolehan retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya melampaui target, namun kemudian menurun pada tahun 2021 karena beberapa kendala, di antaranya:

a. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada ditiadakannya pemagangan mahasiswa dan pembinaan sarana produksi/survei tatap muka.
b. 26 UPTD Puskesmas dan Labkesda sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD, sehingga siswa/mahasiswa magang di UPTD dikenakan tarif BLUD yang langsung masuk ke rekening BLUD dan tidak masuk ke pos retribusi lagi.
c. Sejak tahun 2021, sertifikasi PIRT/Laik Sehat menggunakan Sistem OSS (Online Single Submission) sehingga masyarakat dapat langsung mengakses dan menerbitkan sertifikat tanpa melalui Dinkes.

Di sisi lain, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan (HPKD) dan lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan positif dengan rerata masing-masing 4,72% dan 11,03%. Tren HPKD yang meningkat utamanya dipengaruhi oleh peningkatan laba bersih milik Pemerintah Kota Bogor yang berdampak pada bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Kota Bogor. Sedangkan tren peningkatan lain-lain PAD yang sah dipengaruhi oleh pendapatan dana BLUD dari RSUD Kota Bogor serta meningkatnya status FKTP menjadi BLUD. Berikut tabel target dan realisasi bagian laba Pemerintah Kota Bogor atas penyertaan modal terhadap BUMD 2019-2022:

**Tabel 3.1. 2 Target dan Realisasi Bagian Laba Pemerintah Kota Bogor atas Penyertaan Modal pada BUMD 2019-2022**

| No. | Uraian | 2019 | | | Persentase Realisasi 2019 Terhadap | | 2020 | | | Persentase Realisasi 2020 Terhadap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Target Murni | Target Perubahan | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Target Murni | Target Perubahan |
| | **Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD** | **32.609.812.282,00** | **28.083.707.761,00** | **28.241.844.911,00** | **86,61%** | **100,56%** | **36.044.034.570,00** | **33.520.905.570,00** | **31.927.293.792,00** | **88,58%** | **95,25%** |
| 1 | Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank BJB | 5.250.000.000,00 | 4.178.360.124,00 | 4.178.360.124,00 | 79,59% | 100,00% | 4.470.000.000,00 | 4.470.000.000,00 | 4.394.288.802,00 | 98,31% | 98,31% |
| 2 | Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Kota Bogor | 4.178.656.500,00 | 4.220.612.637,00 | 4.220.612.637,00 | 101,00% | 100,00% | 4.899.616.000,00 | 4.899.616.000,00 | 4.400.997.986,00 | 89,82% | 89,82% |
| 3 | Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) PD Pasar Pakuan | 1.241.155.782,00 | - | 158.137.150,00 | 12,74% | 0,00% | 1.195.118.570,00 | 1.195.118.570,00 | 175.836.004,00 | 14,71% | 14,71% |

| No. | Uraian | 2019 | | | Persentase Realisasi 2019 Terhadap | | 2020 | | | Persentase Realisasi 2020 Terhadap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Target Murni | Target Perubahan | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Target Murni | Target Perubahan |
| | Jaya | | | | | | | | | | |
| 4 | Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) PDAM Tirta Pakuan | 21.940.000.000,00 | 19.684.735.000,00 | 19.684.735.000,00 | 89,72% | 100,00% | 25.479.300.000,00 | 22.956.171.000,00 | 22.956.171.000,00 | 90,10% | 100,00% |

| No. | Uraian | 2021 | | | Persentase Realisasi 2021 Terhadap | | 2022 | | | Persentase Realisasi 2022 Terhadap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Target Murni | Target Perubahan | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Target Murni | Target Perubahan |
| | **Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD** | **30.503.342.185,00** | **32.420.552.150,00** | **32.420.552.150,00** | **106,29%** | **100,00%** | **30.503.342.185,00** | **32.169.497.964,00** | **32.170.048.280,00** | **105,46%** | **100,00%** |

| No. | Uraian | 2021 | | | Persentase Realisasi 2021 Terhadap | | 2022 | | | Persentase Realisasi 2022 Terhadap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Target Murni | Target Perubahan | Target Murni | Target Perubahan | Realisasi | Target Murni | Target Perubahan |
| 1 | Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank BJB | 8.970.000.000,00 | 4.474.677.834,00 | 4.474.677.834,00 | 49,88% | 100,00% | 3.811.539.550,00 | 4.953.584.699,00 | 4.953.584.699,00 | 129,96% | 100,00% |
| 2 | Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Kota Bogor | 806.825.185,00 | 5.034.881.415,00 | 5.034.881.415,00 | 624,04% | 100,00% | 5.158.460.450,00 | 5.141.255.580,00 | 5.141.255.580,00 | 99,67% | 100,00% |
| 3 | Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) PD Pasar Pakuan Jaya | - | 307.803.551,00 | 307.803.551,00 | 0,00% | 100,00% | 806.825.185,00 | 390.694.001,00 | 390.694.001,00 | 48,42% | 0,00% |
| 4 | Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) PDAM Tirta Pakuan | 20.726.517.000,00 | 22.603.189.350,00 | 22.603.189.350,00 | 109,05% | 100,00% | 20.726.517.000,00 | 21.683.963.684,00 | 21.684.514.000,00 | 104,62% | 100,00% |

*Sumber: Pemerintah Kota Bogor, 2019-2022*

Secara umum, target bagian laba penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor atas pada BUMD mengalami perubahan pada tahun 2019-2022. Ini disebabkan oleh penyesuaian kondisi usaha pada masing-masing BUMD, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bank BJB
2. Bank Kota Bogor:
    a. Dampak pandemi yang masih dirasakan pelaku usaha.
    b. Tingkat kemampuan pembayaran angsuran debitur menurun.
    c. Persaingan tingkat suku bunga pinjaman terutama dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank umum.
    d. Tingkat kualitas kredit bermasalah meningkat, akibatnya berpengaruh pada pembentukan biaya cadangan pembentukan PPAP.
    e. Tingkat suku bunga lebih tinggi daripada bank umum.
3. PD Pasar Pakuan Jaya:
    a. Terdapat pajak usaha yang masih terutang.
    b. Perubahan kondisi pasar pascapandemi, berdampak pada tingkat okupansi kios.
    c. Perubahan perilaku konsumen dengan adanya pasar *online.*
    d. Dampak dari program pemerintah pusat, yaitu perbaikan Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista). Ini berdampak pada Pasar Bogor, di mana penjual ditempatkan di penampungan sementara tanpa dikenakan sewa, sehingga berpengaruh pada pendapatan yang diterima dan pengeluaran terus berjalan.
4. PDAM Tirta Pakuan:
    a. Terdapat efisiensi biaya.
    b. Munculnya pekerjaan di luar rencana usaha.
    c. Terhambatnya pendapatan non-air akibat pandemi COVID-19.

Komponen pendapatan transfer tumbuh positif dengan rerata 2,85%. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, di mana untuk Kota Bogor sama-sama mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Kedua pos tersebut kemudian mengalami pertumbuhan positif di tahun 2021 dan 2022. Rerata pertumbuhan positif dari transfer pemerintah pusat disebabkan oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil, peningkatan

alokasi DAK dalam rangka sinkronisasi program pemerintah pusat, serta peningkatan DAU dan DID. Sedangkan rerata pertumbuhan positif pada transfer antardaerah disebabkan oleh meningkatnya DBH pajak Provinsi Jawa Barat hasil dari peningkatan pendapatan provinsi serta adanya bantuan keuangan pemerintah provinsi.

Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah Kota Bogor hingga tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif dengan rerata sebesar -91,44%. Komponen ini terdiri dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh peralihan pendapatan hibah BOS APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan beralih menjadi dana transfer.

## Tabel 3.1. 3 Persentase Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Kota Bogor 2019-2022

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **PENDAPATAN** | **2.639.970.560.688,00** | **2.362.959.267.805,00** | **2.482.148.757.721,00** | **2.824.140.344.471,00** | **2.559.857.207.793,86** | **2.428.579.503.649,12** | **2.644.780.935.777,11** | **2.787.105.058.802,92** | **-3,03%** | **2,78%** | **6,55%** | **-1,31%** |
| **Pendapatan Asli Daerah** | **972.607.288.978,00** | **741.531.123.201,00** | **914.550.650.320,00** | **1.150.887.225.486,00** | **1.015.884.216.919,86** | **872.017.242.152,12** | **1.075.240.926.213,11** | **1.147.623.045.708,92** | **4,45%** | **17,60%** | **17,57%** | **-0,28%** |
| Pajak Daerah | 644.546.554.586 | 440.000.000.000 | 565.600.000.000 | 754.175.900.000 | 689.543.006.040,00 | 509.039.468.746,00 | 624.784.886.145,00 | 744.960.592.537,00 | 6,98% | 15,69% | 10,46% | -1,22% |
| Retribusi Daerah | 53.446.789.400 | 36.691.027.400 | 31.609.433.495 | 37.834.007.000 | 51.362.153.192,00 | 35.010.375.259,00 | 36.033.010.539,00 | 23.942.828.414,00 | -3,90% | -4,58% | 13,99% | -36,72% |
| Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan | 28.083.707.761 | 33.520.905.570 | 32.420.552.150 | 32.169.497.964 | 28.241.844.911,00 | 31.927.293.792,00 | 32.420.552.150,00 | 32.170.048.280,00 | 0,56% | -4,75% | 0,00% | 0,00% |
| Lain-lain PAD yang sah | 246.530.237.231 | 231.319.190.231 | 284.920.664.675 | 326.707.820.522 | 246.737.212.776,86 | 296.040.104.355,12 | 382.002.477.379,11 | 346.549.576.477,92 | 0,08% | 27,98% | 34,07% | 6,07% |
| **Pendapatan Transfer** | **1.577.997.671.710,00** | **1.453.476.644.604,00** | **1.461.272.579.401,00** | **1.673.248.217.735,00** | **1.455.644.350.874,00** | **1.415.498.666.396,00** | **1.463.000.794.326,00** | **1.639.426.533.844,00** | **-7,75%** | **-2,61%** | **0,12%** | **-2,02%** |
| Transfer Pemerintah Pusat | 1.203.263.031.000 | 1.115.223.734.560 | 1.117.385.616.482 | 1.277.870.323.115 | 1.147.567.416.814,00 | 1.112.100.550.899 | 1.127.139.550.566,00 | 1.249.992.463.277,00 | -4,63% | -0,28% | 0,87% | -2,18% |
| Transfer antar - daerah | 374.734.640.710 | 338.252.910.044 | 343.886.962.919 | 395.377.894.620 | 308.076.934.060,00 | 303.398.115.497 | 335.861.243.760,00 | 389.434.070.567,00 | -17,79% | -10,30% | -2,33% | -1,50% |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah** | **89.365.600.000,00** | **167.951.500.000,00** | **106.325.528.000,00** | **4.901.250,00** | **88.328.640.000,00** | **141.063.595.101,00** | **106.539.215.238,00** | **55.479.250,00** | **-1,16%** | **-16,01%** | **0,20%** | **1031,94%** |
| Hibah | 89.365.600.000 | 167.951.500.000 | 106.325.528.000 | | 88.328.640.000,00 | 141.063.595.101,00 | 106.324.704.000,00 | 0,00 | -1,16% | -16,01% | 0,00% | 0,00% |
| Dana Darurat | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| *Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* | | | *0* | *4.901.250* | *0,00* | *0,00* | *214.511.238,00* | *55.479.250* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *1031,94%* |

*Sumber: APBD dan LRA Kota Bogor 2019-202*

**B. Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2019-2023 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Daerah juga akan disajikan untuk menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan/ penurunan realisasi Belanja Daerah Kota Bogor yang dijabarkan sebagai berikut. Kondisi Belanja daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan target Belanja karena berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui Rasionalisasi belanja pegawai, Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%, Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50%.

Kota Bogor memiliki kebijakan *mandatory spending* untuk beberapa urusan, di antaranya:

a. Belanja Pegawai 30% dari APBD di luar tunjangan guru yang berasal dari transfer ke daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).
b. Belanja Infrastruktur 40% dari APBD di luar belanja transfer ke daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).
c. Belanja peningkatan kapabilitas APIP 0,5 % dari Belanja Daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Pedoman Umum APBD 2024).
d. Belanja peningkatan kompetensi ASN: 0,16% dari total Belanja Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan

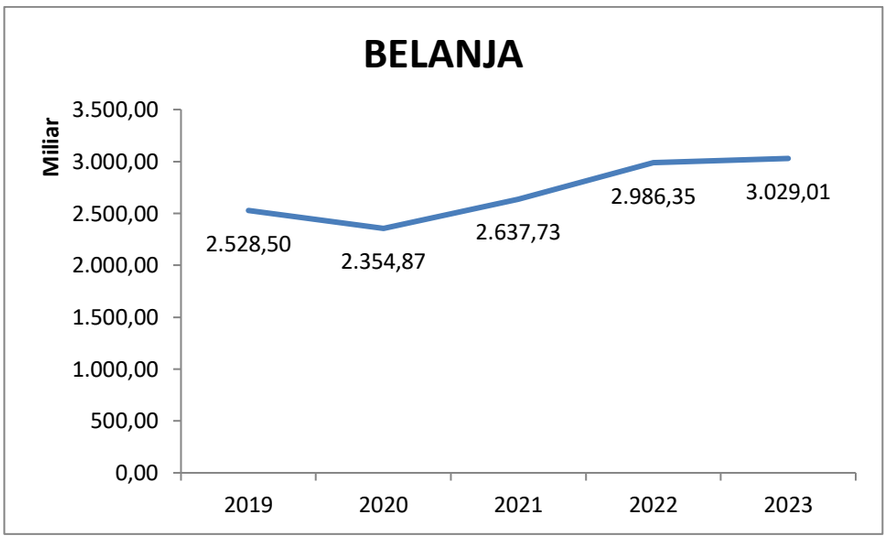
Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Pedoman Umum APBD 2024).

e. Dana kewilayahan untuk peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan 5% dari APBD-DAK (Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018)

f. Belanja pendidikan 20% dari APBD (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

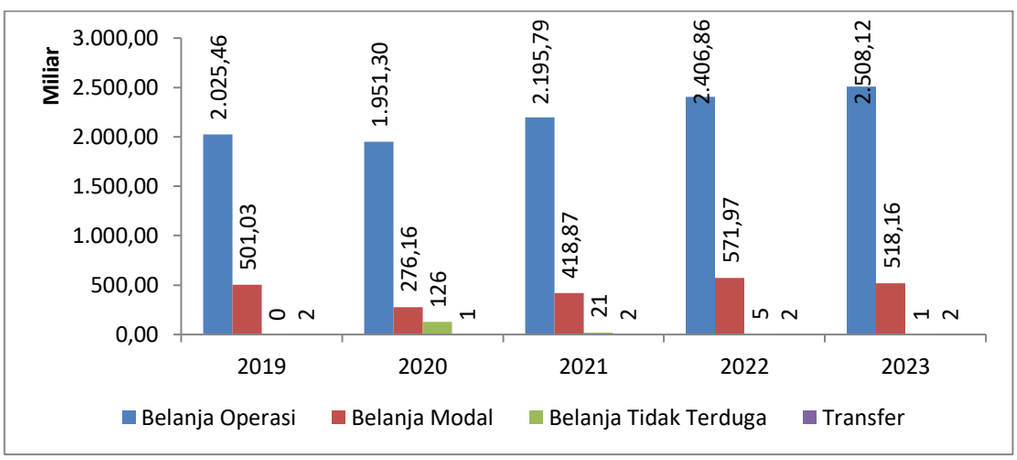
Realisasi Belanja Daerah juga akan disajikan untuk menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan/ penurunan realisasi Belanja Daerah Kota Bogor yang dijabarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1. 3 Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor 2019-2023**




*Sumber: LRA Kota Bogor 2019-2023*

**Gambar 3.1. 4 Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bogor 2019-2023**




*Sumber: LRA Kota Bogor 2019-2023*

## Tabel 3.1. 4 Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019-2023

| No | Uraian | Realisasi( | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| **2** | **BELANJA** | **2.528.500.802.938,19** | **2.354.870.702.982,00** | **2.637.726.570.905,00** | **2.986.354.433.003,00** | **3.029.008.799.209,00** | **5,70%** |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **2.025.462.086.541,19** | **1.951.301.711.023,00** | **2.195.790.762.074,00** | **2.406.860.416.778,00** | **2.508.116.426.071,00** | **5,92%** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.181.889.361.829,00 | 1.010.111.841.189,00 | 1.091.969.595.660,00 | 1.128.093.224.058,00 | 1.063.650.463.277,00 | -1,54% |
| 2.1.2 | Belanja barang dan jasa | 711.101.422.815,19 | 798.841.580.650,00 | 981.671.384.413,00 | 1.066.553.405.102,00 | 1.236.454.360.660,00 | 14,47% |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 6.578.046.142,00 | 5.427.749.091,00 | 4.047.853.424,00 | 4.282.366.790,00 | 6.191.682.700,00 | -13,33% |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 79.149.334.000,00 | 93.233.837.587,00 | 68.284.278.577,00 | 146.302.919.328,00 | 147.381.004.434,00 | 22,73% |
| 2.1.5 | Belanja bantuan sosial | 46.743.921.755,00 | 43.686.702.506,00 | 49.817.650.000,00 | 61.628.501.500,00 | 54.438.915.000,00 | 9,65% |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **501.033.407.778,00** | **276.157.283.029,00** | **418.874.649.797,00** | **571.966.552.801,00** | **518.164.968.738,00** | **4,51%** |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 18.044.020.000,00 | 2.772.077.406,00 | 456.222.600,00 | 17.328.944.627,00 | 1.287.152.960,00 | -1,34% |

| No | Uraian | Realisasi( | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 99.754.707.372,00 | 129.790.481.108,00 | 134.821.926.424,00 | 93.283.801.959,00 | 97.928.993.032,00 | -2,21% |
| 2.2.3 | Belanja bangunan dan gedung | 144.703.165.317,00 | 30.694.955.339,00 | 75.413.812.539,00 | 188.457.698.905,00 | 178.951.840.395,00 | 9,21% |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, irigasi dan jalanan | 235.965.307.071,00 | 109.784.631.171,00 | 206.667.544.227,00 | 271.189.473.185,00 | 238.985.747.391,00 | 4,75% |
| 2.2.5 | Belanja aset tetap lainnya | 1.910.823.018,00 | 1.789.184.630,00 | 1.037.371.248,00 | 708.136.673,00 | 911.157.960,00 | -28,17% |
| **2.2.6** | Belanja aset lainnya | 655.385.000,00 | 1.325.953.375,00 | 477.772.759,00 | 998.497.452,00 | 100.077.000,00 | 15.07% |
| **2.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **9.455.600,00** | **126.277.177.930,00** | **21.400.409.034,00** | **5.366.713.424,00** | 1.066.654.400,00 | **727,95%** |
| 3 | Transfer | 1.995.853.019,00 | 1.134.531.000,00 | 1.660.750.000,00 | 2.160.750.000,00 | **1.660.750.000** | 2,68% |
| 3.1 | Transfer Bagi Hasil | | | | | | 0% |
| 3.2 | Transfer Bantuan Keuangan | 1.995.853.019,00 | 1.134.531.000,00 | 1.660.750.000,00 | 2.160.750.000,00 | 1.660.750.000,00 | 11% |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2019-2023, diolah. *LRA Unaudited*

Dari Tabel 3.1.4 di atas, diketahui bahwa terdapat pos-pos belanja yang mengalami pertumbuhan positif maupun negatif. Dilihat dari komponen-komponennya, rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 5,49%, belanja modal 0,84%, dan belanja tidak terduga 225,90%. Dari belanja operasi, terdapat dua pos yang mengalami penurunan, yaitu belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan -2,60% dan belanja bunga -1,50%. Penurunan belanja pegawai pada tahun 2019-2022 disebabkan oleh bertambahnya jumlah PNS yang pensiun dan adanya kebijakan terkait pembatasan pemberian honorarium. Apabila belanja pegawai dibandingkan terhadap total belanja, terdapat tren penurunan yaitu 46,74% pada tahun 2019, 45,33% pada 2020, 41,74% pada 2021, 37,84% pada 2022, dan 35,12% pada 2023 (di luar tunjangan penghasilan guru dan sertifikasi guru). Ini menunjukkan bahwa dalam kurun 2019-2023 belanja pegawai masih di atas 30%, yang mana masih belum mencapai ketentuan sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji atau uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, belanja bunga bergantung pada jumlah tagihan yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pos-pos lain dalam belanja operasi yang mengalami pertumbuhan positif adalah belanja barang dan jasa dengan rerata pertumbuhan 14,83%, belanja hibah16,81%, dan belanja bantuan sosial 3,88%. Kenaikan belanja barang dan jasa utamanya disebabkan oleh peningkatan jumlah upah dan jumlah non-ASN dalam belanja jasa kantor, di antaranya belanja jasa tenaga pendidikan, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga kebersihan, dan belanja jasa tenaga kesehatan. Untuk kenaikan belanja hibah dipengaruhi oleh belanja hibah dana BOS yang ditransfer langsung oleh pemerintah pusat kepada satuan pendidikan swasta. Sedangkan kenaikan belanja bantuan sosial dipengaruhi oleh peningkatan bantuan sosial untuk individu pada bantuan rumah tidak layak huni.

Belanja modal Kota Bogor mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 0,84%. Belanja modal ini paling banyak dialokasikan

pada belanja jalan, irigasi dan jalanan dengan rerata pertumbuhan 0,32%, belanja bangunan dan gedung 5,45%, belanja peralatan dan mesin -0,46%, serta belanja tanah dengan rerata pertumbuhan sebesar -48,332. Sisanya berupa belanja aset tetap lainnya dengan rerata pertumbuhan -16,90% dan belanja aset lainnya -37,49%. Dalam kurun 2019-2023, Pemerintah Kota Bogor telah membuat anggaran untuk belanja tanah, namun realisasi setiap tahunnya tidak mencapai 100% disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan. Demikian pula dengan realisasi belanja peralatan dan mesin, yang mana mengalami kebijakan pembatasan pada belanja tersebut dengan sumber dana PAD. Belanja bangunan juga tidak mencapai realisasi 100% dari pagu anggaran, disebabkan oleh prioritas pembangunan, antara lain gedung tempat ibadah, gedung tempat pendidikan, dan gedung tempat olahraga. Belanja irigasi jalan dan jalanan meningkat secara signifikan pada tahun 2022 karena adanya peningkatan kebutuhan terhadap peningkatan jalan dan pelaksanaan pembangunan jembatan. Belanja aset tetap lainnya berupa belanja buku cetak, namun dengan adanya buku bacaan dalam bentuk digital maka prioritas anggaran untuk pos tersebut menurun. Sedangkan belanja aset lainnya berupa belanja software dalam rangka digitalisasi.

Belanja tidak terduga Kota Bogor mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu dengan rata-rata pertumbuhan 225,90%. Ini tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19, di mana tahun 2020 Kota Bogor melakukan belanja tidak terduga sebesar Rp 126.277.177.930,00, dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp 9.455.600,00. Setelah itu, belanja tidak terduga Kota Bogor berangsur berkurang sebesar 83% pada tahun 2021 dan 75% pada tahun 2022. Komponen belanja transfer Kota Bogor hanya terdiri dari transfer bantuan keuangan dengan rerata pertumbuhan sebesar 4,49%, yang mana dialokasikan pada desa terdampak musibah TPA Galuga dan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk penanganan bencana alam gempa bumi tahun 2022.

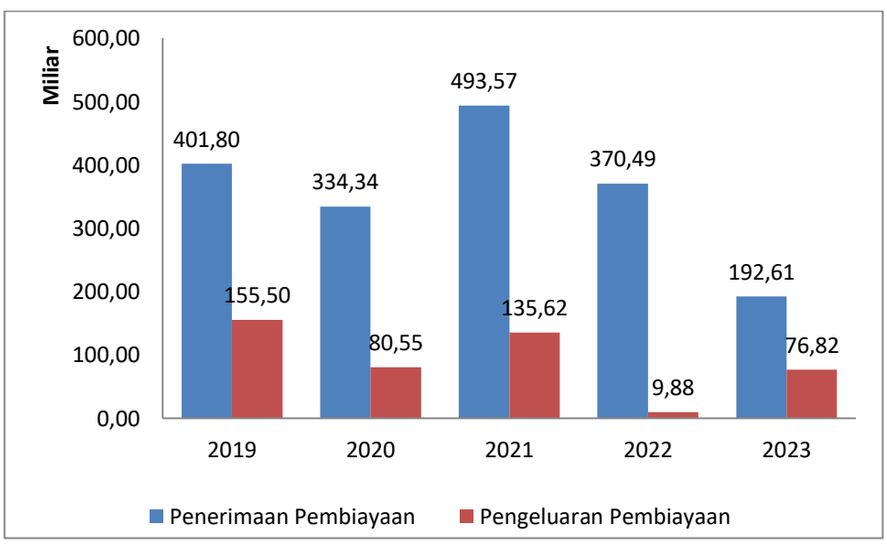
**C. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,

Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

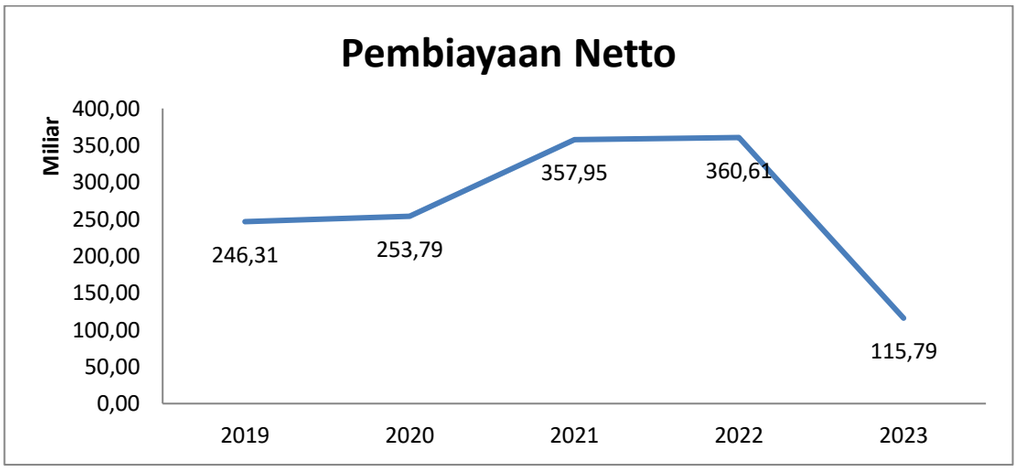
Penerimaan pembiayaan umumnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sedangkan komponen lainnya seperti pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan hanya terjadi secara berkala. Sementara itu komponen pengeluaran pembiayaan, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan investasi non permanen hanya terjadi secara berkala dan dengan nilai yang tidak terlalu besar. Sehingga secara netto pembiayaan mayoritas mengalami nilai positif. Nilai pembiayaan netto yang cukup besar mampu menutup defisit realisasi anggaran, sehingga realisasi anggaran tahun 2019-2023 cenderung memberikan SiLPA positif. Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bogor periode tahun 2018 hingga tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

**Gambar 3.1. 5 Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kota Bogor 2019-2023**




*Sumber: LRA Kota Bogor 2019-2023*

**Gambar 3.1. 6 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bogor 2019-2023**




*Sumber: LRA Kota Bogor 2019-2023*

## Tabel 3.1. 5 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019-2023

| No | Uraian | REALISASI | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| **6.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **401.802.129.830,52** | **334.337.716.975,19** | **493.565.383.802,31** | **370.486.701.874,42** | **192.609.072.644,00** | **-16,79%** |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 256.564.582.703,52 | 277.640.687.080,19 | 327.542.156.075,31 | 365.001.935.698,42 | 161.358.478.068,00 | -10,95% |
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | | 25.765.828.400,00 | 0% |
| 6.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 139.752.780.949,00 | 32.159.096.032,00 | 160.538.461.551,00 | | | -100,00% |
| 6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 5.484.766.178,00 | 24.537.933.863,00 | 5.484.766.176,00 | 5.484.766.176,00 | 5.484.766.176,00 | 0,00% |
| 6.1.6 | Penerimaan Kembali Piutang Daerah | | 19.053.167.687,00 | | | | 0% |
| **6.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **155.495.608.833,00** | **80.545.341.402,00** | **135.617.812.976,00** | **9.878.849.606,00** | **76.821.017.476,00** | **-16,16%** |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | | 71.336.251.300,00 | 0% |
| 6.2.2 | Penyertaan modal daerah | 16.000.000.000,00 | 24.300.000.000,00 | - | 4.394.083.430,00 | | -100,00% |
| 6.2.3 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 139.495.608.833,00 | 56.245.341.402,00 | 135.617.812.976,00 | 5.484.766.176,00 | 5.484.766.176,00 | -55,47% |

| No | Uraian | REALISASI | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| | **Pembiayaan Netto** | **246.306.520.997,52** | **253.792.375.573,19** | **357.947.570.826,31** | **360.607.852.268,42** | **115.788.055.168,00** | **-17,20%** |
| | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)** | **277.662.925.853,19** | **327.501.176.240,31** | **365.001.935.698,42** | **161.358.478.068,34** | **53.386.312.040,80** | **-33,78%** |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2019-2023, diolah *LRA Unaudited*

Dari Tabel 3.1.5 di atas, diketahui bahwa Kota Bogor memperoleh pembiayaan netto positif selama empat tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,55%. Pembiayaan netto kemudian turun pada tahun 2023 karena adanya pembentukan dana cadangan. Pembiayaan netto sendiri diperoleh dari pengurangan penerimaan pembiayaan oleh pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kota Bogor mengalami fluktuasi setiap tahun dengan rerata pertumbuhannya sebesar -16,79%. Pengeluaran pembiayaan Kota Bogor juga mengalami fluktuasi setiap tahun dengan rerata pertumbuhan sebesar -16,16%. Penerimaan pembiayaan Kota Bogor terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. SiLPA Kota Bogor menunjukkan penurunan dengan rerata pertumbuhan -10,95%, setelah pada thaun 2019-2022 terus meningkat. Penerimaan pinjaman daerah -100% dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 0%. Untuk SiLPA, pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh besaran realisasi pendapatan dan belanja pada tahun n-1, di mana pada kurun tahun 2019-2022 terus meningkat, kecuali pada tahun pandemi 2020. Untuk realisasi penerimaan pinjaman daerah terhitung fluktuatif, dipengaruhi oleh supply chain financing pada RSUD Kota Bogor. Sedangkan pos penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah terhitung flat sebesar Rp 5.484.766.176,00, sesuai tagihan dari pemerintah pusat.

Pengeluaran pembiayaan Kota Bogor terdiri dari penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Penyertaan modal daerah yang dilakukan Kota Bogor terhitung negatif, dengan rerata pertumbuhan negatif sebesar -100,00%. Kota Bogor telah menyertakan modal daerah tertinggi senilai Rp 24.300.000.000,00, yang kemudian tidak menyertakan modal daerah sama sekali di tahun 2021. Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan Kota Bogor dialokasikan pada BUMD Kota Bogor. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo juga mengalami fluktuasi setiap tahun dengan rerata pertumbuhan negatif sebesar -55,47%. Pembayaran cicilan pokok utang ini berkaitan dengan supply chain financing untuk RSUD Kota Bogor.

Dengan adanya dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi pendapatan dan belanja, serta besaran pembiayaan yang fluktuatif, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Bogor juga mengalami naik-turun dengan rerata pertumbuhan negatif -33,78%.

Jika dilihat dari tiga tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kota Bogor masih mampu menutup defisit anggaran dengan pembiayaan dan mencapai SILPA terendah pada tahun 2023 sebesar Rp 53.386.312.040,80.

### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Berikut merupakan kondisi Neraca Daerah Kota Bogor Periode tahun 2019-2023.

Kesehatan neraca keuangan suatu daerah dapat ditinjau melalui rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio ini merupakan perbandingan dari beberapa pos pada laporan keuangan.

a. Rasio likuiditas: Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari:
b. Rasio Lancar, menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya.
c. Rasio Cepat, menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aktiva lancar yang paling likuid (tanpa memperhatikan persediaan) dengan kewajiban lancar.
d. Rasio lancar dan rasio cepat yang baik bernilai di atas 1 (satu), yang artinya pemerintah daerah masih memiliki aset lancar yang cukup untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar Kota Bogor pada tahun 2019 adalah sebesar 15,01 dengan rasio cepat sebesar 14,31. Berdasarkan angka tersebut, Kota Bogor

dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar maupun tanpa memperhatikan persediaan. Sepanjang tahun 2019-2023 tren rasio lancar dan rasio cepat Kota Bogor mengalami penurunan. Pada tahun 2023, rasio lancar mencapai 5,77 dan rasio cepat 5,36.

**Tabel 3.1. 6 Rasio Likuiditas Keuangan Kota Bogor**

| Rasio Likuiditas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Lancar | 15,01 | 19,39 | 12,68 | 10,88 | 5,77 |
| Rasio Cepat | 14,31 | 18,28 | 12,04 | 10,15 | 5,36 |

*Sumber: Neraca Pemerintah Daerah Kota Bogor 2019-2023, diolah*
**LRA Unaudited*

Rasio solvabilitas: rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi semua kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dengan jaminan aktiva maupun ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah. Adapun jenis rasio yang digunakan sebagai berikut:

a. Rasio utang terhadap aset, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah seluruh aset yang dimilikinya.
b. Rasio utang terhadap ekuitas, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki.

Rasio solvabilitas Kota Bogor Dalam rentang waktu 2019-2023 menunjukkan angka yang sehat. Pada tahun 2019 Kota Bogor Memiliki rasio utang terhadap aset sebesar 0,014 yang artinya aset Kota Bogor Hanya dibiayai 1,4% kewajiban. Begitu pula pada tahun 2020 hingga 2023 yang menunjukkan angka di kisaran 0,015. Selanjutnya, untuk rasio utang terhadap ekuitas Kota Bogor Juga masih dibawah 100% dari tahun ke tahun. Artinya, Kota Bogor akan mampu membayar utang menggunakan ekuitasnya apabila mengalami gagal bayar.

**Tabel 3.1. 7 Rasio Solvabilitas Keuangan Kota Bogor 2019-2023**

| Rasio Solvabilitas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Utang terhadap Aset | 0,014 | 0,012 | 0,016 | 0,014 | 0,016 |
| Rasio Utang terhadap Ekuitas | 0,014 | 0,012 | 0,017 | 0,014 | 0,016 |

*Sumber: Neraca Pemerintah Daerah Kota Bogor 2019-2022, diolah*
**LRA Unaudited*

**Tabel 3.1. 8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019-2022**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ASET** | **8.450.865.944.760,56** | **9.203.864.257.664,83** | **9.913.070.916.181,37** | **10.316.556.025.616,40** | **10.689.821.549.021,30** | **6,05%** |
| **1.1** | **ASET LANCAR** | | | | | | |
| 1.1.1 | Kas di Kas Daerah | 256.115.222.198,00 | 305.390.350.678,00 | 299.917.646.333,00 | 130.401.482.495,00 | 33.207.209.707,00 | **-39,99%** |
| 1.1.3 | Kas di Bendahara Penerimaan | - | - | - | - | 922.000,00 | **0%** |
| 1.1.4 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 153.905.685,00 | 2.200.525,00 | - | - | 1.262.900,00 | **-69,90%** |
| 1.1.5 | Kas di BLUD | 8.107.669.667,19 | 8.109.372.432,31 | 58.709.937.450,42 | 29.011.343.370,34 | 17.674.821.168,14 | **21,51%** |
| 1.1.7 | Kas Lainnya | - | 25.000,00 | - | 204.120.800,00 | 1.421.195.406,00 | **0%** |
| 1.1.8 | Kas di Bendahara FKTP | 9.337.552.993,00 | 8.356.906.451,00 | - | - | | **-100,00%** |
| 1.1.9 | Kas di Bendahara BOS | 4.229.656.416,00 | 5.903.901.729,00 | 6.420.223.207,00 | 1.990.834.186,00 | 1.647.223.756,00 | **-21,00%** |
| 1.1.10 | Setara Kas | | - | | 0,00 | 0,00 | **0%** |
| 1.1.12 | Piutang Pendapatan | 454.435.483.328,82 | 520.862.986.236,00 | 660.421.877.975,00 | 649.127.643.510,86 | 734.593.350.225,70 | **12,76%** |
| 1.1.15 | Piutang Lainnya | 150.777.331.093,38 | 127.973.208.139,00 | 76.051.221.804,00 | 70.566.455.628,00 | 65.081.689.452,00 | **-18,94%** |
| 1.1.16 | Penyisihan Piutang | -197.644.133.020,74 | -239.164.821.612,00 | -246.794.451.502,85 | -279.787.959.764,01 | -327.357.002.657,22 | **13,44%** |
| 1.1.18 | Beban Dibayar Dimuka | 844.904.499,12 | 857.645.340,00 | 557.238.076,72 | 281.653.702,54 | 204.685.423,93 | **-29,84%** |
| 1.1.19 | Persediaan | 32.596.243.908,48 | 44.188.378.065,00 | 44.896.845.499,74 | 42.886.362.633,34 | 40.031.296.607,74 | **5,27%** |

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **JUMLAH ASET LANCAR** | **718.953.836.768,24** | **782.480.152.983,31** | **900.180.538.843,03** | **644.681.936.562,07** | **566.506.653.989,29** | **-5,78%** |
| **1.2** | **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | | | | | |
| **1.2.1** | **Investasi Non Permanen** | **63.742.100,00** | **-** | **-** | **-** | | **0%** |
| 1.2.1.4 | Dana Bergulir | 63.742.100,00 | 63.742.100,00 | 63.742.100,00 | 63.742.100,00 | | **-100,00%** |
| 1.2.1.5 | Penyisihan Dana Bergulir | | -63.742.100,00 | -63.742.100,00 | -63.742.100,00 | | **0%** |
| **1.2.2** | **Investasi Permanen** | **523.642.733.332,61** | **547.890.119.989,00** | **547.014.085.809,35** | **831.636.916.668,80** | **807.113.768.000,46** | **11,42%** |
| 1.2.2.1 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 523.642.733.332,61 | 547.890.119.989,00 | 547.014.085.809,35 | 831.636.916.668,80 | 807.113.768.000,46 | 11,42% |
| 1.2.2.2 | Investasi Permanen Lainnya | | - | | | | 0% |
| | **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG** | **523.706.475.432,61** | **547.890.119.989,00** | **547.014.085.809,35** | **831.636.916.668,80** | **807.113.768.000,46** | **11,42%** |
| **1.3** | **ASET TETAP** | | | | | | |
| 1.3.1 | Tanah | 4.767.414.421.962,63 | 4.977.048.911.208,63 | 5.517.251.620.522,63 | 5.675.827.547.827,63 | 5.939.069.694.224,63 | 5,65% |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | 743.613.685.335,72 | 878.774.080.881,95 | 968.486.651.160,86 | 1.041.697.508.364,03 | 1.130.946.078.971,06 | 11,05% |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | 1.206.807.131.742,41 | 1.233.596.418.612,15 | 1.258.734.833.812,17 | 1.357.632.385.067,17 | 1.579.078.728.648,85 | 6,95% |

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.124.872.812.527,01 | 2.734.857.301.296,41 | 2.943.360.774.448,42 | 3.204.080.524.732,92 | 3.483.468.228.932,92 | 13,15% |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | 9.905.925.846,82 | 10.771.560.023,70 | 8.810.740.200,87 | 10.425.280.533,84 | 11.314.989.293,84 | 3,38% |
| 1.3.6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 57.861.964.006,16 | 58.350.074.015,93 | 142.128.833.375,25 | 256.117.091.612,52 | 210.346.836.209,34 | 38,08% |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | -1.817.462.723.225,42 | -2.135.442.627.195,92 | -2.444.000.342.178,11 | -2.788.162.647.260,66 | -3.155.936.769.407,10 | 14,79% |
| | **JUMLAH ASET TETAP** | 7.093.013.218.195,33 | 7.757.955.718.842,85 | 8.394.773.111.342,09 | 8.757.617.690.877,45 | 9.198.287.786.873,54 | **6,71%** |
| **1.4** | **DANA CADANGAN** | | | | | | |
| 1.4.1 | Dana Cadangan | - | - | - | - | 45.740.665.268,00 | **0%** |
| | **JUMLAH DANA CADANGAN** | - | - | - | - | 45.740.665.268,00 | **0%** |
| **1.5** | **ASET LAINNYA** | | | | | | |
| 1.5.1 | Tagihan Jangka Panjang | 3.266.687.864,00 | 3.271.317.337,00 | 3.254.915.012,00 | 3.241.564.412,00 | 0,00 | **-100,00%** |
| 1.5.2 | Tagihan Penjualan Angsuran | | | | | 891.773.350,00 | **0%** |
| 1.5.3 | Tuntutan Ganti Rugi | | | | | 2.364.791.062,00 | **0%** |
| 1.5.4 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 52.526.184.310,00 | 52.526.184.310,00 | 11.014.184.310,00 | 11.014.184.310,00 | 11.014.184.310,00 | **-32,33%** |
| 1.5.5 | Aset Tak Berwujud | 13.345.818.781,80 | 14.765.690.156,80 | 15.209.471.381,80 | 16.120.188.183,80 | 16.945.217.083,80 | **6,15%** |

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.6 | Aset Lain-Lain | 175.679.958.444,04 | 176.686.747.836,78 | 170.118.925.126,05 | 189.420.063.755,95 | 200.165.221.094,20 | **3,32%** |
| 1.5.7 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | -12.013.269.674,60 | -13.057.680.075,53 | -14.010.403.525,57 | -14.857.922.126,05 | -16.066.792.926,55 | **7,54%** |
| 1.5.8 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | -117.612.965.360,87 | -118.653.993.715,38 | -114.483.912.117,38 | -134.718.785.714,59 | -143.141.719.083,46 | **5,03%** |
| 1.5.9 | Treasury Deposit Facility (TDF) | | | | 12.400.188.687,00 | 0,00 | **0%** |
| | **JUMLAH ASET LAINNYA** | 115.192.414.364,37 | 115.538.265.849,67 | 71.103.180.186,90 | 82.619.481.508,11 | 72.172.674.889,99 | **-11,03%** |
| | **JUMLAH ASET** | 8.450.865.944.760,56 | 9.203.864.257.664,83 | 9.913.070.916.181,37 | 10.316.556.025.616,40 | 10.689.821.549.021,30 | **6,05%** |
| **2** | **KEWAJIBAN** | **119.207.677.738,43** | **106.162.570.863,00** | **161.721.270.045,45** | **141.993.982.936,48** | | **-100,00%** |
| **2,1** | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | | | | | |
| 2.1.1 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 268.757.122,00 | 258.325.090,00 | 45.871.292,00 | 249.302.783,00 | 573.200.896,00 | **20,85%** |
| 2.1.2 | Utang Bunga | 155.902.381,00 | - | | | | **-100,00%** |
| 2.1.3 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 5.484.766.176,84 | 5.484.766.176,00 | 5.484.766.176,00 | 6.284.285.132,00 | 10.281.879.912,00 | **17,01%** |
| 2.1.4 | Pendapatan Diterima Dimuka | 1.705.986.062,69 | 1.350.712.398,00 | 940.091.752,45 | 278.229.328,39 | 413.113.467,07 | **-29,85%** |
| 2.1.5 | Utang Beban | 8.176.671.331,00 | 31.020.107.885,00 | 64.449.665.375,00 | 52.351.342.792,09 | 86.965.286.440,00 | **80,59%** |

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.6 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 32.113.634.366,00 | 2.231.465.191,00 | 63.032.752,00 | - | | **-100,00%** |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **47.905.717.439,53** | **40.345.376.740,00** | **70.983.427.347,45** | **59.163.160.035,48** | **98.233.480.715,07** | **19,67%** |
| **2,2** | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | | | | | | |
| 2.2.1 | Utang Dalam Negeri | 71.301.960.298,90 | - | 90.737.842.698,00 | 82.830.822.901,00 | 72.948.702.467,00 | **0,57%** |
| 2.2.6 | Utang Jangka Panjang Lainnya | | | | | | **0%** |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | **71.301.960.298,90** | **65.817.194.123,00** | **90.737.842.698,00** | **82.830.822.901,00** | **72.948.702.467,00** | **0,57%** |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN** | **119.207.677.738,43** | **106.162.570.863,00** | **161.721.270.045,45** | **141.993.982.936,48** | **171.182.183.182,07** | **9,47%** |
| | **JUMLAH EKUITAS DANA** | **8.331.658.267.022,12** | **9.097.701.686.801,83** | **9.751.349.646.135,92** | **10.174.464.362.679,90** | **10.518.639.365.839,20** | **6,00%** |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **8.450.865.944.760,55** | **9.203.864.257.664,83** | **9.913.070.916.181,37** | **10.316.458.345.616,40** | **10.689.821.549.021,30** | **6,05%** |

*Sumber: Neraca Pemerintah Kota Bogor 2019-2023, diolah*
**LRA Unaudit*

Neraca Pemerintah Kota Bogor terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset lancar mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -5,78% dengan jumlah Rp 566.506.653.989,29 pada tahun 2023, terendah dalam kurun lima tahun terakhir. Aset lancar Kota Bogor didominasi oleh piutang pendapatan, kas di kas daerah, piutang lainnya, persediaan, kas di BLUD, kas di bendahara BOS, serta beban dibayar di muka. Sementara pos lainnya seperti kas di bendahara pengeluaran SKPD, kas di bendahara FKTP, dan kas lainnya perolehannya fluktuatif setiap tahun. Piutang pendapatan meningkat setiap tahun dengan rerata pertumbuhan 12,76%, yang disebabkan oleh meningkatnya piutang pajak daerah. Kas di BLUD juga mengalami pertumbuhan positif dengan rerata 21,51% yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan BLUD. Di sisi lain, kas pada kas daerah mengalami fluktuasi dengan rerata negatif -39,99%, dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja. Kas di bendahara pengeluaran tumbuh negatif dengan rerata -69,90% yang mana sesuai dengan ketentuan bahwa pada akhir tahun seluruh sisa kas yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetorkan ke RKUD. Untuk kas lainnya berasal dari kas yang dibatasi penggunaannya, sehingga perolehannya fluktuatif setiap tahun. Kas di bendahara FKTP menjadi 0 perolehannya pada tahun 2021-2022, disebabkan oleh adanya peningkatan status FKTP menjadi BLUD. Kas di bendahara BOS pusat diperoleh dari penyaluran dana dari pemerintah pusat ke rekening sekolah yang memperhitungkan sisa kas tahun sebelumnya, yang mana mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 karena optimalisasi belanja serta sisa kas tahun sebelumnya diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS oleh Pemerintah Pusat pada tahun berikutnya. Piutang lainnya tumbuh negatif dengan rerata -18,94%, disebabkan oleh adanya reklasifikasi piutang BLUD dari piutang lainnya menjadi piutang pendapatan, serta adanya pembayaran piutang lain. Penyisihan piutang tumbuh positif dengan rerata 13,44% seiring dengan penambahan umur piutang. Beban dibayar di muka tumbuh negatif dengan rerata -29,84%, berkaitan dengan masa pertanggungan asuransi atas barang milik daerah. Persediaan juga tumbuh positif dengan rerata 5,27% disebabkan oleh adanya persediaan yang berasal dari hibah Pemerintah Pusat/Provinsi.

Investasi jangka panjang Kota Bogor mengalami pertumbuhan dengan rerata 11,42%. Terdapat penambahan penyertaan modal

pemerintah daerah sebesar Rp 831.636.916.668,80 pada tahun 2022, menjadikannya penyertaan modal tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir. Hal ini karena adanya koreksi atas pencatatan penyertaan modal pada Perumda Pasar Pakuan Jaya dan Perumda Tirta Pakuan, serta penambahan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pencatatannya menggunakan metode ekuitas, kecuali pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang menggunakan metode biaya. Di samping itu, terdapat pula perolehan dana bergulir senilai Rp 63.742.100,00 setiap tahun yang juga selalu disisihkan mulai dari tahun 2020.

Aset tetap Kota Bogor juga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 6,71%, yang mana alokasi terbesar diperuntukkan pada tanah; jalan, irigasi dan jaringan; serta akumulasi penyusutan aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 38,08%, disusul oleh jalan, jaringan dan irigasi 13,15%, akumulasi penyusutan aset tetap 14,79%, serta peralatan dan mesin 11,05%. Seluruh pos dalam aset tetap Kota Bogor mengalami kenaikan nilai, kecuali aset tetap lainnya yang terhitung fluktuatif dengan rerata pertumbuhan positif 3,38%.

Sedangkan untuk aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami rata-rata penurunan sebesar -11,03%. Ini dipengaruhi oleh meningkatnya akumulasi amortisasi aset tak berwujud dan akumulasi penyusutan aset lainnya, yang mana masing-masing memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,54% dan 5,03%. Peningkatan nilai amortisasi ini sejalan dengan meningkatnya nilai aset tak berwujud dan aset lain-lain yang tumbuh positif setiap tahun, masing-masing 6,15% dan 3,32%. Selain itu, kemitraan dengan pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata sebesar -32,33%, yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh koreksi pencatatan dari kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap tanah. Tagihan jangka panjang terbilang cukup stabil hingga tahun 2022 dengan rerata -0,26%, sedangkan Treasury Deposit Facility (TDF) hanya diperoleh pada tahun 2022 sebesar Rp 12.400.188.687,00.

Kewajiban jangka pendek Kota Bogor mengalami pertumbuhan positif dengan rerata 19,67%. Kewajiban jangka pendek tertinggi diperoleh pada tahun 2021 sebesar Rp 98.233.480.715,07, yang mana dipengaruhi oleh utang beban sebesar Rp 86.965.286.440,00. Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tumbuh positif dengan rerata 20,85%, diperoleh dari utang PFK pada RSUD Kota Bogor. Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang terhitung stabil sebelum tahun 2022, kemudian bertambah pada tahun 2022-2023 karena adanya bagian lancar dari penambahan kewajiban jangka panjang, yaitu pinjaman kepada PT SMI untuk pembangunan kawasan Suryakencana. Sementara itu, pendapatan diterima di muka turun drastis dengan rerata -29,85%, begitu juga dengan utang jangka pendek lainnya dengan rerata -100,00%. Utang jangka panjang Kota Bogor terbilang cukup stabil dengan rerata pertumbuhan 0,57%, yang disebabkan oleh penambahan pinjaman dari PT SMI.

Secara umum, Kota Bogor telah banyak melakukan belanja pada aset tetap, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekuitas dana Kota Bogor masih lebih besar dibanding kewajibannya, dengan rerata pertumbuhan masing-masing 6,00% dan 9,47%. Ini menjadikan rerata pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar 6,05%, sejalan dengan rerata pertumbuhan jumlah aset yang juga 6,05%.

## 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Belanja daerah sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu Analisis Pembiayaan yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri dari sejumlah *item*, Tidak hanya dari pemenuhan gaji dan tunjangan saja, namun juga meliputi peningkatan kapasitas aparatur, pakaian, hingga pemenuhan peralatan penunjang kerja. Perincian dari belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2. 1 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor 2019-2022**

| NO | URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 480.807.837.587,00 | 483.295.627.451,00 | 456.499.514.837,00 | 456.949.303.955,00 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan | 430.063.148.526,00 | 387.234.448.397,00 | 307.600.560.540,00 | 344.689.616.254,00 |
| 3 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0 | 0 | 159.178.557.231,00 | |
| 4 | Biaya Pemungutan Pajak | 25.425.320.280,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Insentif Pemungutan Pajak | 0 | 21.940.471.029,00 | 27.383.213.346,00 | 29.775.215.468,00 |
| 6 | Insentif Pemungutan Retribusi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD | 360.360.000,00 | 393.120.000,00 | 393.120.000,00 | 393.120.000,00 |
| 8 | Belanja Pegawai BLUD | 63.323.315.053,00 | 78.436.590.917,00 | 125.491.316.546,00 | 133.746.243.121,00 |
| 9 | Belanja Honorarium PNS Kota Bogor | 11.859.459.500,00 | 1.682.957.500,00 | 8.675.726.200,00 | 10.289.898.700,00 |
| 10 | Belanja Uang Lembur | 2.350.190.000,00 | 1.141.104.000,00 | 0 | 0 |
| 11 | Uang Jahit Pakaian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Belanja Premi Asuransi | 47.939.753.631,00 | 71.514.766.672,00 | 86.300.982.908,00 | 104.566.389.196,00 |
| 13 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 1.657.095.515,00 | 858.391.980,00 | 5.192.233.256,00 | 203.833.650,00 |
| 14 | Belanja Pakaian Kerja | 3.175.946.095,00 | 2.393.180.550,00 | 366.812.750,00 | 2.681.903.307,00 |
| 15 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 1.152.019.800,00 | 690.872.000,00 | 824.488.250,00 | |
| 16 | Belanja Perjalanan Dinas PNS Kota Bogor | 98.925.696.726,00 | 56.126.654.891,00 | 48.948.157.743,00 | 79.437.586.151,00 |
| 17 | Belanja Perjalanan Pindah Tugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Belanja Pemulangan Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 69.000.000,00 | 185.000.000,00 | 122.000.000,00 | 143.000.000,00 |

| NO | URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 9.355.501.800,00 | 3.978.593.200,00 | 5.396.963.100,00 | 4.551.775.296,00 |
| 21 | Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan | 13.447.824.326,00 | 13.737.390.085,00 | 15.953.830.737,00 | 12.637.116.474,00 |
| 22 | Belanja pajak kendaraan dinas jabatan | 270.572.600,00 | 306.249.000,00 | 1.033.451.468,00 | 1.502.672.237,00 |
| 23 | Belanja pemeliharaan gedung | 18.358.195.451,00 | 19.517.224.414,00 | 27.877.085.934,00 | 25.085.446.580,00 |
| 24 | Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor (komputer, printer, scanner, laptop, AC) | 7.680.475.864,00 | 7.198.176.574,00 | 4.318.789.396,00 | 3.752.673.591,00 |
| 25 | Belanja Modal pembangunan gedung kantor | 14.632.373.000,00 | 29.509.153.774,00 | 75.413.812.539,00 | 188.457.698.905,00 |
| 26 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 3.178.352.941,00 | 2.802.960.846,00 | 2.072.075.991,00 | 4.086.343.000,00 |
| 27 | Belanja Modal Pengadaan Mobil Dinas Jabatan | 10.469.336.150 | 2.026.200.000,00 | 9.538.784.950,00 | 10.319.261.699,00 |
| 28 | Belanja Modal Pengadaan Mebelair | 4.483.132.590,00 | 2.756.459.226,00 | 2.430.364.960,00 | 3.095.981.989,00 |
| | **TOTAL** | **1.248.984.907.435,00** | **1.187.725.592.506,00** | **1.371.011.842.682,00** | **1.416.365.079.573,00** |

*Sumber: Data Keuangan Pemerintah Kota Bogor, 2019-2022*

Setelah diketahui besaran realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Bogor, data tersebut kemudian dimasukkan pada analisis proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur. Hasil analisisnya tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.2. 2 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor Tahun 2019-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur | 1.248.984.907.435,00 | 1.187.725.592.506,00 | 1.371.011.842.682,00 | 1.416.365.079.573,00 | 4,28% |
| 2 | Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) | 2.683.996.411.771,19 | 2.435.416.044.384,00 | 2.773.344.383.881,00 | 2.996.233.282.609,00 | 3,74% |
| **Persentase** | | 46,53% | 48,77% | 49,44% | 47,27% | 48,00% |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2019-2022, diolah*

Dari Tabel 3.2.2 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata proporsi antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran sebesar 48,00%. Jadi, dapat dikatakan bahwa hampir separuh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Dilihat dari tren data, Kota Bogor telah mempertahankan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada angka yang relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan 4,28%. Apabila dilihat dari tren perbandingannya dengan total pengeluaran, terdapat pertumbuhan yang fluktuatif seiring dengan meningkatnya total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan total pengeluaran tersebut.

Kemudian terdapat pengeluaran wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Perincian dari pengeluaran tersebut dapat dilihat pada tabeL, sebagai berikut:

**Tabel 3.2. 3 Realisasi Pengeluaran Kebutuhan Wajib dan Mengikat Kota Bogor 2019-2022**

| NO | URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Belanja** | **960.628.393.579,00** | **918.744.910.028,00** | **835.930.089.916,00** | **876.047.635.554,00** | **-3,03%** |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 480.807.837.587,00 | 483.295.627.451,00 | 456.499.514.837,00 | 456.949.303.955,00 | -1,68% |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 430.063.148.526,00 | 387.234.448.397,00 | 307.600.560.540,00 | 344.689.616.254,00 | -7,11% |
| 3 | Biaya Pemungutan Pajak | 25.425.320.280,00 | 0 | 0 | 0 | -100,00% |
| 4 | Insentif Pemungutan Pajak | 0 | 21.940.471.029,00 | 27.383.213.346,00 | 29.775.215.468,00 | 16,49% |
| 5 | Insentif Pemungutan Retribusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD | 360.360.000,00 | 393.120.000,00 | 393.120.000,00 | 393.120.000,00 | 2,94% |
| 7 | Gaji dan Tunjangan DPRD | 21.415.414.944,00 | 23.462.283.416 | 41.203.910.676,00 | 41.167.712.768,00 | 24,34% |
| 8 | Gaji dan Tunjangan Walikota/Wakil Walikota | 168.304.352 | 144.786.336 | 180.615.830,00 | 177.312.422,00 | 1,75% |
| 9 | Belanja Penerimaan Lainnya Walikota/Wakil Walikota | 1.416.000.000,00 | 1.112.000.000,00 | 1.422.000.000,00 | 1.648.200.000,00 | 5,19% |
| 12 | Belanja Bagi Hasil Kepada Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13 | Belanja Bantuan kepada Partai Politik | 972.007.890,00 | 1.162.173.399,00 | 1.247.154.687,00 | 1.247.154.687,00 | 8,66% |
| **B** | **Pengajuan Pembiayaan Daerah** | **16.000.000.000,00** | **24.300.000.000,00** | **0** | **4.394.083.430,00** | **-35,00%** |
| 1 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 16.000.000.000,00 | 24.300.000.000,00 | 0 | 4.394.083.430,00 | -35,00% |
| | **TOTAL A+B** | **976.628.393.579,00** | **943.044.910.028,00** | **835.930.089.916,00** | **880.441.718.984,00** | **-3,40%** |

*Sumber: Data Keuangan Pemerintah Kota Bogor, 2019-2022*

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pengeluaran wajib dan mengikat Kota Bogor tumbuh negatif dengan rerata -3,40%. Penurunan ini utamanya dipengaruhi oleh menurunnya penyertaan modal pemerintah daerah dengan rerata pertumbuhan -35%. Belanja juga menurun dengan rerata pertumbuhan -3,03%, yang mana dipengaruhi oleh menurunnya belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan PNS.

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pembiayaan Daerah untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran. Selain itu juga semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

**Tabel 3.2. 4 Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2019-2022**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 2.559.857.207.793,86 | 2.428.579.503.649,12 | 2.644.780.935.777,11 | 2.787.105.058.802,92 |
| | Dikurangi realisasi: | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 2.528.500.802.938,19 | 2.354.870.702.982,00 | 2.637.726.570.905,00 | 2.986.354.433.003,00 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 155.495.608.833,00 | 80.545.341.402,00 | 135.617.812.976,00 | 9.878.849.606,00 |
| | **Defisit riil** | **- 124.139.203.977,33** | **- 6.836.540.738,88** | **- 132.999.906.257,08** | **- 64.382.861.164,08** |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2019-2022, diolah*

Dengan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah yang meningkat setiap tahun, disertai dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang cukup fluktuatif, maka Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami defisit riil pada tahun 2019, 2021, dan 2022. Sedangkan surplus riil hanya dialami Kota Bogor pada tahun 2020.

**Tabel 3.2. 5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2019-2022**

| No | Uraian | Proporsi dari Total Defisit Riil | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 256.564.582.703,52 | 277.640.687.080,19 | 327.542.156.075,31 | 365.001.935.698,42 |
| 2 | Pencairan dana Cadangan | - | - | - | - |
| | Penerimaan Pinjaman Daerah | 139.752.780.949,00 | 32.159.096.032,00 | 160.538.461.551,00 | - |

| No | Uraian | Proporsi dari Total Defisit Riil | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 5.484.766.178,00 | 24.537.933.863,00 | 5.484.766.176,00 | 5.484.766.176,00 |
| **B** | **Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah** | 401.802.129.830,52 | 334.337.716.975,19 | 493.565.383.802,31 | 370.486.701.874,42 |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2019-2022, diolah*

Pada sisi realisasi penerimaan pembiayaan daerah, milik Kota Bogor dapat dikatakan cukup fluktuatif. Hal ini akan memengaruhi kemampuan Kota Bogor untuk menutup defisit riil.

**Tabel 3.2. 6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 2019-2022**

| No. | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 2.559.857.207.793,86 | 2.428.579.503.649,12 | 2.538.517.720.539,11 | 2.787.105.058.802,92 |
| | Dikurangi realisasi: | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 2.528.500.802.938,19 | 2.354.870.702.982,00 | 2.637.726.570.905,00 | 2.986.354.433.003,00 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 155.495.608.833,00 | 80.545.341.402,00 | 135.617.812.976,00 | 9.878.849.606,00 |
| **A** | **Defisit Riil** | **- 124.129.748.377,33** | **119.440.637.195,12** | **- 132.999.906.257,08** | **- 64.382.861.164,08** |
| 4 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya | 256.564.582.703,52 | 277.640.687.080,19 | 327.542.156.075,31 | 365.001.935.698,42 |
| 5 | Pencairan dana Cadangan | - | - | - | - |
| | Penerimaan Pinjaman Daerah | 139.495.608.833,00 | 56.245.341.402,00 | 135.617.812.976,00 | 5.484.766.176,00 |

| No. | Uraian | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 5.484.766.178,00 | 24.537.933.863,00 | 5.484.766.176,00 | 5.484.766.176,00 |
| **B** | **Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **401.802.129.830,52** | **334.337.716.975,19** | **493.565.383.802,31** | **370.486.701.874,42** |
| **B-A** | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) | 277.662.925.853,19 | 327.501.176.240,31 | 365.001.935.698,42 | 161.358.478.068,34 |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2019-2022, diolah*

Setelah mengurangi atau menambah realisasi penerimaan pembiayaan daerah dengan defisit/surplus riil, maka diketahui bahwa Kota Bogor masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA). Ini berarti dengan kondisi defisit riil, Kota Bogor masih mampu mendanai kebutuhan dan menutupi kekurangannya dengan penerimaan pembiayaan daerah.

## Tabel 3.2. 7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 2019-2021

| No | Uraian | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA |
| 1 | Jumlah SiLPA Tahun Berkenaan | 277.640.687.080,19 | | 327.542.156.075,31 | | 365.001.935.698,42 | |
| | **Bersumber dari:** | | | | | | |
| 2 | Pelampauan Penerimaan PAD | 45.203.426.999,86 | 16,28% | 133.760.382.870,12 | 40,84% | 69.471.113.858,00 | 19,03% |
| 3 | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | | | 10.072.550.501,00 | | 79.320.583.698,00 | |
| 4 | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | | | | | | |
| 5 | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 232.410.234.853,33 | 83,71% | 181.764.688.466,19 | 55,49% | 202.570.306.459,42 | 55,50% |
| 6 | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 49.264.000,00 | 0,02% | 1.903.554.403,00 | 0,58% | 13.639.931.683,00 | 3,74% |
| 7 | Kegiatan lanjutan | | | | | | |

*Sumber: Data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor (2023)*

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelampauan penerimaan PAD tumbuh fluktuatif yang disebabkan oleh terlampauinya target Penerimaan PAD. Pelampauan penerimaan dana perimbangan tumbuh pesat, dari Rp 10.072.550.501,00 (2021) menjadi Rp 79.320.583.698,00 (2022) yang disebabkan oleh kurang salur pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya diterima pada tahun 2022, karena terlampauinya target lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya tumbuh fluktuatif yang mencapai perolehan terendah di tahun 2020, yang disebabkan oleh optimalisasi realisasi belanja oleh Perangkat Daerah. Sedangkan besaran kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dipengaruhi oleh keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Tahapan yang harus ditempuh untuk menganalisis kerangka pendanaan adalah dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Perincian proyeksi APBD Kota Bogor 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 3.3. 1 Proyeksi APBD Kota Bogor 2025-2026

| No | Uraian | 2024* | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | **3.035.448.507.631,00** | **2.664.680.685.049,76** | **2.762.783.500.595,03** |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **1.437.509.600.344,00** | **1.502.644.902.329,76** | **1.600.925.811.189,03** |
| 1.1.01 | Pajak Daerah | 1.016.572.839.000,00 | 1.067.401.480.950,00 | 1.150.771.554.997,50 |
| 1.1.02 | Retribusi Daerah | 372.895.138.600,00 | 384.081.992.758,00 | 395.604.452.540,74 |
| 1.1.03 | Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan | 33.064.860.644,00 | 34.387.455.069,76 | 35.762.953.272,55 |
| 1.1.04 | Lain-lain PAD yang sah | 14.976.762.100,00 | 16.773.973.552,00 | 18.786.850.378,24 |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** | **1.597.938.907.287,00** | **1.162.035.782.720,00** | **1.161.857.689.406,00** |
| 1.2.01 | Transfer Pemerintah Pusat | 1.290.378.813.100,00 | 1.034.040.588.036,00 | 1.033.862.494.722,00 |
| | a. Proyeksi DAU | | 841.577.078.036,00 | 841.398.984.722,00 |
| | b. Proyeksi dana Tamsil dan TPG PGSD | | 109.765.151.000,00 | 109.765.151.000,00 |
| | c. Proyeksi DBH | | 82.698.359.000,00 | 82.698.359.000,00 |
| 1.2.02 | Transfer antar - daerah | 307.560.094.187,00 | 127.995.194.684,00 | 127.995.194.684,00 |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.01 | Hibah | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.02 | Dana Darurat | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.03 | Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **BELANJA DAERAH** | **3.107.300.136.495,00** | **2.559.883.571.313,76** | **2.857.986.386.859,03** |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **2.681.056.940.755,00** | **2.328.013.571.313,76** | **2.626.116.386.859,03** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.214.129.058.804,00 | 1.214.129.058.804,00 | 1.214.129.058.804,00 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.252.963.490.855,00 | 1.016.884.512.509,76 | 1.314.987.328.055,03 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 7.750.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 171.671.641.096,00 | 60.000.000.000,00 | 60.000.000.000,00 |

| No | Uraian | 2024* | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 34.542.750.000,00 | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **325.873.195.740,00** | **200.000.000.000,00** | **200.000.000.000,00** |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 6.155.150.436,00 | - | - |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 80.112.260.707,00 | - | - |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 138.714.305.394,00 | - | - |
| 2.2.4 | Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan | 91.727.484.945,00 | - | - |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 9.088.994.258,00 | - | - |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 75.000.000,00 | - | - |
| **2.3** | **Belanja Tak Terduga** | **98.500.000.000,00** | **30.000.000.000,00** | **30.000.000.000,00** |
| 2.3.1 | Belanja Tak Terduga | 98.500.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | **1.870.000.000,00** | **1.870.000.000,00** | **1.870.000.000,00** |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil Pendapatan | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 1.870.000.000,00 | 1.870.000.000,00 | 1.870.000.000,00 |
| | *SURPLUS/DEFISIT* | *-71.851.628.864,00* | *104.797.113.736,00* | *-95.202.886.264,00* |
| **3** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | **71.851.628.864,00** | **-104.797.113.736,00** | **95.202.886.264,00** |
| **3.1** | **Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **84.145.774.860,00** | **5.497.032.260,00** | **105.497.032.260,00** |
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 40.000.000.000,00 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 38.648.742.600,00 | 0 | 100.000.000.000,00 |
| 3.1.3 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 5.497.032.260,00 | 5.497.032.260,00 | 5.497.032.260,00 |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** | **12.294.145.996,00** | **110.294.145.996,00** | **10.294.145.996,00** |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 100.000.000.000,00 | 0 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 2.000.000.000,00 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 10.294.145.996,00 | 10.294.145.996,00 | 10.294.145.996,00 |

| No | Uraian | 2024* | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | **Pembiayaan Netto** | **71.851.628.864,00** | **-104.797.113.736,00** | **95.202.886.264,00** |

*Sumber: Hasil Proyeksi Keuangan Kota Bogor, diolah*

**Data merupakan hasil dari RAPBD 2024 Kota Bogor*

### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang HKPD), disebutkan ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Adanya Undang-Undang HKPD ini mengakibatkan beberapa perubahan terkait komponen-komponen PAD, terutama terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor mengambil langkah untuk merancang peraturan daerah untuk mengakomodasi perubahan tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan yang dimaksud meliputi:

**A. Pajak Daerah**

a. Terdapat penyesuaian nomenklatur nama pajak yang sebelumnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parker menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta perubahan pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sebelumnya tercatat sebagai pendapatan transfer menjadi pendapatan asli daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang akan berlaku tahun 2025.
b. Tarif pajak daerah yang diusulkan mengacu pada tarif yang diatur dalam Undang-Undang HKPD di mana terdapat beberapa perubahan tarif yaitu, tarif pajak parker yang semula 25% menjadi 10%, beberapa penyesuaian dalam tarif pajak hiburan, serta kenaikan NJOPTKP BPHTB yang semula Rp60.000.000,00 menjadi Rp80.000.000,00.
c. Terdapat perubahan tarif untuk PBJT atas tenaga listrik khusus klaster rumah tangga sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil, yaitu:
    - daya 450 Watt ditetapkan 3%
    - daya 900 - 2200 Watt 5%
    - daya > 2200 Watt 10%

**B. Retribusi Daerah**

a. Terdapat penghapusan 8 objek retribusi yaitu:
   1. Retribusi Jasa umum: retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat, retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengawasan dan pengendalian menara komunikasi, dan pelayanan pengujian alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya.
   2. Retribusi Jasa Usaha: retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha, retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
   3. Retribusi Perizinan Tertentu: retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

b. Terdapat perubahan pendapatan bagi BLUD yang semulanya tercatat pendapatan lain-lain PAD yang sah menjadi pendapatan retribusi.

c. Tarif retribusi daerah yang diusulkan menggunakan struktur tarif lama dengan pertimbangan tarif tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini kecuali beberapa tarif yang disesuaikan yaitu tarif retribusi persampahan mengalami kenaikan, penambahan objek pelayanan ambulans di BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD, serta penambahan objek retribusi baru yaitu retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di GOR Kecamatan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Zona Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL).

Perincian jenis pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. 2 Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bogor**

| Pajak | Retribusi |
|---|---|
| 1. PBB-P2 | 1. Retribusi jasa umum: |
| 2. BPHTB | a. pelayanan kesehatan |
| 3. PBJT atas: | b. pelayanan kebersihan |
| a. Makanan dan/atau minuman | c. pelayanan parkir di tepi jalan umum |
| b. Tenaga Listrik | 2. Retribusi jasa usaha |
| c. Jasa Perhotelan | a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan |
| d. Jasa Parkir | b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak |

| Pajak | Retribusi |
|---|---|
| e. Jasa Kesenian dan Hiburan | c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga |
| 4. Pajak Reklame | d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 5. PAT | 3. Retribusi perizinan tertentu |
| 6. Pajak MBLB (tidak dipungut) | a. PBG |
| 7. Pajak sarang burung walet (tidak dipungut) | b. penggunaan tenaga kerja asing |
| 8. Opsen PKB | |
| 9. Opsen BBNKB | |

*Sumber: Perda PDRD Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023*

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;

c. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);

d. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;

e. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

f. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;

g. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;

h. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan instansi terkait;

i. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;

j. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;

k. Penerapan pola insentif dan disinsentif;

l. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;

m. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan transfer yaitu:

a. Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Bogor untuk setiap obyek dari pendapatan transfer sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga di tingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan pendapatan transfer bagi kabupaten/kota;

c. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kota Bogor sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan tumbuh 5% pada tahun 2025 dari RAPBD 2024 dan 7% pada tahun 2026 dari tahun 2025. PAD disumbang terbesar oleh pajak daerah, oleh karena itu Kota Bogor akan memberi perhatian khusus terhadap komponen pendapatan ini, terutama pada BPHTB.

Kemudian untuk pendapatan transfer 2025 terproyeksi turun sebesar -27% dari RAPBD 2024, kemudian turun kembali sebesar -0,01%. Proyeksi penurunan ini disebabkan oleh dikeluarkannya komponen-komponen pendapatan transfer yang bersifat fluktuatif, antara lain sebagian besar DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. Oleh karena itu, transfer pemerintah pusat terdiri dari proyeksi DAU selain DAU PPPK, alokasi dana pensiun, DAK tamsil guru PNSD dan DAK TPG PNSD, serta proyeksi DBH.

Untuk hibah dan dana darurat diproyeksikan 0 setiap tahun dengan mempertimbangkan sifat kedua pos tersebut yang insidental. Begitu pula dengan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diproyeksikan 0 karena sifatnya yang tidak menentu.

### 3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024-2026

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun secara cermat, sistematis dan terpola.

Sebagai komponen APBD, belanja daerah diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi daerah. Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan yang langsung memberikan manfaat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam pengelolaan belanja harus menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan. Efektifitas dan efisiensi dimaksudkan dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud transparan dan akuntabel yaitu setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan perundangan;

b. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit ataupun memiliki *multiplier effects* dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. Belanja dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan OPD sesuai tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran OPD dan sasaran daerah;

d. Penghematan dan rasionalisasi terhadap belanja personil pada belanja langsung secara selektif;

e. Pada tahun 2025-2026 belanja diarahkan untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi;

f. Mempedomani belanja wajib atau *mandatory spending* antara lain:

   1) Anggaran bidang Urusan Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 ayat (1);

   2) Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

   3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (Undang-Undang APBN);

Pada pos belanja operasi, belanja pegawai diproyeksikan flat sebesar Rp 1.214.129.058.804,00, mengikuti RAPBD 2024 dan diberlakukan pada tahun 2025 dan 2026. Belanja barang dan jasa ditetapkan Rp 1.016.884.512.509,76 pada tahun 2025, turun 19% dari RAPBD 2024, lalu naik menjadi Rp 1.314.987.328.055,03 pada

tahun 2026. Belanja bunga ditetapkan *flat* sebesar Rp 7.000.000.000,00 sebagai pembayaran bunga PDAM, begitu pula dengan belanja hibah yang ditetapkan sebesar Rp 60.000.000.000,00 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 30.000.000.000,00.

Pada pos belanja modal terproyeksi *flat* Rp 200.000.000.000,00 untuk tahun 2025 dan 2026. Begitu pula dengan belanja tak terduga dan belanja transfer, masing-masing sebesar Rp 30.000.000.000,00 dan Rp 1.870.000.000,00. Total proyeksi pendapatan Kota Bogor untuk tahun 2025-2026 adalah Rp 2.664.680.685.049,76 dan Rp 2.762.783.500.595,03, sedangkan total proyeksi belanja Kota Bogor tahun 2025-2026 adalah Rp 2.559.883.571.313,76 dan Rp 2.857.986.386.859,03. Dengan demikian, Kota Bogor diperkirakan mengalami surplus pada tahun 2025 sebesar Rp 104.797.113.736,00 dan defisit pada tahun 2026 sebesar Rp -95.202.886.264,00.

### 3.3.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan serta penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Mengupayakan raihan SiLPA 0 untuk mencapai penyerapan anggaran yang efektif dan efisien.
b. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000.000,00 pada tahun 2025 dan pencairan dana cadangan dengan jumlah yang sama di tahun 2026 untuk pendanaan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat 2026 yang akan diselenggarkan di Kota Bogor.
c. Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program kegiatan dengan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa secara ketat, dengan tetap memperhatikan *output* dan *outcome*.
d. Mengupayakan pemanfaatannya untuk kesejahteraan

masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah.

Pada pos penerimaan pembiayaan daerah, SiLPA diproyeksikan 0 setiap tahun, mempertimbangkan kemampuan penyerapan anggaran Kota Bogor dan tren SiLPA yang menuruan setiap tahunnya pada periode lalu. Pada tahun 2025 pencairan dana cadangan sebesar 0, baru pada tahun 2026 dilakukan pencairan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000.000,00. Penerimaan kembali diproyeksikan tetap sebesar Rp 5.497.032.260,00.

Untuk pengeluaran pembiayaan daerah, pembentukan dana cadangan terproyeksi sebesar Rp 100.000.000.000,00 di tahun 2025, yang selanjutnya menjadi 0 pada tahun 2026. Penyertaan modal pemerintah daerah terproyeksi *flat* 0. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo terproyeksi flat di tahun 2025 dan 2026 sebesar Rp10.294.145.996,00. Pembiayaan netto tahun 2025 sebesar Rp -104.797.113.736,00 dan tahun 2026 sebesar Rp 95.202.886.264,00, menutupi surplus tahun 2025 dan defisit tahun 2026.

### 3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Secara keseluruhan kerangka pendanaan daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024-2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4. 1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bogor**

| No | Uraian | Proyeksi | |
|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 |
| | | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Pendapatan | 2.664.680.685.049,76 | 2.762.783.500.595,03 |
| 2 | Pencairan dana cadangan (Sesuai dengan Perda) | 0,00 | 100.000.000.000,00 |
| 3 | Sisa lebih riil Perhitungan Anggaran | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Penerimaan** | 2.664.680.685.049,76 | 2.862.783.500.595,03 |
| | Dikurangi: | | |
| 4 | Belanja Pegawai | 1.214.129.058.804,00 | 1.214.129.058.804,00 |
| 5 | Belanja Bunga | 7.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 |
| 6 | Pembentukan dana cadangan Porprov 2026 | 100.000.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | Pengeluaran Pembiayaan | 10.294.145.996,00 | 10.294.145.996,00 |
| | | 1.331.423.204.800,00 | 1.231.423.204.800,00 |
| | **Kapasitas riil kemampuan keuangan** | **1.333.257.480.249,76** | **1.631.360.295.795,03** |

*Sumber: Hasil Proyeksi Keuangan Kota Bogor, diolah*

Kapasitas riil kemampuan keuangan diproyeksikan Rp 1.333.257.480.249,76 pada tahun 2025 dan Rp 1.631.360.295.795,03 pada tahun 2026. Terdapat pembentukan dana cadangan di tahun

2025 untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026, di mana Kota Bogor berperan sebagai tuan rumah yang berkewajiban untuk mengadakan pembiayaan terkait ajang tersebut. Kemudian pada tahun 2026, Kota Bogor akan melakukan pencairan dana cadangan terkait Porprov dengan nominal yang sama dengan pembentukannya.

**Tabel 3.4. 2 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bogor**

| No | Uraian | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | Kapasitas Riil kemampuan keuangan | 1.333.257.480.249,76 | 1.631.360.295.795,03 |
| **I** | **Prioritas I (60%)** | **799.954.488.149,86** | **978.816.177.477,02** |
| **II** | **Prioritas II (40%)** | **533.302.992.099,90** | **652.544.118.318,01** |

*Sumber: Hasil Proyeksi Keuangan Kota Bogor, diolah*

Kapasitas rill kemampuan keuanangan yang diperoleh kemudian dibagi menjadi Prioritas I dan Prioritas II. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, sedangkan Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

### 3.4.1 Alternatif Pendanaan Pembangunan

Pembangunan Kota Bogor dilaksanakan dengan APBD Kota Bogor. Namun ini tidak menutup peluang untuk kontribusi pendanaan dari sumber-sumber lain. Potensi pendanaan pelaksanaan pembangunan Kota Bogor 2024-2026 telah diidentifikasi sebagai berikut.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

   Pembangunan Kota Bogor juga dibiayai oleh APBN berupa dana tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Selain itu, kabupaten/kota juga dapat menerima dana insntif daerah (DID), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT), dan dana transfer pemerintah pusat lainnya yang sudah ditentukan peruntukannya (*earmarked*).

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat

Dalam belanja transfer provinsi, terdapat akun transfer antardaerah, yang mana pada tingkat provinsi dapat dialokasikan untuk kabupaten/kota. Kota Bogor sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat memiliki peluang untuk menerima transfer berupa bantuan keuangan provinsi.

c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) / *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan program TJSL di Daerah, serta memberi arahan kepada perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Bogor dalam menyiapkan diri guna memenuhi standar nasional dan internasional.

Ruang lingkup TJSLP Kota Bogor terdiri dari bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah. Sedangkan partisipan TJSLP meliputi perusahaan yang berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana dari kegiatan yang menjalankan operasional perusahaan di daerah.

Sebagai gambaran potensi, total nilai TJSLP Kota Bogor pada tahun 2021 mencapai Rp 4.117.740.424,00, kemudian meningkat sebesar 321,21% menjadi Rp 13.244.462.668,00. Peningkatan nilai ini selain menggambarkan dampak dari pemulihan dunia usaha pascapandemi COVID-19, juga menggambarkan potensi TJSLP yang dapat dijaring oleh Pemerintah Kota Bogor. Untuk itu, diperlukan sinergi antara Perangkat Daerah dan perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP melalui tim fasilitasi agar pengelolaannya menjadi lebih optimal.

# BAB IV
# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini, akan menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kota Bogor untuk periode 2025-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bogor. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Bogor didasarkan atas beberapa komponen yang telah dianalisis terkait hasil pembangunan yang ada di periode sebelumnya, seperti, telaah atas dokumen RPJPN, 2025-2045, RPJMN 2020-2024, dokumen RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, dokumen RPJPD Kota Bogor 2005-2025, dokumen RPJMD Kota Bogor 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), isu internasional, dan lain sebagainya.

## 4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan bentuk dari "*gap expectation*: antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa permasalahan yang disampaikan merupakan kondisi yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni terkait permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup.

**Tabel 4.1. 1 Analisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|---|
| Belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing | Belum meratanya akses dan mutu kesehatan | Masih terjadinya ketimpangan pelayanan kesehatan (tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan, SDM tenaga kesehatan, kemampuan finansial masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan yang layak) | Urusan Kesehatan, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Masih belum optimalnya pembiasaan pola hidup bersih dan sehat masyarakat (status mutu gizi keluarga dan pengendalian terhadap penyakit menular dan tidak menular/degeneratif, akses masyarakat terhadap air minum, air limbah, persampahan, rumah layak huni, kebiasaan merokok, cuci tangan | Urusan Kesehatan |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|---|
| | | dengan sabun, kebersihan lingkungan, olahraga) | |
| | | Masih belum optimalnya penguatan sistem kesehatan dalam penanganan wabah | Urusan Kesehatan |
| | Belum meratanya akses dan mutu pendidikan | Masih terjadinya ketimpangan layanan pendidikan (tingkat ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, kemampuan finansial siswa untuk mendapat pendidikan yang layak) | Urusan Pendidikan |
| | Belum optimal layanan pendidikan Inklusif | Rendahnya pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan atas pendidikan inklusif | Urusan Pendidikan |
| | | Kurangnya sarana prasarana untuk pendidikan inklusif | Urusan Pendidikan |
| | | Tidak ada grand design pengembangan pendidikan inklusif | Urusan Pendidikan |
| | Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia | Masih terjadinya ketimpangan peran gender dan perlindungan anak | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Masih cukup tingginya angka kemmiskinan dan pengangguran | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata |
| | | Belum optimalnya peran pemuda dan prestasi pemuda | Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Sosial |
| | | Belum optimalnya pengembangan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap aktivitas pembangunan | Urusan Penelitian dan Pengembangan |
| | | Masih belum optimalnya tumbuh kembang anak dan remaja | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Masih belum optimalnya pemberdayaan lansia dan kelompok disabilitas | Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Belum optimalnya pengembangan literasi | Urusan Pendidikan |
| | | Belum optimalnya produktivitas, daya saing, dan serapan tenaga kerja | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUKM, Urusan Pariwisata Ekraf |
| | | Belum optimalnya layanan untuk pemenuhan, dan integrasi data administrasi kependudukan | Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | Kualitas lulusan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi pasar kerja | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|---|
| | Belum tercapainya pengentasan kemiskinan | Belum meratanya peningkatan pendapatan terutama pada kelompok miskin dan rentan miskin | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum meratanya intervensi perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dalam rangka menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin | Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan |
| | | Masih adanya kantong kantong kemiskinan (kawasan permukiman kumuh padat penduduk) yang belum tertangani dan dilakukan penataan | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Sosial, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan PUPR |
| | | Belum adanya kebijakan redistribusi fiskal yang berorientasi bagi pengembangan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial |
| | Rendahnya penyerapan tenaga kerja di kalangan menengah bawah | Kualitas SDM masyarakat menengah bawah belum optimal | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum optimalnya sector penyerap tenaga kerja *middle low labor* | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Para migran yang mengisi kebutuhan kerja | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum optimalnya peluang Usaha Mikro Kecil Menengah menyerap tenaga kerja | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| Belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan | Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah | Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal dan sektor unggulan daerah | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum optimalnya pengendalian Inflasi Daerah (masih cukup tingginya inflasi di sektor pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, dan transportasi) | Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|---|
| | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pertanian |
| | | Belum terkendalinya tingkat inflasi daerah akibat naiknya sebagian kelompok pengeluaran | Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Belum optimalnya pertumbuhan sektor utama struktur ekonomi kota | Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Belum tingginya peran sektor jasa (tersier) dalam struktur perekonomian kota | Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Rendahnya daya saing wilayah dalam menyerap investasi yang menghasilkan tenaga kerja di Kota Bogor | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | Belum optimalnya integrasi program pengembangan ekonomi inklusif | Belum ada grand design pengembangan ekonomi inklusif dan berkelnajutan | Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Belum meratanya kapasitas/ pemahaman aparatur dalam pengembangan ekonomi inklusif dan berkelnajuutan | Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Belum ada instansi khusus yang menangani perencanaan dan monev terkait ekonomi | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Masih rendahnya integrasi UMKM sebagai bagian dari *Value Chain* industri yg lebih besar | Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Perdagangan, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Belum optimalnya pengembangan aktivitas ekonomi informal | Belum optimalnya penanganan tenaga kerja informal | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum optimalnya fasilitasi ruang aktivitas ekonomi informal | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|---|
| | | | Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal, dan UMKM | Belum teridentifikasi dengan jelas potensi ekonomi lokal | Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum terbentuknya instansi pembina dan penggerak ekonomi lokal dan ekonomi kreatif | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum meratanya kualitas SDM pelaku ekonomi lokal/ UMKM | Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Masih lemahnya pertumbuhan perusahaan *startup* di Kota Bogor | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Peran inkubasi bisnis belum optimal | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum meratanya kualitas dan daya saing produk | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum optimalnya manajemen pengelolaan UMKM | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|---|
| | | Keterbatasan pemasaran produk | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum meratanya pemanfaatan IT & digital economy di lingkup UMKM | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum optimalnya fasilitasi pemerintah dalam membantu masyarakat mengakses pembiayaan | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | Belum optimalnya pengembangan, pemberdayaan, dan pendampingan bagi UMKM | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga |
| | Belum optimalnya peran BUMD | Belum optimalnya pembinaan & pengawasan rutin BUMD | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Penunjang Pemerintah Daerah |
| | | Belum optimalnya kebijakan pengelolaan BUMD sektor keuangan (BPR & LKM) | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Penunjang Pemerintah Daerah |
| | | Kurangnya inovasi pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai sektor | Urusan Komunikasi dan Informasi, Urusan Penelitian dan Pengembangan |
| | Belum stabilnya kondusifitas | Belum optimalnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Urusan Sosial |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|---|
| | keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi salah satu prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | Belum optimalnya perumusan dan penegakan ketentuan perundang undangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | Belum stabilnya kondusifitas wilayah | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | Masih tingginya ketimpangan pendapatan | Masih adanya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, atau pekerjaan dengan upah kurang layak | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Perindustrian |
| | | Tingginya pengeluaran kebutuhan RT/kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Belum optimal Kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat bawah | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan UMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Rendahnya peluang usaha bagi masyarakat bawah | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Penanaman Modal, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Belum optimalnya kebijakan struktur, sistem, dan mekanisme penetapan upah | Urusan penunjang perekonomian, Urusan Tenaga Kerja, Urusan industri |
| | Pertumbuhan ekonomi di kalangan atas kurang dirasakan bagi masyarakat bawah | Peran pemerintah dalam mendorong peran serta masyarakat bagi peningkatan pendapatan masyarakat bawah belum optimal | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Perindustrian |
| | | Belum adanya kebijakan redistribusi fiskal daerah pro masyarakat bawah | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Perindustrian, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang | Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal | Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan (panjang jalan, lebar jalan, kecepatan) | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan jaringan penerangan jalan umum | Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Perhubungan |
| | | Belum optimalnya kualitas penataan transportasi perkotaan (layanan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan) | Urusan Perhubungan |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|---|
| daya saing ekonomi daera | Belum optimalnya penyediaan layanan utilitas perkotaan | Belum meratanya layanan akses penyediaan air minum dan air limbah yang layak dan aman | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Belum optimalnya ketersediaan utilitas pencegahan dan pengendalian resiko bencana | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | Belum optimalnya penanganan genangan dan banjir | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Belum optimalnya penyediaan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan rencana tata ruang kota | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Lingkungan Hidup |
| | Belum optimalnya kualitas penataan kawasan perumahan permukiman | Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh perkotaan | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Terbatasnya aksesibilitas terhadap pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Belum optimalnya kualitas PSU di kawasan perumahan permukiman | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Belum optimalnya penyediaan Rumah Layak Huni | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Masih adanya backlog pemenuhan kebutuhan rumah | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Belum optimalnya kualitas penataan ruang | Belum terwujudnya struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) | Urusan PUPR dan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian tata ruang kota | Urusan PUPR, Urusan Penanaman Modal, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | Belum optimalnya pengendalian kualitas lingkungan dan konservasi lahan | Masih belum terkendalinya kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan | Urusan Lingkungan Hidup |
| | | Masih belum optimalnya kualitas pengelolaan persampahan | Urusan Lingkungan Hidup |
| | | Masih belum optimalnya konservasi kawasan lindung berupa sempadan Sumber Daya Air dan kawasan perlindungan plasma nutfah | Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan | Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel | Belum optimalnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| | | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah | Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Urusan Pengawasan |
| | | Belum optimalnya akuntabilitas keuangan pemerintah | Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Urusan Pengawasan |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Urusan |
|---|---|---|---|
| | Belum optimalnya budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan ASN yang profesional | Integritas, kompetensi, loyalitas ASN belum sepenuhnya terwujud | Urusan Kepegawaian, Urusan Penunjang Pemerintah Daerah |
| | | Agen agen perubahan belum sepenuhnya mampu mempengaruhi perubahan kinerja organisasi | Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, Urusan Kepegawaian |
| | | Budaya kerja belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan prima dan belum sepenuhnya adaptif menghadapi perubahan dan kondisi ketidakpastian | Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, Urusan Kepegawaian |

*Sumber: Data diolah, 2023*

Pada tabel analisis permasalahan sebagai penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terdapat masalah pokok, masalah, dan akar masalah yang saling terkait dalam menganalisis sasaran pembangunan daerah di Kota Bogor. Masalah pokok pertama, yaitu belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, di mana dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan belum optimal. Hal ini terjadi karena masih terdapatnya ketimpangan layanan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Selain itu, pembiasaan pola hidup bersih dan sehat masyarakat yang masih belum optimal, serta layanan pendidikan inklusif baik pada pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan atas pendidikan inklusif, sarana prasarana untuk pendidikan inklusi, dan grand design pengembangan pendidikan inklusif juga belum terlaksana dengan baik dan efektif. Pembangunan daya saing sumberdaya manusia juga dirasa kurang optimal karena masih terjadinya ketimpangan peran gender, tingginya angka pengangguran, dan minimnya peran pemuda dalam pembangunan. Selain itu dalam pemberdayaan lansia dan kelompok disabilitas, produktivitas tenaga kerja, layanan untuk pemenuhan administrasi kependudukan, dan kualitas lulusan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi pasar kerja.

Masalah pokok kedua, yaitu belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Dalam hal ini upaya dalam pengentasan kemiskinan baik pada kebijakan, dan beragam program belum efektif. Selain itu dalam integrasi peran berbagai aktor pada lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan masih belum optimal. Kemudian masih tingginya ketimpangan pendapatan. Dalam hal ini pendapatan dan pekerjaan masyarakat masih banyak yang kurang layak, padahal pengeluaran kebutuhan

RT/kebutuhan dasar tinggi. Selain itu optimalisasi dalam kebijakan peningkatan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat bawah dan struktur pengupahan juga belum efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Masalah pokok ketiga, yaitu belum meratanya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan. Padahal hal ini mampu menunjang daya saing ekonomi daerah. Konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal, penyediaan layanan utilitas perkotaan dalam hal ini yaitu layanan akses penyediaan air minum dan air limbah yang layak dan aman, dan utilitas pencegahan serta pengendalian resiko bencana baik penanganan genangan dan banjir dan penyediaan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan rencana tata ruang kota belum optimal. Selain itu masalah lainnya yaitu belum optimalnya kualitas penataan kawasan perumahan permukiman di mana dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan, aksesibilitas terhadap pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kualitas PSU di kawasan perumahan permukiman, penyediaan Rumah Layak Huni masih terbatas, serta masih adanya backlog pemenuhan kebutuhan rumah. Kemudian, belum optimalnya kualitas penataan ruang, melalui struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW), pengawasan dan pengendalian tata ruang kota, pengendalian kualitas lingkungan dan konservasi lahan belum optimal.

Masalah pokok keempat, yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan, dalam hal ini pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel belum terwujud, baik dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya yang belum berbasis elektronik, akuntabilitas kinerja pemerintah, maupun akuntabilitas keuangan pemerintah. Selain itu budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan juga belum optimal.

## Tabel 4.1 1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Per Urusan Pemerintahan Daerah

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| **Geografi dan Demografi** | Pertanahan | 1 | Rawan konflik kepentingan dari sengketa lahan dan penetapan wilayah administratif | Perkembangan penyelesaian kasus tanah Negara di Kota Bogor mengalami peningkatan terhadap kasus yang terdaftar yaitu Pada Tahun 2018 sebesar 24, Tahun 2019 sebesar 3, Tahun 2020 sebesar 2, dan Tahun 2021 sebesar 5. Luas lahan bersertifikat di Kota Bogor terhadap jumlah luas wilayah mengalami terus peningkatan yang pada tahun 2015 sebesar 0,48% menjadi 0.83 pada tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar 0.35 % dalam kurun waktu tahun 2015 – 2021. Kondisi daerah Kota Bogor terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari penyelesaian permohonan izin lokasi dengan data Tahun 2018 sebesar 33, Tahun 2019 sebesar 1, Tahun 2019 sebesar 2, dan Tahun 2021 sebesar 2.<br><br>Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2023 |
| | Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 | Belum optimalnya pengelolaan kawasan permukiman kumuh padat penduduk | Perbaikan jalan lingkungan pada lokasi kawasan kumuh pada setiap tahunnya memiliki besaran capaian yang berbeda-beda, hingga pada total akhir sejak tahun 2015 hingga 2020 perbaikan jalan tersebut sebesar 18.804,17. Begitupun dengan capaian perbaikan saluran/drainase pada lokasi Kawasan kumuh, di mana pada total akhir sejak tahun 2015 hingga 2020 perbaikan saluran/drainase tersebut sebesar 22.149,04.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Belum optimalnya pencegahan dan mitigasi | Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Sub Bidang Penataan Ruang salah satu yang menjadi permasalahan yaitu belum optimalnya implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | Lingkungan Hidup | 1 | Belum optimalnya pencegahan dan mitigasi akibat bencana/perubahan iklim | Emisi di Kota Bogor mengalami peningkatan dari 1,44 juta ton CO2 eq pada tahun 2012 menjadi 1,48 juta ton CO2 eq pada tahun 2014, lalu mengalami penurunan menjadi 1,02 juta ton CO2 eq pada tahun 2020. Perubahan iklim yang disebabkan efek gas rumah kaca menjadi perhatian dunia karena berdampak pada faktor lain seperti meningkatnya suhu, sehingga emisi perlu ditekan Sedangkan, jika berdasarkan analisa menurut Laporan Akhir KRB dan RPB. Distribusi curah hujan di Kota Bogor 2025 – 2030 dengan Proyeksi iklim di Kota Bogor dianalisis berdasarkan 2 buah model iklim yaitu MIROC5 dan ACCESS1 mengalami penurunan.<br><br>Sumber: jurnal.ipb.ac.id dan kotabogor.go.id |
| **Kesejahteraan Masyarakat** | Tenaga Kerja | 1 | Masih rendahnya serapan tenaga kerja di sektor IKM | Data IPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, pada indikator penduduk dan tenaga kerja, dengan data aktual pada sub indikator persentase NEET (15-24 Tahun) adalah 26,43662, persentase anak yang bekerja (10-17 Tahun) adalah 27,85481. Pada data BPS Kota Bogor. menunjukkan adanya kenaikan data perekonomian, penyerapan tenaga kerja pasca-pandemi dinilai lamban (2,41%) penduduk usia kerja masih terdampak akibat pandemi. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, bahwa diperlukan upaya digitalisasi untuk upaya penaggulangan masalah pengangguran terbuka. Perubahan pola investasi, transaksi, pola kerja, dan pola rekrutmen tenaga kerja yang berpengaruh pada penyerapan dan lamaran tenaga kerja di Kota Bogor. Sumber tenaga kerja yang banyak, transformasi digital akan menjadi musuh terbesar bagi penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor, harus banyak dilakukan sosialisasi terkait perubahan tersebut.<br><br>Sumber: Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan BPS Kota Bogor Tahun 2022, dan Data IPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 |
| | Pertanian | 1 | Belum optimalnya nilai tambah sektor pertanian | Petani menggunakan varietas benih yang tidak jelas garis keturunannya, serta pola tanam dan penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai aturan. Mengakibatkan tanaman rentan terhadap hama dan penyakit. Belum optimalnya nilai tambah sektor pertanian disebabkan salah satunya karena keterbatasan lahan dan kurangnya dukungan harga jual hasil pertanian yang disampaikan oleh para petani di Kota Bogor, sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.<br><br>Sumber: LKPJ Tahun 2022, kotabogor.go.id, dan pangannews.id |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | Perindustrian | 1 | Masih terkendala peningkatan nilai ekspor | Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal. Banyak IKM terhambat perizinan karena belum migrasi ke OSS RBA. Tiadanya kawasan industri di Kota Bogor sehingga berpengaruh pada perizinan pelaku industri kecil yang naik ke industri menengah, serta kesulitan memperoleh bahan baku impor pasca pandemi<br><br>Sumber: LKPJ Tahun 2022 |
| **Daya Saing Daerah** | Tenaga Kerja | 1 | Belum optimal dalam produktivitas angkatan kerja | Pada tahun 2014 nilai TPAK Kota Bogor 59,96 persen dan menurun pada tahun 2015 menjadi 57,74 persen dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2016. Kenaikan terjadi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 hingga 2019 berturut-turut menjadi 61,13 persen, 62,27 persen dan 63,73 persen. Hingga akhirnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 60,81 persen. Data IPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, pada data aktual pada indikator produktivitas tenaga kerja, dengan sub indikator tingkat produktivitas tenaga kerja adalah sejumlah 670.000.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan Data IPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 |
| | Pangan | 1 | Kekurangan pangan beserta gejolak harga pangan masih menjadi ancaman | Berdasarkan LKPJ Kota Bogor Tahun 2022, ketersediaan pangan masih rendah, sebesar 0,206%. Kota Bogor bukan daerah penghasil pangan, sehingga lebih rentan pada gejolak harga pangan di pasaran, ditambah dengan persentase jumlah penduduk rawan pangan yang masih tinggi 16,36%. Konsumsi energi dan protein perkapita meningkat pasca pandemi, namun perlu kemudahan akses pangan untuk rumah tangga dengan pengeluaran pangan di bawah Rp750.000/bulan<br><br>Sumber: LKPJ Tahun 2022, LPPD Tahun 2022 |
| **Pelayanan Umum** | Pendidikan | 1 | Belum optimalnya mutu dan layanan pendidikan dasar dan menengah | Data program pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2020 terkait penjabaran misi 2 yaitu mewujudkan Kota Cerdas di mana salah satu tujuan sasarannya yaitu meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal, dengan indikator kinerja yaitu rata-rata lama sekolah Tahun 2019 yaitu 10,30 Tahun dan Tahun 2020 yaitu 10,33 Tahun. Sedangkan harapan lama sekolah yaitu 13,48 Tahun, dan Tahun 2020 13,41 Tahun. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, bahwa peningkatan kualitas sekolah di sekolah anak mendapat hukuman yang tidak relavan dengan pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu terkait PPDB |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | masalah yang dihadapi utamanya penyediaan saran dan prasarana sekolah, daya tampung antara SD, SMP, dan SMA tidak seimbang sehingga akan dibangun sekolah menengah baru untuk menyamakan jumlah SMP dan SMA. Kondisi pendidikan mutlak harus ditambahkan sarana dan prasarana di daerah yang belum terlayani. Sehingga perlu distribusi sekolah yang belum terlayani.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 |
| | | 2 | Belum optimalnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan | Data program pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2020 terkait penjabaran misi 2 yaitu mewujudkan Kota Cerdas di mana salah satu programnya yaitu program pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi minimal S1 69,90%, persentase pendidikan TK yang memiliki kompetensi 30,00%, persentase tenaga pendidik SD yang memiliki kompetensi sebesar 54,30%, persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki kompetensi 57,06%, jumlah PTK berprestasi di tingkat provinsi dan nasional 1,00%. Analisa Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2022-2028 Kota Bogor:<br><br>● SDN ;<br>a. Kondisi Rombel telah memenuhi SPM.<br>b. Tahun 2022 masih memerlukan 30 RKB, namun seiring dengan penurunan Piramida Penduduk jika 30 RKB terpenuhi, maka pada Tahun 2028 Surplus 16 RKB;<br>c. Kebutuhan Tenaga Pendidik harus menyesuaikan dengan ROMBEL<br>● SMPN ;<br>a. Kondisi Rombel belum memenuhi SPM, dan memerlukan tambahan Ruang Kelas baru;<br>b. Tahun 2022-2023 masih memerlukan 550-712 RKB atau 21-27 USB @26RKB. Namun seiring dengan penurunan Piramida Penduduk jika penambahan 27 USB terpenuhi pada tahun 2023 (menjadi 47 SMPN), sejak 2024 akan terjadi surplus RKB dan USB;<br>c. Kebutuhan Tenaga Pendidik harus menyesuaikan dengan ROMBEL<br>● SMAN/SMKN ;<br>a. Tahun 2023 memerlukan tambahan 65 RKB atau 2 USB;<br>b. Seiring dengan kenaikan piramida penduduk, jika sampai dengan 2023 terpenuhi 65 RKB atau 2 USB, pada Tahun 2028 masih dibutuhkan 87 RKB atau 3 USB (menjadi totalmemerlukan penambahan 152 RKB atau 5 USB (menjadi 20 SMAN/SMKN);<br>c. Kebutuhan Tenaga Pendidik harus menyesuaikan dengan ROMBEL.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Analisa Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2022-2028 Kota Bogor |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Belum terwujudnya daya saing sumber daya manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik 2023, IPM Kota Bogor adalah 78,36. Kualitas SDM di Kota Bogor harus tetap ditingkatkan mengingat SDM merupakan faktor penentu bagi Pembangunan daerah agar menjadi daerah yang memiliki daya saing tinggi Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah sumber daya manusia yang tersedia sebagai PPNSD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum memenuhi harapan yang diinginkan berdasarkan kepada integritas, kompetensi, obyektifitas, dan independensi serta kualitas maupun kuantitas yang memadai. Sementara dalam mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Bogor, ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan daya saing SDM Kota Bogor dalam produktivitas ekonomi diantaranya yaitu:<br><br>a. Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif;<br>b. Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah;<br>c. Terbatasnya akses permodalan;<br>d. Terbatasnya akses pemasaran produk;<br>e. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);<br>f. Terbatasnya akses mendapatkan bahan baku;<br>g. Terbatasnya akses terhadap infrastruktur; dan<br>h. Terbatasnya akses informasi dan teknologi.<br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan Analisa Kebutuhan Sarana Pendidikan 2022-2028 Kota Bogor |
| | | 4 | Belum optimalnya kemampuan literasi pada SD Keagamaan Negeri dan Swasta | Pada dokumen perencanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 diketahui permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yaitu masih rendahnya minat baca masyarakat. Pada data tingkat pendidikan dan literasi Kota Bogor menunjukkan:<br>a. Angka harapan lama sekolah (HLS) mencapai 12,36 tahun, sedangkan angka rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 10,20 tahun.<br>b. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Bogor mengalami eskalasi sejak tahun 2011 s.d 2017 sebagai berikut: 9,43 (2011), 9,60 (2012), 9,96 (2013), 10,01 (2014), dan 10,20 (2015)<br>Sumber: RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Buku Masterplan Smart City 2018-2021 Kota Bogor<br><br>Pada sistem Kota Bogor *Open* Data, penyelenggaraan sarana pendidikan, salah satunya yaitu perpustakaan dan arsip, jumlah perpustakaan berdasarkan jenisnya di Kota Bogor pada Tahun 2021 untuk perpustakaan daerah hanya sejumlah 1 unit, perpustakaan kecamatan 6 unit, perpustakaan sekolah 630 unit, perpustakaan desa tidak ada, perpustakaan kelurahan 68 unit, perpustakaan bacaan masyarakat 35 unit. Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), kemampuan literasi |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SD Keagamaan berada pada capaian nilai sedang dengan nilai skor rapot 53,53, yang berarti 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.<br><br>Sumber: Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan, devdata.kotabogor.go.id, dan Analisa Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2022-2028 Kota Bogor |
| | | 5 | Belum Optimalnya Kemampuan Literasi pada SD Kesetaraan Negeri dan Swasta | Pada dokumen perencanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 diketahui permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yaitu masih rendahnya minat baca masyarakat. Sementara itu, sistem Kota Bogor *Open* Data, dalam penyelenggaraan sarana pendidikan, salah satunya yaitu perpustakaan dan arsip, jumlah perpustakaan berdasarkan jenisnya di Kota Bogor pada Tahun 2021 untuk perpustakaan daerah hanya sejumlah 1 unit, perpustakaan kecamatan 6 unit, perpustakaan sekolah 630 unit, perpustakaan desa tidak ada, perpustakaan kelurahan 68 unit, perpustakaan bacaan masyarakat 35 unit. Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), kemampuan literasi SD kesetaraan berada pada capaian nilai sedang dengan nilai skor rapot 61,82, yang berarti 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Meskipun demikian, nilai tersebut mengalami penurunan 22,80 dari skor rapot 2022.<br><br>Sumber: RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, devdata.kotabogor.go.id, dan Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan |
| | | 6 | Belum Optimalnya Kemampuan Numerasi pada SD Umum Negeri | Pada dokumen perencanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 diketahui permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yaitu masih rendahnya minat baca masyarakat. Sementara sistem Kota Bogor *Open* Data, dalam penyelenggaraan sarana pendidikan, salah satunya yaitu perpustakaan dan arsip, jumlah perpustakaan berdasarkan jenisnya di Kota Bogor pada Tahun 2021 untuk perpustakaan daerah hanya sejumlah 1 unit, perpustakaan kecamatan 6 unit, perpustakaan sekolah 630 unit, perpustakaan desa tidak ada, perpustakaan kelurahan 68 unit, perpustakaan bacaan masyarakat 35 unit. Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), kemampuan numerasi SD Umum Negeri berada pada capaian nilai sedang dengan nilai skor rapot 52,76, yang berarti 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Sumber: devdata.kotabogor.go.id, dan Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan |
| | | 7 | Belum Optimalnya Kemampuan Numerasi pada SD Keagamaan Negeri dan Swasta | Pada dokumen perencanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 diketahui permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yaitu masih rendahnya minat baca masyarakat. Sementara pada sistem Kota Bogor *Open* Data, dalam penyelenggaraan sarana pendidikan, salah satunya yaitu perpustakaan dan arsip, jumlah perpustakaan berdasarkan jenisnya di Kota Bogor pada Tahun 2021 untuk perpustakaan daerah hanya sejumlah 1 unit, perpustakaan kecamatan 6 unit, perpustakaan sekolah 630 unit, perpustakaan desa tidak ada, perpustakaan kelurahan 68 unit, perpustakaan bacaan masyarakat 35 unit. Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), kemampuan literasi SD keagamaan negeri dan swasta berada pada capaian nilai kurang dengan nilai skor rapot 36,89, yang berarti kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.<br><br>Sumber: Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan dan devdata.kotabogor.go.id |
| | | 8 | Belum Optimalnya Kemampuan Numerasi pada SDLB Swasta | Pada dokumen perencanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 diketahui permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yaitu masih rendahnya minat baca masyarakat. Pada sistem Kota Bogor *Open* Data, dalam penyelenggaraan sarana pendidikan, salah satunya yaitu perpustakaan dan arsip, di mana merupakan faktor pendorong sektor pendidikan yaitu pada jumlah perpustakaan berdasarkan jenisnya di Kota Bogor pada Tahun 2021 untuk perpustakaan daerah hanya sejumlah 1 unit, perpustakaan kecamatan 6 unit, perpustakaan sekolah 630 unit, perpustakaan desa tidak ada, perpustakaan kelurahan 68 unit, perpustakaan bacaan masyarakat 35 unit. Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), kemampuan numerasi SDLB Swasta berada pada capaian nilai sedang dengan nilai skor rapot 6,07, di mana ada perbedaan capaian numerasi baik berdasar kelompok gender, kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural. Pada hasil Forum Konsultasi Publik Kota Bogor Tahun 2025-2026 diketahui bahwa dalam fasilitasi pendidikan bagi anak ABK terutama di sekolah negeri perlu dioptimalkan, salah satunya dengan meningkatkan perlindungan anak dari eksploitasi dan upaya-upaya untuk meningkatkan fasilitasi pendidikan.<br>Sumber: devdata.kotabogor.go.id, RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, Data Laporan Rapor |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan, Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 |
| | | 9 | Belum Optimalnya Kemampuan Numerasi pada SD Kesetaraan | Pada dokumen perencanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 diketahui permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yaitu masih rendahnya minat baca masyarakat. Sedangkan pada data sistem Kota Bogor Open Data, dalam penyelenggaraan sarana pendidikan, salah satunya yaitu perpustakaan dan arsip, jumlah perpustakaan berdasarkan jenisnya di Kota Bogor pada Tahun 2021 untuk perpustakaan daerah hanya sejumlah 1 unit, perpustakaan kecamatan 6 unit, perpustakaan sekolah 630 unit, perpustakaan desa tidak ada, perpustakaan kelurahan 68 unit, perpustakaan bacaan masyarakat 35 unit. Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), kemampuan literasi SD kesetaraan berada pada capaian nilai sedang dengan nilai skor rapot 52,73, yang berarti sekitar 40%-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, devdata.kotabogor.go.id, dan Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementerian Pendidikan |
| | | 10 | Belum Kondusifnya Iklim Keamanan Sekolah pada SD Keagamaan Negeri | Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), iklim keamanan SD keagamaan negeri berada pada capaian nilai sedang dengan nilai skor rapot 46,81. Nilai tersebut mengalami penurunan 12,40 dari Tahun 2022, yang berarti satuan pendidikan perlu mulai mengembangkan iklim keamanan dalam aspek kesejahteraan psikologis, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat melanjutkan intervensi dengan meningkatkan kemampuan mencegah dan menangani kasus di lingkungan sekolah.<br><br>Sumber: Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | 11 | Belum Kondusifnya Iklim Kebhinekaan pada SD Keagamaan Negeri | Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), iklim kebhinekaan SD keagamaan negeri berada pada capaian nilai kurang dengan nilai skor rapot 23,32. Nilai tersebut mengalami penurunan 36,41 dari Tahun 2022, yang berarti Satuan pendidikan belum mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, budaya, dan gender; memperkuat nasionalisme.<br><br>Sumber: Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan |
| | | 12 | Belum Kondusifnya Iklim Kebhinekaan pada SDLB Swasta | Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), iklim kebhinekaan SDLB swasta berada pada capaian nilai sedang dengan nilai skor rapot 66,84. Hal tersebut menunjukkan bahwa satuan pendidikan perlu mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, budaya, dan gender; memperkuat nasionalisme.<br><br>Sumber: Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan |
| | | 13 | Belum Kondusifnya Iklim Inklusivitas pada SD Keagamaan Negeri | Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), iklim inklusivitas SD Keagamaan Negeri berada pada capaian nilai sedang dengan nilai skor rapot 50,28, yang berarti turun 1,42 dari Tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa satuan pendidikan perlu mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, budaya, dan gender; memperkuat nasionalisme.<br><br>Sumber: Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | 14 | Belum Kondusifnya Iklim Inklusivitas pada SD Kesetaraan Negeri dan Swasta | Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), iklim inklusivitas SD Kesetaraan Negeri dan Swasta berada pada capaian nilai baik dengan nilai skor rapot 54,13. Hal tersebut menunjukkan bahwa satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.<br><br>Sumber: Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan |
| | | 15 | Masih rendahnya APS Usia (5-6) | Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), iklim inklusivitas SD Keagamaan Negeri berada pada capaian nilai sedang dengan nilai skor rapot 50,28, yang berarti turun 1,42 dari Tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa satuan pendidikan perlu mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, budaya, dan gender; memperkuat nasionalisme.<br><br>Sumber: Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan |
| | | 16 | Masih rendahnya APS Usia (16-18) | Angka partisipasi sekolah Kota Bogor berdasarkan data badan pusat statistik Jawa Barat, penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2020 sebesar 99,91. Kelompok umur 13-15 sebesar 95,32, kelompok umur 16-18 sebesar 68,17, sedangkan kelompok umur 19-24 sebesar N/A. APS penduduk usia 16-18 adalah 65,33 (2018) ; 67,46 (2019) ; 68,17 (2020) ; 68,09 (2021) ; 64,79 (2022). Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan siswa ikut mengenyam pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, bahwa perlu adanya pelibatan wilayah untuk memastikan anak-anak di Kota Bogor terjamin sekolahnya. Angka Putus sekolah menjadi tantangan besar karena rata-rata angka putus sekolah ketika menginjak sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sehingga perlu pendampingan untuk mengatasi permasalahan masih tingginya angka putus sekolah. Terkait dengan ijazah yakni pemkot mengupayakan dengan membantu penebusan ijazah dan akan terus ditingkatkan upayanya.<br>Pada tabel data ATS, Drop Out berdasarkan wilayah individu peserta didik pada jenjang SMA/SMK di Kota Bogor sejumlah 897 peserta didik. |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, Verval DO dan LTM, diakses pada: pd.data.kemdikbud.go.id |
| | | 17 | Masih rendahnya APS Usia (4-18) Penyandang Disabilitas | Angka partisipasi sekolah Kota Bogor berdasarkan data badan pusat statistik Jawa Barat, penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2020 sebesar 99,91. Kelompok umur 13-15 sebesar 95,32, kelompok umur 16-18 sebesar 68,17, sedangkan kelompok umur 19-24 sebesar N/A. Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan siswa ikut mengenyam pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, bahwa perlu adanya pelibatan wilayah untuk memastikan anak-anak di Kota Bogor terjamin sekolahnya. Angka Putus sekolah menjadi tantangan besar karena rata-rata angka putus sekolah ketika menginjak sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sehingga perlu pendampingan untuk mengatasi permasalahan masih tingginya angka putus sekolah. Terkait dengan ijazah yakni pemkot mengupayakan dengan membantu penebusan ijazah dan akan terus ditingkatkan upayanya.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan |
| | | 18 | Masih rendahnya APS Usia (7-18) Kesetaraan | Angka partisipasi sekolah Kota Bogor berdasarkan data badan pusat statistik Jawa Barat, penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2020 sebesar 99,91. Kelompok umur 13-15 sebesar 95,32, kelompok umur 16-18 sebesar 68,17, sedangkan kelompok umur 19-24 sebesar N/A. Daftar anak usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal dan belum berpartisipasi di satuan pendidikan kesetaraan. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, bahwa perlu adanya pelibatan wilayah untuk memastikan anak-anak di Kota Bogor terjamin sekolahnya. Angka Putus sekolah menjadi tantangan besar karena rata-rata angka putus sekolah ketika menginjak sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sehingga perlu pendampingan untuk mengatasi permasalahan masih tingginya angka putus sekolah. Terkait dengan ijazah yakni pemkot mengupayakan dengan membantu penebusan ijazah dan akan terus ditingkatkan upayanya.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan Data Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | Kesehatan | 1 | Belum optimalnya kualitas pelayanan dan SDM kesehatan | Data analisis capaian standar pelayanan minimal kesehatan pada pelayanan dasar kesehatan ibu hamil mengalami penurunan dari 100,3% pada Tahun 2019, menjadi 93,8% pada Tahun 2020, kemudian pada pelayanan kesehatan ibu bersalin dari 99,1 % pada Tahun 2019, menjadi 93,1 %. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan balita mengalami penurunan dari 100% pada Tahun 2019, menjadi 78,8% pada Tahun 2020. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar mengalami penurunan dari 100% pada Tahun 2019, menjadi 51% pada Tahun 2020. Pelayanan kesehatan pada usia produktif mengalami penurunan dari 78,8% pada Tahun 2019, menjadi 18,8% pada Tahun 2020. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut mengalami penurunan dari 100% pada Tahun 2019, menjadi 60,2% pada Tahun 2020. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mengalami penurunan dari 69,8% pada Tahun 2019, menjadi 68,88% pada Tahun 2020. Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat mengalami penurunan dari 89,2% pada Tahun 2019, menjadi 88,4% pada Tahun 2020. Pelayanan kesehatan orang dengan TB mengalami penurunan dari 110,8% pada Tahun 2019, menjadi 104,1% pada Tahun 2020. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mengalami penurunan dari 86,38% pada Tahun 2019, menjadi 95,7% pada Tahun 2020.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | | 2 | Belum optimalnya jaminan kesehatan kepada masyarakat | Pada data persentase penduduk miskin Kota Bogor yang menggunakan jaminan Kesehatan untuk berobat jalan masih sangat rendah. Berdasarkan survey dari BPS pada tahun 2017, persentase penduduk Kota Bogor yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan baru berkisar 56,96 %. Dari angka tersebut, persentase penduduk miskin di kuintil 1 yang menggunakan jaminan kesehatan baru sekitar 39.88%. Sementara itu pada data Capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Bogor hingga bulan Maret 2023 ini sebesar 97,24 persen. Kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 1.069.102 dengan keaktifan peserta mencapai 79,84 persen menggunakan data penduduk kota Bogor 1.099.422 jiwa. Sementara, warga yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar 30.320 jiwa.<br><br>Sumber: kotabogor.go.id, dan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Belum optimalnya layanan puskesmas dan posyandu | Berdasarkan data pada dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 diketahui bahwa Rasio Posyandu di Kota Bogor mencapai 1: 90 dengan range 95 – 98. Artinya rasio posyandu di Kota Bogor termasuk rasio ideal. Sedangkan rasio puskesmas per satuan penduduk Kota Bogor dari tahun 2020 adalah 19.770,65 artinya setiap puskesmas dan pustu melayani sebanyak 19.770 jiwa. Dengan demikian rasio puskesmas/pustu di Kota Bogor sudah memenuhi standar karena standarnya 1 puskesmas/pustu 30.000 jiwa. Pada tahun 2020 baik jumlah puskesmas maupun jumlah puskesmas pembantu mengalami peningkatan sebesar satu poin. Namun pada tahun 2020 rasio puskesmas mengalami penurunan sebesar 0,01 persen bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk sebesar 14.846 jiwa.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | | 4 | Belum meratanya akses dan mutu kesehatan | Angka penerapan *Universal Health Coverage* (UHC) yaitu sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk memperoleh akses kesehatan di Kota Bogor pada Tahun 2023 yaitu 97,24%. Meskipun cukup baik, namun perlu dioptimalkan.<br><br>Sumber: kotabogor.go.id |
| | Sosial | 1 | Belum optimal dalam perlindungan dan pemberdayaan PPKS | Data capaian urusan sosial umum Tahun 2015-2019 menunjukkan indikator kinerja persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya pada Tahun 2019 sebesar 75,32%, persentase jumlah anak terlantar/anak jalanan yang di bina Tahun 2019 sebesar 36,7%, persentase penyandang cacat trauma yang dibina sebesar 17,52%, dan jumlah PMKS/PPKS yang terbina sebesar 302. Data rekapitulasi PPKS se-Kota Bogor menunjukkan bahwa data anak balita terlantar yaitu sebesar 35 orang, data anak terlantar 316 orang, data anak jalanan adalah 6, dan data anak dengan kedisabilitasan atau kecacatan adalah 44 orang, data lanjut usia terlantar adalah 1 orang, data penyandang disabilitas atau cacat adalah 51 rang, data pemulung adalah 33 orang, data kelompok minoritas 1 orang, data bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan sebesar 6 orang, data korban penyalahgunaan napza adalah 8 orang, data korban tindak kekerasan sebesar 1 orang, data bencana alam sebesar 1 orang, data perempuan rawan sosial ekonomi 252 orang, data keluarga fakir miskin 1808 orang, Angka terbesar yaitu pada keluarga fakir miskin, sehingga perlu untuk mengoptimalkan melalui program perlindungan dan pemberdayaan. |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Sumber: Website Dinas Spsial Kota Bogor, diakses dari: pelayanansosial.kotabogor.go.id, dan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. |
| | | 2 | Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik 2023, IPM Kota Bogor adalah 78,36. Kualitas SDM di Kota Bogor harus tetap ditingkatkan mengingat SDM merupakan faktor penentu bagi Pembangunan daerah agar menjadi daerah yang memiliki daya saing tinggi. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah sumber daya manusia yang tersedia sebagai PPNSD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum memenuhi harapan yang diinginkan berdasarkan kepada integritas, kompetensi, obyektifitas, dan independensi serta kualitas maupun kuantitas yang memadai. Sementara dalam mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Bogor, ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan daya saing SDM Kota Bogor dalam produktivitas ekonomi diantaranya yaitu:<br><br>a. Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif;<br>b. Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah;<br>c. Terbatasnya akses permodalan;<br>d. Terbatasnya akses pemasaran produk;<br>e. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);<br>f. Terbatasnya akses mendapatkan bahan baku;<br>g. Terbatasnya akses terhadap infrastruktur dan<br>h. Terbatasnya akses informasi dan teknologi.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | | 3 | Belum tercapainya pengentasan kemiskinan | Data capaian urusan sosial umum Tahun 2015-2019 menunjukkan indikator kinerja persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya pada Tahun 2019 sebesar 75,32%, dan jumlah PMKS/PPKS yang terbina sebesar 302.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | Belum optimalnya perlindungan anak dan | Capaian pada Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan pada tahun 2016 sebanyak 52 Kasus yang terlaporkan baik terhadap Perempuan maupun Anak, dan yang terselesaikan sebanyak 42 kasus dan 13 kasus lainnya sedang dalam tahap proses penyelesaian baik di Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun Pengadilan. Tahun 2017 P2TP2A telah |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | perempuan, serta kesetaraan gender | menangani 117 kasus dengan 66 kasus terhadap perempuan dan 51 kasus kekerasan terhadap anak. Selama tahun 2018, P2TP2A telah menangani sebanyak 109 kasus dengan terdiri dari Kasus Kekerasan terhadap Anak (KTA) sebanyak 56 kasus dan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) sebanyak 53 kasus dan semua kasus yang dapat ditangani dengan baik Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan yang masuk ke P2TP2A Kota Bogor sebanyak 109 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 56 kasus dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 53 kasus dan seluruhnya selesai ditangani dengan baik. Jumlah Tahanan dan Narapidana di Lapas IIA Bogor Menurut Jenis Kasus Tahun 2021, kasus perlindungan terhadap anak sebanyak 81 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 78 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Kasus perlindungan ini meliputi kekerasan terhadap anak yang berupa KDRT, kekerasan fisik maupun kekerasan seksual ataupun eksploitasi terhadap anak. Banyaknya narapidana dan tahanan karena kasus perlindungan anak ini menunjukkan masih tingginya kekerasan yang dialami oleh anak baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal di Kota Bogor. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, bahwa perlu untuk meningkatan sumber daya manusia yang unggul. Organisasi anak di Kota Bogor mengintegrasikan 4 poin dari 7 poin yang sudah dideklarasikan dari Forum Anak, yaitu:<br><br>1) Mendorong pemerintah untuk sosialisasi terkait pergaulan bebas, banyak anak di Kota Bogor yang belum mendapatkan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi sehingga berdampak kepada gaya hidup bebas, dan pergaulan bebas yang berimbas kepada maraknya nikah muda dan menyebabkan *stunting*, sehingga program pencegahan dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.<br>2) Mendukung pemerintah untuk optimalisasi sistem peserta didik baru khususnya jalur zonasi. Sistem PPDB belum sempurna dan adil bagi setiap anak di Kota Bogor.<br>3) Peningkatan kualitas sekolah. Di sekolah anak mendapat hukuman yang tidak relavan dengan pelanggaran yang dilakukan.<br>4) Meningkatkan perlindungan anak dari eksploitasi dan fasilitas bagi anak ABK di sekolah. Kurangnya fasilitas bagi anak ABK terutama di sekolah negeri.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan Dokumen Profil Gender Kota Bogor 2022 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dengan Pusat Kajian Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, diakses dari: dpppa.kotabogor.go.id |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | Data capaian urusan sosial umum Tahun 2015-2019 menunjukkan indikator kinerja persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya pada Tahun 2019 sebesar 75,32%, persentase jumlah anak terlantar/anak jalanan yang di bina Tahun 2019 sebesar 36,7%, persentase penyandang cacat trauma yang dibina sebesar 17,52%, dan jumlah PMKS/PPKS yang terbina sebesar 302. Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (ASLPM) tingkat Kota adalah sebagai unsur organisasi kedalam dan keluar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada musyawarah Forum Komunikasi LPM kecamatan di Daerah Kota. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disingkat FK LPM adalah sebagai unsur organisasi ke dalam dan keluar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat LPM kelurahan di kecamatan.<br><br>Sumber: Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan, dan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan | 1 | Belum maksimalnya pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan | Data capaian urusan sosial umum Tahun 2015-2019 menunjukkan indikator kinerja persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya pada Tahun 2019 sebesar 75,32%, persentase jumlah anak terlantar/anak jalanan yang di bina Tahun 2019 sebesar 36,7%, persentase penyandang cacat trauma yang dibina sebesar 17,52%, dan jumlah PMKS/PPKS yang terbina sebesar 302. Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (ASLPM) tingkat Kota adalah sebagai unsur organisasi kedalam dan keluar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada musyawarah Forum Komunikasi LPM kecamatan di Daerah Kota. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disingkat FK LPM adalah sebagai unsur organisasi ke dalam dan keluar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat LPM kelurahan di kecamatan.<br><br>Sumber: Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan, dan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 | Belum optimalnya program keluarga berencana | Pada data perkembangan masyarakat dalam program keluarga berencana Tahun 2014-2020, di mana mengalami peningkatan sebesar 2 namun hanya berkisar pada angka 75-77, di mana pada Tahun 2020 sebesar 77,42. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, bahwa penguatan kapasitas keluarga sangat penting menjadi pondasi dalam proses pembangunan. Perlu adanya penguatan edukasi pada ibu hamil, pengetahuan gizi, ibu sadar dalam memeriksakan kesehatan kandungannya. Dengan dibangunnya keluarga yang cerdas dan terampil maka pembangunan manusia akan terwujud.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 |
| | Kebudayaan | 1 | Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya | Penyelenggaraan festival seni dan budaya perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2015, 2016, dan 2019 penyelenggaraan kegiatan tersebut mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019 sejumlah 59 menjadi 24 pada tahun 2020<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik 2023, IPM Kota Bogor adalah 78,36. Kualitas SDM di Kota Bogor harus tetap ditingkatkan mengingat SDM merupakan faktor penentu bagi Pembangunan daerah agar menjadi daerah yang memiliki daya saing tinggi. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, bahwa Kota Bogor yang masuk ke dalam WP Bodebekpunjur diprioritaskan untuk ditingkatkan pembangunannya dengan potensi yang masih banyak untuk dikembangkan tanpa mengabaikan fungsi lingkungan. Tema pengembangan yaitu mengendalikan pekembangan fisik wilayah dengan sektor unggulan agroforestry, pariwisata, industry manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis, dan agrowisata. Selain itu pengarahan industri di Kota Bogor tidak memilih industri besar atau padat karya akan tetapi diupayakan untuk memaksimalkan industri kreatif yang ada, dan kegiatan ekonomi didukung oleh makanan minuman. Sementara dalam mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Bogor, ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan daya saing SDM Kota Bogor dalam produktivitas ekonomi diantaranya yaitu:<br><br>a. Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif;<br>b. Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah;<br>c. Terbatasnya akses permodalan;<br>d. Terbatasnya akses pemasaran produk;<br>e. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);<br>f. Terbatasnya akses mendapatkan bahan baku;<br>g. Terbatasnya akses terhadap infrastruktur dan<br>h. Terbatasnya akses informasi dan teknologi.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | Perpustakaan | 1 | Masih rendahnya budaya literasi masyarakat | Pada dokumen perencanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 diketahui permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yaitu masih rendahnya minat baca masyarakat. Pada sistem database; Kota Bogor *Open* Data, dalam penyelenggaraan sarana pendidikan, salah satunya yaitu perpustakaan dan arsip, jumlah perpustakaan berdasarkan jenisnya di Kota Bogor pada Tahun 2021 untuk perpustakaan daerah hanya sejumlah 1 unit, perpustakaan kecamatan 6 unit, perpustakaan sekolah 630 unit, perpustakaan desa tidak ada, perpustakaan kelurahan 68 unit, perpustakaan bacaan masyarakat 35 unit. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, terkait pendidikan karakter dan budaya pada anak. Perlu upaya berbagai sektor dalam mendorong anak-anak agar memiliki karakter pembangunan kota Bogor terutama terkait |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | budaya Kota Bogor yang sekarang mulai punah. Penguatan pendidikan karakter budaya kepada seluruh masyarakat.<br><br>Sumber: devdata.kotabogor.go.id, Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | Kearsipan | 1 | Belum optimal dalam pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis | Pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, diketahui bahwa telah terjadi peningkatan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku yang pada tahun 2015 hanya 13 % perangkat daerah menjadi 70 % perangkat daerah di tahun 2019 namun pada tahun 2020 perangkat daerah mengalami penurunan menjadi 13%, sedangkan pada SDM pengelola kearsipan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 yaitu menjadi 75.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | Tenaga Kerja | 1 | Terbatasnya lapangan kerja | Pada data BPS Kota Bogor, penduduk yang bekerja sebanyak 496.570 orang, naik sebanyak 29.925 orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah lapangan pekerjaan Jasa (21.961 orang). Hanya lapangan pekerjaan Pertanian yang mengalami penurunan, dengan penurunan sebesar 1.045 orang. Data IPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, pada data aktual data indikator kesempatan kerja, dengan sub indikator proporsi lapangan pekerjaan informal non pertanian yaitu sebesar 48,16952, sedangkan Tahun 2023 yaitu sebesar 48,56907. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, bahwa sebagian besar penduduk di Kota Bogor adalah usia produktif namun masih banyaknya pengangguran, perlu dianalisis apa penyebabnya dan solusinya. Usia lansia di Kota Bogor sudah mencapai 10% (sudah masuk ke dalam populasi menua). Lansia bisa mengisi sektor informal agar lebih produktif. Adanya digitalisasi di tingkat pengangguran terbuka. Perubahan pola investasi, transaksi, pola kerja, dan pola rekrutmen tenaga kerja yang berpengaruh pada penyerapan dan lamaran tenaga kerja di Kota Bogor. Sumber tenaga kerja yang banyak, transformasi digital akan menjadi musuh terbesar bagi penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor, harus banyak dilakukan sosialisasi terkait perubahan tersebut.<br><br>Sumber: Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan BPS Kota Bogor Tahun 2022, diakses dari: bogorkota.bps.go.id, dan Data IPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | Koperasi | 1 | Masih rendahnya keaktifan koperasi dan UKM | Berdasarkan LKPJ Kota Bogor Tahun 2022, produktivitas UKM rendah dan cenderung subsisten dan pengusaha UKM masih kesulitan mengakses modal karena tidak bankable.<br><br>Sumber: LKPJ Tahun 2022 |
| | Penanaman Modal | 1 | Belum optimalnya perencanaan dan pengembangan penanaman modal | Berdasarkan LPPD Kota Bogor Tahun 2022, pelayanan perizinan belum efektif dan efisien, diiringi dengan adanya pungutan liar dan biaya tidak resmi yang menghambat iklim investasi<br><br>Sumber: LPPD Tahun 2022 |
| | Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Rendahnya organisasi pemuda yang aktif | Berdasarkan laporan LPPD Kota Bogor Tahun 2022 diketahui bahwa partisipasi pemuda masih dalam kegiatan ekonomi, hanya sekitar 0,1%.<br><br>Sumber: LPPD Tahun 2022 |
| | Perikanan | 1 | Belum optimalnya nilai tambah sektor perikanan belum optimal | Pada laporan LKPJ diketahui bahwa sarana-prasarana penunjang produksi benih ikan (Balai Benih Ikan) memiliki permasalahan yaitu rusak berat, pembudidaya ikan belum seluruhnya memahami cara budidaya ikan yang baik, penerapan SOP dan GMP rendah.<br><br>Sumber: LKPJ Tahun 2022 |
| | Pariwisata | 1 | Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan | Berdasarkan data kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sekitar 4% dan terhadap PAD sekitar 25%. Terdapat berbagai faktor penghambat: daya tarik pariwisata belum terkonsep dengan baik, pelaku pariwisata belum terkoordinir, sarana-prasarana belum terkoordinir dengan baik sepenuhnya menunjang.<br><br>Sumber: LPPD Tahun 2022, dan RIPPARDA Tahun 2023 |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Belum optimalnya pengembangan SDM ekonomi kreatif dan ekonomi digital | Berdasarkan data kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sekitar 4% dan terhadap PAD sekitar 25%. Terdapat berbagai faktor penghambat: daya tarik pariwisata belum terkonsep dengan baik, pelaku pariwisata belum terkoordinir, sarana-prasarana belum sepenuhnya menunjang.<br><br>Sumber: LPPD Tahun 2022, dan RIPPARDA Tahun 2023 |
| | | 3 | Belum maksimalnya promosi produk dan jasa ekonomi kreatif dan ekonomi digital | Perlu wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif dan digital untuk pengembangan potensi dan pemasaran, utamanya dalam bentuk perwal agar tersedia payung hukum, mengikuti pergub Jabar tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, serta menyusun strategi dan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif<br><br>Sumber: LKPJ Tahun 2022 |
| | | 4 | Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana ekonomi kreatif dan ekonomi digital | Perlu wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif dan digital untuk pengembangan potensi dan pemasaran, utamanya dalam bentuk perwal agar tersedia payung hukum, mengikuti pergub Jabar tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, serta menyusun strategi dan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif.<br><br>Sumber: LKPJ Tahun 2022 |
| | Pertanian | 1 | Keterbatasan lahan pertanian | Penggunaan lahan tertinggi di Kota Bogor Sebesar 5.023,59 Hektar atau 45,10 Persen, merupakan kawasan perumahan dan permukiman. sedangkan untuk lahan pertanian seluas 127,42 hektar. Lahan pertanian Kota Bogor hanya tersebar di tiga kecamatan, sedangkan di tiga kecamatan lainnya sudah habis. Habisnya lahan pertanian di Kota Bogor disebabkan adanya penggusuran alih fungsi lahan pertanian oleh pengembang.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Bapperida.kotabogor.go.id |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan peternakan | Munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ruminansia serta dominasi produksi sapi potong dalam negeri dan khususnya ke Kota Bogor berasal dari luar Kota Bogor maupun hasil impor, hal ini menjadikan kegiatan peternakan kurang optimal. Selain itu, pelaksanaan kegiatan peternakan juga ditunjukkan dengan menurunnya produksi daging unggas (BPS Jawa Barat) dari perbandingan tahun 2020 sebesar 1.494.551 kg, sedangkan di Tahun 2022 menurun menjadi 1.122.055 kg.<br><br>Sumber: LKPJ Tahun 2022, kotabogor.go.id, dan BPS Jawa Barat |
| | Perdagangan | 1 | Belum optimal dalam pembinaan dan perlindungan perdagangan | Adanya tren penurunan kontribusi terhadap PDRB oleh sektor perdagangan yang memiliki karakteristik daya saing rendah dan pertumbuhan yang lamban<br><br>Sumber: LKPJ Tahun 2022 |
| | | 2 | Belum optimal dalam pengelolaan pasar tradisional | Pada permasalahan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah salah satunya yaitu terbatasnya kemampuan penetrasi pasar. Usaha kecil pada umumnya mempunyai permasalahan terkait lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, karena pada umumnya usaha kecil merupakan unit usaha keluarga, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Selain itu, upaya pembenahan diri dan peningkatan pengelolaan pasar juga diupayakan dalam salah satu pelaksanaannya yaitu pada Pasar Teknik Umum Kemang dikarenakan pada tahun sebelumnya sempat berselisih dengan PT Galvindo Ampuh terkait pengelolaan Pasar Teknik Umum Kemang.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan rri.go.id |
| | | 3 | Belum optimal dalam distribusi dan stabilitas perdagangan | Pemerintah Kota Bogor mengupayakan untuk membangun peta potensi pengembang wilayah berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bogor No 6 tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 - 2031, wilayah Kota Bogor terbagi kedalam lima Wilayah Pengembangan (WP) melalui arah |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | penanganan pada pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional sepanjang koridor jalan utama.<br><br>Sumber: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 |
| | Perindustrian | 1 | Rendahnya kemampuan industri kecil dan menengah dalam pengelolaan maupun pengembangan usaha | Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal. Banyak IKM terhambat perizinan karena belum migrasi ke OSS RBA. Tiadanya kawasan industri di Kota Bogor sehingga berpengaruh pada perizinan pelaku industri kecil yang naik ke industri menengah, serta kesulitan memperoleh bahan baku impor pasca pandemi<br><br>Sumber: LKPJ Tahun 2022 |
| | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Belum optimalnya pembangunan tata ruang | Berdasarkan data SIMTARU terdapat 18.888 bangunan yang belum diawasi IMBnya<br><br>Sumber: simtaru.kotabogor.go.id |
| | | 2 | Belum optimalnya kualitas jalan dan jembatan | Panjang jalan menurut kondisi jalan Tahun 2022, jalan dalam keadaan rusak dan rusak ringan adalah 18.223 (m) dan 83.010 (m)<br><br>Sumber: kotabogor.go.id |
| | | 3 | Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air | Perbaikan perhitungan cakupan layanan sebagai tindak lanjut arahan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait perhitungan cakupan layanan, dengan asumsi jumlah per SR (Sambungan Rumah) harus mengikuti data dari BPS Kota/Kabupaten setempat. Kota Bogor menggunakan 1 SR(Sambungan Rumah) = 5 jiwa, sehingga berdampak terhadap cakupan layanan yang menurun karena hitungan di tahun sebelumnya Kota Bogor menggunakan asumsi 1 SR (Sambungan Rumah) = 6 Jiwa.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | 4 | Belum meratanya layanan akses penyediaan air minum yang layak dan aman | Jumlah rumah tangga yang dilayani air minum Non PDAM mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2019 meningkat sebesar 0.31% dari tahun 2018 atau dari 0,85% menjadi 4,31%. Untuk tahun 2020, terjadi penurunan Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang aman di mana dari Tahun 2019 sebesar 92,58 menjadi 76,98%, sedangkan persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum PDAM dari 92,58% menjadi 72,67%.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | | 5 | Belum meratanya layanan akses penyediaan air limbah yang layak dan aman | Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak pada tahun 2017 sebesar 72,10%, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 66,80%. Pada tahun 2019 yaitu sebesar 69,121% dari tahun 2018. Pada tahun 2020 sebesar 1,37% dari tahun 2019.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | | 6 | Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal | Salah satu permasalahan di Sub Bidang Pekerjaan Umum adalah konektivitas infrastruktur jalan belum optimal sehingga terjadi penumpukan volume kendaraan di pusat-pusat kegiatan karena jalan alternatif menuju pusat kegiatan belum terhubung.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 | Belum optimalnya kualitas permukiman layak huni | Pemerintah Kota Bogor mengupayakan untuk membangun peta potensi pengembang wilayah berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bogor No 6 tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 - 2031, wilayah Kota Bogor terbagi kedalam lima Wilayah Pengembangan (WP) melalui arah penanganan pada pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional sepanjang koridor jalan utama. Kemudian, adanya komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai *Green City*. Untuk itu telah dilakukan beberapa upaya seperti peningkatan RTH sebagai ruang publik dan adanya penerapan kewajiban penyediaan RTH 20% untuk publik dan 10% untuk privat di dalam proses izin pemanfaatan ruang pada sektor perumahan dan perdagangan jasa. |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Sumber: LKIP, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 |
| | Lingkungan Hidup | 1 | Belum optimalnya pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan | Berdasarkan data dari dokumen Masterplan Smart City Tahun 2017-2021 Kota Bogor, kualitas air baku PDAM menurun, karena pencemaran di hulu/lokasi sumber air baku akibat sedimentasi, dan sampah, sehingga air baku yang dapat diolah berkurang. Seperti air sungai dari 1800 liter/detik menjadi 1700 liter/detik. Berdasarkan data RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, menurut Badan Pusat Statistik Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Indeks kualitas udara di Kota Bogor pada tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan sebesar 5,77. Hasil analisis tanah di Kota Bogor dari berbagai kriteria masih digolongkan baik, belum mengalami kerusakan. Namun kegiatan ini belum dapat menggambarkan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa, karena belum dapat dihitung luasan lahan yang telah rusak di daerah produksi biomassa. Kegiatan ini hanya mengukur tingkat pencemaran per titik lokasi.<br><br>Sumber: Dokumen Master Plan Smart City 2017-2021 Kota Bogor, Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | | 2 | Belum optimalnya penyediaan layanan utilitas perkotaan | Dalam hal utilitas, Kota Bogor memiliki ketergantungan kepada Kabupaten Bogor dalam hal penyediaan sumber air dan TPA. Agar kebutuhan akan sumber air serta lahan untuk TPA dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan penduduk Kota Bogor maka dalam merencanakan sistem utilitas kota, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | | 3 | Belum optimalnya pengendalian kualitas lingkungan dan konservasi lahan | Luasan kawasan lindung Kota Bogor 234.5 dengan jenis kawasan non hutan<br><br>Sumber: opendata.jabarprov.go.id |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | Perhubungan | 1 | Keselamatan lalu lintas perlu dioptimalkan | Masih cukup banyak pengendara kendaraan angkutan barang membongkar muatan di area trotoar yang berada di kawasan Suryakencana dan sejumlah angkot berhenti/mengetem di Jalan Otista untuk menunggu mobilnya terisi penumpang. Selain itu, tingkat kecelakaan lalu lintas yang juga dipengaruhi oleh fenomena "ROJALI" yaitu konten berbahaya dengan menghadang truk menjadi peristiwa yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan keselamatan lalu lintas oleh pihak-pihak terkait.<br><br>Sumber: dishub.kotabogor.go.id dan bogorkota.jabar.polri.go.id |
| | | 2 | Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal | Salah satu permasalahan di Sub Bidang Pekerjaan Umum adalah konektivitas infrastruktur jalan belum optimal sehingga terjadi penumpukan volume kendaraan di pusat-pusat kegiatan karena jalan alternatif menuju pusat kegiatan belum terhubung.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | | 3 | Belum Efektifnya Pencegahan dan Mitigasi | Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Sub Bidang Penataan Ruang salah satu yang menjadi permasalahan yaitu belum optimalnya Implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 1 | Belum stabilnya kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban | Selain itu, terjadinya perubahan perubahan mendasar pada tahun 2020 yang disebabkan karena terjadinya bencana non alam yang ditetapkan secara nasional yaitu berkaitan pandemi Covid-19 yang berimplikasi dan berdampak pada terjadinya krisis ekonomi dan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat serta dengan adanya beberapa perubahan kebijakan nasional termasuk perubahan tema dan fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020-2021 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tema/fokus tahapan RKPD Kota Bogor Tahun 2020-2024. Pada upaya pencegahan dan penanggulangan bencana non alam dan kejahatan yang dilakukan di tingkat daerah atau wilayah tertentu, maka perlu untuk melibatkan kerjasama antara berbagai instansi, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Kamtrantib adalah singkatan dari "Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia" yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang pemasyarakatan, perlindungan hukum, pembinaan narapidana, serta pengelolaan administrasi keimigrasian.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | Komunikasi dan Informasi | 1 | Belum optimal dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta aplikasi informatika | 1. Fasilitasi pembangunan Aplikasi Layanan Administrasi Kelurahan dan Kecamatan (ASINAN Bogor). Analisa Resiko: Gangguan koneksi internet, sarana prasarana (Komputer) yang belum memadai di sebagian kelurahan<br><br>2. ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah). Analisa Resiko: Aplikasi yang di-*hack* dan harus ada *storage backup* harian yang mumpuni<br><br>3. Bogor *Smart Health* merupakan sumber data dan informasi kesehatan tidak hanya berasal dari Dinas Kesehatan saja, namun juga berasal dari *stakeholder* lain, seperti fasilitas kesehatan, organisasi. Analisa Resiko: Gangguan koneksi internet, sarana prasarana (Komputer) yang belum memadai di sebagian kelurahan, kompetensi TIK personil masih kurang<br><br>4. Pembangunan Aplikasi yang merupakan Satu Data Manajemen Kebencanaan adalah sebuah aplikasi sistem dan publikasi informasi kebencanaan terpadu *real time* yang mampu menjembatani dan memenuhi kebutuhan pengelolaan kebencanaan yang diselenggarakan oleh BPBD, Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan, DPUPR dan Disperumkim. Analisa Resiko: Gangguan koneksi internet, sarana prasarana (Komputer) yang belum memadai di sebagian kelurahan, kompetensi TIK personil BPBD masih kurang. |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Sumber: Dokumen Quickwins Kota Bogor |
| | | 2 | Belum optimalnya pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional | Data kegiatan utama pelaksanaan RB General di Kota Bogor pada pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional pada Tahun 2022 pada indeks SPBE yaitu sebesar 2,75 sehingga perlu dilakukan optimalisasi.<br><br>Sumber: Keputusan Walikota Bogor Nomor 061/Keo.144-OrgTahun 2023 tentang Kepwal Perubahan RB Tematik 2019-2023 |
| | | 3 | Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel | 1. Fasilitasi pembangunan Aplikasi Layanan Administrasi Kelurahan dan Kecamatan (ASINAN Bogor). Analisa Resiko: Gangguan koneksi internet, sarana prasarana (Komputer) yang belum memadai di sebagian kelurahan<br><br>2. ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah). Analisa Resiko: Aplikasi yang di-*hack* dan harus ada *storage backup* harian yang mumpuni<br><br>3. Bogor *Smart Health* merupakan sumber data dan informasi kesehatan tidak hanya berasal dari Dinas Kesehatan saja, namun juga berasal dari stakeholder lain, seperti fasilitas kesehatan, organisasi. Analisa Resiko: Gangguan koneksi internet, sarana prasarana (Komputer) yang belum memadai di sebagian kelurahan, kompetensi TIK personil masih kurang<br><br>4. Pembangunan Aplikasi yang merupakan Satu Data Manajemen Kebencanaan adalah sebuah aplikasi sistem dan publikasi informasi kebencanaan terpadu *real time* yang mampu menjembatani dan memenuhi kebutuhan pengelolaan kebencanaan yang diselenggarakan oleh BPBD, Dinas Sosial, Kecamatan dan<br><br>Kelurahan, DPUPR dan Disperumkim. Analisa Resiko: Gangguan koneksi internet, sarana prasarana (Komputer) yang belum memadai di sebagian kelurahan, kompetensi TIK personil BPBD masih kurang.<br><br>Sumber: Dokumen Quickwins Kota Bogor |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Belum terciptanya budaya birokrasi Ber-AKHLAK dengan ASN yang profesional | Data tujuan, sasaran, indikator, dan target pelaksanaan RB Nasional menunjukkan salah satu sasaran terkait terciptanya budaya birokrasi Ber-AKHLAK dengan ASN yang Profesional melalui beberapa pelaksanaan indikator yang belum optimal. Yang didukung dengan peluncuruan nilai budaya kerja Pemerintah Kota Bogor yaitu BOGOR BERLARI<br><br>Sumber: Keputusan Walikota Bogor Nomor 061/Keo.144-OrgTahun 2023 tentang Kepwal Perubahan RB Tematik 2019-2023 |
| | | 4 | Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal | Salah satu permasalahan di Sub Bidang Pekerjaan Umum adalah konektivitas infrastruktur jalan belum optimal sehingga terjadi penumpukan volume kendaraan di pusat-pusat kegiatan karena jalan alternatif menuju pusat kegiatan belum terhubung.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 |
| | Statistik | 1 | Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan data statistik sektoral | Data terkait program penyelenggaraan statistik sektoral dengan indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral pada Tahun 2020 sebesar 76%, Tahun 2021 sebesar 82 %.<br><br>Sumber: Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2023 |
| | Persandian | 1 | Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi dan persandian | Berdasarkan hasil pemetaan arsitektur keamanan di lingkungan Kota Bogor terhadap kebutuhan Metadata Arsitektur Keamanan SPBE, diperoleh keadaan yang menunjukan bahwa masih terdapat 17 kesenjangan, diantaranya adalah: 1. Standar Keamanan Standar keamanan serta peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sudah ada namun belum diketahui dan diterapkan sebagai acuan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Sementara untuk standar keamanan internasional yang digunakan sebagai pendukung peningkatan penerapan keamanan SPBE belum ditemukan. Regulasi lainnya dari beberapa peraturan pemerintah terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sudah ada namun belum diketahui sejauh mana penerapannya di lingkungan Kota Bogor. 2. Penerapan Keamanan informasi kegiatan penerapan keamanan hanya ditemukan dua kegiatan pada sosialisasi edukasi kesadaran keamanan dan kerentanan keamanan |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SPBE. Belum ditemukan bentuk kegiatan lain untuk meningkatkan keamanan serta penanganan insiden keamanan SPBE.<br><br>Sumber: kominfo.kotabogor.go.id |
| | Keuangan | 1 | Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Pengelolaan APBD secara efektif dan efisien menjadi penekanan dalam upaya penyusunan perencanaan anggaran di Kota Bogor. Pimpinan OPD perlu memastikan bahwa Kepala Bidang (Kabid) yang berkaitan dengan infrastruktur betul-betul menguasai apa yang direncanakan. Peran pengguna anggaran atau pimpinan OPD sangat penting dalam merealisasikan program yang direncanakan. Selain itu perlu untuk memastikan system perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan, serta adanya integrasi aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan system perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang dimiliki Pemkot Bogor.<br><br>Sumber:https://bagpbjsetda.kotabogor.go.id/index.php/welcome/post/single/91 |
| | | 2 | Belum optimalnya kualitas pengelolaan aset daerah | Belanja tidak langsung di tahun 2022 mencapai 86%, namun sebaliknya untuk persentase belanja langsung terhadap total APBD menunjukkan tren negatif, artinya terjadi penurunan dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2022 yang hanya sebesar 14%. kemungkinan besar data ini tidak akurat.<br><br>Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024 |
| | | 3 | Belum optimalnya budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan ASN yang profesional | Ombudsman RI menyebut pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih memerlukan perbaikan. Salah satu hal yang perlu perbaikan adalah layanan di Dinas Sosial khususnya terkait kebijakan inklusif bagi kelompok rentan, kaum difabel, anak perempuan dan sebagainya. Perbaikan yang harus dilakukan adalah jaminan sosial termasuk kesehatan, banyak keluhan soal BPJS. Pada kasus keluhan layanan BPJS, banyak penolakan di rumah sakit lantaran kartu kepesertaan sudah tidak aktif. Namun, informasi terkait non aktif kepesertaan tidak langsung disampaikan kepada pemilik kartu penerima peserta penerima bantuan iuran (PBI). Oleh karenanya, Ombudsman RI merekomendasikan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Bogor mulai dari RT, RW hingga Dinas Sosial untuk aktif melakukan reaktivasi. |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Sumber: radarbogor.id |
| | Pengawasan | 1 | Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal | Pada dokumen LKIP Inspektorat Kota Bogor Tahun 2021, diketahui beberapa kelemahan dalam akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Bogor salah satunya yaitu Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV ke atas belum dikaitkan dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*). Kinerja individu pada setiap pegawai telah ditetapkan, namun belum dilaksanakan pengukuran kinerja individu secara periodik dan dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian *reward and punishment* lainnya.<br><br>Sumber: inspektorat.kotabogor.go.id dan ppid.kotabogor.go.id |
| | Penelitian dan Pengembangan | 1 | Belum optimalnya penyusunan perencanaan kelitbangan | Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) menyusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Bogor 2022-2025 menuju Badan Riset Daerah (Brida). Diharapkan hasil roadmap akan memberikan gambaran kemana peta jalan ke depan dan rencana aksinya seperti apa. Untuk itu penyusunan roadmap SIDa menjadi salah satu strategi penguatan sistem inovasi dari sisi kebijakan inovasi daerah, kebijakan-kebijakan makro yang tentunya mendukung pelaksanaan penguatan SIDa di daerah. Selain itu pembuatan roadmap menjadi amanah dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. Adapun tujuan kegiatan SIDa, dalam rangka menyediakan acuan bagi pemangku kebijakan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memonitoring, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan roadmap SIDa Kota Bogor 2022-2025 menuju Brida secara terintegrasi dan sinergi bersama elemen-elemen lain yang ada, selain itu juga menyusun peta jalan terkait penguatan Sistem Inovasi Daerah.<br><br>Sumber: setda.kotabogor.go.id |
| | | 2 | Belum optimalnya kegiatan kelitbangan | Pada salah satu indikator penelitian dan pengembangan Kota Bogor pada Tahun 2019, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 45,96, sedangkan Tahun 2020 sebesar 78,3, dan Tahun 2021 sebesar 97,6.<br><br>Sumber: RKPD Kota Bogor Tahun 2023 |

| Aspek | Fokus/Urusan | No | Masalah | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| | Sekretariat Daerah | 1 | Belum optimal dalam perumusan kebijakan dan koordinasi pembangunan | Pada RPJMD Kota Bogor TA 2019-2024, sasaran 1 terkait terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif da, efisien, dan akuntabel yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2014-2019 tidak tercapai atau dengan predikat BB. Berdasarkan evaluasi pembangunan Kota Bogor 5 (lima) tahun terakhir permasalahan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja pemerintahan (8 area perubahan dalam reformasi birokrasi) menjadi permasalahan pokok yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Bogor untuk mencapai tujuan akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025.<br><br>Sumber: RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2023 |
| | | 2 | Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi | Data kegiatan utama pelaksanaan RB General di Kota Bogor pada pelaksanaan integrasi SAKIP menunjukkan indikator Nilai SAKIP pada Tahun 2022 sebesar 75,20, perencanaan kinerja 23,70, pengukuran kinerja sebesar 24,30, dan pelaporan kinerja 11,12., sedangkan evaluasi internal sebesar 16,08.<br><br>Sumber: Keputusan Walikota Bogor Nomor 061/Keo.144-Org Tahun 2023 tentang Kepwal Perubahan RB Tematik 2019-2023 |
| | | 3 | Belum optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | Data kegiatan utama pelaksanaan RB General di Kota Bogor pada pelaksanaan pelayanan publik prima menunjukkan indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Tahun 2022 sebesar 87,5, dan indeks pelayanan publik sebesar 4,49 sehingga perlu dilakukan optimalisasi.<br><br>Sumber: Keputusan Walikota Bogor Nomor 061/Keo.144-OrgTahun 2023 tentang Kepwal Perubahan RB Tematik 2019-2023 |
| | | 4 | Belum optimalnya penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah | Data kegiatan utama pelaksanaan RB General di Kota Bogor pada pelaksanaan penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah menunjukkan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bogor Tahun 2022 memperoleh nilai 69,7. Capaian tersebut diperoleh melalui berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu dengan melalui sosialisasi penilaian ITKP kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br><br>Sumber: Keputusan Walikota Bogor Nomor 061/Keo.144-OrgTahun 2023 tentang Kepwal Perubahan RB Tematik 2019-2023 |

*Sumber: Data diolah, 2023*

Pada tabel identifikasi permasalahan pembangunan, yang dibagi dalam beberapa aspek yaitu geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, dan pelayanan umum. Pada beberapa aspek tersebut dikelompokkan dalam masing-masing urusan. Pada aspek geografi dan demografi, di mana beberapa masalah terkait konflik kepentingan masih masif, yaitu pada sengketa lahan dan penetapan wilayah administratif. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap penggunaan lahan dan pembagian wilayah administratif. Pengelolaan kawasan permukiman kumuh yang padat penduduk belum optimal. Hal ini menciptakan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tidak layak huni bagi penduduk, serta berpotensi menyebabkan masalah kesehatan dan sosial. Pencegahan dan mitigasi bencana serta perubahan iklim masih belum efektif. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam maupun perubahan iklim, seperti banjir, tanah longsor, dan kenaikan suhu global. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi juga belum optimal, dibutuhkan perencanaan yang lebih baik dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan daerah. Pengolahan data pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan. Data yang akurat dan terkini diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik dalam perencanaan dan pembangunan wilayah.

Sementara pada aspek kesejahteraan masyarakat, di mana salah satunya yaitu pada urusan tenaga kerja. Situasi tenaga kerja di Kota Bogor menghadapi beberapa permasalahan yang perlu segera ditangani. Masalah utama adalah rendahnya serapan tenaga kerja di sektor Industri Kecil Menengah (IKM), yang tercermin dari data IPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Persentase NEET (15-24 Tahun) mencapai 26,44%, sedangkan persentase anak yang bekerja (10-17 Tahun) mencapai 27,85%. Meskipun terjadi kenaikan data perekonomian menurut BPS Kota Bogor, penyerapan tenaga kerja pasca-pandemi masih lamban (2,41%), dengan penduduk usia kerja yang masih terdampak oleh pandemi. Untuk mengatasi masalah ini, Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 menyarankan perlunya upaya digitalisasi dalam penanggulangan pengangguran terbuka. Transformasi digital diharapkan dapat memperbaiki pola investasi, transaksi, pola kerja, dan pola rekrutmen tenaga kerja. Namun, transformasi digital juga dianggap sebagai

tantangan besar bagi penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang luas terkait perubahan ini.

Selain itu, sektor pertanian juga mengalami masalah, terutama dalam hal belum optimalnya nilai tambah. Petani menggunakan varietas benih tanaman yang tidak jelas garis keturunannya, serta pola tanam dan penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai aturan, sehingga tanaman menjadi rentan terhadap hama dan penyakit. Kendala lainnya adalah keterbatasan lahan dan kurangnya dukungan harga jual hasil pertanian, yang membuat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian menjadi sulit. Sementara itu, dalam urusan perindustrian, masalahnya meliputi kendala peningkatan nilai ekspor, serta ketiadaan kawasan industri di Kota Bogor yang berdampak pada perizinan pelaku industri kecil yang ingin naik ke industri menengah, serta kesulitan memperoleh bahan baku impor pasca pandemi. Dengan pemahaman mendalam terhadap masalah-masalah ini, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, nilai tambah sektor pertanian, dan performa perindustrian di Kota Bogor.

Pada aspek daya saing daerah di mana dalam urusan tenaga kerja masalah utamanya adalah rendahnya serapan tenaga kerja di sektor Industri Kecil Menengah (IKM), yang tercermin dari data IPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Persentase NEET (15-24 Tahun) mencapai 26,44%, sedangkan persentase anak yang bekerja (10-17 Tahun) mencapai 27,85%. Meskipun terjadi kenaikan data perekonomian menurut BPS Kota Bogor, penyerapan tenaga kerja pasca-pandemi masih lamban (2,41%), dengan penduduk usia kerja yang masih terdampak oleh pandemi. Untuk mengatasi masalah ini, Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 menyarankan perlunya upaya digitalisasi dalam penanggulangan pengangguran terbuka. Transformasi digital diharapkan dapat memperbaiki pola investasi, transaksi, pola kerja, dan pola rekrutmen tenaga kerja. Namun, transformasi digital juga dianggap sebagai tantangan besar bagi penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang luas terkait perubahan ini. Selain itu, sektor pertanian juga mengalami masalah, terutama dalam hal belum optimalnya nilai tambah. Petani menggunakan varietas benih tanaman yang tidak jelas garis keturunannya, serta pola tanam dan penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai aturan, sehingga tanaman menjadi rentan terhadap hama dan penyakit.

Kendala lainnya adalah keterbatasan lahan dan kurangnya dukungan harga jual hasil pertanian, yang membuat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian menjadi sulit. Sementara itu, dalam urusan perindustrian, masalahnya meliputi kendala peningkatan nilai ekspor, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal, hambatan perizinan karena belum migrasi ke OSS RBA, serta ketiadaan kawasan industri di Kota Bogor yang berdampak pada perizinan pelaku industri kecil yang ingin naik ke industri menengah, serta kesulitan memperoleh bahan baku impor pasca pandemi. Dengan pemahaman mendalam terhadap masalah-masalah ini, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, nilai tambah sektor pertanian, dan performa perindustrian di Kota Bogor.

Aspek pelayanan umum yang diidentifikasi per urusan pemerintah daerah di Kota Bogor menguraikan beberapa masalah. Pada urusan pendidikan, dapat di identifikasi bahwa Kota Bogor perlu untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan, baik melalui peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kerja sebagai upaya peningkatan kualitas SDM, salah satunya dalam kemampuan membaca, dan menghitung. Berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023 dari Asesmen Nasional, pada indikator yang mempengaruhi indeks SPM Anda berdasarkan hasil agregat per jenjang di kabupaten/kota masih perlu dioptimalkan, salah satunya yaitu indikator numerasi pada SD Keagamaan Negeri dan Swasta yang masih kurang.

Pada unsur kesehatan yang selama ini terlaksana masih perlu untuk diperbaiki dalam kualitas pelayan dan SDM kesehatan, terutama dalam menjamin akses bagi seluruh masyarakat mencapai haknya. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, merupakan unsur penting pembangunan namun upaya perlindungan anak dan perempuan serta kesetaraan gender masih perlu dioptimalkan karena berdasarkan data capaian kasus kekerasan masih belum optimal tertangani serta belum masifnya program pemberdayaan yang ada. Unsur lain dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bogor masih perlu dioptimalkan, terutama dalam pemberian layanan pembuatan KTP, dan akte kelahiran agar bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan sistem yang lebih efektif dan efisien.

Unsur penting berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di mana data capaian urusan sosial menunjukkan bahwa pada Tahun 2015-2019 indikator kinerja persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya pada Tahun 2019 sebesar 75,32%, persentase jumlah anak terlantar/anak jalanan yang di Tahun 2019 sebesar 36,7%, persentase penyandang cacat trauma yang dibina sebesar 17,52%, dan jumlah PMKS/PPKS yang terbina sebesar 302. Hal ini memperlihatkan bahwa aktor atau pihak penerima manfaat belum bisa sepenuhnya dan seluruhnya menjangkau atau menerima pemberdayaan. Pada unsur lain yang juga menjadi perhatian pemerintah Kota Bogor, di mana Kota Bogor menjadi kota metropolitan, dengan mobilitas masyarakat tinggi, namun dalam hal ini tenaga kerja masih terbatas, dan belum optimalnya produktivitas angkatan kerja mengingat kualitas SDM tenaga kerja di Kota Bogor rata-rata masih pada lulusan SMA dan juga belum memiliki kompetensi.

Kota Bogor sebagai salah satu daerah subur pengembangan sektor pertanian saat ini masih terbatas pada ketersediaan pangan beserta gejolak harga pangan yang masih menjadi ancaman, hal ini karena terbatasnya lahan dan minatnya anak muda untuk menjadi petani. Pada unsur koperasi diantaranya yaitu masih rendahnya keaktifan koperasi dan UKM. Unsur perdagangan identifikasi masalah yang muncul diantaranya yaitu belum optimalnya pembinaan dan perlindungan, pengelolaan pasar, dan distribusi dan stabilitas perdagangan. Unsur perindustrian yaitu masih terkendala peningkatan nilai ekspor, dan rendahnya kemampuan industri kecil dan menengah dalam pengelolaan maupun pengembangan usaha.

Pembangunan tata ruang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi masalah yang terus berkembang, belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal padahal Kota Bogor memiliki konsentrasi tinggi terhadap lapangan kerja dan berbagai sektor usaha. Sementara dalam unsur persandian yaitu belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi dan persandian. Pada unsur perencanaan pembangunan yaitu belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengolahan data pembangunan daerah.

## 4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan sebuah kondisi atau permasalahan daerah yang bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Secara konseptual, isu strategis memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah suatu saat nanti.

### 4.2.1 Isu Internasional

#### A. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sejak tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs/*TPB*)* tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs adalah agenda pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim.

SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang meliputi berbagai isu pembangunan berkelanjutan, 17 tujuan global tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Tanpa Kemiskinan (*No Poverty)*** – Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat;
2. **Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)** – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan;

3. **Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*)** – Menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan / kesejahteraan bagi semua pada semua usia;
4. **Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)** – Menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua;
5. **Kesetaraan *Gender* (*Gender Equality*)** – Menjamin kesetaraan *gender,* serta memberdayakan seluruh perempuan;
6. **Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*)** – Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. **Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)** – menjamin akses terhadap energi yang terjangkau (terbeli), andal, berkelanjutan, dan modern, bagi semua orang;
8. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*)** – Meningkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bag semua orang;
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)** – Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. **Mengurangi Kesenjangan *(Reduced Inequalities*)** – Mengurangi ketidaksetaraan di dalam, dan di antar negara;
11. **Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*)** – Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, dan berkelanjutan;
12. **Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab *(Responsible Consumption and Production*)** – Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. **Aksi terhadap Iklim (*Climate Action*)** – Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;
14. **Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*)** – Melindungi dan menggunakan lautan, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. **Kehidupan di Darat (*Life on Land)*** – Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan,

menghentikan dan membalik degradasi (kerusakan) tanah, dan kehilangan biodiversitas (keragaman hayati);

16. **Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions)*** – Menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan inklusif, pada semua level; dan
17. **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*)** – Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan SDGs, melalui Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB. Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kota Bogor berkewajiban untuk berkontribusi dalam penyusunan rencana aksi daerah TPB dan melaksanakannya sesuai kewenangan daerah otonom.

**Tabel 4.2. 1 Keterkaitan Isu-isu Strategis Internasional dengan Kota Bogor**

| No | Isu-isu Strategis | | Keterangan (Capaian TPB Kota Bogor) |
|---|---|---|---|
| | SDG's | Kota Bogor | |
| 1 | Tanpa Kemiskinan (*No Poverty)* | Pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM dalam fokusnya yaitu penanggulangan kemiskinan | Salah satu alasannya ditunjukkan berdasarkan capaian persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 7,24%, dibawah target yang ditetapkan yaitu 5,78% dan menurun dari tahun sebelumnya 6,68 |
| 2 | Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*) | Pembangunan manusia yang berkualitas dalam kaitannya dengan pemerataan akses kesehatan | Ditunjukkan adanya peningkatan Prevalensi Kekurangan Gizi (*underweight*) pada anak balita pada 2021 sebesar 5,43%, yang naik dibandingkan capaian di 2020 yaitu 3,74%. Hal tersebut umumnya disebabkan penurunan kesehatan balita dan rendahnya kesadaran ibu untuk memberi makan makanan bergizi |
| 3 | Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*) | Pembangunan manusia yang berkualitas dalam kaitannya dengan pemerataan akses kesehatan | Tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang menjadi salah satu indikator pencapaian SDGs, menunjukkan kenaikan yang bermakna negatif. Semulanya 73,50 untuk angka kematian ibu di 2020 menjadi 122,60 di 2021. Begitu juga pada angka kematian bayi, pada 2020 sebesar 74,5 naik menjadi 122,60 di tahun berikutnya |

| No | Isu-isu Strategis | | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | SDG's | Kota Bogor | (Capaian TPB Kota Bogor) |
| 4 | Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*) | Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang ditunjang pemerataan pelayanan infrastruktur | Dilihat dari indikator penilaiannya, capaian untuk tujuan pendidikan berkualitas masih terdapat beberapa yang belum mencapai target seperti APK PAUD dan persentase SD dan SMP yang terakreditasi minimal B masih dibawah target yang ditentukan |
| 5 | Kesetaraan *Gender* (*Gender Equality*) | Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing | Pada tujuan kesetaraan gender, secara keseluruhan sudah memenuhi target seperti pada indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah dengan capaian 22% |
| 6 | Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*) | Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur | Pemenuhan air minum yang aman dan sanitasi yang layak masih perlu menjadi perhatian yang tercermin pada Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan dengan capaian yang belum sesuai target dari 2021 sebesar 83,83 menjadi 68,68 di 2022 |
| 7 | Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*) | - | - |
| 8 | Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*) | Pembangunan dan pengembangan daya saing ekonomi | Perlunya perhatian lebih dalam dukungannya terhadap UMKM dengan contohnya dalam Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan yang masih tercapai 11,70% dari target yang ditentukan yaitu 25% |
| 9 | Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*) | Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur | Secara garis besar perkembangan industri dan infrastruktur dalam indikator tujuang ke sembilan TPB ini sudah menunjukkan nilai yang positif dengan contohnya yatu indikator Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dari 4,46% menjadi 5,08% di 2022 |
| 10 | Mengurangi Kesenjangan *(Reduced Inequalities*) | Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta pengembangan ekonomi | Dari indikator koefisien gini tujuan ke sepuluh TPB ini menunjukkan data capaian yang belum sesuai target sehingga dirasa perlu penanganan masalah kesenjangan tersebut dicerminkan dari Koefisien Gini sebesar 0,43 |
| 11 | Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*) | Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur | Kota yang aman sebagai maksud dari tujuan ini, diupayakan Kota Bogor dengan keselamatan bencana. Kaitannya dengan infrastruktur adalah bagaimana infrastruktur tersebut dapat memadai dalam menunjang dan membantu keselamatan masyarakat khususnya jika terjadi bencana yang salah satunya terwakilkan dari data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di kategori sedang yaitu 0,74 |
| 12 | Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab *(Responsible Consumption and Production*) | Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur | Kaitannya dengan limbah serta dampaknya terhadap lingkungan, indikator jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) masih menunjukkan capaian dibawah target. Maka dalam upaya mendukung *responsible consumption and production* pelaksanaan pengelolaan limbah harus ditingkatkan lagi |
| 13 | Aksi terhadap Iklim (*Climate Action*) | Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan | Perhatian dan kesiapsiagaan mengantisipasi bencana menjadi faktor penting yang sejalan dengan indikator tujuan TPB Kota Bogor yaitu dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah dan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang, perlu dimasukan point dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca (GRK) |

| No | Isu-isu Strategis | | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | SDG's | Kota Bogor | (Capaian TPB Kota Bogor) |
| 14 | Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*) | - | Kota Bogor tidak memiliki wilayah laut |
| 15 | Kehidupan di Darat (*Life on Land)* | Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan | Kaitannya dengan lahan di Kota Bogor baik dari alih fungsi maupun RTH yang belum sesuai target dari indikator Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan yaitu 803,81 ha dari target 5,5 juta ha (skala nasional) |
| 16 | Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions)* | Tata kelola pemerintahan yang baik kaitannya dengan perlindungan hukum dan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Maraknya kasus kejahatan dan kekerasan menjadi fokus pada capaian tujuan TPB ini, jumlah kekerasan yang terjadi pada anak capaian 2022 masih belum sesuai dengan target seperti halnya dalam Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir yang meningkat dari 2021 sebesar 51% menjadi 73% di 2022 |
| 17 | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*) | Tata kelola pemerintahan yang baik | Kaitannya dengan isu tata kelola pemerintahan yang baik karena pemerintah yang menjadi *leader* dalam pembangunan daerah Kota Bogor menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kemitraan khususnya dalam pembangunan daerah yang belum sesuai target pada indikator Rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan capaian 8,52% di 2022 dengan target yang ditetapkan yaitu di atas 12% |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

Mengakhiri kemiskinan di segala aspek yang menjadi tujuan pertama dalam program pembangunan berkelanjutan (SDG's), sehingga kemiskinan menjadi perhatian yang harus dituntaskan di setiap negara. Dalam hal ini juga perlu menjadi perhatian dari Kota Bogor dalam upaya pembangunannya. Kota Bogor sendiri, dalam kaitannya dengan isu ini menjadikan beberapa target dalam pelaksanaannya. Pertama, Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional dengan indikatornya adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Kedua, menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Indikator dari target ini adalah "Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan", "Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan", dan "Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan". Target ketiga yaitu pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya

masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Target ini diukur dengan tujuh indikator, yaitu "persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)", "prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin", "persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak", "persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak", "Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat", "Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat", dan "persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran".

Terakhir, target dalam mengakhiri kemiskinan yaitu pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Dengan enam indikator yaitu "Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. (Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana)", "Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial", "Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (Kelurahan Tangguh Bencana)", "Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi", "Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana", dan "Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah".

Pada pelaksanaan target pertama, Kota Bogor belum mencapai optimal mencapai target yang ditentukan. Hal itu dibuktikan di tahun 2021 dengan capaian persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur masih dibawah target yang ditentukan, yaitu sebesar 7,24% dari target yang ditentukan sebesar 5,78%. Penurunan juga terlihat ketika disandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 6,68%. Kaitannya dengan hasil tersebut, maka dari itu isu kemiskinan harus terus diperbaiki dan menjadi perhatian yang dimasukkan dalam rencana pembangunan Kota Bogor kedepannya.

Kemudian, sebab dari perlunya perhatian dalam isu kemiskinan dihadirkan dalam perencanaan pembangunan Kota Bogor dibuktikan dengan capaian pada 2021 terkait indikator proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan yang menurun yaitu 90,31% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 91,10. Capaian indikator tersebut juga masih dibawah target yang ditentukan yaitu 97%. Tidak hanya disitu, capaian indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak pada target ketiga isu kemiskinan sebesar 68,49% ini juga menurun jika dibandingkan capaian tahun 2020, yaitu 81,46%. Kemudian capaian dari Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat di 2021 juga menurun, yaitu 82,54% daripada tahun sebelumnya yaitu 88,01% di 2020.

Berdasarkan data penurunan hasil capaian indikator yang digunakan sebagai ukuran dalam mengatasi kemiskinan sesuai tujuan SDG's tersebut menjadikan alasan pentingnya menghadirkan isu kemiskinan ini dalam rencana pembangunan daerah Kota Bogor kedepannya.

Tanpa kelaparan, tujuan SDGs terkait zero hunger dilaksanakan dalam bentuk tujuan yaitu Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Tujuan tersebut berusaha diwujudkan dengan ditentukan dua target. Pertama, pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Kedua, Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Pada target pertama yang ditentukan ditunjang empat indikator sebagai bentuk keberhasilannya. Empat indikator yang dimaksud adalah "Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernurishment*) Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan", "Prevalensi Kekurangan Gizi (*underweight*) pada anak balita. Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (*Underweight*)", "Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Skor Pola

Pangan Harapan (PPH) Konsumsi", dan "Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. Konsumsi energi".

Rawan pangan yang dapat menimbulkan kelaparan masyarakat, harus menjadi perhatian Kota Bogor. Berdasarkan data evaluasi kinerja pencapaian sasaran SDGs memperlihatkan bahwa Prevalensi Kekurangan Gizi (*underweight*) pada anak balita dengan ukuran berdasarkan Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (*underweight*) mengalami peningkatan. Pada 2021, Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita sebesar 5,43%, nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan capaian di 2020 yaitu 3,74%. Kemudian, penurun yang mengindikasikan nilai negatif yaitu pada kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan perkapita yang menurun bila disandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu 70,56 di 2021 dan 2020 sebesar 75,84. Didasarkan pada data tersebut, dapat dikatakan pelaksanaan pembangunan dalam arahnya mewujudkan *zero hunger* (tujuan kedua SDGs) perlu diperhitungkan untuk masuk dalam rencana pembangunan daerah khususnya Kota Bogor.

Dilanjutkan dengan tujuan ketiga terkait *Good Health and Well-being* diwujudkan dalam tujuan "Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Seluruh Usia". Pada tujuan tersebut, ditentukan beberapa target, diantaranya yaitu "Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup", yang diukur berdasarkan Angka Kematian Ibu (AKI), Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, dan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Target kedua yaitu "Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000". Indikator yang menyertainya adalah Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup dengan Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, dan

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Berdasarkan evaluasi kinerja pencapaian sasaran SDGs, bahwa indikator angka kematian ibu dan angka kematian bayi mengalami kenaikan, yang mulanya 73,50 untuk angka kematian ibu di 2020 menjadi 122,60 di 2021. Begitu juga pada angka kematian bayi, pada 2020 sebesar 74,5 naik menjadi 122,60 di tahun berikutnya. Didasarkan pada data ini, menunjukkan bahwa kesehatan yang baik seperti tujuan ketiga SDGs masih perlu dilaksanakan semaksimal mungkin. Sehingga Kota Bogor dapat memperhatikan upaya peningkatan kualitas SDM dalam kaitannya pemerataan akses kesehatan dalam agenda rencana pembangunan Kota Bogor. Harapannya jika akses kesehatan merata, maka dapat timbul kesehatan yang baik seperti tujuan ketiga dari SDGs.

Tujuan *Quality Education,* diwujudkan dengan upaya menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Akan tetapi dilihat dari indikator penilaiannya, capaian untuk tujuan pendidikan berkualitas masih terdapat beberapa yang belum mencapai target seperti APK PAUD dan persentase SD dan SMP yang terakreditasi minimal B masih dibawah target yang ditentukan. Maka dari itu, demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas harus diimbangi dengan peningkatan sarana pendidikan yang berkualitas.

Tujuan kelima terkait dengan kesetaraan gender. Melihat dari indikator capaian kesetaraan gender dalam TPB di tahun 2022 sudah menunjukkan data yang positif. Secara garis besar sudah melampaui target. Begitu pula jika disandingkan dengan capaian IPG dan IDG Kota Bogor yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya (berdasarkan data bps.go.id). Yang berarti menunjukkan kesetaraan gender semakin baik.

Sedangkan untuk tujuan *clean water and sanitation,* indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak masih berada dibawah target. Capaian ini juga sejalan dengan upaya Kota Bogor dalam mewujudkan daerah yang ODF (*Open Defecation Free*).

Tujuan selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Dari keseluruhan indikator tujuan TPB kedelapan ini, hampir keseluruhan sudah mencapai target. Akan tetapi, untuk

indikator persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan masih belum sesuai target. Capaian yang belum optimal berarti harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi kedepannya, sejalan dengan isu yang diangkat di RPD Kota Bogor 2025-2026 dalam mengembangkan UMKM.

Dari indikator koefisien gini tujuan ke sepuluh TPB, menunjukkan data capaian yang belum sesuai target sehingga dirasa perlu penanganan masalah kesenjangan tersebut. Indeks gini menjadi salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Kota Bogor sendiri berada pada kategori sedang.

Tujuan SDGs selanjutnya yaitu *sustainable cities and communities* dalam rangka mewujudkan kota dan pemukiman manusia inklusif dan aman. Seperti TPB dengan indikatornya yang berupa mengukur aspek ketahanan dan keamanan dalam menghadapi kebencanaan. Dengan karakteristik dan letak geografis Kota Bogor yang memiliki curah hujan dan tinggi menjadikan potensi banjir selalu ada dalam kebencanaan di wilayah tersebut. Sehingga dalam upaya membersamai mewujudkan *sustainable cities and communities* diperlukan infrastruktur yang harapannya dapat mendukung dan mencegah kebencanaan yang terjadi.

*Responsible consumption and production* menjadi tujuan yang ingin diwujudkan melalui SDGs. Tujuan ini didukung dengan TPB di Kota Bogor dengan tujuan menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Yang dimaksud disini adalah segala apapun bentuk konsumsi dan produksi di daerah selalu memperhatikan keberlanjutannya dengan dampaknya terhadap lingkungan. Indikator dalam tujuan TPB ke-12 ini yaitu jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) masih belum sesuai target. Air limbah yang sangat berdampak pada lingkungan harus diperhatikan pengelolaannya. Maka dari itu, perlu menjadi perhatian pengelolaan air limbah ini baik melalui infrastrukturnya maupun penegakan dari pemerintah terhadap subjek pengelola air limbah tersebut.

Hal yang kemudian ingin diwujudkan dalam konsep SDGs yaitu *climate action* dan *life on land* fokusnya terhadap lingkungan. *Climate action* yang memperhatikan kebencanaan dalam tujuan ke-13 TPB dan *life on land* yang memperhatikan tata guna lahan dan ruang hijau dalam tujuan ke-15 TPB. Secara garis besar, capaian Kota Bogor dalam

indikator-indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan 13 dan 15 TPB sudah sesuai dengan target. Akan tetapi kaitannya dengan lingkungan, harus selalu menjadi perhatian bagi Kota Bogor.

Selanjutnya yaitu perwujudan *peace, justice and strong institutions.* Kaitannya dengan ini dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dari segala bentuk kejahatan maupun kekerasan baik kepada anak, remaja, maupun wanita. Jika dilihat dari indikator TPB prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dengan capaian empat kasus dengan keterangan yang belum mencapai target. Setiap kekerasan maupun kejahatan baik itu yang sudah dikendalikan pemerintah maupun yang masih belum harus selalu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah. Hal ini lantaran, pemerintah sebagai penegak hukum dan pembentuk produk hukum harus dapat mengatasi setiap tindakan kejahatan dan kekerasan. Dengan hal ini, perlunya tata kelola pemerintah yang baik khususnya dengan dalam institusi penegak hukum harus selalu ditingkatkan terus menerus.

*Partnership for the goals* menjadi tujuan yang terakhir pada SDGs. Kaitannya dengan ini, peran Pemerintah Daerah sebagai *leading* dalam kewenangannya mengambil arah pembangunan menjadi baris terdepan dalam memulai langkah yang diambil. Berdasarkan capaian TPB, untuk tujuan ke-17 ini hampir seluruhnya sudah sesuai dengan target, akan tetapi satu indikator yaitu rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang masih belum sesuai target. Dengan ini peran Pemerintah Daerah memutuskan langkah apa yang akan diambil kedepannya, sehingga perlunya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perwujudan tujuan ini sangat diperlukan.

**B. The World Economic Forum**

*World Economic Forum* menyediakan platform global yang tidak memihak dan nirlaba, bertindak sebagai Organisasi Internasional untuk kerjasama dengan Pemerintah-Swasta yang independen. Pada saat gejolak dan ketidakpastian meningkat, Forum ini berperan penting untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang saling berhubungan yang kita hadapi saat ini, berfungsi sebagai platform untuk hubungan yang bermakna antara para pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan, dan membangun inisiatif pemerintah-swasta yang terstruktur untuk kerja sama dan kemajuan.

Dunia menghadapi empat transformasi utama yang saling berhubungan dan memperkuat: ekonomi dan lingkungan hidup, politik dan geopolitik, teknologi, dan sosial. Secara keseluruhan, keempat transformasi ini menciptakan *trade-off* dan peluang bagi para pengambil keputusan di pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Forum ini mendukung para pemimpin dan masyarakat luas dalam memahami tantangan-tantangan ini dan bersama-sama merancang dan menerapkan solusi.

Berdasarkan *The Global Risk Report* 2023 yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum*, dunia dalam lingkup global akan mendapat risiko yang rentan muncul dalam rentang waktu yang beragam, dari sekarang, tahun depan maupun lima hingga 10 tahun kedepan. Risiko-risiko tersebut dibagi dalam lima aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, geopolitik, sosial, dan teknologi.

Berikut ini lima risiko yang diidentifikasi oleh World Economic Forum. Pertama, Krisis Hutang. *World Economic Forum* menjelaskan bahwa risiko krisis hutang lantaran munculnya pemberian dana yang murah dalam bentuk utang publik dari berbagai pemerintah negara. Hal tersebut muncul akibat dari dampak luas pandemi *Covid-19* yang melemahkan keuangan dan ekonomi negara. Maka dari itu, dalam upaya menstabilkan sistem keuangan, pemberian dana untuk mendorong daya beli masyarakat sebagai penggerak ekonomi.

Kedua, konflik antar wilayah. Konflik antar wilayah atau antar negara ini menjadi risiko kedua yang berpotensi muncul, berdasarkan identifikasi *World Economic Forum*. Risiko ini muncul usai terjadinya perang dan meningkatnya konfrontasi geo ekonomi antar negara, terutama setelah perang antara Ukraina dan Rusia. Konflik antar wilayah ini menurut *World Economic Forum* merupakan risiko yang terjadi karena adanya penerapan sanksi perdagangan, perang perdagangan, hingga arus investasi yang terbatas karena semakin ketat penyaringannya atau yang kerap kali dikenal sebagai *investment screening*.

Ketiga, meningkatnya inflasi. Risiko inflasi ini menjadi risiko secara luas bagi negara-negara dunia. *World Economic Forum* mengkategorikan risiko inflasi yang berpotensi naik cepat dan akan dihadapi seluruh negara global selama dua tahun ke depan. Permasalahan inflasi yang berisiko naik cepat ini disebabkan oleh komoditas pangan dan energi sebagai senjata dalam peperangan yang

terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta efek samping dari pandemi *Covid-19*.

Konsekuensi lanjutan dari risiko ini menurut *World Economic Forum* adalah terjadinya pertumbuhan yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan inflasi (stagflasi) karena pertumbuhan ekonomi yang sempat terpuruk akibat pandemi dan juga masih belum pulih akibat kebijakan moneter yang ketat, hingga munculnya krisis biaya hidup.

Keempat, kesenjangan digital. Risiko ketimpangan digital yang harus dihadapi negara-negara global berdasarkan identifikasi *World Economic Forum* diakibatkan oleh kurangnya investasi pada sektor tersebut, keterampilan dan kemampuan digital yang rendah, daya beli yang tidak memadai, hingga adanya pembatasan-pembatasan teknologi oleh pemerintah.

Terakhir, kontestasi geopolitik terhadap sumber daya. *World Economic Forum* mengidentifikasi risiko ini akan dihadapi oleh negara-negara berkembang, karena semakin terekspos nya sumber daya alam negara tersebut di sektor pertambangan alam untuk jenis metal dan mineral yang menjadi sumber daya utama negara global di tengah aksi penanganan perubahan iklim. Sumber daya tersebut merupakan sumber daya yang penting dan akan menjadi kunci dalam potensi konfrontasi geopolitik karena sumber daya ini tidak hanya penting bagi sumber energi baru dan terbarukan melainkan juga untuk untuk produk-produk teknologi hingga militer.

Berdasarkan hasil identifikasi dari forum tersebut, jika di analisis terkait dengan apa yang menjadi fokus pembangunan Kota Bogor, maka dapat dilihat seperti berikut:

**Tabel 4.2. 2 Keterkaitan Isu World Economic Forum dengan Isu Kota Bogor**

| No | Isu-isu Strategis | | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | WEF | Kota Bogor | |
| 1 | Lonjakan inflasi | Pengembangan ekonomi Kota Bogor | Inflasi dapat berdampak positif maupun negatif. Namun inflasi yang tinggi dan tidak terkendali akan membawa efek buruk yaitu meningkatkan kemiskinan dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan fokus RB Tematik Kota Bogor yaitu pengendalian inflasi. Laju inflasi Kota Bogor di 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yaitu 5,82 (Kota Bogor) dan 5,51 (Nasional). Jika tren ini berlanjut dan dan tidak terkendali, maka akan terjadi lonjakan inflasi yang dapat merugikan daerah |
| 2 | Ketimpangan digital | Tata kelola pemerintahan yang baik | Berdasarkan *1data.menpan.go.id* Indeks SPBE 2022 Kota Bogor yaitu 2.747 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya yaitu Kabupaten Bogor yang sebesar 3.332 walaupun masih dalam satu kategori yaitu baik. SPBE sebagai salah satu aspek yang dapat menjadi ukuran digitalisasi memperlihatkan masih terjadi digitalisasi yang kurang optimal di Kota Bogor |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

Potensi munculnya lonjakan inflasi yang diperkirakan terjadi satu hingga 10 tahun kedepan, merupakan hal yang harus diawasi oleh Kota Bogor juga. Hal ini lantaran hasil data laju inflasi Kota Bogor tahun 2022 meningkat daripada tiga tahun sebelumnya. Laju inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi ekonomi suatu wilayah, salah satunya pada sektor ekonomi. Peningkatan inflasi mempengaruhi perputaran ekonomi masyarakat. Terjadinya inflasi yang tinggi juga akan memperburuk kemiskinan.

Selanjutnya risiko ketimpangan digital juga masih memiliki relevansi dengan Kota Bogor. Digitalisasi pemerintahan yang didukung adanya SPBE menjadi salah satu acuan yang memperlihatkan tingkat digitalisasi di suatu daerah khususnya pada pemerintahan. Mengambil data dari *1data.menpan.go.id,* Indeks SPBE 2022 Kota Bogor yaitu 2.747 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya yaitu Kabupaten Bogor walaupun masih dalam satu kategori baik yang sebesar 3.332. Dari data tersebut, menjadi dasar perlunya pengembangan tata kelola yang baik khususnya peningkatan digitalisasi sesuai mandat pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**C. G20 (Group of Twenty)**

G20 2022 yang dilaksanakan di Bali dengan Indonesia selaku presidensi G20. Pada forum tersebut, Indonesia mengangkat isu-isu global yang harus menjadi fokus bersama. Pertama, arsitektur kesehatan global. Seluruh dunia sedang mencoba bangun dan memulihkan diri pasca pandemi. Adanya *Covid-19* menuntut setiap negara berperan dan saling bahu membahu untuk mengatasi pandemi. Di antaranya adalah meningkatkan hubungan antar negara dalam hal mencukupi kebutuhan dunia akan kesehatan. Kesehatan menjadi salah satu isu utama yang dibahas di forum G20 Bali. Pemulihan akibat dampak pandemi membutuhkan kerja sama global yang lebih kuat yang memastikan kesetaraan standar kesehatan global dan kolaborasi yang lebih erat untuk memastikan ketahanan seluruh negara terhadap pandemi yang mungkin dapat terjadi lagi di masa depan.

Kedua yaitu transformasi digital dan ekonomi. Digitalisasi ekonomi yang cepat membutuhkan rancangan baru dalam kerjasama antar negara dan semua pemangku kepentingan untuk mengamankan kesejahteraan bersama, termasuk bidang ekonomi di era digital.

Kemajuan teknologi yang pesat harus diikuti bagi seluruh negara. Penggunaan teknologi yang masif di seluruh aspek menjadikan teknologi tidak dapat dilepaskan dari pembangunan. Pengembangan ekonomi yang selalu menjadi fokus pembangunan dapat diiringi penggunaan teknologi. Transformasi ini yang nantinya dapat mendorong ekonomi. Terakhir, kaitannya dengan energi berkelanjutan. Isu lainnya adalah hubungannya dengan energi, kebutuhan mendesak untuk mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih bersih perlu ditangani dengan pendekatan dan dimensi baru, memastikan masa depan yang lebih bersih bagi seluruh negara global.

**Tabel 4.2. 3 Isu G20 dengan Isu Kota Bogor**

| No | Isu-isu Strategis | | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | G20 | Kota Bogor | |
| 1 | Kesehatan global | Pembangunan manusia yang berdaya saing kaitannya dengan pemerataan akses layanan Kesehatan | Faktor perlunya pemerataan akses layanan kesehatan adalah perlunya peningkatan Angka Harapan Hidup yang dipicu beberapa masalah seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi serta ketersediaan faskes di setiap wilayah (ketersediaan/kebutuhan) yang belum mencukupi |
| 2 | Transformasi ekonomi digital | Pengembangan daya saing ekonomi | Pengembangan ekonomi yang salah satunya dapat didukung oleh ekonomi lokal dan UMKM serta tidak bisa dilepaskannya perkembangan teknologi yang gencar dimanfaatkan dalam semua aspek kehidupan. Menjadikan perlunya pengembangan ekonomi yang berdaya saing. Daya saing memiliki makna yang luas, berdaya saing berarti dapat bersaing dari kuantitas maupun kualitas. Namun kapasitas dan kualitas dari ekonomi lokal dan UMKM Kota Bogor perlu ditingkatkan. Salah satunya mendorong penggunaan teknologi yang di mana, ekonomi lokal dan UMKM saat ini masih rendah/kurang dalam memanfaatkan penggunaan teknologi. |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

Kesehatan sebagai pilar dalam kaitannya dengan pembangunan manusia. Munculnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh besar terhadap kesehatan manusia, membuat ancaman nyata dalam kesehatan global. Meningkatnya angka kematian akibat wabah, lumpuhnya kegiatan ekonomi merupakan sedikit dampak yang dirasakan ketika terjadi Covid-19. Maka dari itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi gempuran yang tidak terduga seperti itu harus menjadi fokus yang diatasi oleh pemerintah.

Sejalan dengan tujuan dari SDGs terkait dengan *Good Health and Well-being*. Kesehatan tidak dapat dilepaskan dalam pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing harus diimbangi dengan kesehatan yang memadai. Hal ini di Kota Bogor, jika ditarik dari permasalahan yang terjadi, masih perlu pengoptimalisasi pemerataan akses layanan kesehatan. Namun jika

disandingkan dengan capaian kinerja Kota Bogor, aspek kesehatan beserta indikator-indikatornya secara bertahap selalu mengalami kenaikan yang positif. Akan tetapi jika dikembalikan dalam syarat pembangunan manusia, yaitu perlunya peningkatan kesehatan. Baik itu dari ketersediaan sarana prasarana kesehatan, SDM tenaga kesehatan dan kemampuan finansial masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan yang layak. Maka dari itu, demi menyelaraskan upaya pembangunan daerah dengan upaya pembangunan internasional, Kota Bogor dapat memperhatikan upaya peningkatan kualitas SDM dalam kaitannya pemerataan akses kesehatan dalam agenda rencana pembangunan Kota Bogor. Harapannya jika akses kesehatan merata, maka dapat timbul kesehatan yang baik.

Selanjutnya adalah transformasi ekonomi digital. Poin ini juga menjadi fokus dalam pembangunan daerah. Adanya masalah pengembangan ekonomi lokal dan UMKM, yang di mana daya saing ekonomi lokal dan UMKM tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan rendahnya penggunaan teknologi dalam lingkup tersebut. Kondisi sekarang ini dengan kemajuan zaman yang pesat, mendorong kemajuan teknologi dan penggunaannya di seluruh aspek. Pemanfaatan teknologi juga dapat mendorong daya saing ekonomi lokal dan UMKM dengan segala penyesuaiannya.

### 4.2.2 Isu Nasional

#### A. RPJPN (Indonesia Emas 2045)

Mengacu pada dokumen RPJPN 2025-2045, Pembangunan ke depan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat delapan misi (agenda) pembangunan dengan tiga transformasi Indonesia, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Tiga transformasi tersebut dijabarkan dengan 14 upaya transformatif dan enam upaya sebagai landasan transformasi yang disajikan sebagai berikut:

14 (empat belas) upaya transformatif untuk transformasi Indonesia, berdasarkan tiga aspek transformasi yaitu:

1. Transformasi Sosial

   Transformasi ini dimaksudkan dalam hal menciptakan manusia yang unggul dengan upaya

   a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1) tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar menengah).

b. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
c. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru dan tenaga medis.
d. Investasi pelayanan kesehatan primer serta penuntasan *stunting* dan penyakit terabaikan (terutama: TBC dan Kusta).
e. Pengentasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi

Tujuan transformasi ekonomi sendiri kaitannya dengan upaya mewujudkan Indonesia maju yang dapat lolos dari *middle income trap*. Transformasi ekonomi dilakukan dengan tujuh upaya.

a. Peningkatan anggaran IPTEKIN termasuk swasta dan menuju komersialisasi oleh Industri.
b. Industrialisasi hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
c. Sumber pertumbuhan ekonomi baru: ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual.
d. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi, serta transportasi hijau.
e. Super *Platform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
f. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
g. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

3. Transformasi Tata Kelola

Upaya pembangunan wilayah tidak bisa lepas dari *leading sector*-nya yakni Pemerintah. Maka dalam upaya pembangunan, selain pembangunan masyarakat juga harus berimbang dengan tata kelola yang baik di lingkup Pemerintahan. Pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik berusaha mewujudkan transformasi tata kelola dengan maksud menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif.

Transformasi tata kelola sendiri dilakukan dengan dua upaya, yaitu:

a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama *single salary* dan sistem pensiun), serta pemberantasan korupsi.
b. Penguatan sistem integritas partai politik.

Sedangkan, Enam Upaya Transformatif untuk Landasan Transformasi adalah sebagai berikut:

1. Supremasi Hukum, Stabilitas Dan Ketangguhan Diplomasi

Transformasi lembaga kepolisian menuju organisasi sipil.

a. Transformasi Industri Pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional.
b. Reformasi Perencanaan dan Fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan *fiscal rule adaptive*, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
c. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

a. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
b. Pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Untuk landasan implementasi transformasi terdiri atas tiga macam, yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan.

1. Pembangunan Ke Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Dalam rangka Pemerintah Indonesia mewujudkan dan meningkatkan pemerataan serta keadilan pembangunan melalui pelaksanaan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian karakteristik masing-masing wilayah.

2. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Sarana dan prasarana yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan wilayah, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dijadikan sebagai faktor kunci

pengembangan wilayah yang sekaligus menjadi pilar dasar pendukung perwujudan agenda transformasi.

3. Kesinambungan Pembangunan

Kesinambungan pembangunan diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan. Upaya dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi seluruh tujuan pembangunan daerah yang sejalan dalam mendukung tujuan pembangunan Nasional.

Kaitannya dengan transformasi sosial, upaya percepatan wajib belajar 13 tahun, hal ini dapat diintervensi oleh Kota Bogor karena kewenangan pendidikan SD dan SMP berada pada Kota/Kabupaten. Jika menarik masalah yang ada di Kota Bogor, masih terdapat masalah terkait pendidikan inklusif yang belum optimal. Penyelesaian masalah ini nantinya dapat mendukung upaya Pemerintah Nasional dalam transformasi sosial. Kemudian daripada itu, dukungan Kota Bogor untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 adalah mengangkat isu yang selaras dengan transformasi sosial dalam upayanya pengentasan kemiskinan. Upaya ini juga sesuai dengan tujuan dari SDGs. Di Kota Bogor sendiri untuk pengentasan kemiskinan diupayakan dalam bentuk pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan pengembangan ekonomi. Harapannya melalui hal tersebut dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya pada transformasi ekonomi, Kota Bogor memiliki isu yang selaras dengan arah pembangunan nasional yaitu pengembangan ekonomi dan penggunaan teknologi. Mendorong pelaku ekonomi seperti UMKM dan ekonomi lokal yang berdaya saing sejalan dengan upaya yang dicetuskan dalam transformasi ekonomi. Penggunaan teknologi tidak bisa dipandang sebelah mata karena kemajuan zaman. Era digital mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk berkreasi dalam menggunakan teknologi sebagai penunjang aktivitasnya.

Untuk transformasi tata kelola, Kota Bogor sebagai Pemerintah Daerah mengikuti aturan dari Nasional yang bersifat mandat. Pelaksanaan layanan dan tata kelola mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Nasional). Kaitannya dengan tata kelola, isu Kota Bogor dalam mendukung Indonesia Emas adalah dengan optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik seperti

peningkatan SAKIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general maupun yang terbaru yaitu tematik.

Dilanjutkan dengan kerangka implementasi transformasi khususnya pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana adalah satu kesatuan sehingga menjadi tindakan yang saling mendukung. Berdasarkan arah kebijakan Nasional dalam pembangunan wilayah dan sarana prasarana, khususnya dalam fokus pembangunan perkotaan terdapat beberapa arah yang ditentukan, beberapa diantaranya yaitu (i) pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan, (ii) optimalisasi lahan, terutama di daerah perkotaan dalam menyediakan hunian vertikal, (iii) peremajaan kota khususnya di wilayah metropolitan (iv) eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) diseluruh rumah tangga.

Kota Bogor dapat menyikapi arah kebijakan nasional tersebut dengan melakukan tindakan intervensi pada agenda nasional terkait pembangunan wilayah dan sarana prasarana khususnya pada pemenuhan rumah layak huni dan eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga. Upaya Kota Bogor yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor dengan mengangkat isu "Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan". Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam membentuk kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) yang diakibatkan adanya kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang langsung dibuang ke sungai sehingga menyebabkan menurunnya kualitas air sungai yang menjadi salah satu potensi air baku di Kota Bogor. Kota Bogor baru memiliki 19 kelurahan yang ODF (*Open Defecation Free*) (sumber: radarbogor.id/2023/04/14).

Selanjutnya pada upaya mendukung kesinambungan pembangunan, setiap pemerintah daerah khususnya Kota Bogor dapat menyikapi agenda ini dengan selalu menyelaraskan dan mensinkronisasi setiap pembangunan daerah yang disesuaikan dengan tujuan pembangunan Pemerintah Nasional. Hal ini dapat didukung Pemerintah Kota Bogor melalui isu yang diangkat dalam Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 Kota Bogor yaitu "Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". Walaupun pada prinsipnya sudah dilakukan dengan baik, untuk pelaksanaan kedepannya harus tetap dioptimalkan.

**B. Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi (RB) menurut Sedarmayanti (2009:72), merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas, sementara menurut KemenPAN RB pada hakikatnya reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Adapun beberapa faktor yang mendorong dilakukannya reformasi birokrasi menurut Miftah Thoha (2008:106-108) adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan melakukan pembaharuan;
2. Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional;
3. Memahami strategis yang terjadi di lingkungan global; dan
4. Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional dalam kurun waktu 2010-2025. Adapun isu reformasi birokrasi dalam paparan Oscar (2019) adalah sebagai berikut:

1. *Leadership;*
2. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi
3. Administrasi dan Kelembagaan;
4. Budaya Birokrasi;
5. Transformasi Digital;
6. Globalisasi dan TPB;
7. SDM Aparatur; dan
8. *Closed System Bureaucracy dan Silo Mentality.*

Program Birokrasi diharapkan akan mampu berdampak optimal sehingga sesuai dengan instruksi Presiden, Kementerian PANRB sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian agenda prioritas pemerintah terutama penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi membentuk program Reformasi Birokrasi Tematik sebagai salah satu strategi yang mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, formulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sebagainya. Perbedaan antara RB Tematik dengan RB General adalah sebagai berikut:

Reformasi Birokrasi Tematik:

1. RB tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
2. Melalui RB Tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam menyelesaikan setiap masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan dan administrasi pemerintah).
3. Penerapan RB Tematik akan mempercepat manfaat program pembangunan, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara cepat.

Reformasi Birokrasi General:

1. RB General mempunyai sasaran jangka panjang untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah.
2. RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah.
3. RB General mempunyai fokus pada tercapainya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN Profesional.

Kota Bogor dinilai sudah menerapkan tata kelola manajemen kepegawaian yang baik, sudah mendekati dengan Sistem Merit yang ditetapkan oleh KASN. Salah satu yang menjadi tantangan dalam pengelolaan pemerintahan di Kota Bogor adalah masalah kurangnya SDM di jajaran aparatur pemerintah daerah. Oleh karena itu, saat ini jumlah pegawai Non ASN di Kota Bogor masih cukup tinggi. Sesuai dengan mandat dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK. Oleh karena itu, ketimpangan Non ASN dan ASN harus segera diatasi agar pemerintahan dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya kebijakan penghapusan status Non ASN tersebut.

Didasarkan pada Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061/Kep.144-Org/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45-300 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat,

maka Kota Bogor menentukan tema RB tematik di Kota Bogor, sampai tahun 2024 RB Tematik di Kota Bogor difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
4. Pengendalian Inflasi;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Fokus RB Tematik yang diambil Kota Bogor ini juga menjadi salah satu dasar acuan isu strategis pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPD Kota Bogor 2025-2026. Pertama, penanggulangan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan konsep SDGs juga menjadi fokus pembangunan Kota Bogor. Persentase penduduk miskin Kota Bogor 2022 sebesar 7,10%, yang menunjukkan angka lebih kecil dibandingan dengan Jawa Barat dan Nasional. Akan tetapi, nilai ini dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga dapat mewujudkan tanpa kemiskinan seperti tujuan dari SDGs serta mendukung upaya Reformasi Birokrasi dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi baik itu dari bisnis, industri maupun perdagangan tidak akan berjalan optimal jika tidak ada dukungan investasi. Investasi sebagai sumber daya dukung keuangan memberikan pengaruh besar dalam pertumbuhan bisnis. Maka dari itu, dalam meningkatkan ekonomi daerah-pun juga harus diimbangi dengan peningkatan investasi agar pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya dapat berjalan dengan maksimal.

Fokus Reformasi Birokrasi yang ketiga yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan. Sejalan dengan perkembangan teknologi serta tujuan pemberian pelayanan yang mudah dan praktis, digitalisasi terus digencarkan pelaksanaannya. Pemerintahan yang adaptif memanfaatkan teknologi digitalisasi agar memudahkan integrasi, pelayanan yang lebih mudah karena adanya teknologi. Fokus ini juga sebagai dasar isu strategis Kota Bogor dalam perwujudan tata kelola yang baik.

Keempat, pengendalian inflasi. Hasil data *jabar.bps.go.id* (2023) laju inflasi Kota Bogor tahun 2022 meningkat daripada tiga tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, laju inflasi di 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yaitu 5,82 (Kota Bogor) dan 5,51 (Nasional). Laju inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi ekonomi suatu wilayah, salah satunya pada sektor ekonomi. Peningkatan inflasi mempengaruhi perputaran ekonomi masyarakat. Terjadinya inflasi

yang tinggi juga akan memperburuk kemiskinan. Sehingga inflasi yang tidak terkendali akan memberikan dampak buruk yang sangat luas terhadap aspek-aspek yang lain. Namun tidak dipungkiri juga inflasi yang meningkat menunjukkan peningkatan ekonomi. Maka dari itu laju inflasi khususnya Kota Bogor harus tetap dikendalikan. Terakhir yaitu penggunaan produk dalam negeri. Hal ini juga menjadi fokus yang menjadi alasan pengangkatan isu strategis Kota Bogor yaitu pengembangan ekonomi yang berdaya saing. Daya saing ekonomi khususnya produk lokal, di gempuran kemudahan kegiatan ekonomi menimbulkan dampak pada pelaku ekonomi di daerah. Mudahnya produk impor yang masuk serta persaingan harga yang kompetitif, menjadi sebab produk daerah sulit untuk bersaing. Kebiasaan masyarakat menganggap produk luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik menjadikan produk daerah kurang diminati. Adanya masalah yaitu belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal dan UMKM juga menjadi faktor penghambat.

### 4.2.3 Isu Regional

#### A. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan penelaahan faktor internal berupa permasalahan pembangunan dan kebijakan Provinsi Jawa Barat, serta penelaahan faktor eksternal yang meliputi penelaahan isu internasional, isu/kebijakan nasional, dan telaahan RPD daerah sekitar, maka dapat dirumuskan isu strategis daerah. Isu strategis merupakan hal-hal yang berdaya ungkit, bersifat penting untuk pembangunan jangka menengah, dan gambaran permasalahan atau tantangan yang akan ditangani atau dijawab, serta potensi dan peluang yang akan diambil atau dioptimalkan.

Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2026 meliputi:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
    a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.
    b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.
    c. Penurunan *stunting* dan penanganan AIDS, Tubercolosis, dan Malaria.

d. Peningkatan standar hidup layak masyarakat.
e. Percepatan Penanggulangan kemiskinan.
f. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana.
g. Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.

2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
   a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar.
   b. Penerapan UMKM dan industri hijau.
   c. Percepatan digitalisasi ekonomi.
   d. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan
   e. Pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM.
   f. Penerapan pertanian ekologis.
   g. Pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian dan perikanan.
   h. Peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha.
   i. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan.
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan
   a. Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir.
   b. Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat.
   c. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung.
   d. Penyediaan transportasi massal perkotaan.
   e. Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah.
   f. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah.
   g. Penyediaan hunian layak huni.
   h. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
   i. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
   j. Penerapan *Circular economy*.
   k. Mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan bencana.
   l. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan.

4. Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah
    a. Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
    b. Penataan dan penguatan organisasi.
    c. Deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum.
    d. Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional.
    e. Penataan tata laksana proses bisnis, dan SOP serta keterbukaan informasi.
    f. Penataan sistem manajemen SDM aparatur.
    g. Penguatan akuntabilitas.
    h. Penguatan pengawasan.
    i. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
    j. Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

**B. Isu Strategis Wilayah Sekitar (DKI Jakarta)**

Berdasarkan RPD DKI Jakarta 2023-2026, rencana pembangunan DKI Jakarta mengangkat enam isu strategis yang didasarkan pada permasalahan strategis, RPJPD 2005-2025, RTRW, RPJMN 2020-2024 dan evaluasi capaian SDGs. Enam isu strategis yang diangkat dalam pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026 yaitu:

1. Ketahanan Terhadap Bencana

    Jakarta mendorong perubahan nyata terhadap perubahan iklim yang menjadi masalah global melalui kolaborasi dan pembelajaran melalui praktik terbaik. Mitigasi dan adaptasi adalah dua cara yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk menghadapi perubahan iklim, dengan tujuan mitigasi adalah mengurangi sumber penyebab perubahan iklim, seperti mengurangi produksi $CO_2$ dan meningkatkan penyerapan $CO_2$, ataupun intervensi melalui aspek lainnya, seperti transformasi ke kendaraan ramah lingkungan moda pribadi maupun massal, mengurangi konsumsi energi pada bangunab-bangunan tinggi, serta adaptasi dalam perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi iklim untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumberdaya air serta untuk mengurangi kemungkinan bencana dikarenakan iklim seperti banjir dan rob.

2. Pemerintah Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik

   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berusaha mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik karena peran DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia, yang memiliki kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan menjadi contoh ataupun acuan bagi daerah lain dalam pelayanan publik pada masyarakat. Pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik dijalankan dengan dasar adanya reformasi birokrasi dalam tujuannya mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Prinsip efektif dan efisien menjadi aspek yang diutamakan dalam peningkatan birokrasi.

   Adanya paradigma *City 4.0* juga menjadi acuan dalam mengangkat isu pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik. Pendekatan tersebut menekankan kolaborasi antara seluruh elemen masyarakat ke pemerintah. Pemerintah akan menjadi *collaborator,* dan masyarakat menjadi *co-creator* sehingga akan memunculkan arah *bottom-up* dalam menciptakan kebijakan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi yang tidak dapat terpisahkan dari segala aspek, menuntut pemerintah harus dapat menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi ini dalam praktiknya menjadikan tata kelola yang baik.

3. Ketahanan Ekonomi Inklusif

   Dampak luas adanya pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi ekonomi salah satunya, sangat dirasakan oleh DKI Jakarta seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pendapatan. Pada tahun 2021, capaian Indeks Gini DKI Jakarta sebesar 0,411 yang naik jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 0,399. Dalam artian menunjukkan semakin rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk DKI Jakarta.

   Tidak terlepas juga dengan kemiskinan yang ada di DKI Jakarta yang masih belum dapat mengakses kebutuhan dasar dan berkesempatan hidup layak. Beberapa alasan tersebut menjadi permasalahan yang menghambat pembangunan dan stabilitas ekonomi DKI Jakarta. Sehingga perlunya mewujudkan ketahanan ekonomi inklusif diangkat menjadi isu strategis dalam upaya pembangunan DKI Jakarta kedepan.

4. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas

   DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah berbondong-bondong merantau ke Jakarta dalam upaya mendapatkan penghidupan yang lebih layak dibandingkan daerah asalnya. Jakarta juga sebagai salah satu pusat ekonomi menjadi alasan mendasar masyarakat mencari keberuntungan di Jakarta. Faktor ini menyebabkan membludaknya populasi dan tingginya urbanisasi ke DKI Jakarta. Tingginya populasi yang tidak terkendali dan adanya perilaku konsumtif masyarakat menimbulkan peningkatan jumlah sampah dan sampah tersebut akan berdampak pada lingkungan. Salah satu permasalahan ini yang menjadi acuan dalam pemilihan isu kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas. Penambahan digital dan komunitas merupakan upaya yang dilakukan kaitannya dengan seiringnya perkembangan teknologi dan pendekatan kolaborasi masyarakat dan pemerintah. Kota berkelanjutan dimaksudkan menjaga keberlangsungan daerah dari gempuran kerusakan yang terjadi sehingga dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya sebagai kota yang layak. Berbasis digital dan komunitas yaitu dengan pemanfaatan teknologi dan peran komunitas yang berkolaborasi bersama mewujudkan kota berkelanjutan tersebut.

5. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara

   Kaitannya dengan isu ini adalah Jakarta sebagai *Center of Human Development* bagi Indonesia yang membawa kontribusi positif bagi daerah lainnya dan ditandai dengan kondisi pendidikan yang secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik. Walaupun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Mewujudkan manusia sehat, berdaya saing dan setara salah merupakan upaya DKI Jakarta dalam menghadapi globalisasi. Sehingga salah satu cara yang dapat diupayakan dalam mewujudkan hal tersebut melalui pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan mampu mendorong sumber daya manusia yang berkualitas juga. Dalam pelaksanaannya harus diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, serta mengikuti perkembangan zaman dalam penggunaan teknologi. Kemudian kaitannya dengan manusia sehat, yaitu peningkatan kesehatan masyarakat baik layanan dasar yang diberikan pemerintah maupun program kesehatan lain yang

digunakan sebagai modal pembentukan manusia yang sehat. Pelayanan kesehatan harus merata dan optimal sehingga seluruh masyarakat merasakan dampak pelayanan tersebut. Kesehatan menjadi modal awal dalam menjadi manusia yang berdaya saing dan pastinya ditunjang dengan pendidikan.

6. Pemerataan Pembangunan

   Ketimpangan antar wilayah jika dilihat berdasarkan tingkat kemiskinan antar wilayah sengat kentara. Tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar 14,87% dan wilayah Administrasi Kota Jakarta Utara sebesar 6,78% tahun 2020 yang jauh dibawah tingkat kemiskinan DKI Jakarta yaitu 4,69% (RPD DKI Jakarta). Ketimpangan dari data tersebut menjadi dasar perlunya pemerataan pembangunan. Pengurangan ketimpangan difokuskan pada tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi, sehingga memerlukan penguatan peran Walikota dan Bupati sebagai koordinator dalam peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

**C. Isu Strategis Wilayah Sekitar (Kabupaten Bogor)**

Terdapat empat rancangan isu strategis dalam RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Pelayanan Publik

   Pelayanan publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor menjadi isu strategis yang tetap perlu diprioritaskan pada rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

   Dalam mendukung terciptanya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Kabupaten Bogor akan mengupayakan peningkatan kompetensi dan kualitas Aparatur Sipil Negara, peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peningkatan integrasi antar sektor.

3. Daya Saing Daerah

   Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan daya saing, yaitu dengan mendorong penyebarluasan terap hasil inovasi kepada masyarakat, penguatan infrastruktur dan kebijakan investasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Selain itu

juga mendukung penanganan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor yang mencapai peringkat tertinggi ke-3 di Provinsi Jawa Barat.

4. Pembangunan Berkelanjutan

   Mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, maka Kabupaten Bogor memerlukan penguatan kebijakan berorientasi lingkungan dan penguatan mitigasi bencana terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah memperhatikan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon.

**D. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 426/Kep/727-Kesra/2022**

Bertepatan dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:426/Kep/727-Kesra/2022 tentang Penunjukkan Daerah Kota Bogor sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026. Penunjukkan Kota Bogor sebagai tuan rumah dalam kegiatan besar menimbulkan potensi adanya aktivitas yang tinggi dalam proses menuju pelaksanaan kegiatan pekan olahraga tersebut. Kota Bogor sebagai tuan rumah pada ajang tersebut akan meningkatkan kegiatan ekonomi baik dari sektor industri maupun perdagangan. Industri yang kaitannya dengan industri tekstil dikarenakan pekan olahraga yang akan diadakan tersebut memicu minat masyarakat dalam turut serta merayakan kegiatan olahraga tersebut, sehingga kebutuhan akan produk industri tekstil seperti jersey maupun sepatu akan sangat diminati masyarakat.

Selain itu, sektor perdagangan baik dari perdagangan kuliner maupun produk-produk daerah akan menjadi tujuan dari masyarakat ketika berkunjung ke Kota Bogor khususnya dalam merayakan Pekan Olahraga Jawa Barat XV tersebut. Potensi-potensi akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat baik dari industri kecil maupun menengah. Daripada itu, sektor-sektor wisata di Kota Bogor juga akan menjadi destinasi yang dituju oleh masyarakat. Sehingga kesiapan objek-objek wisata juga harus dimaksimalkan.

Akan tetapi, diluar daripada potensi-potensi yang memberikan dampak positif. Pekan Olahraga Jawa Barat XV yang akan digelar di Kota Bogor akan menimbulkan domino yaitu munculnya PMKS dari luar daerah. Dikarenakan pola dari PMKS yaitu mencari daerah dengan keadaan yang ramai. Sehingga, tindakan antisipatif harus disiapkan dalam menghadapi dampak-dampak negatif tersebut.

## E. Isu Strategis Kota Bogor

### 1. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Masih perlunya pemerataan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan menjadi faktor yang menjadikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Salah satunya diakibatkan Kota Bogor yang masih memiliki ketimpangan layanan pendidikan dari tingkat ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, kemampuan finansial siswa untuk mendapat pendidikan yang layak. Sarana prasarana pendidikan di Kota Bogor.

Pemerataan pendidikan juga menyebabkan kualitas dan daya saing tidak meningkat. Pendidikan merupakan modal dasar dalam menambah wawasan dan kualitas diri. Sehingga, ketika masyarakat terjun dalam dunia kerja, dari kualitasnya mampu memenuhi kualifikasi dunia kerja dan memiliki produktivitas yang tinggi. Maka dari itu, dari pemerataan pendidikan untuk masyarakat dapat mengembangkan kualitas diri sehingga akan mampu meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia Kota Bogor.

Didasarkan juga pada hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2022, capaian indikator makro RPJMD Kota Bogor 2020-2024 menunjukkan bahwa salah satu indikatornya yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) masih sedikit di bawah target yang ditentukan, yaitu 77,17 dari target 77,19. Salah satu hasil ini menjadikan alasan bahwa pembangunan manusia yang belum sepenuhnya dapat dikesampingkan, sehingga munculnya isu pembangunan manusia di RPD 2025-2026 yang sebelumnya di RPJMD 2020-2024 sudah dicantumkan menjadi isu strategis.

Selanjutnya adalah peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Beberapa hal yang menyebabkan munculnya isu kesetaraan dan keadilan gender adalah hasil evaluasi RPJPD Kota Bogor terkait misinya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan sasaran pokoknya adalah meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender masih menunjukkan capaian dibawah target yang ditentukan. Pada sasaran tersebut, indikator yang digunakan ada tiga, yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup. Capaian yang menunjukkan capaian dibawah target adalah rata-rata lama sekolah, target pada periode empat RPJPD

Kota Bogor adalah 15, sedangkan capaian hingga 2022 masih berada di angka 10,63. Jika dilihat di periode ketiga, target yang ditentukan 13, akan tetapi angka capaian d akhir periode 3 yaitu 2019 adalah 10,32. Walaupun secara tingkat capaian sudah dikategorikan tinggi dan dari Indeks Pembangunan Gender berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat, isu ini masih perlu untuk terus ditingkatkan jika dilihat dari capaian yang masih dibawah target RPJPD 2005-2025. Isu ini perlu hadir lantaran isu ini adalah keinginan yang dapat dituntaskan di RPJPD periode 2005-2025, sehingga apabila isu ini secara target belum maksimal pencapaiannya, maka isu ini perlu diselesaikan dalam rencana pembangunan Kota Bogor periode selanjutnya.

**2. Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi**

Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu isu strategis di Kota Bogor. Pembangunan ekonomi menjadi isu penting pastinya untuk seluruh wilayah. Akan tetapi, di Kota Bogor sendiri isu pengembangan dan pembangunan ekonomi memang perlu ditingkatkan. Jika dilihat dari evaluasi RPJPD, yang kaitannya dengan capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi. Pada awal periode perencanaan 2005, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor adalah 6,12. Sedangkan pada kondisi di tahun 2022 memperlihatkan penurunan jika dibandingkan dengan awal periode perencanaan tersebut yaitu 5,65. Hal ini membuktikan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -0,47.

Dampak sosial yang ditimbulkan akibat pembangunan yang kurang optimal akan menyebabkan berbagai ketimpangan, salah satunya adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran serta kemiskinan. Dalam kasus angka kemiskinan, Kota Bogor telah mengalami kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2019-2022, pada tahun 2019 terendah yaitu 5,77 persen. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 6,68 persen dan sampai dengan tahun 2021 yang mencapai angka 7,24 persen, pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7,10 persen.

Dengan kondisi sumber daya manusia yang berlimpah, yang ditandai adanya angkatan kerja berusia muda dan produktif, harus diarahkan pada peningkatan kemampuan keterampilan

dalam pengolahan sumber daya potensi yang dimiliki daerah. Penyediaan penawaran tenaga kerja yang berlimpah, tanpa ada keterkaitannya dengan kebutuhan dunia usaha, tentu akan sia-sia. Salah satu yang perlu dikembangkan adalah keterkaitan dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja dengan usaha melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar, baik peralatan maupun teknologinya.

Salah satu isu yang mulai berkembang dan dihadapi oleh para pencari kerja di Kota Bogor adalah mulai sempitnya lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi tantangan bersama bagaimana akhirnya para pencari kerja harus mulai diberikan pelatihan dan bimbingan agar bisa lebih mandiri dengan berwirausaha.

Sektor lain yang perlu dikembangkan adalah sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Kota Bogor. Selain itu, ekonomi kreatif juga akan mendorong lahirnya wirausaha lokal yang dapat mengangkat keunggulan, budaya, dan karakteristik wilayah sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan memicu daya saing daerah.

**3. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi. Perencanaan pembangunan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja ditetapkan merupakan beberapa indikator yang digunakan untuk terbentuknya sebuah tata kelola pemerintah yang baik. Perencanaan pembangunan yang strategis diperlukan agar pemerintah daerah tahu terkait dengan apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, sumber daya yang diperlukan dan berapa target yang harus. Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis secara tepat terkait dengan informasi-informasi dan data-data yang diperoleh yang mana nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Evaluasi kinerja difungsikan untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan pegawai terhadap kompetensi yang telah ditetapkan dan juga untuk mengetahui terkait kendala-kendala yang

dialami pegawai sehingga nantinya bisa ditemukan penyelesaian atas kendala tersebut.

Sedangkan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Kota Bogor terkait dengan pengelolaan pemerintahan adalah terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam kaitannya dengan akuntabilitas dan peningkatan pelayanan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini yang akan membawa dampak terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, serta meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja Pemerintah Daerah. Kemudian didasarkan juga pada Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061/Kep.144-Org/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45-300 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, yang didalam keputusan tersebut berfokus pada peningkatan investasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan yang berarti pengelolaan yang baik sangat perlu untuk diupayakan lagi agar menjadi lebih baik sesuai dengan kondisi dan amanat yang ada.

**4. Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta mempedomani prioritas nasional. Infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar yang digunakan untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur bukan hanya sekedar membangun atau mengadakan kebutuhan infrastruktur tetapi juga sinkronisasi untuk terciptanya keterpaduan pengembangan infrastruktur yang melibatkan berbagai macam pihak. Isu strategis pelayanan infrastruktur yang ada di Kota Bogor, yaitu:

Pertama adalah terkait sektor bina marga yang masih kurang memadainya kapasitas jalan. Panjang jalan menurut

kondisi jalan Tahun 2022, jalan dalam keadaan rusak dan rusak ringan adalah 18.223 (m) dan 83.010 (m) (sumber: kotabogor.go.id). Kota Bogor juga memiliki daerah rawan banjir yang cukup tinggi persentasenya, hal ini dikarenakan masih kurangnya daerah resapan air dan daya tampung dari Drainase Jalan/Sungai/Situ yang ada disekitar daerah rawan banjir. Kedua, aksesibilitas transportasi di Kota Bogor termasuk terminal dan transportasi umum menjadi isu strategis di Kota Bogor. Tingginya kebutuhan transportasi moda darat juga masih belum semua teratasi baik dari aspek kenyamanan, keamanan, maupun aksesibilitasnya.

Ketiga, rumah tangga dikatakan mempunyai akses sanitasi apabila rumah tangga yang ada di Kota Bogor sudah memiliki fasilitas buang air besar (BAB) baik sendiri maupun bersama dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja (TPAT). Pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan, Adanya kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang langsung dibuang ke sungai sehingga menyebabkan menurunnya kualitas air sungai yang menjadi salah satu potensi air baku di Kota Bogor. Kota Bogor baru memiliki 19 kelurahan yang ODF (*Open Defecation Free*) (sumber: radarbogor.id/2023/04/14).

Keempat, pencemaran dan kerusakan di Kota Bogor juga menjadi isu strategis daerah, karena kondisi lingkungan hidup yang masih belum baik dan juga terkait pencemaran yang masih rendah, khususnya pada pengelolaan persampahan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah menjadi faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Bogor.

## Tabel 4.2. 4 Keterkaitan Isu Internasional, Nasional, dan Regional dengan Kota Bogor

| No | Isu-isu Strategis | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SDGs** | **WEF** | **G20** | **Indonesia Emas 2045** | **RB Tematik** | **Jawa Barat** | **DKI Jakarta** | **Kabupaten Bogor** | **Kota Bogor** |
| 1 | • Tanpa kemiskinan<br>• Tanpa kelaparan<br>• Kehidupan sehat dan sejahtera<br>• Pendidikan berkualitas<br>• Kesetaraan gender<br>• Berkurangnya kesenjangan | - | Kesehatan global | Transformasi sosial | Penanggulangan kemiskinan | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Manusia sehat, berdaya saing dan setara | Daya saing daerah | • Pembangunan manusia yang berdaya saing<br>• Pemerataan akses, mutu, dan layanan pendidikan dan kesehatan<br>• Iklim ketenagakerjaan yang kompetitif |
| 2 | • Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi<br>• Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab<br>• Kemitraan untuk mencapai tujuan | Lonjakan inflasi | Transformasi ekonomi digital | Transformasi ekonomi | • Penanggulangan kemiskinan<br>• Peningkatan investasi<br>• Pengendalian inflasi<br>• Peningkatan penggunaan produk dalam negeri | Pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan | ketahanan ekonomi inklusif | • Daya saing daerah<br>• Pembangunan berkelanjutan | Pembinaan dan pengembangan daya saing ekonomi dan pengembangan potensi ekonomi lokal |
| 3 | • Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh | Ketimpangan digital | - | Transformasi tata kelola | digitalisasi administrasi pemerintahan | Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta reformasi birokrasi | • Pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik<br>• Kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas | • Pelayanan publik<br>• Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah | Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik |

| No | Isu-isu Strategis | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SDGs** | **WEF** | **G20** | **Indonesia Emas 2045** | **RB Tematik** | **Jawa Barat** | **DKI Jakarta** | **Kabupaten Bogor** | **Kota Bogor** |
| 4 | • Air bersih dan sanitasi layak<br>• Energi bersih dan terjangkau<br>• Industri, inovasi, dan infrastruktur<br>• Kota dan permukiman yang berkenajutan<br>• Penanganan perubahan iklim<br>• Ekosistem lautan<br>• Ekosistem daratan | - | - | Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan | - | Pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan | Pemerataan pembangunan | • Pelayanan publik<br>• Daya saing daerah<br>• Pembangunan berkelanjutan | Pemenuhan dan pemerataan pelayanan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengembangan potensi daerah |
| 5 | | - | - | Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan | - | | | | |
| 6 | | - | - | Kesinambungan pembangunan | - | | | | |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

Jika menyandingkan isu-isu strategis dari tingkat internasional, nasional hingga regional, isu yang diangkat Kota Bogor memperlihatkan keselarasan. Pertama, kaitannya dengan pembangunan manusia. Hal ini menjadi fokus yang selalu dikembangan di empat daerah di atas dan pastinya di beberapa daerah lainnya. Tujuan ini selaras dengan arah tujuan pembangunan jangka panjang nasional dalam menghadapi bonus demografi serta menuju Indonesia Emas. Kota Bogor mengangkat isu pertama ini sebagai pembentukan pilar pembangunan, di mana sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing akan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.

Kedua adalah pengembangan ekonomi. Empat wilayah berfokus dalam mengembangkan ekonomi. Setelah terdampak *Covid-19,* seluruh daerah mencoba pulih dari keterpurukan. Pengoptimalan peran ekonomi daerah dan UMKM juga menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, Kota Bogor mengangkat isu pengembangan daya saing ekonomi mengupayakan peningkatan peran UMKM dan ekonomi lokal dalam upaya bersama mewujudkan ekonomi yang lebih baik. Era globalisasi dan perkembangan digitalisasi mengharuskan pelaku ekonomi beradaptasi dengan hal tersebut. Perdagangan bebas di era sekarang ini tidak terbatas pada skala nasional, melainkan sudah pada lingkup internasional. Maka dari itu, perlunya ekonomi yang berdaya saing adalah kaitannya dengan kemampuan ekonomi daerah dalam bersaing dengan pelaku ekonomi dari luar.

Isu ketiga yaitu pembangunan wilayah yang kaitannya dengan infrastruktur. Pembangunan yang lebih baik harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Ketimpangan maupun ketidakmerataan infrastruktur yang tersedia di setiap daerah membuat tidak semua masyarakat dapat menikmati layanan tersebut. Maka dari itu perlu adanya pemerataan dan pembangunan wilayah, salah satunya terhadap infrastruktur sebagai sarana masyarakat dalam meningkatkan kehidupannya.

Terakhir, kaitannya dengan internal pemerintah sebagai *leading sector* pembangunan daerah harus selalu berbenah dan meningkatkan kualitasnya. Adanya reformasi birokrasi dan SAKIP yang disusun Pemerintah Pusat yaitu Negara Indonesia menjadi arahan bagi pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan internalnya. Arahan tersebut bertujuan dalam mewujudkan

pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel. Sehingga meningkatnya birokrasi akan berdampak pada pembangunan yang lebih baik pula.

## F. Telaah Kebijakan RTRW Kota Bogor

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.

**Tabel 4.2. 5 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang**

| Kebijakan | Strategi |
|---|---|
| Pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi | Strategi pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi meliputi:<br>1. Peningkatan peran Daerah Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang skala regional. pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya;<br>2. Penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;<br>3. Penetapan dan pemantapan kawasan lindung; dan<br>4. Pengembangan kegiatan budi daya secara terpadu serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan |
| Mengembangkan 4 (empat) Wilayah Pelayanan selain Pusat Kota, sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota | Strategi mengembangkan 4 (empat) WP sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota meliputi:<br>1. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta kawasan wisata pada WP Pasima sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang serta keberadaan Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan lindung lainnya;<br>2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Utara;<br>3. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Purwa; dan<br>4. Pengembangan kegiatan agribisnis, perumahan, serta kegiatan jasa sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Daksina |
| Mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan | Strategi mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan meliputi:<br>1. Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor; dan<br>2. Revitalisasi PPK dengan tetap memperhatikan fungsi, identitas, dan karakter Daerah Kota sebagai Kota Pusaka |
| Pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu | Strategi pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu meliputi:<br>1. Perwujudan pusat pertumbuhan baru sub PPK Pasima melalui pengembangan kawasan campuran;<br>2. Perwujudan Sub PPK Utara sebagai kawasan perkotaan baru melalui pengembangan koridor pusat yang terpadu;<br>3. Perwujudan Sub PPK Purwa sebagai salah satu gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran; dan<br>4. Perwujudan sub PPK Daksina sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan campuran |
| Pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada Masyarakat | Strategi pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan melalui mengembangkan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya |
| Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK, maupun PL | Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor meliputi: |

| Kebijakan | Strategi |
|---|---|
| dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor | 1. Sinergitas sistem jaringan jalan antara Daerah Kota dengan Kabupaten Bogor;<br>2. Peningkatan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar PPK, Sub PPK, dan PL;<br>3. Pengembangan jalan lingkar dan jalan tembus;<br>4. Peningkatan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya PPK, Sub PPK, dan PL;<br>5. Pengembangan sistem transportasi massal berbasis rel dan berbasis jalan;<br>6. Pengembangan sistem pengelolaan lalu lintas;<br>7. Pengembangan sistem jaringan lintas barang dari dan keluar Daerah Kota;<br>8. Pengembangan terminal penumpang dan angkutan barang;<br>9. Pengembangan konsep TOD pada titik pertemuan antar moda; dan<br>10. Pengembangan sistem jaringan pejalan kaki dan sistem jaringan perkotaan lainnya |
| Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum; | Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum lainnya meliputi:<br>1. Pendistribusian sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;<br>2. Melengkapi perumahan eksisting dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai standar minimal yang ditetapkan;<br>3. Pengembangan jaringan energi listrik dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;<br>4. Pengembangan jaringan gas;<br>5. Pengembangan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih belum terjangkau;<br>6. Pengembangan jaringan sumber daya air;<br>7. Pengembangan sistem jaringan air minum;<br>8. Peningkatan sistem pengelolaan air limbah;<br>9. Peningkatan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;<br>10. Peningkatan sistem jaringan persampahan Daerah Kota;<br>11. Peningkatan dan mengembangkan sistem drainase; dan<br>12. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana |
| Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung | Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi:<br>1. menetapkan kawasan berfungsi lindung;<br>2. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah;<br>3. merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi; dan<br>4. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung |
| Pelestarian kawasan cagar budaya | Strategi pelestarian kawasan cagar budaya meliputi:<br>1. Penetapan kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya;<br>2. Peningkatan nilai kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya; dan<br>3. Pengembangan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah |
| Peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota | Strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota meliputi:<br>1. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;<br>2. Pengembalian RTH yang telah beralih fungsi;<br>3. Peningkatan ketersediaan RTH melalui bank tanah (*landbanking*); dan<br>4. Pengembangan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH |
| Pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan | Strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:<br>1. Mengarahkan kawasan terbangun dengan intensitas kepadatan rendah, sedang, tinggi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;<br>2. Pengendalian pengembangan kawasan PPK;<br>3. Optimalisasi pengembangan Sub PPK; dan<br>4. Pembatasan pengembangan kawasan industri |
| Pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan | Strategi pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan meliputi:<br>1. Penetapan delineasi pengembangan kawasan dan/atau fungsi khusus, antara lain kawasan TOD, kawasan wisata ilmu pengetahuan, dan kawasan khusus lainnya;<br>2. Pengembangan kawasan budi daya terbangun secara vertikal pada sebagian PPK dan Sub PPK, kawasan atau bangunan fungsi campuran, superblok dan kawasan TOD; dan<br>3. Pengembangan ruang-ruang kawasan yang kompak, efisien, dan berkelanjutan |
| Pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan | Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan adalah:<br>1. Mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan lingkungan; dan<br>2. Penataan kawasan KSK dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan |

| Kebijakan | Strategi |
|---|---|
| Pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya | Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya adalah:<br>1. Mempertahankan, melindungi, dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan sosial budaya;<br>2. Mempertahankan nilai sejarah kawasan;<br>3. Penataan kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya; dan<br>4. Pengembangan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata |
| Pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi | Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi adalah:<br>1. Pengembangan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan ekonomi;<br>2. Penataan kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi;<br>3. Pengembangan kawasan tematik; dan<br>4. Integrasi konsep guna campuran, *superblock*, dan TOD dengan kegiatan ekonomi |

*Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031*

Berdasarkan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor, pengembangan dan pembangunan wilayah Kota Bogor sudah ditentukan, sehingga dalam rangka pembangunan Daerah di tiap periodenya dapat didasarkan pada aturan RTRW yang berlaku. khususnya dalam turunan dokumen perencanaan yang salah satunya yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor 2025-2026 tetap berpedoman pada RTRW yang sudah ditentukan. Kaitannya dengan hal tersebut, fokus pembangunan yang ditetapkan yang diangkat dari isu strategis RPD Kota Bogor 2025-2026 disandingkan dengan RTRW dalam upaya untuk menyelaraskan pembangunan Kota Bogor. Isu strategis yang diangkat, salah satunya yaitu pemenuhan dan pemerataan pelayanan infrastruktur yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan dalam RTRW seperti peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK, maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor dan Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum melalui strategi-strategi yang sudah ditentukan juga.

Selanjutnya kaitannya dengan isu strategis yang diangkat dalam RPD Kota Bogor 2025-2026 dengan pembinaan dan pengembangan daya saing ekonomi melalui kebijakan pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi yang dapat dimaksimalkan melalui penentuan lokasi-lokasi kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sehingga tetap selaras dan dicapai secara maksimal oleh Pemerintah Kota Bogor.

## Tabel 4.2. 6 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota Bogor

| Kawasan Strategis | Lokasi |
|---|---|
| **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** | |
| Kawasan Pasar Kebun Kembang dan sekitarnya | Kawasan Pasar Kebon Kembang, Kawasan perdagangan di Jalan MA Salmun, Jalan Mayor Oking, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Merdeka |
| Kawasan TOD dan Sub PPK | . Kawasan TOD Skala Regional/Kota di Kawasan Stasiun Bogor dan Kawasan Terminal Baranangsiang;<br>a. Kawasan TOD skala sub kota di Sukaresmi, Tanah Baru, Mulyaharja, dan Kertamaya; dan<br>b. Kawasan Sub PPK WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, dan WP Daksina |
| **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya** | |
| Kawasan Pusaka Bogor | Kawasan Batututulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana |
| **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** | |
| Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup | Kawasan Hutan Penelitian Dramaga, kawasan Kebun Raya dan Istana Bogor, kawasan Situ Gede, kawasan Sungai Cisadane, dan kawasan Sungai Ciliwung. |

*Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031*

# BAB V
# TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026 secara khusus disajikan pada bagian ini. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), namun secara khusus indikator yang pada bagian ini merupakan alat ukur pencapaian kinerja hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Penentuan indikator berfungsi untuk memberikan batasan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Perumusan tujuan, sasaran, dan indikator merupakan tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2025-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kota Bogor merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025.

## 5.1 Visi dan Misi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025

Periode penyusunan RPD Kota Bogor 2025-2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJPD Kota Bogor 2005-2025, yang merupakan tahap Usaha Peningkatan Berkelanjutan. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bogor periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam dalam RPJPD Kota Bogor 2005-2025 adalah:

***"Kota Jasa yang Nyaman dengan masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah"***

Berikut merupakan penjabaran dari visi Kota Bogor di atas:

1. Kota Jasa mengandung pengertian bahwa Kota Bogor menjadi pusat jasa dalam pengertian pelayanan (*services*) dan sektor ekonomi tersier (*economic activities*). Kota Bogor akan diarahkan untuk menjadi suatu kota yang aktivitas masyarakatnya bergerak terutama di sektor jasa. Sektor jasa merupakan sektor yang mendukung bagi berkembangnya aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat baik aktivitas budaya, ekonomi, penataan fisik kota, maupun penanganan masalah kota. Sektor ini perlu diprioritaskan untuk mendorong perekonomian Kota Bogor, terutama pada sub sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa-jasa lainnya.
2. Nyaman berarti bahwa Kota Bogor diharapkan menjadi kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan.
3. Masyarakat madani berarti bahwa masyarakat Kota Bogor harus memiliki derajat kualitas kehidupan yang tinggi baik dari segi

keimanan, pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang tercermin dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*).

4. Pemerintahan amanah yaitu pemerintahan yang baik yang senantiasa mengacu kepada kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik yang prima di segala bidang serta terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bogor.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada adalah pembangunan diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi rakyat yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengembangan sektor jasa agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, adalah pembangunan diarahkan kepada penampilan kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkan untuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat kota dapat merasakan kenyamanan kotanya.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera adalah pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kota Bogor memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang memadai agar mampu menjadi masyarakat mandiri.
4. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum, adalah penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan otonomi daerah

yang nyata dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat disertai penegakan supremasi hukum.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan.

## 5.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, Pemerintah Kota Bogor merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026. Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dan berdasarkan pada analisis Arah Kebijakan RPJPD Tahap IV serta memperhatikan isu strategis Kota Bogor, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan RPD Kota Bogor 2025-2026 sebagai berikut:

## Tabel 5.2 1 Perumusan Tujuan RPD Kota Bogor 2025-2026

| Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 | Arah Pembangunan | Indikator Tahun 2020-2024 | Isu Strategis | Tujuan RPD Tahun 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|
| Mengembangkan Perekonomian Masyarakat dengan Titik Berat Pada Jasa yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya yang Ada | Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal agar berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global | • Memantapkan sektor tersier sebagai sektor unggulan<br>• PDRB Rp.7.849.788,64 (juta)<br>• Indeks Daya Beli 74,12 | Pengembangan daya saing ekonomi | Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan |
| | Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada | Terpeliharanya peningkatan jejaring antar wilayah sentra ekonomi, secara fisik, pemodalan dan inovasi | | |
| | Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, meningkatkan daya saing, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi daerah | • Pengelolaan dan pemanfaatan pusat bisnis<br>• Peningkatan promosi dan pemasaran pusat bisnis | | |
| | Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui regulasi perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur sebagai penunjang investasi | • Pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi<br>• Mempertahankan iklim investasi yang kondusif<br>• Terciptanya dan tersedianya paket-paket insentif bersaing bagi investasi<br>• Peningkatan promosi investasi, agar Kota Bogor menjadi salah satu tujuan investor | | |
| | Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal | Penerapan pengelolaan tenaga kerja secara madani oleh pemberi kerja | | |

| Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 | Arah Pembangunan | Indikator Tahun 2020-2024 | Isu Strategis | Tujuan RPD Tahun 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|
| | Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia | • Pelatihan ketrampilan, kewirausahaan dan peningkatan produktivitas<br>• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja<br>• Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui standarisasi dan sertifikasi.<br>• Meningkatkan Pembinaan lembaga pelatihan swasta dan pemerintah | | |
| | Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan | Menjaga tingkat ketahanan pangan serta pemantapan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkelanjutan | | |
| | Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya saing industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas | • Pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar dalam negeri<br>• Pengelolaan wilayah industri yang berwawasan lingkungan | | |
| | Di sektor tersier diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor terutama jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa-jasa lainnya | Terpeliharanya keberlanjutan kawasan Bisnis dan perdagangan | | |
| | Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi wisata yang ada | Penciptaan dan pelestarian kesan dan citra Bogor sebagai tempat nyaman untuk beraktivitas | | |
| | Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis iptek dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk memperkuat perekonomian lokal. Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang berorientasi | • Memantapkan keterlibatan swasta melalui CSR untuk mendukung pengembangan ekonomi UMKM<br>• Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pasar | | |

| Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 | Arah Pembangunan | Indikator Tahun 2020-2024 | Isu Strategis | Tujuan RPD Tahun 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|
| | terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil serta inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat | | | |
| Mewujudkan Kota yang Bersih, Indah, Tertib dan Aman (Beriman) dengan Sarana Prasarana Perkotaan yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan | Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan melalui penataan ruang dan pertanahan yang terintegrasi secara nasional, regional, maupun lokal menuju kota metropolitan yang nyaman | Pengendalian dan pemutakhiran tata ruang terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan | Pemenuhan dan pemerataan pelayanan infrastruktur yang berkelanjutan | Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah |
| | Mewujudkan penataan kota secara menyeluruh untuk membentuk wajah dan lingkungan kota yang beridentitas dan berbudaya yang mendukung kenyamanan dan daya tarik wisata | Pemantapan penataan kota yang beridentitas dan berbudaya | | |
| | Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung aksesibilitas kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui penyelenggaraan transportasi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta bersinergi dengan tata ruang | • Pemantapan angkutan umum<br>• Pemantapan rekayasa lalu lintas | | |
| | Mewujudkan kelestarian sistem ekologi kota yang memperhatikan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan serta pengamanan kota dari bencana melalui perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terintegrasi secara regional | • Pemantapan ruang terbuka hijau<br>• Perlindungan kawasan resapan air<br>• Penataan bantaran sungai | | |
| | Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui pembangunan perumahan permukiman yang sehat dengan mengutamakan pembangunan secara vertikal dan memperhatikan daya dukung lahan, konservasi sumber daya air serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang memadai | • Pengembangan jaringan masyarakat dalam pengelolaan PSD permukiman<br>• Perwujudan lingkungan permukiman yang berkualitas<br>• Pengelolaan dan pengembangan rusun | | |
| | Mewujudkan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana informasi telekomunikasi modern untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kegiatan perkotaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan. Integrasi jaringan utilitas kota dilakukan secara terpadu | • Pemantapan layanan dan kualitas air minum<br>• Keterpaduan jaringan utilitas | | |
| | Meningkatkan sistem layanan persampahan melalui modernisasi pengolahan dan peningkatan partisipasi masyarakat | • Pemantapan layanan dan kualitas air minum<br>• Keterpaduan jaringan utilitas | | |

| Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 | Arah Pembangunan | Indikator Tahun 2020-2024 | Isu Strategis | Tujuan RPD Tahun 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|
| | Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum dalam mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman | Pemantapan partisipasi swasta dalam investasi infrastruktur | | |
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berketerampilan, Sehat Cerdas dan Sejahtera | Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) | IPM Kota Bogor 86,85 | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing |
| | Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas | Jumlah Penduduk 1.500.000 LPP 2% | | |
| | Terciptanya sistem administrasi kependudukan yang tertib guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bogor, serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial | Pemantapan sistem administrasi kependudukan | | |
| | Pembangunan pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya pendidikan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas berketrampilan dan berdaya saing dengan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau | • Bebas buta huruf<br>• RLS 15,00<br>• Peningkatan kualitas lulusan pendidikan non formal | | |
| | Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus terhadap ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin | AHH 79,5 | | |
| | Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian disertai peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat | Terwujudnya peningkatan pembiayaan, pembinaan, pengawasan pengendalian dan Penilaian dalam pelayanan kesehatan serta pemantapan kemandirian masyarakat | | |
| | Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku yang bermoral | Pemantapan Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat | | |

| Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 | Arah Pembangunan | Indikator Tahun 2020-2024 | Isu Strategis | Tujuan RPD Tahun 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|
| | Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial | Pelayanan Sosial 34,86% | | |
| | Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak anak-anak yang dilaksanakan secara integral lintas sektor dan lintas wilayah | Menurunnya Jumlah Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan 0% | | |
| | Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat | Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak 40% | | |
| | Pembangunan daerah harus memperhatikan pengarusutamaan gender yaitu setiap kebijakan publik haruslah memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki | Pemantapan kebijakan publik yang memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki | | |
| | Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan dan partisipasi pemuda di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik serta memiliki wawasan kebangsaan | • Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan 100%<br>• Pengembangan nilai-nilai budaya lokal. | | |
| | Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga dan budaya olahraga di kalangan masyarakat | Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga 40% | | |
| Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Effisien serta Menjunjung Tinggi Supremasi | Memantapkan dan mendukung proses demokrasi secara berkelanjutan pada berbagai aspek, yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan pembangunan Kota Bogor | Pemantapan dan penguatan pemahaman partisipasi politik masyarakat yang demokratis | Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan |
| | Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang amanah pada semua tingkat pemerintahan serta mendekatkan pola pelayanan masyarakat yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima | Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima kepada masyarakat | | |

| Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 | Arah Pembangunan | Indikator Tahun 2020-2024 | Isu Strategis | Tujuan RPD Tahun 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hukum | Terwujudnya kualitas masyarakat dan aparatur yang mempunyai kesadaran hukum dan menjunjung tinggi hukum serta memperkuat penegakan hukum tanpa diskriminatif dengan sanksi hukum yang tegas | • Pemantapan budaya hukum masyarakat dengan tersedianya produk hukum daerah yang responsif<br>• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penegakan hukum<br>• Peningkatan kompetensi aparatur | | |
| | Memperkuat peran serta masyarakat melalui bentuk kelembagaan yang lebih efisien dan efektif | Pemantapan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan | | |
| | Terwujudnya sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan | Pemantapan sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan | | |
| | Memantapkan peran media massa yang profesional melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan bertanggungjawab dengan menjadikan media massa sebagai alat kontrol atas pemenuhan kepentingan publik | Pemantapan peran Media yang profesional dan bertanggungjawab sebagai alat kontrol | | |
| | Terciptanya kesetaraan gender dalam segala aspek tatanan kehidupan | Pemantapan program, anggaran, kerjasama yang berbasis gender | | |

*Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025*

Pelaksanaan dan pencapaian RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan amanah melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Bidang sosial dan budaya fokus sasaran utama pada bidang pendidikan diarahkan pada penuntasan program wajib belajar 15 (lima belas) tahun. Pemantapan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB), serta ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemantapan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap merupakan sasaran prioritas. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui rekrutmen tenaga pendidik dan pelatihan terus dilaksanakan.

Bidang ekonomi tetap menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian jasa layanan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya dengan telah terbangunnya kemitraan kelompok-kelompok perekonomian antar wilayah yang telah dicapai pada RPJM ke-3 (tiga), peningkatan perekonomian wilayah di Kota Bogor dititikberatkan pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan jejaring sentra ekonomi baik lokal maupun antar wilayah dengan penerapan pengelolaan sumber daya manusia yang madani sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di sektor pariwisata, pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata diarahkan pada pengembangan destinasi pariwisata serta pemantapan pelestarian kesan dan citra Kota Bogor sebagai tempat yang nyaman untuk beraktivitas. Sektor KUMKM diarahkan pada pemantapan jaringan kelembagaan untuk mengatasi persaingan global melalui kemitraan yang bersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan oleh semua komponen yang terkait. Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, dalam tahap ini diupayakan pada peningkatan pemasaran prospek investasi dan pemantapan regulasi di bidang investasi.

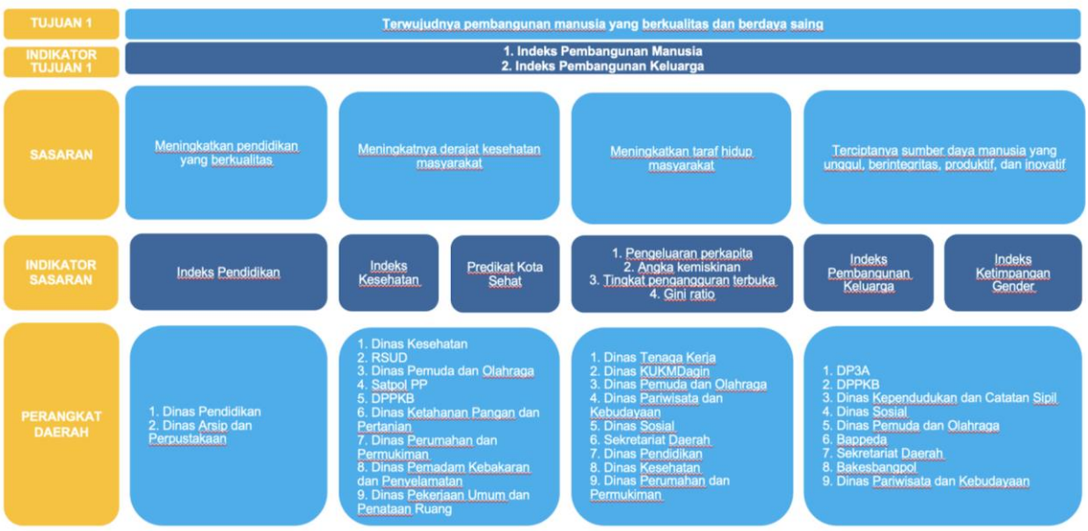
Bidang fisik dan prasarana, pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah. Pengembangan infrastruktur transportasi jalan pada tahap ini ditandai dengan peningkatan kuantitas, kemantapan infrastruktur yang telah ada serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pembangunan infrastruktur transportasi terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dengan

pola penanganan yang terpadu antara lain dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya. Pengembangan seluruh sistem jaringan utilitas kota diarahkan pada sistem terpadu dengan konstruksi ducting system. Sistem ini akan meningkatkan keamanan jaringan utilitas serta meningkatkan kualitas estetika kota. Perencanaan tata ruang kota akan selalu memprioritaskan kawasan-kawasan yang harus diselamatkan seperti kawasan lindung serta kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana. Kawasan-kawasan tersebut tetap dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak terbangun. Selain itu kawasan budaya peninggalan masa lalu (Cagar budaya) baik berupa bangunan maupun situs perlu dilestarikan. Dalam upaya pencegahan degradasi lingkungan, dilakukan peningkatan kuantitas resapan limpahan air permukaan dalam upaya mengembalikan kandungan air tanah dan mengendalikan daya tampung sungai seiring dengan meningkatnya luas lahan terbangun. Mengembalikan fungsi konservasi kawasan bantaran sungai, perlindungan mata air, sumur resapan dan pengalokasian ruang terbuka hijau (RTH) kota rpd dilakukan secara bertahap dengan pendekatan partisipatif. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pada sarana prasarana air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana prasarana telekomunikasi terus ditingkatkan guna meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan bidang hukum diarahkan pada pemantapan penerapan produk hukum dan penegakan hukum. Pada tahap ini, selain mewujudkan harmonisasi produk hukum juga dilakukan perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat, penguasaan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. Pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada pemantapan profesionalisme aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan. Peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan diorientasikan pada pengembangan pelayanan organisasi pemerintahan. Pembangunan bidang politik diarahkan pada pemantapan pelaksanaan proses demokrasi politik, membangun kemandirian organisasi politik serta pemantapan masyarakat madani. Pada tahapan ini dilakukan upaya perluasan akses masyarakat dalam partisipasi politik melalui kelembagaan.

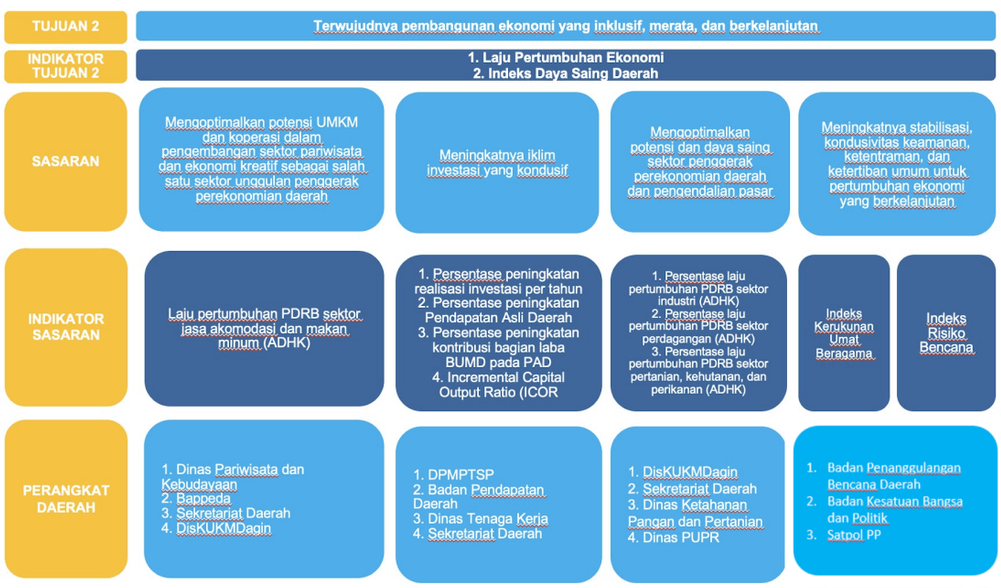
Secara lengkap cascading tujuan dan sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 5.2. 1 Tujuan 1 RPD Kota Bogor 2025-2026**




*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

**Gambar 5.2. 2 Tujuan 2 RPD Kota Bogor 2025-2026**



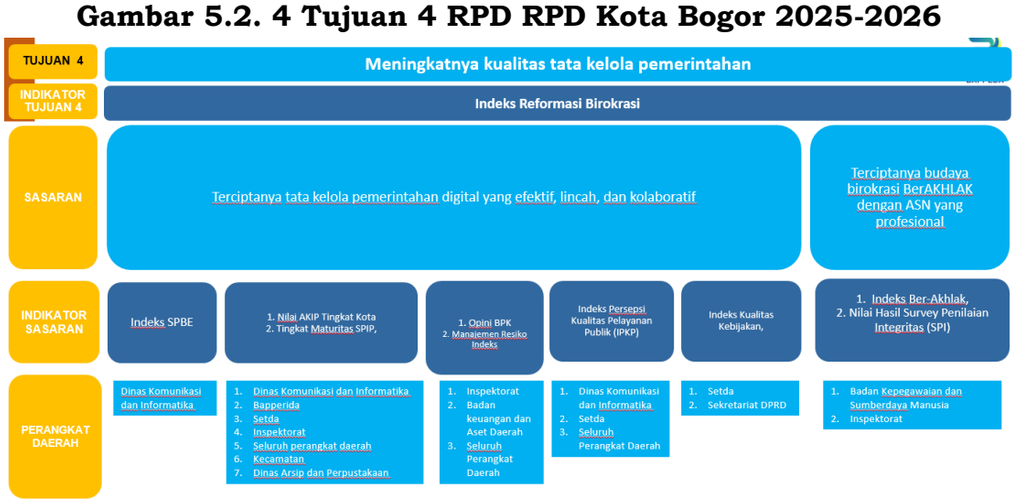

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

**Gambar 5.2. 3 Tujuan 3 RPD RPD Kota Bogor 2025-2026**




*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

**Gambar 5.2. 4 Tujuan 4 RPD RPD Kota Bogor 2025-2026**




*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

Penetapan tujuan dan sasaran RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 dari gambar di atas merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan yang sekaligus menggambarkan kemajuan pembangunan daerah baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Penentuan target indikator makro memperhatikan pencapaian indikator makro sampai dengan tahun 2023, rata-rata pertumbuhan dari masing-masing indikator serta kecenderungan pencapaian jika dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

## Tabel 5.2 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | |
| **1.** | **Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing** | | **Indeks Pembangunan Manusia** | **Indeks** | **77,85** | **78,7** | **79,35** | **79,35** |
| | | | **Indeks Pembangunan Keluarga** | **Indeks** | **61,81** | **61,98** | **62,08** | **62,08** |
| 1.1 | | Meningkatnya kualitas pendidikan | Indeks Pendidikan | Indeks | 72,74 | 76,17 | 77,19 | 77,19 |
| 1.2 | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | Indeks | 83,28 | 83,74 | 83,88 | 83,88 |
| | | | Predikat Kota Sehat | Predikat | Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi) | Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi) | Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi) | Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi) |
| 1.3 | | Meningkatnya taraf hidup masyarakat | Pengeluaran Per Kapita | Angka | 12.656 | 12.700 | 12.750 | 12.750 |
| | | | Angka Kemiskinan | Angka | 6,67 | 6,05 | 5,9 | 5,9 |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persentase | 9,39 | 8,11 | 7,96 | 7,96 |
| | | | Gini Ratio | Rasio | 0,464 | 0,43 | 0,41 | 0,41 |
| 1.4 | | Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 61,81 | 61,98 | 62,08 | 62,08 |
| | | | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0,434 | 0,419 | 0,414 | 0,414 |
| **2.** | **Terwujudnya pembangunan ekonomi yang** | | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **Persentase** | **5,1** | **5,3** | **5,5** | **5,5** |
| | | | **Indeks Daya Saing Daerah** | **Indeks** | **3,42 (Tinggi)** | **3,55 (Tinggi)** | **3,75 (Tinggi)** | **3,75 (Tinggi)** |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | |
| 2.1 | **inklusif, merata, dan berkelanjutan** | Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah | Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) | Persentase | 5,26 | 6,14 | 7,74 | 7,74 |
| 2.2 | | Meningkatnya iklim investasi yang kondusif | Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun | Persentase | 20,94 | 21,25 | 21,88 | 21,88 |
| | | | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Persentase | 16,57 | 12,33 | 17,43 | 17,43 |
| | | | Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD | Persentase | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| | | | Incremental Capital Output Ratio (ICOR) | Rasio | 6 | 6 | 5,9 | 5,9 |
| 2.3 | | Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK) | Persentase | 3,96 | 4,5 | 5 | 5 |
| | | | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK) | Persentase | 3,73 | 3,79 | 4 | 4 |
| | | | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK) | Persentase | 3,20 | 3,89 | 4,42 | 4,42 |
| 2.4 | | Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 79,98 | 80 | 80,09 | 80,09 |
| | | | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 63,49 | 65 | 65 | 65 |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | |
| **3.** | **Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah** | | **Indeks Infrastruktur Pilar IDSD** | **Indeks** | **2,15** | **2,25** | **2,35** | **2,35** |
| 3.1 | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal | Persentase realisasi capaian kinerja penataan rang | Persentase | 48 | 60 | 65 | 65 |
| | | | Volume to Capacity Ratio | Rasio | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 |
| | | | Rasio konektivitas | Rasio | 0,78 | 0,79 | 0,8 | 0,8 |
| 3.2 | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 58,4 | 57,84 | 58,09 | 58,09 |
| **4.** | **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan** | Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Indeks** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| 4.1 | | | Indeks SPBE | Indeks | 3,72 | 3,75 | 3,8 | 3,8 |
| | | | Nilai AKIP Tingkat Kota | Skor | BB (76,23) | A | A | A |
| | | | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | Tingkat Maturitas SPIP | Predikat | Level 3 (3,296) | Level 3 (3,326) | Level 3 (3,356) | Level 3 (3,356) |
| | | | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) | Indeks | 97,23 | 98 | 98,5 | 98,5 |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | |
| | | | Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks | 65 | 70 | 70 | 70 |
| | | | Indeks Manajemen Risiko (MRI) | Indeks | Level 3 (3,045) | Level 3 (3,055) | Level 3 (3,06) | Level 3 (3,06) |
| 4.2 | | Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional | Indeks Ber-Akhlak | Indeks | 60,5 | 62,5 | 62,7 | 62,7 |
| | | | Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata-rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat | Skor | 71,29 | 72 | 72,72 | 72,72 |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

**Tabel 5.2 3 Keterkaitan Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026**

| Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 | | Sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Meningkatnya akses pendidikan Masyarakat | 1.1 | Meningkatnya kualitas pendidikan |
| 1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1.2 | Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat |
| 1.3 | Meningkatnya taraf hidup masyarakat | 1.3 | Meningkatnya taraf hidup masyarakat |
| 1.4 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda | 1.4 | Terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif |
| 1.5 | Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk | 1.4 | Terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif |
| 2.1 | Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan | 2.3. | Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar |
| 2.2 | Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan | 2.3. | Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar |
| 2.3 | Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum | 2.1 | Optimalisasi potensi UMKM dan Koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah |
| 2.4 | Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja | 2.2 | Meningkatnya iklim investasi yang kondusif |
| 3.1 | Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur | 3.1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal |
| 3.2 | Meningkatnya kualitas infrastruktur | 3.1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal |
| 3.3 | Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman | 1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| 3.4 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 3.2 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan |
| 3.5 | Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana | 3.2 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan |
| 3.6 | Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan | - | - |
| 4.1 | Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi | 1.4 | Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif |
| 4.2. | Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah | 4.1 | Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif |
| 4.3 | Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan | 4.2 | Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

Dalam proses penyusunannya RPD Kota Bogor memiliki keselarasan dengan RPD Jawa Barat, keselarasan penyusunan dokumen perencanaan ini merupakan upaya dalam mendukung program daerah Jawa Barat dalam usaha menjadikan daerah Jawa Barat semakin meningkat pembangunan baik pembangunan manusia maupun pembangunan infrastruktur. Sasaran RPD Jawa Barat yang selaras dengan dengan RPD Kota Bogor seperti tabel di atas berjumlah

18 Indikator. Indikator tersebut merupakan indikator makro yang bertujuan untuk akselerasi pembangunan. Indikator yang pertama adalah di RPD Jawa Barat adalah Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat sedangkan di RPD Kota Bogor adalah Meningkatnya Kualitas pendidikan. Keselarasan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor berkomitmen dalam mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam usaha memajukan pendidikan. Sehingga dalam dokumen perencanaan ini, Pemerintah Kota Bogor memunculkan isu pendidikan sebagai salah satu isu strategis dalam perencanaan untuk tahun 2025 dan 2026.

Indikator yang kedua yang selaras antara RPD Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bogor adalah dalam aspek kesehatan. Dalam RPD Jawa Barat indikatornya adalah Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat sedangkan di Kota Bogor juga memiliki indikator yang sama yakni meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Aspek kesehatan juga menjadi isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan dalam RPD Tahun 2025 dan 2026, hal ini karena aspek kesehatan menjadi salah satu indikator dalam Angka Harapan Hidup. Masih perlunya pemerataan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan menjadi faktor yang menjadikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Salah satunya diakibatkan Kota Bogor yang masih memiliki ketimpangan layanan pendidikan dari tingkat ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, kemampuan finansial siswa untuk mendapat pendidikan yang layak. Sarana prasarana pendidikan di Kota Bogor.

Pemerataan pendidikan juga menyebabkan kualitas dan daya saing tidak meningkat. Pendidikan merupakan modal dasar dalam menambah wawasan dan kualitas diri. Sehingga, ketika masyarakat terjun dalam dunia kerja, dari kualitasnya mampu memenuhi kualifikasi dunia kerja dan memiliki produktivitas yang tinggi. Maka dari itu, dari pemerataan pendidikan untuk masyarakat dapat mengembangkan kualitas diri sehingga akan mampu meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia Kota Bogor. Sehingga isu pendidikan dan isu kesehatan menjadi salah satu isu prioritas yang ada di Kota Bogor demi mewujudkan Kota Bogor yang lebih baik lagi kedepannya.

Keselarasan selanjutnya adalah mengenai Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat atau dalam istilah lain adalah pembangunan

ekonomi Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu isu strategis di Kota Bogor. Pembangunan ekonomi menjadi isu penting pastinya untuk seluruh wilayah. Akan tetapi, di Kota Bogor sendiri isu pengembangan dan pembangunan ekonomi memang perlu ditingkatkan. Jika dilihat dari evaluasi RPJPD, yang kaitannya dengan capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi. Pada awal periode perencanaan 2005, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor adalah 6,12. Sedangkan pada kondisi di tahun 2022 memperlihatkan penurunan jika dibandingkan dengan awal periode perencanaan tersebut yaitu 5,65. Hal ini membuktikan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -0,47.

Dengan kondisi sumber daya manusia yang berlimpah, yang ditandai adanya angkatan kerja berusia muda dan produktif, harus diarahkan pada peningkatan kemampuan keterampilan dalam pengolahan sumber daya potensi yang dimiliki daerah. Penyediaan penawaran tenaga kerja yang berlimpah, tanpa ada keterkaitannya dengan kebutuhan dunia usaha, tentu akan sia-sia. Salah satu yang perlu dikembangkan adalah keterkaitan dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja dengan usaha melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar, baik peralatan maupun teknologinya. Salah satu isu yang mulai berkembang dan dihadapi oleh para pencari kerja di Kota Bogor adalah mulai sempitnya lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi tantangan bersama bagaimana akhirnya para pencari kerja harus mulai diberikan pelatihan dan bimbingan agar bisa lebih mandiri dengan berwirausaha.

Sektor lain yang perlu dikembangkan adalah sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Kota Bogor. Selain itu, ekonomi kreatif juga akan mendorong lahirnya wirausaha lokal yang dapat mengangkat keunggulan, budaya, dan karakteristik wilayah sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan memicu daya saing daerah. Isu ini juga selaras dengan RPD Provinsi Jawa Barat, beberapa contoh Indikator ini menjadi bukti bahwa RPD Kota Bogor memiliki keselarasan dengan RPD Jawa Barat dalam beberapa indiktor, utamanya adalah indikator-indiktaor strategis yakni indikator dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang bukan hanya menjadi isu strategis dalam lingkup kota akan tetapi juga menjadi isu strategis dalam lingkup provinsi.

# BAB VI
# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

## 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran Pembangunan pada bab selanjutnya akan dicapai melalui penetapan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah pemahaman yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola setiap program kegiatannya dengan menyusun metode, tahapan, atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Rumusan strategi berisi pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, dan merupakan salah satu referensi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai.

Adapun strategi dan arah kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, sebagai berikut :

## Tabel 6.1. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor 2025-2026

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Utama | Pendukung |
| **1.** | **Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing** | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas pendidikan | 1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan | 1. Meningkatkan kuantitas dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan | Dinas Pendidikan | |
| | | | 2. Meningkatkan pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik | Dinas Pendidikan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | 3. Meningkatkan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik | Dinas Pendidikan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan pada setiap jenjang | Dinas Pendidikan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | 5. Meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan melalui pemberian bantuan beasiswa kepada siswa miskin | Dinas Pendidikan | Dinas Sosial |
| | | | 6. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan pengembangan inovasi untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar | Dinas Pendidikan | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | 7. Meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja | Dinas Pendidikan | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | 8. Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada sekolah | Dinas Pendidikan | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | 9. Meningkatkan iklim keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan sekolah | Dinas Pendidikan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | 10. Mengembangkan sekolah negeri baru sesuai dengan Standar Pendidikan Pelayanan Minimal khususnya SMP sederajat dan SMA sederajat yang | Dinas Pendidikan | |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat | | |
| | | | 11. Meningkatkan pendidikan inklusif yang berkualitas | Dinas Pendidikan | |
| | | | 12. Meningkatkan asupan makanan bagi peserta didik | Dinas Pendidikan | Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | | 13. Meningkatkan akses terhadap siswa putus sekolah | Dinas Pendidikan | Dinas Sosial |
| | | | 14. Mengembangkan PKBM yang mampu menumbuhkan minat dan bakat siswa | Dinas Pendidikan | |
| | | 2. Memperkuat literasi masyarakat | 1. Meningkatkan kualitas perpustakaan berstandar nasional | Dinas Arsip dan Perpustakaan | |
| | | | 2. Meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan | Dinas Arsip dan Perpustakaan | |
| | | | 3. Meningkatkan pembinaan perpustakaan | Dinas Arsip dan Perpustakaan | |
| | | | 4. Mendorong minat baca masyarakat | Dinas Arsip dan Perpustakaan | |
| | 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1. Meningkatkan kualitas dan akses kesehatan | 1. Penguatan pencegahan, deteksi dini wabah, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | 2. Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pelayanan prima | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | 3. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | 4. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan yang terintegrasi | Dinas Kesehatan | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | 5. Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (health security) | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | 6. Peningkatan inovasi teknologi di bidang kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | 7. Meningkatkan kesadaran PHBS masyarakat | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah, |
| | | | 8. Menurunkan angka perilaku ODF masyarakat | Dinas Kesehatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | 9. Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah, |
| | | | 10. Penegakan hukum kawasan tanpa rokok | Satpol PP | Dinas Kesehatan |
| | | | 11. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | 12. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | 13. Meningkatkan pelayanan kuratif bagi masyarakat | Rumah Sakit Umum Daerah | Dinas Kesehatan |
| | | | 14. Meningkatkan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | 15. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan puskesmas dan posyandu | Dinas Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | | | Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | 16. Meningkatkan jaminan kesehatan kepada masyarakat | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | 2. Memperkuat pembudayaan olahraga pada masyarakat | 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | 2. Meningkatkan prestasi olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | 3. Menurunkan angka kelahiran | 1. Meningkatkan kebijakan yang mendukung peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS) | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | 2. Optimalisasi pembentukan kelompok bina keluarga seperti BKP dan BKR | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | 3. Meningkatkan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui pemantapan kualitas keluarga dan penurunan angka kematian bayi | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 4. Menjamin kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat | 1. Menurunkan angka *stunting* pada balita | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | 2. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dinas Sosial |
| | | | 3. Meningkatkan kecukupan konsumsi energi dan protein pada asupan pangan masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dinas Sosial |
| | | | 4. Meningkatkan pengendalian kontaminasi pada bahan pangan dan produk-produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dinas Sosial |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | 5. Meningkatkan kualitas pangan segar asal tumbuhan dan pangan asal hewan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | | 5. Mengurangi kawasan kumuh dan lingkungan sehat | 1. Meningkatkan hunian layak huni | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| | | | 3. Meningkatkan cakupan layanan air minum yang layak | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | | 4. Meningkatkan cakupan layanan air limbah yang layak | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | | 5. Meningkatkan waktu tanggap terhadap kebakaran | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| | 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat | 1. Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan | 1. Meningkatkan keterbukaan kesempatan kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| | | | 2. Meningkatkan kompetensi para pencari kerja | Dinas Tenaga Kerja | |
| | | 2. Meningkatkan daya saing dan kapasitas pemuda | 1. Meningkatkan kewirausahaan pemuda | Dinas Pemuda dan Olahranga | |
| | | | 2. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan kebangsaan | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | 3. Meningkatkan keaktifan pemuda dalam organisasi kepemudaan | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | 3. Meningkatkan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif | 1. Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan |
| | | | 2. Mengembangkan industri padat karya, agrobisnis, dan agrowisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan |
| | | 4. Mengurangi kemiskinan | 1. Meningkatkan keterpaduan dan ketepat sasaran penanggulangan kemiskinan | Dinas Sosial | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Daerah |
| | | | 2. Meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin | Dinas Sosial | |
| | | | 3. Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana | Dinas Sosial | |
| | | | 4. Meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial | Dinas Sosial | |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | 5. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat | Dinas Sosial | |
| | | | 6. Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi korban bencana | Dinas Sosial | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | 4. Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif | 1. Meningkatkan ketahanan keluarga | 1. Meningkatkan kualitas keluarga baik ketahanan struktur fisik, ekonomi, sosial psikologi dan sosial budaya | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | 2. Meingkatkan pembinaan dan pendampingan keluarga | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | | 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan remaja | Dinas Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | 4. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | 5. Meningkatkan pemenuhan hak anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | 6. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | 7. Menurunkan jumlah anak terlantar | Dinas Sosial | |
| | | | 8. Meningkatkan pelayanan lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan | Dinas Sosial | |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | 2. Memperkuat legalitas kependudukan | 1. Meningkatkan layanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas data dan informasi administrasi kependudukan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | | 3. Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreativitas dan inovasi generasi muda | 1. Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan pengembangan prestasi | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | 2. Meningkatkan pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | 3. Meningkatkan upaya pencegahan penggunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras pada generasi muda | Dinas Sosial | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | 4. Meningkatkan program pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti, dan upaya untuk mengedepankan wawasan kebangsaan | Dinas Pendidikan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 4. Menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat | 1. Meningkatkan penggalian kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya | Badan Perencaanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | |
| | | | 2. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan |
| | | | 3. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya) | Dinas Komunikasi dan Informasi | Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | 5. Meningkatkan pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan masyarakat dan toleransi | 1. Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | 2. Meningkatkan peran partai politik dan peran perempuan dalam politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 3. Meningkatkan pemberdayaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | 4. Meningkatkan penghargaan terhadap pahlawan | Dinas Sosial | |
| | | | 5. Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | 6. Penguatan kemajuan kebudayaan bangsa | 1. Memperkuat lembaga kesenian tradisional | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | 2. Memperkuat pelestarian dan pengelolaan cagar badaya sebagai potensi ekonomi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | 3. Meningkatkan pembinaan sejarah dan kualitas museum | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| **2.** | **Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan** | | | | |
| | 1. Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah | 1. Meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif | 1. Meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Bogor | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | 2. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | 3. Meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | 4. Meningkatkan HKI pada produk ekonomi kreatif | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | 5. Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif yang unggul, komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | 6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreatifitas, inovasi, dan penguasaan teknologi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pemuda, dan Olahraga |
| | | | 7. Mengembangkan kampung kampung tematik sebagai potensi ekonomi lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2. Meningkatkan kualitas perencanaan ekonomi | 1. Memperkuat perencanaan ekonomi yang komprehensif dan integratif | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | |
| | | 3. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM | 1. Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM. IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan fasilitasi permodalan/ pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi) | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 2. Meningkatkan pengembangan pemasaran UMKM melalui pembangunan jejaring kemitraan dalam penyediaan supply produk UMKM/IKM/Ekraf, penyediaan Channel distribusi produk UMKM/IKM/Ekraf, dan penyediaan demand terhadap produk UMKM/IKM/Ekraf | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 3. Meningkatkan pengembangan inkubator bisnis melalui pembinaan, pemberian bantuan pendanaan modal, pembangunan ruang-ruang inkubasi dan jaringan atau koneksi dengan berbagai sektor dalam membentuk kerjasama bisnis permodalan maupun kerjasama proses bisnis | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | 4. Meningkatkan kualitas manajemen koperasi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 5. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan perkoperasian | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 6. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksanaan koperasi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 7. Meningkatkan koperasi yang sehat | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 8. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | 2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif | 1. Mengakselerasi pelayanan investasi | 1. Meningkatkan layanan perizinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | 2. Meningkatkan pengembangan *City Marketing* | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | 3. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pajak dan retribusi daerah | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | 2. Meningkatkan pendapatan daerah | 1. Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah | Badan Pendapatan Daerah | |
| | | 3. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja | 1. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program penunjang kompetensi tenaga kerja | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | 2. Meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor IKM | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| | | | 3. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan keterampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Komunikasi dan Informasi |
| | | | 4. Meningkatkan kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| | | 4. Mengembangkan usaha sektor pertanian dan perikanan | 1. Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | | | 2. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |

| Tujuan dan Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Utama** | **Pendukung** |
| 3. Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar | 1. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi | 1. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri bagi industri kecil dan menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | 2. Meningkatkan pengembangan IKM dan industri hijau | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | 3. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur industri dan pengembangan sentra industri terpadu | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | 4. Memperkuat sistem dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | 5. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang untuk mempertemukan supply dan demand, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | 6. Meningkatkan program revitalisasi pasar tradisional | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | 7. Mendorong pengembangan profesionalisme dan profitabilitas BUMD yang bergerak di sektor pelayanan umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya | Sekretariat Daerah | |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Utama | Pendukung |
| | | | 8. Meningkatkan program pembinaan dan perlindungan perdagangan | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 9. Meningkatkan distribusi dan stabilitas perdagangan | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 10. Meningkatkan ekspor produk Kota Bogor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 11. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 12. Meningkatkan pengawasan standarisasi sarana perdagangan | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 13. Meningkatkan peran fasilitator dan agregator dalam pengembangan proses bisnis | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | 2. Menjaga stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan penting | 1. Meningkatkan pengawasan terhadap harga barang pokok dan penting | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |
| | | | 2. Meningkatkan penggunaan produk lokal | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | |

| Tujuan dan Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | 3. Memperkuat aktivitas perekonomian sektor pertanian dan perikanan | 1. Meningkatkan pemberdayaan budaya ikan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | | 2. Meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan dan pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | | 3. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan perikanan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | | 4. Meningkatkan penyuluhan pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | | 5. Meningkatkan kualitas irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | 6. Meningkatkan strategi pengelolaan, pemasaran, pada sektor usaha pertanian dan perikanan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |
| | | 7. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan usaha sektor pertanian dan perikanan | Dinas Tenaga Kerja | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | 4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar | 1. Memperkuat efisiensi dan efektifitas dalam proses pengembangan ekosistem pasar | 1. Meningkatkan strategi dalam pengembangan inovasi produk | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | 2. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pengelolaan produk | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | 3. Meningkatkan kolaborasi dalam memperkuat pondasi ekosistem pasar melalui platform penjualan online, akses pembiayaan, akses pembayaran non tuna bagi konsumen, dan proses onboarding yang efisien bagi pedangang | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 2. Memperkuat branding produk | 1. Meningkatkan daya saing produk melalui pengembangan kualitas produk dan pemasaran | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | 2. Meemperluas jangkauan konsumen | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | 5. Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | 1. Mengurangi risiko bencana daerah | 1. Meningkatkan manajemen mitigasi dan adaptasi risiko bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | 2. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dalam mitigasi bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 2. Memperkuat penegakan peraturan daerah serta ketentraman umum dan perlindungan masyarakat | 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur penegak perda dan perlindungan masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang penegak perda dan perlindungan masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | | 3. Meningkatkan kerjasama dalam penegakan perda dan perlindungan masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| **3** | **Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah** | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal | 2. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal | 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah | Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang | |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung | Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang | |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan lingkungan | Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang | |
| | | 3. Mengoptimalkan pemerataan kebutuhan infrastruktur kebinamargaan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal | 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan | Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang | |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas sistem drainase | Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang | |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas | Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang | |
| | | 4. Terwujudnya kualitas, konektivitas dan infrastruktur transportasi | 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi | Dinas Perhubungan | |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum | Dinas Perhubungan | |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen lalu lintas | Dinas Perhubungan | |
| | | | 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan perlintasan kereta api dalam daerah kota | Dinas Perhubungan | |
| | 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan | 1. Terwujudnya pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau publik budidaya yang berkualitas | Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau publik kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| | | 2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan | 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau publik kawasan lindung | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengolahan sampah di sumber | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | 3. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | 4. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | 5. Meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | 6. Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| **4** | **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan** | | | | |
| | 1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif | 1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | 1. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung SPBE daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Utama | Pendukung |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | | 3. Meningkatkan pemanfaatan persandian dan keamanan informasi daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | | 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | | 5. Meningkatkan keterbukaan informasi publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang holistik, sinergis, partisipatif, dan berkelanjutan | 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas data dan informasi serta alternatif sumber pendanaan dalam | Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah | |
| | | | 2. Meningkatkan kematangan organisasi Perangkat Daerah | Sekretariat Daerah | |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan | Sekretariat Daerah | |
| | | 3. Memperkuat akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah | 1. Meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Inspektorat | |
| | | | 2. Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP | Inspektorat | |
| | | | 3. Optimalisasi capaian kinerja pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah | Inspektorat | |
| | | | 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan PD yg sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku | Inspektorat | |
| | | | 5. Meningkatkan tingkat kepatuhan PD terhadap peraturan yang berlaku | Inspektorat | |
| | | 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas | 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah | Seluruh Perangkat Daerah | |
| | | | 2. Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Kecamatan | |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi kecamatan | Kecamatan | |
| | | | 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah | Sekretariat Daerah | |
| | | 5. Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas | 1. Optimalisasi pencapaian pelaksanaan program di setiap urusan pemerintahan dan penguatan kerjasama daerah | Sekretariat Daerah | |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan | Sekretariat Daerah | |
| | | | 3. Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan di wilayah | Sekretariat Daerah | |
| | | 6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan | 1. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan | Kecamatan | |
| | | | 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan | Kecamatan | |
| | | | 3. Meningkatkan partisipasi dan keterwakilan kelompok masyarakat dalam musrenbang | Seluruh Perangkat Daerah | |
| | | 7. Meningkatkan pengelolaan arsip yang berkualitas | 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip | Dinas Arsip dan Perpustakaan | |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas penyelamatan dan pelestarian arsip daerah | Dinas Arsip dan Perpustakaan | |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan arsip | Dinas Arsip dan Perpustakaan | |
| | | 8. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas | 1. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran pada APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | | 2. Meningkatkan tingkat kepatuhan PD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | | 3. Memperkuat administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | 9. Meningkatkan Penataan organisasi, penataan per-UU, penataan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas | 1. Meningkatkan kualitas pemanfaatan sistem informasi PBJ, kualitas layanan, PBJ dan Penguatan SDM PBJ | Sekretariat Daerah | |
| | | | 2. Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah | Sekretariat Daerah | |
| | | 10. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah | Seluruh Perangkat Daerah | |
| | | 11. Memperkuat pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi yang memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan perencanaan pembangunan Kota Bogor | Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pengkajian dan penerapan invensi dan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan | Sekretariat Daerah | |
| | | 12. Meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas dalam rangka menunjang fungsi DPRD Kota Bogor | Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD | Sekretariat DPRD | |
| | 2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional | 1. Meningkatkan pengelolaan manajemen ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi | 1. Meningkatkan kualitas pengadaan, pemberhentian, sistem informasi dan penatausahaan kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| | | | 2. Mengoptimalkan proses mutasi dan promosi ASN | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |

| Tujuan dan Sasaran | | Strategi | Arah Kebijakan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Utama** | **Pendukung** |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas standarisasi perencanaan, evaluasi dan penyelenggaraan diklat | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| | | | 4. Meningkatkan kualitas standarisasi perencanaan, evaluasi dan penyelenggaraan diklat | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| | | 2. Meningkatkan kinerja organisasi yang bebas korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani | Meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBN | Inspektorat | |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

Berdasarkan tabel tujuan, sasaran, dan strategi yang menjadi referensi penting dalam perencanaan pembangunan daerah maka terdapat 4 tujuan diantarannya yaitu, pertama adalah terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, di mana arah kebijakan yang dibentuk yaitu pada sasaran terkait pendidikan dilakukan melalui peningkatan standar kualifikasi dalam sumber daya tenaga kependidikan maupun dalam peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam pendidikan. Selanjutnya pada sasaran dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dilakukan dengan meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan baik melalui peningkatan ketersediaan sdm, maupun pada sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan, hingga sarana dan prasarana pendukung. Selanjutnya pada peningkatan taraf hidup arah kebijakan yang dilakukan yaitu melalui upaya peningkatan kebijakan kesejahteraan sosial, sedangkan dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat maka dilakukan optimalisasi program keluarga berencana, maupun dalam pelayanan sosial dan pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

Tujuan kedua yaitu terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, di mana sasaran yang dituangkan berkaitan dengan optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif, upaya peningkatan iklim investasi, maupun dalam optimalisasi potensi dan daya saing perekonomian lokal. Arah kebijakan yang dibentuk beragam, diantaranya yaitu dalam pengembangan inkubator bisnis melalui pembinaan, kerjasama permodalan maupun dalam proses bisnis, dan pembangunan ruang inkubasi dalam mendukung pengembangan bisnis-bisnis kreatif, selain itu perihal sumber daya penunjang perlu dilakukan program peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan kerjasama berbagai sektor dalam mendukung penyerapan tenaga kerja. Berikutnya yaitu pada upaya perizinan, maka dilakukan pelayanan yang responsif, mudah, dan cepat.

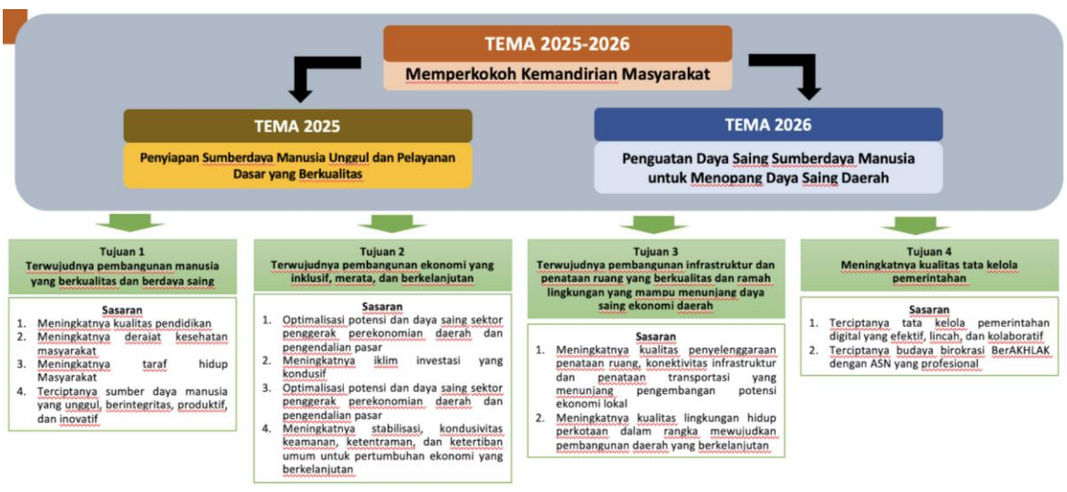
Tujuan ketiga yaitu terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah. Sasaran dari tujuan tersebut yaitu dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. Arah kebijakan yang dilaksanakan yaitu melalui pembangunan berbagai fasilitas publik baik jalan, dan bangunan. Selain itu sasaran lain yaitu dengan peningkatan

kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui dorongan akses penyediaan pelayanan air minum, penataan permukiman, dan pengelolaan persampahan.

Tujuan keempat yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sasaran yang dibentuk yaitu melalui terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Arah kebijakan yang dibentuk yaitu melalui penguatan kelembagaan birokrasi pada pengembangan sistem birokrasi yang berbasis pada teknologi, penguatan sistem, maupun penguatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan Pembangunan dikemas ke dalam tema Pembangunan tahunan yang secara simultan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Tema Pembangunan Kota Bogor tahun 2025-2026 adalah **"Memperkokoh Kemandirian Masyarakat",** yang dijabarkan ke dalam tema tahunan pembangunan untuk periode tahun 2025-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dareah tahunan. Secara skematik, keterkaitan tema dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Bogor 2025-2026 disajikan pada Gambar 6.1 sebagai berikut:

**Gambar 6.1. 1 Tema Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026**




*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

Tema Pembangunan Kota Bogor 2025-2026 merupakan kelanjutan dari tema Pembangunan Kota Bogor 2019 – 2024. Berdasarkan hasil evaluasi periode RPJMD sebelumnya bahwa hal yang harus diperkuat selama 2 periode ke depan adalah fokus ke sumberdaya manusia, pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan Masyarakat. Penjelasan mengenai tema pambangunan setiap tahun dan

fokus pembangunannya adalah sebagai berikut: Tema pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan tema memperkokoh kemandirian masyarakat, yang terbagi kedalam 2 sub tema yaitu penyiapan sumberdaya manusia unggul dan pelayanan dasar yang berkualitas pada Tahun 2025, dan penguatan daya saing sumber daya manusia yang menopang daya saing daerah pada Tahun 2026, di mana sub tema tersebut memuat pemetaan berdasarkan 4 tujuan.

Tujuan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut yaitu perlu melakukan upaya peningkatan pada kualitas sektor pendidikan, kesehatan, taraf hidup masyarakat, dan upaya dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan ditargetkan dengan kerjasama antara lembaga pendidikan dan perusahaan. Fokus pada upaya dalam mengoptimalkan potensi daya saing daerah, pengembangan investasi, dan stabilisasi perekonomian.

Kemudian, pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi tujuan lain untuk mendukung daya saing ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur yang adil dan berkualitas diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian lokal, dan upaya dalam mewujudkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan. Terakhir, meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan menjadi fokus untuk mencapai tujuan pembangunan. Reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja sektor publik diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan maupun masyarakat. Keseluruhan, tujuan-tujuan ini menciptakan visi pembangunan yang holistik, berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, ekonomi yang inklusif, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

**Gambar 6.1. 2 Fokus Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026**

| Tujuan | Fokus Pembangunan | |
|---|---|---|
| | **2025** | **2026** |
| | **Tema: Penyiapan Sumber Daya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas** | **Tema: Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia untuk Menopang Daya Saing Daerah** |
| Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. | Penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik/kesehatan, mengurangi siswa putus sekolah, menjamin pendidikan siswa miskin, memperkuat jaminan kesehatan, menurunkan *stunting* dan ODF, memastikan ketepatan sasaran intervensi program penanggulangan kemiskinan, memperkuat sistem perlindungan anak, lansia dan perempuan | Akselerasi pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, mengakselerasi intervensi penanggulangan kemiskinan, menurunkan *stunting* dan ODF, meningkatkan prestasi olahraga, meningkatkan kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta meningkatkan prestasi olah raga pada Porprov 2026 |
| Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan | Mendorong pengembangan potensi pariwisata heritage dan ilmiah, kampung tematik, ekonomi kreatif, penguatan sumberdaya manusia kreatif dan UMKM, mengakselerasi pelayanan investasi, mengembangkan sarana prasarana perekonomian, serta meningkatkan produktivitas | Memperkuat daya saing pariwisata, produk UMKM dan ekonomi kreatif, memperkuat pendidikan vokasi ekonomi kreatif, meningkatkan kesempatan kerja yang inklusif dan melanjutkan pengembangan sarana prasarana perekonomian |
| Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah | Mengakselerasi penataan angkutan umum, melanjutkan pembangunan jalan, penuntasan integrasi jalur pedestrian di pusat-pusat kegiatan, memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana, mengakselerasi pengelolaan sampah di sumber timbulan, memperluas ruang terbuka hijau publik | Memperkuat penataan angkutan umum, melanjutkan meningkatkan pemerataan infrastruktur jalan yang berkualitas, memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana, memperkuat pengelolaan sampah di sumber timbulan, memperluas ruang terbuka hijau publik |
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Penguatan zona Integritas di seluruh Perangkat Daerah, Penguatan sistem kerja dan manajemen Kinerja SDM, Peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan manajemen resiko, Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi Pelayanan, Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, dan Penguatan riset dan inovasi daerah | Penguatan zona Integritas di seluruh Perangkat Daerah, Penguatan sistem kerja dan manajemen Kinerja SDM, Peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan manajemen resiko, Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi Pelayanan, Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, dan Penguatan riset dan inovasi daerah |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

Fokus pembangunan merujuk pada area atau sektor-sektor yang menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan di Kota Bogor. Fokus pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026, di mana tema pada Tahun 2025 yaitu penyiapan SDM unggul dan pelayanan dasar yang berkualitas, sedangkan pada tahun 2026 yaitu penguatan daya saing sumber daya manusia untuk menopang daya saing daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor berdasarkan kurasi waktunya, maka terdapat 4 tujuan sebagai hasil atau kondisi yang diinginkan yang ingin dicapai melalui upaya, tindakan, atau perencanaan tertentu.

Tujuan pertama, yaitu dalam mencapai pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Fokus pembangunannya yaitu pada Tahun 2025 diharapkan adanya pemerataan akses dan peningkatan kualitas yang bersifat holistik, memandang pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi penting dalam pembangunan manusia yang lebih baik. Dengan memfokuskan perhatian pada masalah-masalah utama seperti putus sekolah, *stunting*, dan perlindungan sosial, tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih berdaya saing. Sedangkan pada Tahun 2026 maka upaya pembangunan manusia berfokus pada pembangunan yang merata, dan berkelanjutan. Upaya-upaya dalam memperbaiki sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, mempercepat intervensi penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi angka *stunting* dan mencapai status ODF dirasa penting. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan prestasi olahraga mencerminkan pentingnya kebugaran fisik dan prestasi olahraga dalam membentuk masyarakat yang sehat dan aktif. Peningkatan kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas mencerminkan inklusi sosial yang lebih besar.

Tujuan kedua, yaitu dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Pembangunan pada Tahun 2025 diharapkan berfokus pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya yang ada. Melalui pengembangan pariwisata heritage dan ilmiah, serta pembentukan kampung-kampung tematik, upaya ini dapat meningkatkan daya tarik pariwisata dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Selain itu,

investasi dalam ekonomi kreatif dan pemberdayaan sumberdaya manusia kreatif serta UMKM akan mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemampuan individu untuk bersaing di pasar global. Sedangkan pada Tahun 2026 fokus pembangunan bergerak untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata, produk-produk UMKM, dan ekonomi kreatif. Hal ini dicapai dengan memperkuat pendidikan vokasi dalam bidang ekonomi kreatif, menciptakan peluang kerja yang inklusif, dan terus mengembangkan infrastruktur ekonomi. Dengan demikian, tujuan utama adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Tujuan ketiga, yaitu dalam mencapai pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah. Pembangunan pada Tahun 2025 diharapkan berfokus pada upaya dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan bagi penduduk kota. Dengan peningkatan angkutan umum, infrastruktur jalan, keberlanjutan lingkungan, dan aksesibilitas yang lebih baik, diharapkan kualitas hidup masyarakat akan meningkat secara signifikan. Sedangkan pada Tahun 2026 fokus pada peningkatan dan pengembangan angkutan umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan mobilitas dan mengurangi kemacetan di kota. Selain itu pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan di sumbernya menjadi hal penting, termasuk pengurangan, daur ulang, dan pemusnahan yang aman. Upaya sterategis ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan resiliensi kota terhadap tantangan seperti mobilitas, bencana, dan masalah lingkungan.

Tujuan keempat, yaitu dalam mencapai kualitas tata kelola pemerintahan. Pada Tahun 2025 diharapkan berfokus pada upaya pembangunan pembangunan secara menyeluruh dalam menciptakan fondasi untuk tata kelola yang lebih baik, layanan publik yang lebih efisien, dan perkembangan inovatif dalam pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik, sehingga lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan Tahun 2026 berfokus pada upaya-upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang

lebih baik kepada masyarakat sambil menghadapi perubahan dan tantangan yang muncul di era digital dan globalisasi.

## 6.2 Program Prioritas

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 merupakan bentuk pengimplementasian dari strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.2. 1 Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2026**

| Tujuan Pembangunan | Prioritas Pembangunan |
|---|---|
| Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing | P1. Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial |
| Pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan | P2. Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi |
| Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah | P3. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan |
| Kualitas tata kelola pemerintahan | P4. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik |

*Sumber: Hasil analisis (2023)*

### 6.2.1 Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1)

Prioritas Pembangunan ini diarahkan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas pendidikan diarahkan ke peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan. Kemudian, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini terdiri dari revitalisasi bangunan sekolah, penambahan TK, peningkatan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan potensi peserta didik, pengembangan kualitas pendidikan berorientasi kebutuhan pasar kerja, dan penyediaan fasilitas teknologi dan informasi. Sedangkan pemerataan mutu pendidikan terdiri dari peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik, pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, penciptaan iklim sekolah yang aman dan inklusif, peningkatan asupan makan siswa, dan peningkatan akses pendidikan bagi siswa putus sekolah.
b. Penguatan Transformasi Kesehatan

Terdiri dari 6 pilar yakni transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.

c. Pengentasan kemiskinan ekstrem

Berfokus pada strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, perlindungan sosial dan rehabilitasi bagi korban bencana, dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial masyarakat.

d. Penurunan tingkat pengangguran

Terdiri dari peningkatan keterbukaan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi para pencari kerja.

e. Penanganan Stunting, ATM

Berfokus pada pemenuhan kualitas konsumsi pangan dan gizi balita.

f. Pembinaan Insan Keolahragaan Menuju PORPROV 2026

Mengoptimalkan momen Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat 2026, di mana Kota Bogor berperan sebagai tuan rumah. Di samping pembangunan sarana dan prasarana olah raga, ajang ini dapat menjadi insentif materi dan nonmateri untuk membina peserta PORPROV asal Kota Bogor.

g. Perlindungan anak, lansia, Perempuan dan disabilitas

Berfokus pada penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, serta peningkatan produktivitas dan kemandirian bagi lansia dan disabilitas.

### 6.2.2 Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi (P2)

a. Pemerataan dan pertumbuhan pembangunan

Mengoptimalkan produktivitas dan pemasaran berbagai sektor ekonomi unggulan dan potensial Kota Bogor, di antaranya perdagangan, perindustrian kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif.

b. Penguatan daya saing KUKM

Meningkatkan aktivitas dan kesehatan koperasi serta perlindungan dan pengawasan terhadapnya. Juga memberdayakan UKM dengan kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran produk.

c. Pengendalian Inflasi

Mengupayakan kestabilan harga barang pokok dengan optimalisasi distribusi perdagangan dan operasi pasar.

d. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
   Mengembangkan destinasi wisata dan produk wisata berbasis potensi lokal, dan merancang kampung tematik untuk pengembangan ekonomi lokal. Juga mengembangkan ekonomi kreatif yang unggul, komparatif, dan kompetitif, dengan produk yang orisinal dan berlisensi HKI, serta meningkatkan pemasaran baik untuk pariwisata maupun ekonomi kreatif.
e. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
   Sebagai salah satu upaya menjaga kestabilan harga dan kondusivitas iklim usaha Kota Bogor, di mana banyak pasokan barang-barang berasal dari hasil impor.
f. Peningkatan investasi Daerah
   Mengadakan layanan perizinan yang responsif dan mudah, meningkatkan mutu penyelenggaraan perizinan dan non perizinan beserta pemasukan dari pajak dan retribusi daerah yang melekat padanya.
g. Penanggulangan bencana daerah
   Mengurangi resiko bencana dengan peningkatan mitigasi, penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta peningkatan kualitas infrastruktur, sera meningkatkan penegakan peraturan daera dan perlindungan masyarakat.

### 6.2.3 Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan (P3)

a. Keberlanjutan program Penataan Angkutan Umum
   Terdiri dari peningkatan layanan angkutan umum, manajemen lalu lintas, dan pengelolaan kereta api dalam kota.
b. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan
   Menambah dan memelihara jalan, jembatan, dan irigasi.
c. Pembangunan sarana dan prasarana Porprov 2026
   Peningkatan mutu dan kapasitas sarana dan prasarana penyelenggaraan Porprov 2026, baik untuk keolahragaan maupun penunjangnya.
d. Penuntasan integrasi jalur pedestrian di pusat pusat kegiatan
   Sebagai pendukung mobilitas masyarakat yang diselenggarakan secara aman dan nyaman.
e. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
   Merancang kebijakan tentang pengelolaan sampah, mengembangkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta

meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga pelaku pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

f. Pengendalian kualitas lingkungan dan ruang terbuka hijau
   Menyediakan lahan RTH sesuai dengan RTRW dan meningkatkan kualitas pengelolaannya.
g. Pengembangan sarana prasarana perekonomian (Pasar Padasuka, Pasar Taman Kencana, Pasar Bogor, Plaza Bogor, Pasar Merdeka, Pasar TU, Pasar Cipaku dan pengembangan pasar lainnya)
   Mengoptimalkan pemanfaatan pasar dengan cara membangun kemudahan akses pelaku usaha dan masyarakat pada pasar dan merancang spesifikasi perdagangan yang tepat untuk pasar fisik di tengah berkembangnya pasar dalam jaringan.

### 6.2.4 Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik (P4)

a. Penguatan zona Integritas di seluruh Perangkat Daerah
   Menerapkan Zona Integritas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
b. Penguatan sistem kerja dan manajemen Kinerja SDM
   Meningkatkan akuntabilitas kinerja SDM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk mewujudkan pembangunan yang telah disusun perencanaannya.
c. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan manajemen resiko
   Meningkatkan perumusan kebijakan yang tepat sasaran, mendukung pembangunan daerah, serta meminimalkan kelalaian dan meniadakan penyelewengan dalam kinerja instansi pemerintah Kota Bogor.
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi pelayanan
   Membangun kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik serta mengintegrasikan data dari berbagai sektor.
e. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
   Sebagai upaya peningkatan kinerja seluruh unit kerja di instansi pemerintah Kota Bogor yang memerhatikan kematangan perencanaan, pengukuran kinerja yang sesuai jenjang, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan evaluasi

yang berkelanjutan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

f. Penguatan riset dan inovasi daerah

Membangun terobosan dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui riset di berbagai sektor dan pemanfaatan inovasi dengan pelibatan partisipasi masyarakat.

**Tabel 6.2. 2 Keterkaitan Prioritas RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dan Prioritas RPD Kota Bogor 2025-2026**

| Prioritas RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 | Prioritas RPD Kota Bogor 2025-2026 |
|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata (P1) | Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi (P2) |
| Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama (P2) | Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1) |
| Penguatan sistem kesehatan daerah (P3) | Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1) |
| Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana (P4) | Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1)<br>Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi (P2) |
| Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa (P5) | Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan (P3) |
| Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah (P6) | Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik (P4) |

*Sumber: hasil analisis (2023)*

Prioritas RPD Kota Bogor 2025-2026 memiliki keterkaitan dengan Prioritas RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2025. Prioritas 1 RPD Jawa Barat selaras dengan Prioritas 2 RPD Kota Bogor yang menitikberatkan inovasi untuk mendukung kegiatan ekonomi. Prioritas 2 RPD Jawa Barat selaras dengan Prioritas 1 RPD Kota Bogor yang berfokus pada penguatan sistem pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan. Prioritas 3 RPD Jawa Barat selaras dengan Prioritas 1 RPD Kota Bogor yang berfokus pada penguatan sistem kesehatan. Prioritas 4 RPD Jawa Barat selaras dengan Prioritas 1 dan Prioritas 2 RPD Kota Bogor yang beririsan pada aspek perlindungan sosial dan penanggulangan resiko bencana. Prioritas 5 RPD Jawa Barat selaras dengan Prioritas 3 RPD Kota Bogor yang berfokus pada pengembangan infrastruktur. Terakhir, Prioritas 6 RPD

Jawa Barat selaras dengan Prioritas 4 RPD Kota Bogor yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik.

Seluruh prioritas pembangunan pada RPD Kota Bogor 2025-2026 tersebut didistribusikan pada berbagai program sesuai dengan urusan pemerintahan masing-masing. Setiap program diampu oleh perangkat daerah yang berkenaan, dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.2. 3 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2026**

| No. | Prioritas Pembangunan/Program Prioritas | Perangkat Daerah |
|---|---|---|
| **A** | **Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1)** | |
| 1. | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| 2. | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 3. | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 4. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan<br>Rumah Sakit Umum Daerah |
| 5. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 6. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Dinas Kesehatan |
| 7. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 8. | Program Pengembangan Daya Saing Kapasitas Keolahragaan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 9. | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 10. | Program Pembinaan Keluarga Berencana | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 11. | Program Pengendalian Penduduk | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 12. | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 13. | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 14. | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 15. | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 16. | Program Peningkatan Sarana Prasarana Utilitas | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 17. | Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 18. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 19. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 20. | Program penanganan kerawanan pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 21. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja |
| 22. | Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja |

| No. | Prioritas Pembangunan/Program Prioritas | Perangkat Daerah |
|---|---|---|
| 23. | Program Pengembangan UMKM | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 24. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 25. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 26. | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| 27. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| 28. | Program Penanganan Bencana | Dinas Sosial |
| 29. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| 30. | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| 31. | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| 32. | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| 33. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 34. | Program Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 35. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 36. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 37. | Program Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 38. | Program Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 39. | Program Pemenuhan Hak Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 40. | Program Perlindungan Khusus Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 41. | Program Perlindungan Perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 42. | Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| 43. | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| 44. | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Dinas Sosial |
| 45. | Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 46. | Program Pengelola Sistem Data Gender dan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 47. | Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 48. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 49. | Program Penelitian dan Pengembangan | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 50. | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| 51. | Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 52. | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 53. | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 54. | Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| No. | Prioritas Pembangunan/Program Prioritas | Perangkat Daerah |
|---|---|---|
| 55. | Program Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 56. | Program Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 57. | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 58. | Program Pengembangan Kesenian Tradisonal | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 59. | Program Pembinaan Sejarah | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 60. | Program pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| **B** | **Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi (P2)** | |
| 1. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3. | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 4. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 5. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 6. | Program Pengembangan UMKM | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 7. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 8. | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 9. | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 10. | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 11. | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 12. | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 13. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 14. | Program Promosi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 15. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 16. | Program Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| No. | Prioritas Pembangunan/Program Prioritas | Perangkat Daerah |
|---|---|---|
| 17. | Program Pelayanan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 18. | Program pengelolaan pendapatan daerah | Badan Pendapatan Daerah |
| 19. | Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja |
| 20. | Program Hubungan Industrial | Dinas Tenaga Kerja |
| 21. | Program Perekonomian dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| 22. | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 23. | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 24. | Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 25. | Program Pengembangan Ekspor | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 26. | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 27. | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 28. | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 29. | Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 30. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 31. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 32. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 33. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 34. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 35. | Program Penyuluhan pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 36. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 37. | Program Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 38. | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 39. | Program Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesbangpol |
| 40. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan |
| 41. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kecamatan |
| **C** | **Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan (P3)** | |

| No. | Prioritas Pembangunan/Program Prioritas | Perangkat Daerah |
|---|---|---|
| 1. | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2. | Program Penataan Bangunan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3. | Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4. | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 5. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 6. | Program: Pengembangan Jasa Konstruksi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 7. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan |
| 8. | Program Pengelolaan Perkereta apian | Dinas Perhubungan |
| 9. | Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati | Dinas Perumahan dan Permukiman<br>Dinas Lingkungan Hidup |
| 10. | Program Pengelolaan Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 11. | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Dinas Lingkungan Hidup |
| 12. | Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat | Dinas Lingkungan Hidup |
| 13. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Dinas Lingkungan Hidup |
| 14. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 15. | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Dinas Lingkungan Hidup |
| 16. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 17. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Dinas Lingkungan Hidup |
| 18. | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 19. | Program Pengelolaan Sumberdaya Air | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **D** | **Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik (P4)** | |
| 1. | Program Aplikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2. | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 4. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 5. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 6. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 7. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sekretariat Daerah |
| 8. | Program Perekonomian dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| 9. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat |
| 10. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |

| No. | Prioritas Pembangunan/Program Prioritas | Perangkat Daerah |
|---|---|---|
| 11. | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| 12. | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Sekretariat Daerah |
| 13. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Sekretariat Daerah |
| 14. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Kecamatan |
| 15. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kecamatan |
| 16. | Program Pengelolaan Arsip | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 17. | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 18. | Program Perizinan Penggunaan Arsip | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 19. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| 20. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | BKAD |
| 21. | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | BKAD |
| 22. | Program Perekonomian dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| 23. | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| 24. | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Sekretariat DPRD |
| 25. | Program Kepegawaian Daerah | BKPSDM |
| 26. | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | BKPSDM |
| 27. | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat |

*Sumber: Hasil analisis (2023)*

Adapun program prioritas Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2026 yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Pembangunan daerah sebagaimana tabel 6.2.4, sebagai berikut.

## Tabel 6.2. 4 Program Pembangunan Daerah RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| **Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing** | **Indeks Pembangunan Manusia** | **77,85** | **78,7** | **79,35** | **79,35** | | | | | | | |
| | **Indeks Pembangunan Keluarga** | **61,81** | **61,98** | **62,08** | **62,08** | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pendidikan | Indeks Pendidikan | 72,74 | 76,17 | 77,19 | 77,19 | Program Pengelolaan Pendidikan | Indeks SPM (Pendidikan) | 67,42 | 67,2 | 77,19 | 77,19 | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Program Pembinaan Perpustakaan | Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1) | 0,4660 | 0,7933 | 1 | 1 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| | | | | | | | Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2) | 0,0892 | 0,0914 | 0,0922 | 0,0922 | |
| | | | | | | | Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3) | 0,9497 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Tingkat kunjungan masyarakat perhari (UPLM 4) | 0,00102 | 0,1143 | 0,1166 | 0,1166 | |
| | | | | | | | Perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP) (UPLM 5) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6) | 0,1252 | 1 | 1 | 1 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Anggota perpustakaan (UPLM 7) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Persentase naskah kuno yang diinventarisasi | N/A | 50 | 100 | 100 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 83,28 | 83,74 | 83,88 | 83,88 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | 59,89 | 54,5 | 54 | 54 | Dinas Kesehatan |
| | Predikat Kota Sehat | Swastisaba Wistara (Kategori | Swastisaba Wistara (Kategori | N/A | N/A | | Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup | 6,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | |
| | | | | | | | Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup | 7,08 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | |
| | | | | | | | Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Prevalensi Hipertensi | 9,66 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |
| | | | | | | | Prevalensi Diabetes Melitus | 2,5 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| | | | | | | | Prevalensi ODGJ | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| | | | | | | | Angka Keberhasilan Pengobatan TB | 74,28 | 90 | 90 | 90 | |
| | | | | | | | Insiden Rate HIV | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| | | | | | | | Predikat STBM | Pratama | Paripurna | Paripurna | Paripurna | |
| | | | | | | | Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase Balita Berstatus gizi Normal | 86,54 | 87,10 | 87,20 | 87,20 | |
| | | | | | | | Ratio Puskesmas per 30.000 penduduk | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | |
| | | | | | | | Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar | 92 | 92 | 96 | 96 | |
| | | | | | | | Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi | 53,57 | 55 | 60 | 60 | |
| | | | | | | | Persentase keluarga yang diintervensi melalui pendekatan keluarga | 69,239 | 94 | 96 | 96 | |
| | | | | | | | Capaian SPM RSUD Kota Bogor | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | |
| | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan | 90,6 | 96 | 96,50 | 96,50 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan | 99,26 | 96 | 96 | 96 | |
| | | | | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan | 32,90 | 40 | 45 | 45 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian | 55 | 65 | 70 | 70 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan | 50 | 60 | 65 | 65 | |
| | | | | | | | Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi | 63,20 | 70 | 75 | 75 | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Rumah Tangga ber PHBS | 71,53 | 72,20 | 72,40 | 72,40 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri | 10,29 | 11,50 | 12 | 12 | |
| | | | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional atau Internasional | 50 | 50 | 50 | 100 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | | | | | | | Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar | N/A | 80 | 33 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase Atlet Berprestasi Dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan | 74 | 50 | 55 | 55 | |
| | | | | | | | Persentase Perolehan medali dengan jumlah Atlet yang berpartisipasi dalam Kejuaraan | N/A | 50 | 55 | 55 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana | Persentase Peserta KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS) | 19,79 | 19,84 | 19,86 | 19,86 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Program Pengendalian Penduduk | Persentase dokumen kegiatan pengendalian kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang disusun | 75 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 83,1 | 84,7 | 85,7 | 85,7 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | | Ketersediaan Energi | 2318 kkal/kap/hari | 2400 kkal/kap/hari | 2400 kkal/kap/hari | 2400 kkal/kap/hari | |
| | | | | | | | Ketersediaan protein | 76,4 gram/kap/hari | 63 gram/kap/hari | 63 gram/kap/hari | 63 gram/kap/hari | |
| | | | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | 92,96 | 95,50 | 95,80 | 95,80 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 79,75 | 47,62 | 54,55 | 54,55 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | | Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan | 82,63 | 83,25 | 83,50 | 83,50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perumahan dan Permukiman |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase tingkat hunian rusunawa | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | | | | | | | Persentase intervensi rumah layak huni bagi warga miskin | 19,06 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | |
| | | | | | | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum | Persentase Panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara | 46,04 | 54,13 | 62,22 | 62,22 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | | | | | | | Persentase drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara | 46,04 | 54,13 | 62,22 | 62,22 | |
| | | | | | | | Persentase luas tembok penahan tanah yang dibangun untuk pengamanan kawasan permukiman dan pencegahan bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase pengelolaan makam yang dikelola pemerintah | 20,74 | 21,03 | 21,33 | 21,33 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase kelurahan tanggap kebakaran | 35,29 | 65 | 75 | 100 | Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | | | | | Persentase SDM aparatur damkar dan penyelamatan yang ditingkatkan kompetensinya | 52,43 | 75 | 80 | 40 | |
| | | | | | | | Rata Rata *respontime* penanganan kebakaran | 11,91 | 9,25 | 9,20 | 9,20 | |
| | | | | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman | 76,57 | 78,37 | 84,69 | 84,69 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | Cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak | 91,91 | 93,68 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak | 73,46 | 74,99 | 79,12 | 79,12 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman | 5,49 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Presentase Pelanggar Perda KTR Yang di Tertibkan | 100 | 100 | 100 | 100 | Satpol PP |
| Meningkatnya taraf hidup masyarakat | Pengeluaran Per Kapita | 12.656 | 12.700 | 12.750 | 12.750 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourished* (PoU) | 4,86 | 4,77 | 4,68 | 4,68 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | Angka Kemiskinan | 6,67 | 6,12 | 6,01 | 6,01 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja | 91,94 | 91,94 | 92 | 92 | Dinas Tenaga Kerja |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | 9,39 | 8,11 | 7,96 | 7,96 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi | N/A | 100 | 100 | 100 | Dinas Tenaga Kerja |
| | Gini Ratio | 0,464 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | | Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memliki Usaha | N/A | 35 | 35 | 35 | |
| | | | | | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang ditindaklanjuti | 80 | 87 | 90 | 90 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | Jumlah penduduk miskin ekstrim yg mendapat bantuan sosial BSM (berdasar data P3KE desil1) | 800 Orang | 1000 Orang | 1500 Orang | 2500 Orang | |
| | | | | | | | Jumlah penduduk miskin yg mendapat bantuan sosial BSM (berdasar Data DTKS) | 2000 Orang | 3000 Orang | 3500 Orang | 6500 Orang | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi | 0,17 | 3,62 | 3,86 | 3,86 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | | Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina | N/A | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausaaan | N/A | 2,175 | 2,18 | 2,18 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | | | Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan | 21,17 | 21,18 | 22 | 22 | |
| | | | | | | | Presentase organisasi kepemudaan yang aktif | N/A | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Data Kemiskinan yang tervalidasi | 87 | 88,50 | 90 | 90 | Dinas Sosial |
| | | | | | | | Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan | 19,57 | 18 | 17,50 | 17 | |
| | | | | | | | Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | 87 | 90 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Penanganan Bencana | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| | | | | | | | Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif | 84 | 85 | 86 | 87 | |
| | | | | | | Program Kawasan Permukiman | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah | 7,18 | 5,53 | 3,88 | 3,88 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | | | | | | | Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara | 30,31 | 39,79 | 41,47 | 41,47 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | | | | | | | Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara | 27,45 | 33,67 | 39,94 | 39,94 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | | | | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan, Perorangan, dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional | 99,7 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif | Indeks Pembangunan Keluarga | 61,81 | 61,98 | 62,08 | 62,08 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| | Indeks Ketimpangan Gender | 0,434 | 0,419 | 0,414 | 0,414 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase realisasi capaian kinerja pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan | 87 | 87 | 90 | 90 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Layanan Pemeliharaan Anak Terlantar Yang Tertangani | N/A | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase pemuda pelopor yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional | 20 | 30 | 35 | 35 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Nilai dimensi kualitas legalitas struktur | N/A | 79,90 | 80 | 80 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | Nilai dimensi kualitas ketahanan fisik | N/A | 78,27 | 80 | 80 | |
| | | | | | | | Nilai dimensi kualitas ketahanan ekonomi | N/A | 68,35 | 70 | 70 | |
| | | | | | | | Nilai dimensi kualitas Ketahanan Sosial Psikologi | N/A | 62,91 | 80 | 80 | |
| | | | | | | | Nilai Dimensi kualitas ketahanan sosial budaya | N/A | 66,61 | 80 | 80 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif | 82,26 | 82,34 | 82,38 | 82,38 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil |
| | | | | | | | Persentase cakupan perekaman E-KTP | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil |
| | | | | | | Program Pencatatan Sipil | Persentase Pendataan Akta Kelahiran 0-18 tahun | 98 | 99,20 | 99,50 | 99,50 | Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil |
| | | | | | | | Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan | 55 | 65 | 70 | 70 | Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil |
| | | | | | | Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan | Persentase penyajian data kependudukan yang di perlukan OPD sesuai dengan SOP kerjasama pemanfaatan data | 52 | 60,87 | 69,57 | 69,57 | Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil |
| | | | | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Skor pada klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA | 95 | 101 | 104 | 104 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | Skor pada klaster 2 (perlindungan keluarga dan pengasuhan alternatif) KLA | 128 | 130 | 137,75 | 137,75 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Skor pada kluster 3 (Kesehatan dasar dan kesejahteraan) KLA | 142 | 144 | 146 | 146 | |
| | | | | | | | Skor pada klaster IV (Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) KLA | 61 | 102 | 102 | 102 | |
| | | | | | | Program Perlindungan Khusus Anak | Skor pada klaster V (perlindungan khusus anak) | 155 | 156 | 157 | 157 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| | | | | | | | Persentase layanan rehabilitasi bagi masyarakat lanjut usia terlantar | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Perlindungan Perempuan | Persentase korban Kekerasan Perempuan yang terlayani | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase taman makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk | 13 | 13 | 13 | 13 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase partisipasi partai politik dalam pendidikan politik | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | | Peran masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase partisipasi perempuan perempuan sebagai anggota legislatif | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| | | | | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Jumlah kebijakan dalam pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya | 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif | 52,51 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Program Pengembangan Kebudayaan | Jumlah kontribusi event seni budaya dalam CoE | 3 Event | 3 Event | 3 Event | 3 Event | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase lembaga seni tradisional yang dibina | N/A | 10 | 15 | 15 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Program Pembinaan Sejarah | Jumlah SDM pelaku pelestari sejarah yang ditingkatkan kompetensinya | N/A | 5 | 5 | 10 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase status ODCB menjadi CB | N/A | 10 | 10 | 10 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase peningkatan kunjungan ke museum | 55,71 | 55,71 | 55,75 | 55,75 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Program Penanggulangan Bencana | Persentase masyarakat tangguh bencana | N/A | 5 | 5 | 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **5,1** | **5,3** | **5,5** | **5,5** | | | | | | | |
| | **Indeks Daya Saing Daerah** | **3,42 (Tinggi)** | **3,55 (Tinggi)** | **3,75 (Tinggi)** | **3,75 (Tinggi)** | | | | | | | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah | Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) | 5,26 | 6,14 | 7,74 | 7,74 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi | N/A | 1 Destinasi | 1 Destinasi | 1 Destinasi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Program Pemasaran Pariwisata | Jumlah kunjungan wisata | 5.650.637 | 7.038.999 | 7.742.899 | 7.742.899 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | 23,43 | 23,44 | 23,45 | 23,45 | |
| | | | | | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual | Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI | N/A | 25 | 25 | 25 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi | 0,17 | 3,62 | 3,86 | 3,86 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | | Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina | N/A | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha | N/A | 16 | 18 | 34 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | | Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan | N/A | 3 | 4 | 7 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Pengembangan UMKM | Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up) | N/A | 2 (90 Wirausaha Baru) | 2,2 (100 Wirausaha Baru) | 2,2 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | | Persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet penjualannya | N/A | 4,4 (200 Pelaku Usaha) | 4,6 (210 Pelaku Usaha) | 4,6 | |
| | | | | | | | Persentase Pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital | N/A | 7 (315 UMKM) | 8 (360 UMKM) | 8 | |
| | | | | | | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti dengan kebijakan | 72,72 | 73 | 74 | 74 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit | 17,75 | 18,01 | 18,30 | 18,30 | |
| | | | | | | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Peningkatan koperasi berizin | 50 | 70 | 80 | 80 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal | 47,17 | 50 | 53,33 | 53,33 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Koperasi Berkualitas | 10,14 | 11,37 | 12,45 | 12,45 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase Koperasi yang Sehat | 15,15 | 15,6 | 17,16 | 17,16 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase peningkatan Koperasi Aktif | N/A | 6,24 | 9,36 | 9,36 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ketercapaian target program pembangunan daerah urusan perekonomian dan SDA | 77,08 | 80,6 | 83,87 | 83,87 | BAPPERIDA |
| Meningkatnya iklim investasi yang kondusif | Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun | 20,94 | 21,25 | 21,88 | 21,88 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 16,57 | 12,33 | 17,43 | 17,43 | Program Promosi Penanaman Modal | Nilai Realisasi Investasi | 1.934 Triliun | 1.940 Triliun | 1.950 Triliun | 1.950 Triliun | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase peningkatan kontribusi BUMD pada penerimaan PAD | -0,26 | 0,5 | 1 | 1 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Jumlah Kebijakan atau regulasi Penanaman Modal yang terimplementasi | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | Incremental Capital Output Ratio (ICOR) | 6 | 6 | 5,9 | 5,9 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Rata Rata nilai capaian kinerja BUMD | 67,40 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP | 85,44 | 100 | 100 | 100 | Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Target penerimaan Pajak Daerah | 897.753.380.910,00 | 1.067.401.480.950,00 | 1.120.771.554.997,50 | 1.120.771.554.997,50 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | | Persentase peningkatan pajak daerah | 20,51 | 18,90 | 24,84 | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi | N/A | 30 | 30 | 30 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | | Program Hubungan Industrial | Penetapan Besaran UMK | 1 Keputusan | 1 Keputusan | 1 Keputusan | 1 Keputusan | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | | | Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang Ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK) | 3,96 | 4,5 | 5 | 5 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Persentase UMKM yang Difasilitasi Pemasarannya dari data UMKM yang Terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI | N/A | 5 | 5 | 10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK) | 3,73 | 3,79 | 4 | 4 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase Jumlah Perusahaan yang Berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 13,50 | 14,30 | 14,40 | 14,40 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan IKM yang Produktif | 7,80 | 8,70 | 9,28 | 9,28 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Program Pengembangan Ekspor | Nilai Realisasi Ekspor | USD 125.022.760,50 | USD 139.025.307,45 | USD 158.766.901,10 | USD 158.766.901,10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai standar | N/A | 29,19 | 29,95 | 29,95 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan | N/A | 30 | 40 | 40 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang) | N/A | 11,87 | 12,03 | 12,03 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase Pelaksanaan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok | N/A | 100 | 100 | 100 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi pengendalian Inflasi Daerah | 72,41 | 75,86 | 79,30 | 79,30 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (ikan konsumsi) | -32,44 | 1 | 1 | 1 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | | Persentase peningkatan produksi perikan (ikan hias) | -12,13 | 1 | 1 | 1 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persentase Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura (26 item) | 65,67 | 32,68 | 67,22 | 100 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase pemenuhan sarana peternakan (3 item) | 34,12 | 48,72 | 51,28 | 100 | |
| | | | | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase pengelolaan kawasan LP2B yang dibina Pemkot Bogor | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | | Persentase peningkatan jumlah potong hewan yang dilayani RPH | 1,03 | 1,54 | 1,52 | 1,52 | |
| | | | | | | | Persentase peningkatan retribusi RPH | 13,39 | 1,54 | 1,52 | 1,52 | |
| | | | | | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | 30,70 | 18,42 | 27,63 | 27,63 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Program Penyuluhan pertanian | Cakupan bina kelompok tani | 93,08 | 93,41 | 93,57 | 93,57 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | | Persentase peningkatan jumlah kelompok *urban farming* | 1,87 | 1,81 | 1,77 | 1,77 | |
| | | | | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%) | 53,66 | 62,21 | 66,49 | 66,49 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | Persentase Sungai yang berkondisi baik (%) | 82,46 | 87,97 | 93,64 | 93,64 | |
| | | | | | | | Persentase Lokasi rawan banjir yang ditangani | 2,38 | 3,57 | 4,76 | 4,76 | |
| Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 79,98 | 80 | 80,9 | 80,9 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana | N/A | 20 | 20 | 20 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | Indeks Risiko Bencana | 63,49 | 65 | 65 | 65 | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 100 | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | | Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningakatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase konflik SARA yang tertangani | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah** | **Indeks Infrastruktur Pilar IDSD** | **2,15** | **2,25** | **2,35** | **2,35** | | | | | | | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal | Volume to Capacity Ratio | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang | 60 | 65 | 75 | 75 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung | N/A | 30 | 50 | 50 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya | Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRW/RDTRK) | N/A | 50 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang | 88,95 | 89 | 89,2 | 89,2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase penurunan lokasi genangan | 0,89 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | Persentase pemenuhan ketersediaan drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal | 62 | 75 | 80 | 80 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik | 8,2 | 14,22 | 22,22 | 22,22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan | Persentase tingkat keselamatan jalan | N/A | 92,50 | 93 | 93 | Dinas Perhubungan |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase fasilitas terminal yang terpelihara | 76,47 | 77,78 | 78,95 | 78,95 | |
| | | | | | | | Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi | 98,06 | 98,10 | 98,50 | 98,50 | |
| | | | | | | | Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan | N/A | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik | N/A | 88 | 94 | 94 | |
| | | | | | | | *Load Factor* Angkutan Perkotaan | 35,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| | | | | | | | *Load Factor* Angkutan Umum Massal | 64,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| | | | | | | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Persentase penetapan kebijakan rencana induk perkeretaapian | 23,08 | 30 | 35 | 35 | Dinas Perhubungan |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 58,4 | 57,84 | 58,09 | 58,09 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Luas penambahan RTH Publik Budidaya yang dibangun | 471,31 | 472,91 | 473,91 | 473,91 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | | | | | | | Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik | 47,96 | 49,77 | 50,57 | 50,57 | |
| | | | | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi | 0,5 Ha | 0,5 Ha | 0,5 Ha | 0,5 Ha | Dinas Lingkungan Hidup |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase Reduksi Sampah | 7,81 | 8 | 8,10 | 8,10 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | Persentase Volume Sampah tertangani | 79,03 | 79,25 | 79,50 | 79,50 | |
| | | | | | | | Persentase jalur wilayah penyapuan | 48,80 | 94,97 | 97,50 | 97,50 | |
| | | | | | | | Persentase peningkatan retribusi persampahan | 2,80 | 2,90 | 3 | 3 | |
| | | | | | | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun | 0,01 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi | 0,02 | 2,13 | 5,84 | 5,84 | |
| | | | | | | | Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan | 100 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | |
| | | | | | | | Persentase sarana persampahan yang terpenuhi | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat | Persentase kelompok masyarakat/lembaga/kegiatan usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup | 14,71 | 15 | 15,30 | 15,30 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Persentase Sekolah Adiwiyata | 35,56 | 35,6 | 35,70 | 35,70 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan | 18,98 | 19 | 19,10 | 19,10 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | 57,14 | 56,32 | 57,45 | 57,45 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu | N/A | 20 | 25 | 25 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu | N/A | 8 | 8,30 | 8,30 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Program Pengelolaan Sumberdaya Air | Persentase sungai yang berkondisi baik | 82,46 | 87,97 | 93,64 | 93,64 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | Persentase jumlah sungai rawan banjir yang ditangani | 2,38 | 3,57 | 4,76 | 4,76 | |
| | | | | | | | Persentase irigasi yang berkondisi baik | 53,66 | 62,21 | 66,49 | 66,49 | |
| | | | | | | | Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air berkondisi baik | 68,06 | 75,09 | 80,07 | 80,07 | |
| **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **A** | **A** | **A** | **A** | | | | | | | |
| Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif | Indeks SPBE | 3,72 | 3,75 | 3,8 | 3,8 | Program Pengelolaan Aplikasi dan informatika | Nilai Aspek Teknologi informasi dan komunikasi pada penilaian SPBE | Indeks 3,50 | Indeks 3,50 | Indeks 3,50 | Indeks 3,50 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | Nilai Aspek Kebijakan internal tata Kelola SPBE | Indeks 3,70 | Indeks 3,70 | Indeks 3,70 | Indeks 3,70 | |
| | Nilai AKIP Tingkat Kota | BB (76,23) | A | A | A | | Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE | Indeks 3,00 | Indeks 3,00 | Indeks 3,00 | Indeks 3,00 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | | Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE | Indeks 2,88 | Indeks 2,88 | Indeks 2,88 | Indeks 2,88 | |
| | Tingkat Maturitas SPIP | Level 3 (3,296) | Level 3 (3,326) | Level 3 (3,356) | Level 3 (3,356) | | Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas | Indeks 3,35 | Indeks 3,46 | Indeks 3,46 | Indeks 3,46 | |
| | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) | 97,23 | 98 | 98,5 | 98,5 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Indeks Kualitas Kebijakan | 65 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | |
| | Indeks Manajemen Risiko (MRI) | Level 3 (3,045) | Level 3 (3,055) | Level 3 (3,06) | Level 3 (3,06) | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Indeks prinsip satu data indonesia | 2,5 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | Indeks kualitas data | 2,59 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | |
| | | | | | | | Indeks Proses Bisnis Statistik | 2,79 | 3 | 3,1 | 3,1 | |
| | | | | | | | Indeks Kelembagaan | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
| | | | | | | | Indeks Statistik Nasional | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | |
| | | | | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rasio Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10000 penduduk) | 25,7 | 27,5 | 30 | 30 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | | | | | Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan | 95 | 100 | 100 | 100 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP | 36,5 | 37,5 | 38 | 38 | |
| | | | | | | | Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah | 70,97 | 75 | 80 | 80 | |
| | | | | | | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia | 26,61 | 26,88 | 27,14 | 27,14 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | | | | | Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia | 25,95 | 26,21 | 26,47 | 26,47 | |
| | | | | | | | Persentase ketercapaian target program perencanaan Pembangunan daerah urusan pemerintahan dan pembangunan manusia | 71,72 | 80,6 | 83,87 | 83,87 | |
| | | | | | | | Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan perekonomian dan SDA | 28,06 | 28,34 | 28,62 | 28,62 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan perekonomian dan SDA | 27,2 | 27,47 | 27,75 | 27,75 | |
| | | | | | | | Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan insfrastruktur dan kewilayahan | 28,2 | 28,48 | 28,77 | 28,77 | |
| | | | | | | | Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan insfrastruktur dan kewilayahan | 26,54 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | |
| | | | | | | | Persentase ketercapaian target program pembangunan daerah urusan insfrastruktur dan kewilayahan | 71,15 | 80,6 | 83,87 | 83,87 | |
| | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PD yang mendapat nilai pelaporan kinerja perangkat daerah minimal 12,2 | 25 | 50 | 63,90 | 63,90 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kematangan sangat tinggi | 72,22 | 80,55 | 83,33 | 83,33 | |
| | | | | | | | Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kelembagaan minimal sangat efektif | 77,77 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Presentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah | 90 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai perencanaan | 60 | 65 | 75 | 75 | |
| | | | | | | | Persentase capaian kinerja pembangunan daerah | 97,44 | 98 | 98,50 | 98,50 | |
| | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah | 23,7 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | | | | | | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah | 25 | 26,55 | 26,82 | 26,82 | |
| | | | | | | | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah | 12 | 12,48 | 13 | 13 | |
| | | | | | | | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah | 21 | 21,97 | 21,98 | 21,98 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah | 93 | 94 | 94 | 94 | |
| | | | | | | | Persentase Kepatuhan Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | 94 | 95 | 95 | 95 | |
| | | | | | | | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | 93 | 94 | 94 | 94 | |
| | | | | | | | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana | 87 | 87,11 | 87,87 | 87,87 | |
| | | | | | | | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 88 | 88,75 | 89,25 | 89,25 | |
| | | | | | | | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 88,2 | 88,38 | 89,39 | 89,39 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 88,1 | 88,38 | 89,39 | 89,39 | |
| | | | | | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama | 70 | 80 | 85 | 85 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penyelenggaraan Pemerintahan | N/A | 90 | 90 | 90 | |
| | | | | | | Program penyelesaian sengketa tanah garapan | Persentase Sengketa Tanah yang difasilitasi sesuai SOP | N/A | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Kelurahan yang berpredikat swasembada | N/A | 4,40 | 5,90 | 5,90 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara aktif | N/A | 70 | 75 | 75 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan | 88 | 88,10 | 88,20 | 88,20 | Kecamatan Bogor Utara |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Utara |
| | | | | | | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Timur |
| | | | | | | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Utara |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | N/A | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | N/A | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | N/A | 1 | 1 | 1 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | N/A | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Timur |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan | N/A | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan | N/A | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan | N/A | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | N/A | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan | 88 | 88,10 | 88,20 | 88,20 | Kecamatan Bogor Timur |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Utara |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Timur |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan | 88 | 88,10 | 88,20 | 88,20 | Kecamatan Bogor Selatan |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Selatan |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Lembaga | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif | 100 | 75 | 80 | 80 | Kecamatan Bogor Selatan |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif | 70 | 75 | 80 | 80 | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | N/A | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Selatan |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan | N/A | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan | N/A | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan | N/A | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | N/A | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Koordinasi dan Ketentraman Umum | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan | 88 | 88,10 | 88,20 | 88,20 | Kecamatan Tanah Sereal |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Tanah Sereal |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilann perempuan dan musrenbag kecamatan | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan anak dalam musrebang kecamatan | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Tanah Sereal |
| | | | | | | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | N/A | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Tanah Sereal |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan | N/A | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan | N/A | 2 | 2 | 2 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan | N/A | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | N/A | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Barat |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | N/A | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | N/A | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | N/A | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan | 88 | 88,10 | 88,20 | 88,20 | Kecamatan Bogor Barat |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Barat |
| | | | | | | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang AKtif | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Barat |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan | N/A | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan | N/A | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan | N/A | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | N/A | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Tengah |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan ketentraman dan s umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan | 88 | 88,10 | 88,20 | 88,20 | Kecamatan Bogor Tengah |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Tengah |
| | | | | | | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | N/A | 100 | 100 | 100 | Kecamatan Bogor Tengah |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan | N/A | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan | N/A | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan | N/A | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | N/A | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Pengelolaan Arsip | Persentase Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik | 41,17 | 51.42 | 57.14 | 57.14 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| | | | | | | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase arsip statis yag diselamatkan, dielstarikan dan dimanfaatkan | 49,38 | 52 | 53 | 53 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| | | | | | | Program Perizinan Penggunaan Arsip | Persentase arsip tertutup yang dibuatkan sarana temu baliknya | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai evaluasi kinerja internal minimal “20” | 61,11 | 70,63 | 75,4 | 75,4 | Inspektorat |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | |
| | | | | | | | Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP | 86,96 | 90 | 92 | 92 | |
| | | | | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan struktur dan proses SPIP pada level 3 | N/A | 90 | 90 | 90 | Inspektorat |
| | | | | | | | Nilai Capaian MCP KPK diatas rata-rata nasional | 85,53 | 87 | 88 | 88 | |
| | | | | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dan penganggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | | Persentase kepatuhan pengalokasian anggaran mandatory sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Transparansi Perencanaan Penganggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Transparansi Pelaksanaan APBD | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | | Persentase penyerapan realisasi anggaran dalam APBD | 95,41 | 93 | 93 | 93 | |
| | | | | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Tingkat Kepatuhan Perizinan Bangunan | 7 | 7 | 10 | 10 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | | Persentase Kepatuhan Pensertifikatan Tanah | 24 | 34 | 39 | 39 | |
| | | | | | | | Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik | 67 | 83 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase Ketepatwaktuan penyampaian laporan stock opname dan BA rekon | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25 poin | 55,55 | 75 | 80,55 | 80,55 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah | 92,58 | 93 | 93 | 93 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | Persentase terselenggaranya penyebarluasan informasi | 90 | 80 | 90 | 90 | |
| | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM ≥ 3,35 | 86,11 | 88,89 | 91,67 | 91,67 | Sekretariat Daerah |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 100 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu | N/A | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase penanganan perkara (TUN dan Perdata) yang dapat diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n | 33 | 36,11 | 41,66 | 41,66 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | | | | | Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi | N/A | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah | N/A | 30 | 50 | 50 | |

| Tujuan & Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Program | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Rencana Kerja DPRD yang di fasilitasi sesuai fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan | 100 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional | Indeks BerAKHLAK | 60,5 | 62,5 | 62,7 | 62,7 | Program Kepegawaian Daerah | Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian | 44 poin | 56,5 poin | 56,5 poin | 56,5 poin | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata-rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat | 71,29 | 72 | 72,72 | 72,72 | | Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan | 150 poin | 170 poin | 170 poin | 170 poin | |
| | | | | | | | Indeks Sistem Merit Aspek perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai, sistem informasi serta perlindungan dan pelayanan | 112 poin | 114 poin | 114 poin | 114 poin | |
| | | | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat | 38 poin | 43 poin | 43 poin | 43 poin | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi | Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai diatas "75" | 4,8 | 10 | 15 | 15 | Inspektorat Daerah |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2024*

## 6.3 Program Pembangunan Berbasis Spasial

Pembangunan daerah tidak hanya menggunakan pendekatan sektoral namun perlu disertai dengan pendekatan spasial sehingga dapat saling melengkapi untuk menghasilkan program pembangunan daerah yang selaras. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, program pembangunan dilengkapi dengan pendekatan spasial yang berpedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.

Pendekatan spasial pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026 melalui Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah dengan Indikasi Program Perwujudan RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031, seperti pada Tabel berikut ini.

**Tabel 6.3. 1 Sinkronisasi Program RPD Kota Bogor Tahun 2025 - 2026 dengan Indikasi Program Perwujudan RTRW Kota Bogor 2011-2031**

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1. | **Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing** | | |
| 1.1 | **Meningkatnya Kualitas pendidikan** | | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Pendataan Fasilitas Pendidikan Tahunan (profil fasilitas pendidikan) | Kota Bogor |
| | | Revitalisasi prasarana dan sarana fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK | Setiap WP |
| | | Penambahan TK negeri | WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E) |
| | | Penambahan SD negeri | WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E) |
| | | Penambahan SMP negeri | WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E) |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | | |
| | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | | |
| 1.2 | **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** | | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pendataan Fasilitas Kesehatan | Kota Bogor |
| | | Revitalisasi pelayanan fasilitas kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap unit pengembangan | Kota Bogor |
| | | Pembangunan RSUD | Kota Bogor |
| | | Penambahan Puskesmas dan atau Puskesmas Pembantu | WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, WP Daksina |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja fasilitas kesehatan | Kota Bogor |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Pendataan Fasilitas Olahraga dan Rekreasi Tahunan | Kota Bogor |
| | | Penataan fasilitas olahraga yang ada | Tersebar di kota Bogor |
| | | Pembangunan fasilitas olahraga | Di setiap kecamatan |
| | | Pembangunan fasilitas olahraga terpadu skala kota atau skala nasional | WP Utara, WP Daksina |
| | | Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana olah raga skala WP dan lingkungan | Di setiap kecamatan |
| | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana | | |
| | Program Pengendalian Penduduk | | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | | |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | |
| | Program Pengembangan Perumahan | Pembangunan rumah susun umum | Kawasan yang terakses dengan angkutan umum Tersebar di Kota Bogor |
| | Program Peningkatan Sarana Prasarana Utilitas | Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan | Kota Bogor |
| | | Pembangunan prasarana dan sarana utilitas perumahan permukiman | Tersebar di Kota Bogor |
| | | Penataan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perumahan | Kota Bogor |
| | | Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada | Menyebar di Kota Bogor |
| | | Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor | Jalan Dadali, Jalan Pemuda, Jalan Siliwangi, Jalan Adnawijaya, Jalan Ahmad Sobana, Jalan Ahmad Syam, Jalan-jalan lainnya |
| | | Fasilitas integrasi yang menghubungkan TOD | Kawasan TOD |
| | | Mengembangkan jaringan prasarana bawah tanah terpadu | Kota Bogor |
| | | Pendataan TPU | Kota Bogor |
| | | Penyusunan Perencanaan TPU | Kota Bogor |
| | | Penataan dan pengembangan TPU pemerintah | Kelurahan Empang (TPU Dreded) untuk WP Samida, Kelurahan Situ Gede (TPU Situ Gede) untuk WP Pasima, Kelurahan Kebon Pedes (TPU Blender) dan Kelurahan Kayumanis (TPU Kayumanis) untuk WP Utara, Kelurahan Cimahpar (TPU Cimahpar) untuk WP Purwa, Kelurahan |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | | Mulyaharja (TPU Mulyaharja), Kelurahan Genteng (TPU Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (TPU Cipaku), dan Kelurahan Katulampa (TPU Katulampa) untuk WP Daksina |
| | | Pengembangan fasilitas sosial | Sub PPK/ Pusat WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina |
| | | Pengembangan Gardu Induk Listrik | Kota Bogor |
| | | Pendataan Fasilitas Peribadatan Tahunan (profil fasilitas peribadatan) | Kota Bogor |
| | | Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang fasilitas peribadatan | Kota Bogor |
| | | Revitalisasi fasilitas peribadatan | Kota Bogor |
| | | Pembangunan fasilitas peribadatan | Kota Bogor |
| | | Pengembangan untuk panti jompo, panti asuhan, dan rumah singgah | Tersebar di Kota Bogor |
| | | Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel | Seluruh bagian wilayah Kota Bogor |
| | | Pengembangan dan perluasan jaringan internet | Seluruh bagian wilayah Kota Bogor |
| | | Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat | Seluruh bagian wilayah Kota Bogor |
| | | Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel | Seluruh bagian wilayah Kota Bogor |
| | | Pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya | Seluruh bagian wilayah Kota Bogor |
| | | Membangun tower bersama | Seluruh bagian wilayah Kota Bogor |
| | | WIFI Publik | Seluruh bagian wilayah Kota Bogor |
| | | Pengembangan micro cell | Seluruh bagian wilayah Kota Bogor |
| | | Peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya | Seluruh kota |
| | | Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji | Seluruh kota |
| | | Pengembangan sistem keamanan jaringan gas | Seluruh kota |
| | | Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik | Seluruh kota |
| | | Peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota<br>a. Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani<br>b. Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani. | Seluruh kota |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Peningkatan instalasi jaringan listrik | Seluruh kota |
| | | Pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik | Seluruh kota |
| | | Pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah | Kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota |
| | | Peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi listrik | Seluruh kota |
| | | Pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik | Seluruh kota |
| | Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Penyusunan rencana induk proteksi kebakaran | Kota Bogor |
| | | Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran | Perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah. |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum | Perluasan pelayanan sistem jaringan bukan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum | Kota Bogor |
| | | Pengembangan fasiiltas penampungan air skala lingkungan | Kota Bogor |
| | | Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan | Kota Bogor |
| | | Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air | Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan Layanan PDAM |
| | | Pengembangan SPAM Zona 1:<br>a. Pembangunan Intake<br>b. pembangunan IPA<br>c. pembangunan reservoir<br>d. pengembangan jaringan perpipaan<br>e. Program penurunan kehilangan air<br>• Pembangunan *District Metering Area* (DMA) | Zona 1 |
| | | Pengembangan SPAM Zona 2<br>a. Pembangunan Intake<br>b. pembangunan IPA<br>c. pembangunan reservoir<br>d. pengembangan jaringan perpipaan<br>e. Program penurunan kehilangan air<br>• Pembangunan *District Metering Area* (DMA) | Zona 2 |
| | | Pengembangan SPAM Zona 3<br>a. Pembangunan Intake<br>b. pembangunan IPA<br>c. pembangunan reservoir<br>d. pengembangan jaringan perpipaan<br>e. Program penurunan kehilangan air<br>• Pembangunan *District Metering Area* (DMA) | Zona 3 |
| | | Pengembangan SPAM Zona 4<br>a. Pembangunan Intake<br>b. pembangunan IPA<br>c. pembangunan reservoir<br>d. pengembangan jaringan perpipaan | Zona 4 |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | e. Program penurunan kehilangan air<br>• Pembangunan *District Metering Area* (DMA) | |
| | | Pengembangan SPAM Zona 5<br>a. Pembangunan Intake<br>b. pembangunan IPA<br>c. pembangunan reservoir<br>d. pengembangan jaringan perpipaan<br>e. Program penurunan kehilangan air<br>• Pembangunan *District Metering Area* (DMA) | Zona 5 |
| | | Pengembangan SPAM Zona 6<br>a. Pembangunan Intake<br>b. pembangunan IPA<br>c. pembangunan reservoir<br>d. pengembangan jaringan perpipaan<br>e. Program penurunan kehilangan air<br>• Pembangunan *District Metering Area* (DMA) | Zona 6 |
| | | Pengembangan SPAM Zona 7<br>a. Pembangunan Intake<br>b. pembangunan IPA<br>c. pembangunan reservoir<br>d. pengembangan jaringan perpipaan<br>e. Program penurunan kehilangan air<br>• Pembangunan *District Metering Area* (DMA) | Zona 7 |
| | | Pengembangan SPAM Zona baru<br>a. Pembangunan Intake<br>b. pembangunan IPA<br>c. pembangunan reservoir<br>d. pengembangan jaringan perpipaan<br>e. Program penurunan kehilangan air<br>• Pembangunan *District Metering Area* (DMA) | Kota Bogor |
| | | Perluasan pelayanan sistem jaringan bukan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum | Kota Bogor |
| | | Pengembangan fasiiltas penampungan air skala lingkungan | Kota Bogor |
| | | Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum | Kota Bogor |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Optimalisasi dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik komunal beserta jaringannya pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan | Di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan |
| | | Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) | Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan/ WP Daksina |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Optimalisasi dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman menjadi Skala Kota dan IPLT | Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara |
| | | Pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) | Kota Bogor |
| | | Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) | Seluruh Kota Bogor |
| | | Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran | Seluruh Kota Bogor |
| | | Pengembangan Instalasi Pengolahaan Air Limbah | Kota Bogor |
| **1.3** | **Meningkatnya taraf hidup masyarakat** | | |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | | |
| | Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja | | |
| | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan promosi hasil industri kecil dan menegah | Kota Bogor |
| | | Pengembangan sentra pemasarana hasil industri kecil dan menengah | Kota Bogor |
| | | Fasilitasi pengembangan sentra industri kecil dan menengah | Kota Bogor |
| | | Monitoring dan evaluasi kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan | Kota Bogor |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Program Rehabilitasi Sosial | | |
| | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | |
| | Program Penanganan Bencana | | |
| | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial | | |
| | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | |
| | Program Kawasan Permukiman | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan | Kota Bogor |
| | | Revitalisasi kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan kampung dan pembangunan rumah susun | Berdasarkan pemutakhiran data kawasan permukiman kumuh Kota Bogor |
| | | Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur | Kel Panaragan,Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur |
| | | Penyusunan Review Rencana Induk Perumahan Permukiman | Kota Bogor |
| | | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan | Kota Bogor |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Pendataan perumahan Kota Bogor dan Kecamatan (profil perumahan dan prasarana sarana utilitas perumahan eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan) | Kota Bogor, setiap Kecamatan |
| | **Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif** | | |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | | |
| | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | | |
| | Program Pendaftaran Penduduk | | |
| | Program Pencatatan Sipil | | |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | |
| | Program Pemenuhan Hak Anak | | |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | | |
| | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | |
| | Program Rehabilitasi Sosial | | |
| | Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | | |
| | Program Pengelola Sistem Data Gender dan Anak | | |
| | Program Perlindungan Perempuan | | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | |
| **1.4** | Program Pengembangan Kepramukaan | | |
| | Program Penelitian dan Pengembangan | | |
| | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | |
| | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | |
| | Program Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | | |
| | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | | |
| | Program Pengembangan Kesenian Tradisonal | | |
| | Program Pembinaan Sejarah | | |
| | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | | |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | | |
| | Program Penanggulangan Bencana | | |
| **2.** | **Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan** | | |
| **2.1** | **Mengoptimalkan potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah** | | |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pengembangan kluster-kluster wisata Kota Bogor | Kota Bogor |
| | | Pengembangan wisata agro, pariwisata MICE dan rekreasi alam | WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E) |
| | | Pengembangan wisata perkemahan | WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E) |
| | | Pembangunan kampong Sunda | WP Purwa (WP D) |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Pengembangan kegiatan agrowisata | Kota Bogor |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Program Pemasaran Pariwisata | | |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual | | |
| | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | | |
| | Program Perekonomian dan Pembangunan | | |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | | |
| | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | | |
| | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | | |
| | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | | |
| | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | | |
| | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| **2.2** | **Meningkatnya iklim investasi yang kondusif** | | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | |
| | Program Promosi Penanaman Modal | | |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | |
| | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | | |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | | |
| | Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja | | |
| | Program Hubungan Industrial | | |
| | Program Perekonomian dan Pembangunan | | |
| **2.3** | **Mengoptimalkan potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar** | | |
| | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Pengembangan sentra pemasarana hasil industri kecil dan menengah | Kota Bogor |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | | |
| | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Pendataan kawasanperuntukan Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan) | Kota Bogor |
| | | Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan | Kota Bogor |
| | Program Pengembangan Ekspor | | |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Pendataan Kawasan Perdagangan Jasa Tahunan (profil perdagangan jasa eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan) | Kota Bogor |
| | | Revitalisasi Plaza Bogor | Plaza Bogor |
| | | Revitalisasi Pasar Sukasari | Pasar Sukasari |
| | | Revitalisasi Pasar Bogor | Pasar Bogor |
| | | Relokasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor | Pasar Bogor dan Plaza Bogor |
| | | Revitalisasi Pasar Jambu Dua | WP Purwa |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Pengembangan Pasar Teknik Umum menjadi Pasar Induk | WP Utara (WP C) |
| | | Revitalisasi pasar rakyat | Tersebar di kota Bogor |
| | | Pengembangan pasar rakyat | WP Pasima (WP B)<br>WP Utara (WP C)<br>WP Purwa (WP D)<br>WP Daksina (WP E) |
| | | Penataan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP | WP Pasima (WP B)<br>WP Utara (WP C)<br>WP Purwa (WP D)<br>WP Daksina (WP E) |
| | | Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota/ regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP | WP Purwa di sepanjang jalan arteri/frontage Jalan Tol Lingkar Luar Bogor dan pusat WP |
| | | Penataan kawasan perdagangan dan jasa di koridor *Inner Ring Road* | koridor *Inner Ring Road* |
| | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | | |
| | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | | |
| | Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | | |
| | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | |
| | Program Perekonomian dan Pembangunan | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pendataan kawasan pertanian, LP2B | Kota Bogor |
| | | Pengembangan sistem pertanian tanaman pangan perkotaan | Kota Bogor |
| | | Kegiatan dukungan keberlanjutan kawasan pertanian dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); | Kota Bogor |
| | | Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pertanian | Kota Bogor |
| | | Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai RPH regional | WP Pasima (WP B) |
| | | Berkerjasama dengan pengelola lahan pertanian dalam bentuk kebun penelitian dan percobaan dalam menjaga dan memelihara kebun penelitian sebagai bagian dari RTH | Kota Bogor |
| | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | |
| | Program Penyuluhan pertanian | Sosialisasi sistem pertanian perkotaan, meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, hidroponik | Kota Bogor |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | | |
| **2.4** | **Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan** | | |
| | Program Penanggulangan Bencana | Penetapan dan peningkatan standar fasilitas minimum kelaikan bangunan dan kelengkapan peralatan | Kota Bogor |
| | | Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana | Kota Bogor |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi | |
| | | Penyediaan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana | Kota Bogor |
| | | Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana secara rinci | Kota Bogor |
| | | Penanganan kawasan rawan bencana banjir | Kawasan Pacilong Kelurahan Kebon Pedes, Kampung Situ Asem Kelurahan Mekarwangi, Kampung Kramat Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Cibadak, Kelurahan Cibuluh |
| | | Penanganan kawasan rawan bencana longsor | Di sepanjang sungai Cisadane, sungai Ciomas, saluran Cisadane Empang, saluran Cidepit, saluran Cibalok, sepanjang sungai Ciliwung, dan lokasi-lokasi yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) terutama di Kecamatan Bogor Selatan |
| | | Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran | Perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah. |
| | | Peningkatan kesiagaan terhadap bencana | Kota Bogor |
| | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | |
| | Program Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | |
| **3.** | **Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah** | | |
| **3.1** | **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal** | | |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang pemerintahan | Kota Bogor |
| | | Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan infrastruktur | Kota Bogor |
| | | Penataan kawasan campuran | Kota Bogor |
| | | Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan campuran | Kota Bogor |
| | | Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang militer | Kota Bogor |
| | | Pembangunan Pusat Lingkungan | Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja |
| | | Pembangunan RTNH skala WP | Tersebar di WP Daksina (WP E) |
| | | Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) ( perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) | Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – *Inner Ring Road* |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) Koridor *Inner Ring Road* | Koridor *Inner Ring Road* |
| | | Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Daksina (WP E) | Sub Pusat WP Dasina (WP E) |
| | | Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota | Kawasan TOD Skala Sub Kota |
| | | Pembangunan RTNH skala WP | Tersebar di WP Purwa (WP D) |
| | | Pembangunan Pusat Lingkungan | Kelurahan Kedunghalang, Ciluar, Cimahpar, Tegalgundil |
| | | Pengembangan kawasan Sub PPK WP Purwa (WP D) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa (WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) | Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya |
| | | Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Purwa (WP D) | Sub Pusat WP Purwa (WP D) |
| | | Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota | Kawasan TOD Skala Sub Kota |
| | | Pembagunan RTNH skala WP | Tersebar di WP Utara (WP C) |
| | | Pembangunan Pusat Lingkungan | Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, Kebonpedes, Cilendek Barat |
| | | Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) ( perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) | Sub PPK Utara 9WP C): Yasmin – Pasar TU Kemang |
| | | Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Pasima (WP C) | Sub Pusat WP Utara (WP C) |
| | | Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota | Kawasan TOD Skala Sub Kota |
| | | Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota | Kawasan TOD Skala Sub Kota |
| | | Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan, penyiapan lahan, dan pembangunan) | Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang |
| | | Pembagunan RTNH skala WP | Tersebar di WP Pasima (WP B) |
| | | Pembangunan Pusat Lingkungan | Kelurahan Balungbang Jaya, Gunungbatu |
| | | Penataan Pusat Lingkungan | Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Pengembangan RTNH skala kota | PPK WP Samida (WP A) |
| | | Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur | Kel Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur |
| | | Penataan kawasan TOD Kota Bogor | TOD Stasiun Bogor |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | Program Penataan Bangunan Gedung:<br>a. Kantor Pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota<br>b. Kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota | Kota Bogor |
| | | Penataan kawasan perkantoran | PPK |
| | | Penambahan kawasan perkantoran pemerintahan baru skala kota | WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Pasima (WP B) dan WP Daksina (WP E) |
| | | Rehabilitasi/ peremajaan bangunan pemerintah | Kota Bogor |
| | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol | Akses konektivitas ke Jalan Tol Lingkar Bogor (BoRR), Akses konektivitas dari jalan R3 (Kolonel Ahmad Syam) ke Jalan Jagorawi (Baranangsiang), Akses konektivitas dari rencana jalan Bogor Inner Ring Road ke Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) |
| | | Pembangunan jalan arteri sekunder | Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa, Rencana ruas jalan Stasiun Sukaresmi - Jalan KH Sholeh Iskandar |
| | | Pembangunan jalan kolektor sekunder | Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina; Jalan tembus Ahmad Sobana – Ahmad Yani, Rencana ruas jalan: Pertigaan Salabenda-kel Kayumanis - Kel Mekarwangi – Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kab Bogor), Rencana ruas jalan: Jalan KH Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya, Rencana ruas jalan: Stasiun Sukaresmi – Jalan Raya Pemda (Kedung Halang), Rencana ruas jalan: Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) – Perum Pondok Aren – Jalan P Aoghiri, Rencana ruas jalan: Jalan Adnawijaya – Jalan P Asogiri – Jalan Sukaraja (samping |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | | sungai Ciluar), Rencana ruas jalan: Jalan Ahmad Sobana – Jalan P Shogiri – samping jalan Toll Jagorawi, Rencana ruas jalan: Jalan R3 – Kampung Cokondang – samping jalan Toll Jagorawi – Jalan Parung Banteng, Rencana ruas jalan frontage Bogor Inner Ring Road ke Lingkar Luar Bogor (kelurahan mulyaharja), Rencana ruas jalan alternatif Situ Gede, Rencana ruas jalan dibawah jalur listrik tegangan tinggi |
| | | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | Tersebar di Kota Bogor |
| | | Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) | Semua WP |
| | | Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan) | Semua WP |
| | | Peningkatan Jembatan | Jembatan jalan MA Salmun, Jembatan Jalan Veteran, Jembatan Batu Tulis – Pamoyanan, Jembatan ruas jalan lainnya |
| | | Pembangunan persimpangan tidak sebidang | Jalan arteri, kolektor dan lokal lainnya |
| | | Perbaikan geometrik simpang | Simpang Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor - Jalan KS. Tubun, Simpang Tol Lingkar Bogor – Jalan Pangeran Sogiri, Simpang Ahmad Syam – Cimahpar, Simpang Jalan Ahmad Syam – Jalan Tol Jagorawi (Kampung Sawah) |
| | | Jalan Lokal | Tersebar di Kota Bogor |
| | | Penyusunan data base jaringan jalan | Kota Bogor |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Penanganan drainase primer | S. Cisindangbarang, S. Carampulang, S.Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, S.Cipinanggading, S.Cibeureum, S.Cinangka, S.Cisadane Hulu, Jl.Cipaku, S.Ciawi, S.Cipaku, S.Ciliwung, S.Ciseuseupan, S.Ciluar, S.Cibeuleut, S.Cimahpar, S. Cikerti, S.Cibuluh, S.Ciparigi, S.Ciliwung, Jl. Pajajaran, Jl. Otista, S.Cipakancilan, |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | | S.Cibuluh, Jl.Raya Baru, Kali Kayang, S.Cigede kulon, S.Cimanggis. |
| | | Penanganan drainase sekunder | Anak sungai cisindangbarang, Jalan Jakarta - Bogor, Jalan lingkar luar, JL,raya Bogor Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, Jl.Rd.Hanafiah, Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri, Jl.Pengadilan, Cibuluh, Jl.A.Adnawijaya, Jl.Martadinata, Jl. Kedung Badak, Jl.Parung, Jl.Kemang, Mekarsari. |
| | | Penanganan drainase tersier | Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Jl.Gunung Batu, Jel.Menteng, Cilendek, Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, Bojongkerta, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, Parung, Kel.Kencana, drainase lokal. |
| | | Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan | Kawasan sempadan sungai |
| | | Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase | Kota Bogor |
| | | Normalisasi sungai dan saluran | Kota Bogor |
| | | Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya | Kawasan Sempadan Sungai |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | | |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pembangunan terminal di Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, Kertamaya yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan | Tanah Baru<br>Bubulak<br>Mulyaharja<br>Kertamaya |
| | | Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan | Kelurahan Sukaresmi |
| | | Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD | Kawasan TOD |
| | | Peningkatan sarana pendukung terminal | Seluruh Terminal |
| | | Pembangunan terminal barang | Kelurahan Tanah Baru |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala sub kota | Sukaresmi<br>Tanah Baru<br>Bubulak<br>Mulyaharja<br>Kertamaya |
| | | Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala lingkungan | Menyebar di Kota Bogor (sesuai hasil kajian lebih lanjut) |
| | | Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan | Seluruh jalan |
| | | Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horizontal | Pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya |
| | | Pembangunan gedung parkir dan atau pelataran parkir | Pusat-pusat kegiatan Kawasan pengembangan TOD |
| | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Pembangunan Stasiun Kereta Api penunjang jalur kereta api Bogor Sukabumi | Berdasarkan hasil kajian lebih lanjut |
| **3.2** | **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan** | | |
| | Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati | Pendataan RTH Publik (profil RTH, pemanfaatan ruang, perubahan fungsi, sistem informasi) | Kota Bogor |
| | | Penyusunan dokumen pendukung pengadaan lahan dan pembangunan RTH | Setiap WP |
| | | Pengembangan RTH skala kota | PPK WP Samida (WP A) |
| | | Pembangunan RTH skala WP | Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang |
| | | Pembangunan RTH skala WP | WP Utara (WP C) |
| | | Pembangunan RTH skala WP | WP Purwa (WP D) |
| | | Pembangunan RTH skala WP | WP Daksina |
| | | Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada disempadan sungai, danau/situ dan mata air | Menyebar di kota Bogor |
| | | Penyusunan dokumen pendukung pengadaan lahan dan pembangunan RTH | Setiap WP |
| | | Pengadaan tanah untuk RTH melalui program *land banking* | Setiap WP |
| | | Perencanaan dan pembangunan hutan kota, taman Kehati (keanekaragaman hayati) | WP Pasima (WP B)<br>WP Utara (WP C),<br>WP Purba (WP D)<br>WP Daksina (WP E) |
| | | Perencanaan dan pembangunan taman kota | Di pusat kota dan di setiap Sub PPK |
| | | Perencanaan dan pembangunan taman WP dan lingkungan | Menyebar di seluruh Kota Bogor<br>Permukiman padat penduduk (kawasan kumuh) |
| | | Perencanaan dan pembangunan taman tematik | Menyebar di seluruh Kota Bogor |
| | | Pembangunan sempadan jalan / Jalur hijau jalan | Menyebar di seluruh Kota Bogor |
| | | Revitalisasi sempadan jalan, sempadan rel kereta api, sempadan SUTT yang mengalami menurun fungsi | Kota Bogor |
| | | Membangun dan memanfaatkan RTH di daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi | Daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Pendataan kondisi pohon pelindung dan pemeliharaan pohon pelindung di RTH publik wilayah Kota Bogor | Jalur protokol tersebar di Kota Bogor, jalur hijau kawasan perumahan yang terdapat pohon pelindung berusia tua/rawan tumbang |
| | Program Pengelolaan Persampahan | Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (Reuse, *Reduce, Recycle)* melalui pembangunan TPS 3R | |
| | | Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota | Kota Bogor |
| | | Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi dengan sistem pengangkutannya | Masing-masing kelurahan |
| | | Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan | Kota Bogor |
| | | Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah | Kota Bogor |
| | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA | TPA Galuga |
| | | Pemanfaatan TPA Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu | TPA Regional Nambo |
| | | Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan TPA Regional Nambo | Kota Bogor |
| | | Pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar | Ciluar |
| | | Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah | Kota Bogor |
| | | Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan | Kota Bogor |
| | | Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan | Diutamakan disetiap kawasan perumahan baru |
| | | Pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu | Kota Bogor |
| | Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat | | |
| | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | | |
| | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | | |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | | |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | | |
| | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan | | |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | | |
| | Program Pengelolaan Sumberdaya Air | Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi | Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota | Sungai Cipakancilan<br>Sungai Cibalok<br>Sungai Ciangke<br>Sungai Ciomas<br>Sungai Cigede<br>Sungai Cisindangbarang<br>Sungai Ciapus<br>Sungai Cibalok |
| | | Pemeliharaan jaringan irigasi | WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina |
| | | Pembangunan sumur resapan di perumahan | Sesuai hasil kajian |
| | | Pembangunan kolam retensi pada lokasi yang memiliki potensi genangan | Sesuai hasil kajian |
| | | Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air) | Kota Bogor |
| | | Peningkatan kualitas air | Kota Bogor |
| | | Pencegahan pencemaran air | Kota Bogor |
| | | Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan | Kota Bogor |
| | | Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air | Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan Layanan PDAM |
| | | Mengamankan embung – embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik | Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor |
| | | Pembangunan sumur resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep *zero run off, eco drainage*, dan *Low impact development* | Kota Bogor |
| | | Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir | Kecamatan Bogor Utara; dan Kecamatan Tanah Sareal |
| | | Penataan kawasan sempadan sungai | Menyebar di kota Bogor |
| | | Penataan kawasan sempadan danau/situ | Menyebar di kota Bogor |
| | | Penataan sempadan kawasan sekitar mata air | Menyebar di kota Bogor |
| | | Pembebasan lahan di sempadan sungai, danau dan mata air | Menyebar di kota Bogor |
| | | Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang mengalami penurunan fungsi lindung | Menyebar di kota Bogor |
| | | Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ | Menyebar di kota Bogor |
| | | Naturalisasi sempadan sungai dan situ | Menyebar di kota Bogor |
| | | Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Pasima | Kelurahan Balumbangjaya,<br>Kelurahan Situgede, Kelurahan Margajaya |
| | | Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Daksina | Kelurahan Mulyaharja,<br>Kelurahan Pamoyanan,<br>Kelurahan Bojong Kerta,<br>Kelurahan Harjasari |

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikasi Program RTRW | Lokasi |
|---|---|---|---|
| | | | Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Genteng |
| | | Pembangunan Taman-taman resapan dengan konsep water harvesting untuk konservasi air dan mengoptimalkan konsep zero run off | Tersebar di Kota Bogor |
| | | Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan perlindungan setempat | Kota Bogor |
| | | Pengembangan kolam retensi | Kota Bogor |
| **4.** | **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan** | | |
| **4.1** | **Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif** | | |
| | Program Aplikasi dan Informatika | | |
| | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi | | |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | |
| | Program Informasi dan Komunikasi Publik | | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | |
| | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | Program Perekonomian dan Pembangunan | | |
| | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | | |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | | |
| | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | |
| | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | | |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | |
| | Program Pengelolaan Arsip | | |
| | Program Perizinan Penggunaan Arsip | | |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | | |
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | | |
| | Program Perekonomian dan Pembangunan | | |
| | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | |
| **4.2** | **Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional** | | |
| | Program Kepegawaian Daerah | | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | | |
| | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi | | |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

Tujuan maupun sasaran dalam RPD Kota Bogor 2025-2026 yang diwujudkan melalui program-program pembangunannya harus selalu selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Program pembangunan dalam RPD Kota Bogor 2025-2026 yang selaras dengan RTRW sebagai bentuk pendekatan spasial dalam perwujudan dan pelaksanaan program pembangunan Kota Bogor. Pada tabel di atas, program RPD Kota Bogor 2025-2026 diselaraskan dengan indikasi program perwujudan RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031.

Pada setiap program atas tiap tujuan dan sasaran yang terbagi atas empat tujuan pembangunan. Setiap tujuan dijabarkan dengan sasaran turunannya, kemudian dijabarkan lagi dengan program-program pembangunan yang sudah ditetapkan, dari program tersebut diselaraskan dengan program pembangunan dalam RTRW serta lokasi atas wilayah perencanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021. Dengan adanya sinkronisasi program pembangunan RPD Kota Bogor 2025-2026 dengan indikasi program perwujudan RTRW Kota Bogor 2011-2031, harapannya dapat mewujudkan pembangunan yang selaras dan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap pembangunan kedepan sejalan dengan yang direncanakan dengan upaya pembangunan lainnya.

# BAB VII
# KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan yang memuat kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mendanai program pembangunan daerah. Kapasitas riil keuangan yang disajikan adalah perkiraan ketersediaan pendanaan di luar belanja wajib dan mengikat. Pemerintah Kota Bogor telah menyusun program pembangunan, indikator kinerja dan target kinerja *outcome* seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

## 7.1 Kerangka Pendanaan

Belanja daerah ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan urusan konkuren pemerintah daerah provinsi meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan unsur pemerintahan umum.

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah. Belanja daerah yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja

Transfer. Pemerintah Kota Bogor telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang.

**Tabel 7.1. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah**

| URAIAN | Target | |
|---|---|---|
| | 2025 | 2026 |
| Kapasitas Riil kemampuan keuangan | 1.333.257.480.249,76 | 1.631.360.295.795,03 |
| | | |
| Prioritas I (60%) | **799.954.488.149,86** | **978.816.177.477,02** |
| Prioritas II (40%) | **533.302.992.099,90** | **652.544.118.318,01** |

*Sumber: Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Bogor*

## 7.2 Proyeksi Pendanaan Program

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

a. Penjabaran visi dan misi RPJPD Tahun 2005-2025;
b. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
c. Pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
d. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs);
e. Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
f. Penerapan sub bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
g. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Rencana program perangkat daerah Kota Bogor untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2026. Program dimaksud merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kota Bogor, serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan dan unsur pemerintahan umum.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan Kota Bogor

tahun 2025-2026, telah disusun program pembangunan yang disertai pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Bogor. Pendanaan program pembangunan berdasarkan urusan, bidang urusan, dan perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.2.1 sebagai berikut:

## Tabel 7.2. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | |
| **Pendidikan** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 25,2 | 438.105.996.277,00 | 25,8 | 315.011.950.849,80 | 25,9 | 330.682.458.494,52 | 25,9 | 645.694.409.344,32 | Dinas Pendidikan |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 26,1 | | 25,98 | | 26,08 | | 26,08 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 12,75 | | 10,88 | | 10,98 | | 10,98 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 14 | | 17,8 | | 17,9 | | 17,9 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | N/A | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | N/A | | 81,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | N/A | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | N/A | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | N/A | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Pengelolaan Pendidikan | Indeks SPM (Pendidikan) | 67,42 | 393.368.019.809,00 | 67,2 | 248.288.569.696,98 | 77,19 | 263.009.689.552,71 | 77,19 | 511.298.259.249,69 | Dinas Pendidikan |
| **Kesehatan** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 28,60 | 210.139.681.290,00 | 27,01 | 155.860.724.862,50 | 27,34 | 164.611.879.012,28 | 27,34 | 320.472.603.874,78 | Dinas Kesehatan |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 28,88 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 13,08 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 22,70 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | N/A | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 92,28 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 94,66 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 94,21 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 92,43 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup | 59,89 | 387.025.035.892,00 | 54,5 | 383.648.933.276,97 | 54 | 404.749.016.321,11 | 54 | 788.397.949.598,08 | Dinas Kesehatan |
| | Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup | 6,7 | | 2,7 | | 2,6 | | 2,6 | | |
| | Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup | 7,08 | | 2,9 | | 2,8 | | 2,8 | | |
| | persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Prevalensi Hipertensi | 9,66 | | 8,4 | | 8,4 | | 8,4 | | |
| | Prevalensi Diabetes Melitus | 2,5 | | 2,05 | | 2,05 | | 2,05 | | |
| | Prevalensi ODGJ | 0,18 | | 0,14 | | 0,14 | | 0,14 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Angka Keberhasilan Pengobatan TB | 74,28 | | 90 | | 90 | | 90 | | |
| | Predikat STBM | Pratama | | Paripurna | | Paripurna | | Paripurna | | |
| | Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Insiden Rate HIV | 0,19 angka | | 0,18 angka | | 0,18 angka | | 0,18 angka | | |
| | Persentase Balita Berstatus gizi Normal | 86,54 | | 87,10 | | 87,20 | | 87,20 | | |
| | Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional | 99,7 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Ratio Puskesmas per 30.000 penduduk | 0,673 | | 0,673 | | 0,673 | | 0,673 | | |
| | Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | |
| | Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi | 53,57 | | 55 | | 60 | | 60 | | |
| | Persentase keluarga yang diintervens | 69,239 | | 94 | | 96 | | 96 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | melalui pendekatan keluarga | | | | | | | | | |
| | Capaian SPM RSUD Kota Bogor | 93,1 | | 93,1 | | 93,1 | | 93,1 | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan | 90,6 | 3.420.262.640,00 | 96 | 9.176.662.789,15 | 96,50 | 9.696.371.389,82 | 96,50 | 18.873.034.178,97 | Dinas Kesehatan |
| | Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan | 99,26 | | 96 | | 96 | | 96 | | |
| Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan | 32,9 | 263.918.100,00 | 40 | 476.457.406,83 | 45 | 503.440.964,78 | 45 | 979.898.371,62 | Dinas Kesehatan |
| | Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian | 55 | | 65 | | 70 | | 70 | | |
| | Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan | 50 | | 60 | | 65 | | 65 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi | 63,20 | | 70 | | 75 | | 75 | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Rumah Tangga ber PHBS | 71,53 | 13.775.197.200,00 | 72,20 | 11.927.726.798,56 | 72,40 | 12.603.238.402,94 | 72,40 | 24.530.965.201,50 | Dinas Kesehatan |
| | Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri | 10,29 | | 11,50 | | 12 | | 12 | | |
| **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 28,65 | 47.877.097.937,00 | 28,85 | 24.347.792.218,55 | 29,95 | 28.729.147.306,62 | 29,95 | 53.076.939.525,17 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 25,13 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,6 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 18,75 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 75 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | 94 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 94 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | 90,6 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 80,39 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 80,19 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 74,92 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 79,44 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Sungai yang berkondisi baik (%) | 82,46 | 33.869.408.400,00 | 87,97 | 34.953.898.979,10 | 93,64 | 39.203.469.173,06 | 93,64 | 74.157.368.152,16 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Persentase Lokasi rawan banjir yang ditangani | 2,38 | | 3,57 | | 4,76 | | 4,76 | | |
| | Persentase irigasi yang berkondisi baik (%) | 53,66 | | 62,21 | | 66,49 | | 66,49 | | |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman | 76,57 | - | 78,37 | 1.003.666.851,37 | 84,69 | 1.094.379.847,11 | 84,69 | 2.098.046.698,49 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak | 91,91 | | 93,68 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD) yang layak | 73,46 | 19.948.669.600,00 | 74,99 | 11.848.319.293,81 | 79,12 | 17.919.189.110,96 | 79,12 | 29.767.508.404,77 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD) yang aman | 5,49 | | 6,1 | | 6,6 | | 6,6 | | |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Presentase penurunan lokasi genangan | 0,89 | 19.456.368.000,00 | 0,80 | 14.650.753.049,58 | 0,75 | 15.974.911.257,20 | 0,75 | 30.625.664.306,79 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Persentase pemenuhan ketersediaan drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal | 62 | | 75 | | 80 | | 80 | | |
| Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung | N/A | 2.656.612.000,00 | 30 | 24.370.365.825,88 | 50 | 28.753.761.152,25 | 50 | 53.124.126.978,13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRW/RDTRK) | N/A | - | 50 | 3.666.999.735,68 | 100 | 4.051.237.699,78 | 100 | 7.718.237.435,46 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang | 88,95 | 76.755.417.221,00 | 89 | 114.953.322.548,49 | 89,2 | 136.998.436.758,12 | 89,2 | 251.951.759.306,61 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik | 8,2 | 375.000.000,00 | 14,22 | 260.132.699,21 | 22,22 | 287.390.093,80 | 22,22 | 547.522.793,01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang | 60 | 1.500.000.000,00 | 65 | 1.230.209.868,95 | 75 | 1.359.114.523,85 | 75 | 2.589.324.392,80 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 29,06 | 41.341.924.281,00 | 29,06 | 30.699.753.677,66 | 29,07 | 34.427.880.916,01 | 29,07 | 65.127.634.593,67 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 28,13 | | 28,13 | | 28,15 | | 28,15 | | |
| | Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 12,49 | | 12,50 | | 12,51 | | 12,51 | | |
| | Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 19,80 | | 19,81 | | 19,82 | | 19,82 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Kepatuhan Anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | 94,85 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 86,5 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM | 89,2 | | 89,3 | | 89,35 | | 89,35 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 83,55 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 92,5 | | 93 | | 93,5 | | 93,5 | | |
| Program Pengembangan Perumahan | Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni | 100 | 6.336.685.880,00 | 100 | 14.160.657.707,21 | 100 | 15.880.304.524,76 | 100 | 30.040.962.231,97 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase tingkat hunian rusunawa | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | |
| | Persentase intervensi rumah layak huni bagi warga miskin | 19,06 | | 14,73 | | 14,73 | | 14,73 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Kawasan Permukiman | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah | 7,18 | 5.207.549.800,00 | 5,53 | 32.917.184.622,70 | 3,88 | 41.914.593.002,27 | 3,88 | 74.831.777.624,97 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara | 30,31 | | 39,79 | | 41,47 | | 41,47 | | |
| | Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara | 27,45 | | 33,67 | | 39,94 | | 39,94 | | |
| Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara | 46,04 | 82.295.943.284,00 | 54,13 | 48.678.360.526,35 | 62,22 | 59.589.780.002,28 | 62,22 | 108.268.140.528,63 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Persentase drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara | 46,04 | | 54,13 | | 62,22 | | 62,22 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase luas tembok penahan tanah yang dibangun untuk pengamanan kawasan permukiman dan pencegahan bencana | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase pengelolaan makam yang dikelola pemerintah | 20,74 | | 21,03 | | 21,33 | | 21,33 | | |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Luas penambahan RTH Publik Budidaya yang dibangun | 471,31 | 16.709.565.196,00 | 472,91 | 22.532.835.838,96 | 473,91 | 30.269.186.101,91 | 473,91 | 52.802.021.940,87 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik | 47,96 | | 49,77 | | 50,57 | | 50,57 | | |
| **Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 23,8 | 7.607.641.042,00 | 27,01 | 5.505.313.780,17 | 27,34 | 5.716.294.774,91 | 27,34 | 11.221.608.555,08 | BPBD |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 21 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 11,69 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 15,2 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD) | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase Kepatuhan Anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | 88 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 89,1 | | 87,11 | | 87,37 | | 87,37 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM | 91,8 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 89 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 88,3 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Penanggulangan Bencana | Persentase masyarakat tangguh bencana | N/A | 1.144.689.400,00 | 5 | 1.246.204.027,16 | 5 | 1.293.962.497,58 | 5 | 2.540.166.524,74 | BPBD |
| | Persentase logistik dan perawatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana | N/A | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 27,51 | 40.394.323.213,00 | 28 | 33.517.328.211,89 | 28,2 | 36.730.609.369,77 | 28,2 | 70.247.937.581,66 | Satpol PP |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 25,5 | | 26,1 | | 26,15 | | 26,15 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 11,01 | | 11,65 | | 11,75 | | 11,75 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 22,93 | | 23,05 | | 23,15 | | 23,15 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase Kepatuhan Anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 90,25 | | 90,3 | | 90,35 | | 90,35 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM | 85 | | 85,15 | | 85,25 | | 85,25 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 89,9 | | 90 | | 90,1 | | 90,1 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 93,75 | | 93,85 | | 93,95 | | 93,95 | | |
| Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase pelanggar perda KTR yang ditertibkan | 100 | 3.062.118.400,00 | 100 | 2.569.330.257,95 | 100 | 2.815.650.025,86 | 100 | 5.384.980.283,81 | Satpol PP |
| | Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman,keindahan) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | 26,37 | 15.198.356.637,00 | 27,01 | 10.656.983.114,04 | 27,34 | 12.917.352.545,63 | 27,34 | 23.574.335.659,67 | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | | | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 26,25 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,42 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 18,33 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 95,95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 92,50 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 92,75 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 81,94 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 88,50 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Pencegahan, | Persentase kelurahan tanggap kebakaran | 35,29 | 970.087.800,00 | 65 | 1.292.941.354,13 | 75 | 1.567.177.043,77 | 100 | 2.860.118.397,89 | Dinas Pemadam Kebakaran |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase SDM aparatur damkar dan penyelamatan yang ditingkatkan kompetensinya | 52,43 | | 75 | | 80 | | 40 | | |
| | Rata Rata respon time penanganan kebakaran | 11,91 | | 9,25 | | 9,20 | | 9,20 | | |
| **Sosial** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 26,99 | 11.241.297.221,00 | 27,01 | 8.841.515.575,20 | 27,34 | 9.180.350.349,30 | 27,34 | 18.021.865.924,50 | Dinas Sosial |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 26,19 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 11,74 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 20,76 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |
| | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD) | 94 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase Kepatuhan Anggaran | 94 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | 94 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 87 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM | 88,25 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 88,5 | | 88,6 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 87,75 | | 88,38 | | 88,39 | | 88,39 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Pemberdayaan Sosial | Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif | 100 | 353.549.800,00 | 100 | 576.392.681,28 | 100 | 598.481.867,50 | 100 | 1.174.874.548,78 | Dinas Sosial |
| | Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | |
| Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 2 | 1.547.179.300,00 | 2 | 943.849.498,31 | 2 | 980.020.789,17 | 2 | 1.923.870.287,48 | Dinas Sosial |
| | Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase layanan rehabilitasi bagi masyarakat lanjut usia Terlantar | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Data Kemiskinan yang tervalidasi | 87 | 973.175.000,00 | 88,50 | 1.048.043.200,66 | 90 | 1.088.207.522,95 | 90 | 2.136.250.723,61 | Dinas Sosial |
| | Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan | 19,57 | | 18 | | 17,50 | | 17 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | 87 | | 90 | | 100 | | 100 | | |
| Program Penanganan Bencana | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota | 100 | 1.168.649.600,00 | 100 | 502.793.125,83 | 100 | 522.061.744,85 | 100 | 1.024.854.870,67 | Dinas Sosial |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik | 100 | 50.146.800,00 | 100 | 141.745.906,97 | 100 | 150.052.294,02 | 100 | 291.798.200,99 | Dinas Sosial |
| **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | |
| **Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 28,04 | 10.292.672.397,00 | 28,04 | 7.619.573.942,68 | 28,50 | 7.911.580.057,88 | 28,50 | 15.531.154.000,56 | Dinas Tenaga Kerja |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 25 | | 25,00 | | 26,00 | | 26,00 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 12,91 | | 12,91 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 22,70 | | 22,70 | | 23,00 | | 23,00 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | N/A | | 95 | | 95 | | 95 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | N/A | | 84,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | N/A | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | N/A | | 88,39 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | N/A | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi | N/A | 2.996.593.337,00 | 100 | 1.583.600.064,54 | 100 | 1.644.288.615,68 | 100 | 3.227.888.680,22 | Dinas Tenaga Kerja |
| | Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memliki Usaha | N/A | | 35 | | 35 | | 35 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi | N/A | | 30 | | 30 | | 30 | | |
| Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja | 91,94 | 519.568.930,00 | 91,94 | 2.364.797.386,98 | 92 | 2.455.423.884,39 | 92 | 4.820.221.271,37 | Dinas Tenaga Kerja |
| Program Hubungan Industrial | Penetapan Besaran UMK | 1 keputusan | 185.960.700,00 | 1 keputusan | 110.847.647,05 | 1 keputusan | 115.095.678,64 | 1 keputusan | 225.943.325,69 | Dinas Tenaga Kerja |
| | Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang Ditindaklanjuti | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 25,20 | 9.172.698.810,00 | 27,01 | 9.850.293.240,57 | 27,34 | 10.227.787.557,76 | 27,34 | 20.078.080.798,32 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak |
| | Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 24,90 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 11,10 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 20,25 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 95,90 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 88,50 | | 88,75 | | 89,00 | | 89,00 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 91,25 | | 91,50 | | 91,75 | | 91,75 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 88,50 | | 88,75 | | 89,00 | | 89,00 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 90,75 | | 90,50 | | 90,75 | | 90,75 | | |
| Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender | 100 | 735.715.700,00 | 100 | 759.037.193,43 | 100 | 788.125.893,65 | 100 | 1.547.163.087,08 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak |
| Program Perlindungan Perempuan | Persentase korban Kekerasan Perempuan yang terlayani | 100 | 735.430.200,00 | 100 | 291.317.559,01 | 100 | 302.481.767,05 | 100 | 593.799.326,06 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak | 100 | 112.706.500,00 | 100 | 89.445.229,47 | 100 | 92.873.052,89 | 100 | 182.318.282,36 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak |
| | Nilai dimensi kualitas legalitas-struktur | N/A | 3.486.516.309,00 | 79,90 | 1.139.396.527,29 | 80 | 1.183.061.797,30 | 80 | 2.322.458.324,59 | Dinas Pemberdayaan |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Nilai dimensi kualitas ketahanan fisik | N/A | | 78,27 | | 80 | | 80 | | Perempuan dan Anak |
| | Nilai dimensi kualitas ketahanan ekonomi | N/A | | 68,35 | | 70 | | 70 | | |
| | Nilai dimensi kualitas Ketahanan Sosial Psikologi | N/A | | 62,91 | | 80 | | 80 | | |
| | Nilai Dimensi kualitas ketahanan sosial budaya | N/A | | 66,61 | | 80 | | 80 | | |
| Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Skor pada klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA | 95 | 549.511.200,00 | 101 | 401.091.829,72 | 104 | 416.462.934,19 | 104 | 817.554.763,91 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak |
| | Skor pada klaster 2 (perlindungan keluarga dan pengasuhan alternatif) KLA | 128 | | 130 | | 137,75 | | 137,75 | | |
| | Skor pada klaster 3 (Kesehatan dasar dan kesejahteraan) KLA | 142 | | 144 | | 146 | | 146 | | |
| | Skor pada klaster IV (Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) KLA | 61 | | 102 | | 102 | | 102 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Perlindungan Khusus Anak | Skor pada klaster V (perlindungan khusus anak) | 155 | - | 156 | 397.960.397,14 | 157 | 413.211.495,22 | 157 | 811.171.892,36 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak |
| **Pangan** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 26,43 | 15.780.108.174,00 | 26,53 | 12.995.106.518,97 | 26,58 | 13.493.120.003,69 | 26,58 | 26.488.226.522,66 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 28,5 | | 28,55 | | 28,55 | | 28,55 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,82 | | 11,92 | | 11,97 | | 11,97 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 22,7 | | 22,8 | | 22,85 | | 22,85 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | N/A | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 83,66 | | 85,47 | | 85,92 | | 85,92 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 88,63 | | 89,53 | | 89,75 | | 89,75 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 85,39 | | 85,75 | | 85,84 | | 85,84 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 94,33 | | 95,68 | | 95,68 | | 95,68 | | |
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 83,1 | 648.785.052,00 | 84,7 | 567.350.894,02 | 85,7 | 589.093.570,42 | 85,7 | 1.156.444.464,44 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | Ketersediaan Energi | 2318 kkal/ kap/ hari | | 2400 kkal/ kap/ hari | | 2400 kkal/ kap/ hari | | 2400 kkal/ kap/ hari | | |
| | Ketersediaan protein | 76,4 gram/ kap/ hari | | 63 gram/ kap/ hari | | 63 gram/ kap/ hari | | 63 gram/ kap/ hari | | |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourished (PoU) | 4,86 | 86.306.500,00 | 4,77 | 191.747.814,79 | 4,68 | 199.096.196,06 | 4,68 | 390.844.010,85 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | 92,96 | 19.743.703,00 | 95,50 | 51.006.719,46 | 95,80 | 52.961.457,89 | 95,80 | 103.968.177,36 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| **Pertanahan** | | | | | | | | | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Sengketa Tanah yang difasilitasi sesuai SOP | N/A | 80.148.400,00 | 100 | 69.587.994,67 | 100 | 80.905.206,09 | 100 | 150.493.200,76 | Sekretariat Daerah |
| **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun | 0,01 | 7.909.170.289,00 | 4,17 | 10.717.592.054,24 | 4,17 | 12.362.142.612,13 | 4,17 | 23.079.734.666,37 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi | 0,02 | | 2,13 | | 5,84 | | 5,84 | | |
| | Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan | 100 | | 98,16 | | 98,16 | | 98,16 | | |
| | Persentase sarana persampahan yang terpenuhi | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 27,37 | 110.144.854.819,00 | 27,01 | 65.130.370.645,52 | 27,34 | 75.124.237.443,06 | 27,34 | 140.254.608.088,58 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 26,03 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,2 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 23,55 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | 100 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 100 | | 95 | | 95 | | 95 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | 100 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 86,50 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 89,20 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 83,55 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 92,50 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS | 100 | 773.000.000,00 | 100 | 462.666.599,74 | 100 | 533.660.029,12 | 100 | 996.326.628,86 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu | N/A | 1.100.000.000,00 | 20 | 824.100.016,00 | 25 | 950.553.246,75 | 25 | 1.774.653.262,75 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu | N/A | | 8 | | 8,30 | | 8,30 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi | 0,5 Ha | 150.000.000,00 | 0,5 Ha | 94.175.100,13 | 0,5 Ha | 108.625.707,39 | 0,5 Ha | 202.800.807,52 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) | Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3 | 100 | 250.000.000,00 | 100 | 205.801.382,90 | 100 | 237.380.377,26 | 100 | 443.181.760,15 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | 57,14 | 150.000.000,00 | 56,32 | 135.020.977,06 | 57,45 | 155.739.140,43 | 57,45 | 290.760.117,49 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase kelompok masyarakat/ lembaga/ kegiatan usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup | 14,71 | 609.999.900,00 | 15 | 424.706.436,86 | 15,30 | 489.875.105,73 | 15,30 | 914.581.542,58 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Persentase Sekolah Adiwiyata | 35,56 | 550.000.000,00 | 35,60 | 402.474.961,42 | 35,70 | 464.232.343,02 | 35,70 | 866.707.304,45 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan | 18,98 | | 19 | | 19,10 | | 19,10 | | |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti | 100 | 30.000.000,00 | 100 | 23.384.479,96 | 100 | 26.972.688,89 | 100 | 50.357.168,85 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pengelolaan Persampahan | Persentase Reduksi Sampah | 7,81 | 3.795.605.700,00 | 8 | 11.773.872.645,94 | 8,10 | 13.580.503.158,69 | 8,10 | 25.354.375.804,64 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Persentase Volume Sampah tertangani | 79,03 | | 79,25 | | 79,50 | | 79,50 | | |
| | Persentase jalur wilayah penyapuan | 48,80 | | 94,97 | | 97,50 | | 97,50 | | |
| | Persentase peningkatan retribusi persampahan | 2,86 | | 2,90 | | 3 | | 3 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 28,86 | 12.819.606.730,00 | 29 | 11.435.998.828,22 | 29,5 | 11.874.262.386,84 | 29,5 | 23.310.261.215,05 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 28,5 | | 28,5 | | 29 | | 29 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,02 | | 11,5 | | 12 | | 12 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 21,05 | | 22 | | 22,5 | | 22,5 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 97,09 | | 97,50 | | 98 | | 98 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 91,61 | | 92,50 | | 93 | | 93 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 92,25 | | 93 | | 93,50 | | 93,50 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 91,91 | | 96 | | 96,50 | | 96,50 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 98,50 | | 98,50 | | 99 | | 99 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga | 100 | 1.521.028.000,00 | 100 | 1.795.317.477,90 | 100 | 1.864.119.708,35 | 100 | 3.659.437.186,25 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persenatse cakupan perekaman E-KTP | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Pencatatan Sipil | Persentase Pendataan Akta Kelahiran 0-18 tahun | 98 | 228.978.500,00 | 99,20 | 286.966.363,58 | 99,50 | 297.963.820,09 | 99,50 | 584.930.183,67 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan | 55 | | 65 | | 70 | | 70 | | |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase penyajian data kependudukan yang di perlukan OPD sesuai dengan SOP kerjasama pemanfaatan data | 52 | 340.376.400,00 | 60,87 | 314.186.231,53 | 69,57 | 326.226.839,26 | 69,57 | 640.413.070,78 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | | |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Kelurahan yang berpredikat swasembada | N/A | 31.077.800,00 | 4,40 | 102.531.418,06 | 5,90 | 119.206.273,27 | 5,90 | 221.737.691,33 | Sekretariat Daerah |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara aktif | N/A | 100.000.000,00 | 70 | 51.120.117,08 | 75 | 59.433.866,83 | 75 | 110.553.983,91 | Sekretariat Daerah |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif | 100 | 6.600.000,00 | 100 | 55.396.578,78 | 100 | 55.603.392,70 | 100 | 110.999.971,48 | Kecamatan Bogor Utara |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif | 100 | 6.600.000,00 | 75 | 89.638.950,30 | 80 | 92.459.845,82 | 80 | 182.098.796,12 | Kecamatan Bogor Selatan |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif | 70 | | 75 | | 80 | | 80 | | |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif | 100 | 6.600.000,00 | 100 | 53.865.401,72 | 100 | 54.013.536,11 | 100 | 107.878.937,82 | Kecamatan Bogor Timur |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif | 100 | 25.749.400,00 | 100 | 68.927.328,09 | 100 | 70.267.278,43 | 100 | 139.194.606,53 | Kecamatan Bogor Barat |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif | 100 | 6.600.000,00 | 100 | 53.704.180,93 | 100 | 54.013.536,11 | 100 | 107.717.717,04 | Kecamatan Bogor Tengah |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif | 100 | 18.880.900,00 | 100 | 62.422.465,94 | 100 | 62.898.534,03 | 100 | 125.320.999,97 | Kecamatan Tanah Sareal |
| | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 25,2 | 7.691.793.006,00 | 27,01 | 5.924.978.727,15 | 27,34 | 6.152.042.606,81 | 27,34 | 12.077.021.333,96 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 22,8 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 12,3 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 20,25 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |
| | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD) | 90 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase Kepatuhan Anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | 100 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | 94 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | N/A | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM | N/A | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | N/A | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | N/A | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Pengendalian Penduduk | Persentase dokumen kegiatan pengendalian kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang disusun | 75 | 8.793.140.000,00 | 100 | 2.152.728.335,53 | 100 | 2.235.227.677,76 | 100 | 4.387.956.013,29 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase Peserta KB Metode Kontasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS) | 19,79 | 1.193.128.480,00 | 19,84 | 2.638.633.891,17 | 19,86 | 2.739.754.667,45 | 19,86 | 5.378.388.558,62 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif | 82,26 | 1.067.002.700,00 | 82,34 | 3.401.327.218,46 | 82,38 | 3.531.676.809,53 | 82,38 | 6.933.004.027,99 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **Perhubungan** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 27,72 | 79.853.051.925,00 | 27,73 | 40.886.666.544,11 | 27,74 | 47.575.055.387,25 | 27,74 | 88.461.721.931,36 | Dinas Perhubungan |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 26,25 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,00 | | 11,01 | | 11,02 | | 11,02 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 20,20 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 96,99 | | 97 | | 97,10 | | 97,10 | | |
| | Persentase Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 86,14 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 84,24 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 84,78 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 89,55 | | 89,60 | | 89,65 | | 89,65 | | |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase tingkat keselamatan jalan | N/A | 24.713.3937.043,00 | 92,50 | 41.859.585.347,50 | 93 | 48.707.127.768,57 | 93 | 90.566.713.116,06 | Dinas Perhubungan |
| | Persentase fasilitas terminal yang terpelihara | 76,47 | | 77,78 | | 78,95 | | 78,95 | | |
| | Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi | 98,06 | | 98,10 | | 98,50 | | 98,50 | | |
| | Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik | N/A | | 88 | | 94 | | 94 | | |
| | *Load Factor* Angkutan Perkotaan | 35,00 | | 59,00 | | 59,00 | | 59,00 | | |
| | *Load Factor* Angkutan Umum Massal | 64,00 | | 79,00 | | 79,00 | | 79,00 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Pengelolaan Perkeretaapian | Persentase penetapan kebijakan rencana induk perkeretaapian | 23,08 | - | 30 | 146.875.927,13 | 35 | 170.902.422,69 | 35 | 317.778.349,82 | Dinas Perhubungan |
| **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 27,57 | 14.683.501.704,00 | 27,57 | 11.243.963.174,83 | 27,57 | 11.674.867.321,30 | 27,57 | 22.918.830.496,13 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 27,00 | | 27,00 | | 27,00 | | 27,00 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,65 | | 11,65 | | 11,65 | | 11,65 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 22,50 | | 22,50 | | 22,50 | | 22,50 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | N/A | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 83,75 | | 85 | | 85 | | 85 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 80 | | 81,25 | | 82,5 | | 82,5 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 82,25 | | 82,5 | | 82,75 | | 82,75 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 94,5 | | 95 | | 95,25 | | 95,25 | | |
| Program Informasi dan Komunikasi Publik | Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat | 92,58 | 1.635.454.289,00 | 93 | 3.479.351.530,85 | 93 | 3.612.691.259,76 | 93 | 7.092.042.790,61 | |
| | Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi | 90 | | 80 | | 90 | | 90 | | |
| Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE | 3,50 | 2.863.088.702,00 | Indeks 3,50 | 4.303.099.693,73 | Indeks 3,50 | 4.468.008.051,38 | Indeks 3,50 | 8.771.107.745,12 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 3,70 | | Indeks 3,70 | | Indeks 3,70 | | Indeks 3,70 | | |
| | Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE | 3,00 | | Indeks 3,00 | | Indeks 3,00 | | Indeks 3,00 | | |
| | Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE | 2,88 | | Indeks 2,88 | | Indeks 2,88 | | Indeks 2,88 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas | 3,35 | | Indeks 3,46 | | Indeks 3,46 | | Indeks 3,46 | | |
| **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 28,04 | 16.056.676.612,00 | 28,05 | 1.908.830.038,35 | 28,06 | 1.967.793.371,04 | 28,06 | 3.876.623.409,40 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 26,63 | | 26,64 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 11,26 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 21,05 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |
| | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD) | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Kepatuhan Anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | N/A | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | N/A | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM | N/A | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | N/A | | 88,39 | | 88,39 | | 88,39 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | N/A | | 88,38 | | 88,39 | | 88,39 | | |
| Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Peningkatan koperasi berizin | 50 | 21.000.000,00 | 70 | 47.539.245,68 | 80 | 49.361.099,58 | 80 | 96.900.345,26 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Koperasi Berkualitas | 10,14 | 59.830.000,00 | 11,37 | 45.264.061,92 | 12,45 | 46.998.723,59 | 12,45 | 92.262.785,51 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase Koperasi yang Sehat | 15,15 | - | 15,6 | 48.021.381,81 | 17,16 | 49.861.712,68 | 17,16 | 97.883.094,49 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal | 47,17 | 378.063.000,00 | 50 | 515.171.389,03 | 53,33 | 534.914.382,15 | 53,33 | 1.050.085.771,18 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase Koperasi Aktif | N/A | 44.040.000,00 | 6,24 | 339.132.141,83 | 9,36 | 352.128.755,55 | 9,36 | 691.260.897,38 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan | Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha | N/A | 242.280.000,00 | 16 | 1.118.169.807,59 | 18 | 1.161.021.602,73 | 34 | 2.279.191.410,33 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan | N/A | | 3 | | 4 | | 7 | | Perdagangan, dan Perindustrian |
| Program Pengembangan UMKM | Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up) | N/A | 24.930.000,00 | 2 (90 Wirausaha Baru) | 248.749.822,60 | 2,2 (100 Wirausaha Baru) | 258.282.700,68 | 2,2 | 507.032.523,28 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| | Persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet penjualannya | N/A | | 4,4 (200 Pelaku Usaha) | | 4,6 (210 Pelaku Usaha) | | 4,6 | | |
| | Persentase Pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital | N/A | | 7 (315 UMKM) | | 8 (360 UMKM) | | 8 | | |
| **Penanaman Modal** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 28,71 | 11.061.153.797,00 | 28,81 | 9.413.285.067,90 | 28,84 | 9.774.031.853,05 | 28,84 | 19.187.316.920,95 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 25,88 | | 28,05 | | 28,32 | | 28,32 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 11,76 | | 13,98 | | 14,50 | | 14,50 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 22,50 | | 23,47 | | 23,48 | | 23,48 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | N/A | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 81,77 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 83,09 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 89,26 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 92,72 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Jumlah Kebijakan atau regulasi Penanaman Modal yang terimplementasi | 100 | 142.330.000,00 | 100 | 108.649.168,65 | 100 | 112.812.947,61 | 100 | 221.462.116,26 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Promosi Penanaman Modal | Nilai Realisasi Investasi | 1.934 T | 39.302.300,00 | 1.940 Triliun | 144.597.191,19 | 1.950 Triliun | 150.138.611,80 | 1.950 Triliun | 294.735.802,99 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP | 85,44 | 1.855.615.944,00 | 100 | 1.693.335.602,68 | 100 | 1.758.229.565,89 | 100 | 3.451.565.168,57 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu | 100 | 415.178.000,00 | 100 | 230.709.618,72 | 100 | 239.551.139,26 | 100 | 470.260.757,98 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 396.939.951,86 | 100 | 412.151.943,27 | 100 | 809.091.895,13 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 24,67 | 11.865.829.385,00 | 27,01 | 7.189.061.441,45 | 27,34 | 9.767.359.325,96 | 27,34 | 16.956.420.767,41 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 22,13 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,15 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 23,55 | | 23,75 | | 23,98 | | 23,98 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 96 | | 97 | | 97 | | 97 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 89,25 | | 89,50 | | 89,75 | | 89,75 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 90 | | 90,50 | | 90,75 | | 90,75 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 89,30 | | 89,50 | | 89,75 | | 89,75 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 87,5 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase pemuda yang medapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan | N/A | 946.119.800,00 | 2,175 | 893.011.361,33 | 2,18 | 1.213.282.557,02 | 2,18 | 2.106.293.918,36 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan | 21,17 | | 21,18 | | 22 | | 22 | | |
| | Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif | N/A | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional | 20 | | 30 | | 35 | | 35 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional atau Internasional | 50 | 9.856.109.600,00 | 50 | 23.740.267.112,45 | 50 | 232.254.519.073,21 | 100 | 255.994.786.185,66 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar | NA | | 80 | | 33 | | 100 | | |
| | Persentase Atlet Berprestasi Dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan | 74 | | 50 | | 55 | | 55 | | |
| | Persentase Perolehan medali dengan jumlah Atlet yang berpartisipasi dalam Kejuaraan | NA | | 50 | | 55 | | 55 | | |
| Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina | 100 | 900.000.000,00 | 100 | 592.981.370,82 | 100 | 805.649.272,80 | 100 | 1.398.630.643,63 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| **Statistik** | | | | | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Indeks Prinsip Satu Data Indonesia | 2,50 | 322.998.800,00 | 2,75 | 179.435.148,08 | 2,75 | 186.311.669,11 | 2,75 | 365.746.817,19 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Indeks Kualitas Data | 2,59 | | 2,66 | | 2,66 | | 2,66 | | |
| | Indeks Kelembagaan | 2,85 | | 2,85 | | 2,85 | | 2,85 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Indeks Statistik Nasional | 2,22 | | 2,22 | | 2,22 | | 2,22 | | |
| **Persandian** | | | | | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Level 2 | 105.655.100,00 | Level 2 | 101.865.513,33 | Level 2 | 105.769.321,21 | Level 2 | 207.634.834,54 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **Kebudayaan** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 29,06 | 9.999.558.147,00 | 29,07 | 7.762.403.410,02 | 29,08 | 8.059.883.201,07 | 29,08 | 15.822.286.611,09 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,51 | | 11,52 | | 11,53 | | 11,53 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 15,63 | | 15,64 | | 15,65 | | 15,65 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | N/A | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 85,97 | | 85,98 | | 85,99 | | 85,994 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 93,69 | | 93,70 | | 93,71 | | 93,71 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 94,60 | | 94,61 | | 94,62 | | 94,62 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 93,46 | | 93,47 | | 93,48 | | 93,48 | | |
| Program Pengembangan Kebudayaan | Kontribusi event seni budaya dalam CoE | 3 event | 952.463.400,00 | 3 event | 864.707.488,18 | 3 event | 897.845.807,50 | 3 event | 1.762.553.295,67 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase lembaga seni tradisional yang dibina | N/A | 40.795.000,00 | 10 | 631.019.577,43 | 15 | 655.202.238,67 | 15 | 1.286.221.816,10 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pembinaan Sejarah | Jumlah SDM pelaku pelestari sejarah yang ditingkatkan kompetensinya | N/A | 31.642.000,00 | 5 | 6.575.754,90 | 5 | 6.827.758,57 | 10 | 13.403.513,47 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase status ODCB menjadi CB | N/A | 650.678.000,00 | 10 | 1.000.000.000,00 | 10 | 1.000.000.000,00 | 10 | 2.000.000.000,00 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase peningkatan kunjungan ke museum | 55,71 | 182.420.000,00 | 55,71 | 729.024.269,44 | 55,75 | 795.285.934,96 | 55,75 | 1.524.310.204,41 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **Perpustakaan** | | | | | | | | | | |
| Program Pembinaan Perpustakaan | Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1) | 0,4660 | 368.144.400,00 | 0,7933 | 5.769.789.226,55 | 1 | 5.990.905.754,89 | 1 | 11.760.694.981,44 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| | Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2) | 0,0892 | | 0,0914 | | 0,0922 | | 0,0922 | | |
| | Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3) | 0,9497 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Tingkat kunjungan masyarakat perhari (UPLM 4) | 0,00102 | | 0,1143 | | 0,1166 | | 0,1166 | | |
| | Perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP) (UPLM 5) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6) | 0,1252 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Anggota perpustakaan (UPLM 7) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Persentase naskah kuno yang diinventarisasi | N/A | - | 50 | 141.745.906,97 | 100 | 150.052.294,02 | 100 | 291.798.200,99 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **Kearsipan** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 24 | 9.755.287.835,00 | 27,01 | 8.573.645.561,50 | 27,34 | 8.902.214.711,47 | 27,34 | 17.475.860.272,97 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 24,90 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 10,20 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 14,25 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | 94 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | 94 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 91,77 | | 92,25 | | 92,75 | | 92,75 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 80,22 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 86,16 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 75,72 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Pengelolaan Arsip | Persentase Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik | 41,17 | 388.748.200,00 | 51,42 | 217.979.541,62 | 57,14 | 226.333.205,44 | 57,14 | 444.312.747,06 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase arsip statis yang diselamatkan, dilestarikan dan dimanfaatkan | 49,38 | - | 52 | 20.948.544,60 | 53 | 21.751.358,93 | 53 | 42.699.903,53 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| Program Perizinan Penggunaan Arsip | Persentase arsip tertutup yang dibuatkan sarana temu baliknya | 100 | - | 100 | 141.745.906,97 | 100 | 150.052.294,02 | 100 | 291.798.200,99 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| **Uruasan Pemerintahan Pilihan** | | | | | | | | | | |
| **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (ikan konsumsi) | -32,44 | 430.463.100,00 | 1 | 350.881.736,93 | 1 | 364.328.632,21 | 1 | 715.210.369,13 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | Persentase peningkatan produksi perikanan (ikan hias) | -12,13 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persentase Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan | 1 | 77.440.000,00 | 1 | 76.804.202,08 | 1 | 79.747.581,44 | 1 | 156.551.783,52 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **Pariwisata** | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi | N/A | 109.999.900,00 | 1 destinasi | 598.459.594,67 | 1 destinasi | 621.394.454,63 | 1 destinasi | 1.219.854.049,30 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pemasaran Pariwisata | Jumlah kunjungan wisata | 5.650.637 | 464.190.700,00 | 7.038.999 | 551.891.117,61 | 7.742.899 | 573.041.326,60 | 7.742.899 | 1.124.932.444,21 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | Kontribusi sektor pawirisata terhadap PAD | 23,43 | | 23,44 | | 23,45 | | 23,45 | | |
| Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI | N/A | 14.684.800,00 | 25 | 12.079.941,47 | 25 | 12.542.882,94 | 25 | 24.622.824,42 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi | 0,17 | 484.574.900,00 | 3,62 | 683.310.627,95 | 3,86 | 709.497.247,23 | 3,86 | 1.392.807.875,18 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina | N/A | | 10 | | 10 | | 10 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **Pertanian** | | | | | | | | | | |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura (26 item) | 65,67 | 519.818.266,00 | 32,68 | 580.993.136,93 | 67,22 | 603.258.627,13 | 100 | 1.184.251.764,06 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | Persentase pemenuhan sarana peternakan (3 item) | 34,12 | | 48,72 | | 51,28 | | 100 | | |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase pengelolaan kawasan LP2B yang dibina Pemkot Bogor | 63,10 | 178.091.100,00 | 63,10 | 484.632.373,36 | 63,10 | 503.205.015,05 | 63,10 | 987.837.388,41 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | Persentase peningkatan jumlah potong hewan yang dilayani RPH | 1,03 | | 1,54 | | 1,52 | | 1,52 | | |
| | Persentase peningkatan retribusi RPH | 13,39 | | 1,54 | | 1,52 | | 1,52 | | |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 79,75 | 227.817.400,00 | 47,62 | 265.779.551,25 | 54,55 | 275.965.062,26 | 54,55 | 541.744.613,51 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan | 82,63 | | 83,25 | | 83,50 | | 83,50 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | 30,70 | 12.278.400,00 | 18,42 | 5.354.828,28 | 27,63 | 5.560.042,20 | 27,63 | 10.914.870,48 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Program Penyuluhan Pertanian | Cakupan bina kelompok tani | 93,08 | 96.437.300,00 | 93,41 | 135.854.738,77 | 93,57 | 141.061.121,01 | 93,57 | 276.915.859,78 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming | 1,87 | | 1,81 | | 1,77 | | 1,77 | | |
| **Perdagangan** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | N/A | N/A | - | N/A | 67.392.540,09 | N/A | 55.786.177,64 | N/A | 123.178.717,73 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin 3 | N/A | - | 30 | 141.745.906,97 | 40 | 150.052.294,02 | 40 | 291.798.200,99 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai standar | N/A | 33.840.000,00 | 29,19 | 264.853.813,52 | 29,95 | 275.003.847,33 | 29,95 | 539.857.660,85 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase Pelaksanaan stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok | N/A | 32.754.000,00 | 100 | 85.199.646,79 | 100 | 88.464.766,08 | 100 | 173.664.412,88 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| Program Pengembangan Ekspor | Nilai realisasi ekspor (USD) | 122.022.760,50 | - | 139.025.307,45 | 67.320.127,24 | 158.766.901,10 | 69.900.046,93 | 158.766.901,10 | 137.220.174,17 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang) | N/A | 87.831.800,00 | 11,87 | 183.740.499,01 | 12,03 | 190.782.014,68 | 12,03 | 374.522.513,69 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Persentase UMKM yang difasilitasi pemasarannya dari data UMKM yang terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI | N/A | 89.951.000,00 | 5 | 477.617.951,48 | 5 | 495.921.778,39 | 10 | 973.539.729,87 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| **Perindustrian** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | N/A | N/A | - | N/A | 11.763.432.017,17 | N/A | 13.238.377.946,76 | N/A | 25.001.809.963,93 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan IKM yang produktif | 7,80% | 279.850.500,00 | 8,7 | 354.452.609,58 | 9,28 | 368.036.351,97 | 9,28 | 722.488.961,55 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase jumlah IKM yang terintegrasi dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) | 13,50% | - | 14,30 | 27.583.330,01 | 14,40 | 28.640.410,24 | 14,40 | 56.223.740,25 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian |
| **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | |
| **Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PD yang mendapat nilai pelaporan kinerja perangkat daerah minimal 12,2 | 25 | 70.289.158.311,00 | 50 | 53.290.508.272,83 | 63,90 | 61.957.232.350,82 | 63,90 | 115.247.740.623,65 | Sekretariat Daerah |
| | Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kematangan sangat tinggi | 72,22 | | 80,55 | | 83,33 | | 83,33 | | |
| | Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kelembagaan minimal sangat efektif | 77,77 | | 83,33 | | 83,33 | | 83,33 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Presentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM ≥ 3,35 | 86,11 | | 88,89 | | 91,67 | | 91,67 | | |
| | NIlai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 27,19 | | 27,25 | | 27,3 | | 27,3 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 25,88 | | 25,88 | | 26 | | 26 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,19 | | 11,48 | | 11,74 | | 11,74 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 18,55 | | 18,55 | | 18,75 | | 18,75 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | N/A | | ≥95 | | ≥95 | | ≥95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 86,25 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 86 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 87,60 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 93 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang ditindaklanjuti | 80 | 35.109.559.850,00 | 87 | 28.554.206.362,84 | 90 | 33.198.024.480,43 | 90 | 61.752.230.843,27 | Sekretariat Daerah |
| | Jumlah penduduk miskin ekstrim yg mendapat bantuan sosial BSM (berdasar data P3KE desil1) | 800 Orang | | 1000 Orang | | 1500 Orang | | 2500 Orang | | |
| | Jumlah penduduk miskin yg mendapat bantuan sosial BSM (berdasar Data DTKS) | 2500 Orang | | 3000 Orang | | 3500 Orang | | 6500 Orang | | |
| | Persentase realisasi capaian kinerja pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan | 87 | | 87 | | 90 | | 90 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama | 45 | | 80 | | 85 | | 85 | | |
| | Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penyelenggaraan Pemerintahan | N/A | | 90 | | 90 | | 90 | | |
| | Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 100 | | 100 | | a | | 100 | | |
| | Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penanganan perkara (TUN dan Perdata) yang dapat diselesaikan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Perekonomian dan Pembangunan | Rata Rata nilai capaian kinerja BUMD | 67,40 | 1.514.280.850,00 | 67,50 | 1.468.938.897,02 | 67,50 | 1.707.834.875,32 | 67,50 | 3.176.773.772,34 | Sekretariat Daerah |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi pengendalian Inflasi Daerah | 72,41 | | 75,86 | | 79,30 | | 79,30 | | |
| | Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti dengan kebijakan | 72,72 | | 73 | | 74 | | 74 | | |
| | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit | 17,75 | | 18,01 | | 18,30 | | 18,30 | | |
| | Persentase capaian kinerja pembangunan daerah | 97,44 | | 98 | | 98,50 | | 98,50 | | |
| | Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai perencanaan | 60 | | 65 | | 75 | | 75 | | |
| | Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25 poin | 55,55 | | 75 | | 80,55 | | 80,55 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **Sekretariat DPRD** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah | 25,76 | 84.348.617.073,00 | 27,01 | 69.011.767.921,60 | 27,34 | 72.270.068.532,18 | 27,34 | 141.281.836.453,78 | Sekretariat DPRD |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah | 27,23 | | 27,53 | | 28 | | 28 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup perangkat daerah | 11,45 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 22,08 | | 22,51 | | 23,1 | | 23,1 | | |
| | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Kepatuhan Anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | 89,83 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sasaran dan prasarana | 81,25 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM | 79 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |
| | Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan,prosedur, waktu, tarif dan standaar pelayanan | 84,25 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| | Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan | 80,5 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Rencana Kerja DPRD yang di fasilitasi sesuai fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan | 100 | 72.707.407.500,00 | 100 | 47.777.887.515,27 | 100 | 50.033.658.157,75 | 100 | 97.811.545.673,01 | Sekretariat DPRD |
| **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | |
| **Perencanaan** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 27,19 | 16.065.793.076,00 | 27,25 | 12.595.142.762,47 | 27,34 | 13.077.828.374,05 | 27,34 | 25.672.971.136,53 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 26,25 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 11,76 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 23,55 | | 23,6 | | 23,65 | | 23,65 | | |
| | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD) | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase Kepatuhan Anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | 96,27 | | ≥95 | | ≥95 | | ≥95 | | |
| | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 75,75 | | 76,51 | | 77,27 | | 77,27 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM | 76,5 | | 77,27 | | 78,04 | | 78,04 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 96 | | 96,96 | | 97,93 | | 97,93 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 96,75 | | 97,72 | | 98,69 | | 98,69 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rasio Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10000 penduduk) | 25,7 | 2.768.438.300,00 | 27,5 | 1.403.691.788,39 | 30 | 1.457.485.686,73 | 30 | 2.861.177.475,11 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah |
| | Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP | 36,5 | | 37,50 | | 38 | | 38 | | |
| | Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah | 70,97 | | 75 | | 80 | | 80 | | |
| Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia | 26,61 | 869.250.800,00 | 26,88 | 1.050.906.093,40 | 27,14 | 1.091.180.130,77 | 27,14 | 2.142.086.224,17 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan pemerintahan dan Pembangunan manusia | 25,95 | | 26,21 | | 26,47 | | 26,47 | | |
| | Persentase ketercapaian target program perencanaan Pembangunan daerah urusan pemerintahan dan pembangunan manusia | 71,72 | | 80,6 | | 83,87 | | 83,87 | | |
| | Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan perekonomian dan SDA | 28,06 | | 28,34 | | 28,62 | | 28,62 | | |
| | Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan perekonomian dan SDA | 27,2 | | 27,47 | | 27,75 | | 27,75 | | |
| | Persentase ketercapaian target program pembangunan daerah urusan perekonomian dan SDA | 71,15 | | 80,6 | | 83,87 | | 83,87 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada PD lingkup urusan infrastruktur dan kewilayahan | 28,2 | | 28,48 | | 28,77 | | 28,77 | | |
| | Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja di lingkup PD urusan insfrastruktur dan kewilayahan | 26,54 | | 26,8 | | 26,8 | | 26,8 | | |
| | Persentase ketercapaian target program pembangunan daerah urusan insfrastruktur dan kewilayahan | 71,15 | | 80,6 | | 83,87 | | 83,87 | | |
| **Keuangan** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 26,16 | 20.441.795.328,00 | 26,2 | 17.147.961.172,09 | 26,4 | 17.805.125.150,45 | 26,4 | 34.953.086.322,54 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 27 | | 27,1 | | 27,2 | | 27,2 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 12,29 | | 12,4 | | 12,5 | | 12,5 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 21,68 | | 21,7 | | 21,8 | | 21,8 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | 99,50 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 58,73 | | 85,97 | | 85,97 | | 85,97 | | |
| | Persentase transparansi pengelolaan keuangan daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 99,26 | | 99,30 | | 99,40 | | 99,40 | | |
| | Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 99,26 | | 99,30 | | 99,40 | | 99,40 | | |
| | Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 99,26 | | 99,30 | | 99,40 | | 99,40 | | |
| | Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 99,26 | | 99,30 | | 99,40 | | 99,40 | | |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dan penganggaran | 100 | 102.595.724.483,00 | 100 | 141.459.419.694,83 | 100 | 43.048.275.472,69 | 100 | 184.507.695.167,52 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Persentase kepatuhan pengalokasian anggaran mandatory sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Transparansi Perencanaan Penganggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Transparansi Pelaksanaan APBD | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyerapan realisasi anggaran dalam APBD | 95,41 | | 93 | | 93 | | 93 | | |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Tingkat Kepatuhan Perizinan Bangunan | 7 | 5.957.304.100,00 | 7 | 4.985.020.103,77 | 10 | 5.176.061.803,16 | 10 | 10.161.081.906,93 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Persentase Kepatuhan Pensertifikatan Tanah | 24 | | 34 | | 39 | | 39 | | |
| | Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik | 67 | | 83 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Ketepatwaktuan penyampaian laporan *stock opname* dan BA rekon | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | N/A | 43.636.064.322,00 | 27,01 | 36.766.207.201,55 | 27,34 | 38.175.204.268,37 | 27,34 | 74.941.411.469,92 | Badan Pendapatan Daerah |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | N/A | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | N/A | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | N/A | | 21,37 | | 21,38 | | 21,38 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | N/A | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 90,33 | | 90,33 | | 90,35 | | 90,35 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 94,47 | | 94,47 | | 94,60 | | 94,60 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 93,50 | | 93,50 | | 93,67 | | 93,67 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 96,95 | | 96,95 | | 96,97 | | 96,97 | | |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Target penerimaan Pajak Daerah | 897.753.380.910,00 | 4.793.694.000,00 | 1.067.401.480.950,00 | 3.560.222.899,89 | 1.120.771.554.997,50 | 4.696.661.874,83 | 1.120.771.554.997,50 | 8.256.884.774,72 | Badan Pendapatan Daerah |
| | Persentase peningkatan pajak daerah | 20,51 | | 18,90 | | 24,84 | | 24,84 | | |
| **Kepegawaian** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 28,13 | 20.450.126.993,00 | 28,5 | 23.757.188.319,16 | 28,5 | 25.667.638.735,60 | 28,5 | 49.424.827.054,76 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 27,00 | | 27,00 | | 27,5 | | 27,5 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,29 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 20,43 | | 20,5 | | 21,00 | | 21,00 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | 94 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 97 | | 97,5 | | 97,10 | | 97,10 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 99,75 | | 99,75 | | 99,75 | | 99,75 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 97,05 | | 97,10 | | 97,15 | | 97,15 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 97,25 | | 97,30 | | 97,35 | | 97,35 | | |
| Program Kepegawaian Daerah | Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian | 44 poin | 1.959.669.900,00 | 56,5 poin | 1.949.764.507,98 | 56,5 poin | 2.024.485.635,94 | 56,5 poin | 3.974.250.143,92 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan | 150 poin | | 170 poin | | 170 poin | | 170 poin | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Pegawai Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan | 112 poin | | 114 poin | | 114 poin | | 114 poin | | |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat | 38 poin | 2.328.720.518,00 | 43 poin | 2.080.574.319,36 | 43 poin | 2.160.308.492,03 | 43 poin | 4.240.882.811,39 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **Penelitian dan Pengembangan Daerah** | | | | | | | | | | |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n | 33 | 1.541.990.070,00 | 36,11 | 1.560.290.020,51 | 41,66 | 1.620.085.257,21 | 41,66 | 3.180.375.277,72 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah |
| | Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi | N/A | | 10 | | 10 | | 10 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah | N/A | | 30 | | 50 | | 50 | | |
| **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | |
| **Inspektorat** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah | 28,13 | 22.456.935.516,00 | 28,16 | 16.430.048.162,71 | 28,19 | 17.059.699.449,34 | 28,19 | 33.489.747.612,06 | Inspektorat |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah | 27,75 | | 27,78 | | 27,81 | | 27,81 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup perangkat daerah | 13,02 | | 13,03 | | 13,05 | | 13,05 | | |
| | Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah | 21,68 | | 21,7 | | 21,73 | | 21,73 | | |
| | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase Kepatuhan Anggaran | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | 94,26 | | >95 | | >95 | | >95 | | |
| | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 85,75 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM | 86,12 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 88,45 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 83 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai evaluasi kinerja internal minimal “20” | 61,11 | 289.172.000,00 | 70,63 | 214.889.942,65 | 75,4 | 223.125.203,29 | 75,4 | 438.015.145,94 | Inspektorat |
| | Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK | 90,2 | | 90,2 | | 90,2 | | 90,2 | | |
| | Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP | 86,96 | | 90 | | 92 | | 92 | | |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan struktur dan proses SPIP pada level 3 | N/A | 599.599.000,00 | 90 | 264.563.679,79 | 90 | 274.702.594,77 | 90 | 539.266.274,56 | Inspektorat |
| | Nilai Capaian MCP KPK diatas rata-rata nasional | 85,53 | | 87 | | 88 | | 88 | | |
| | Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan ZI | 4,8 | | 10 | | 15 | | 15 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | dengan nilai diatas "75" | | | | | | | | | |
| **Unsur Kewilayahan** | | | | | | | | | | |
| **Kecamatan** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 26,51 | 21.235.829.759,00 | 26,52 | 16.528.630.013,75 | 26,53 | 17.162.059.267,97 | 26,53 | 33.690.689.281,72 | Kecamatan Bogor Utara |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 27,53 | | 27,54 | | 27,55 | | 27,55 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 10,82 | | 10,83 | | 10,84 | | 10,84 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 18,55 | | 18,56 | | 18,57 | | 18,57 | | |
| | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | 93 | | 94 | | 94 | | 94 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase Kepatuhan Anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | 96,83 | | 96,84 | | 96,85 | | 96,85 | | |
| | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 99,4 | | 99,41 | | 99,42 | | 99,42 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM | 99,09 | | 99,1 | | 99,11 | | 99,11 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 99,71 | | 99,72 | | 99,72 | | 99,72 | | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 99,17 | | 99,18 | | 99,19 | | 99,19 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur | 100 | 258.807.700,00 | 100 | 164.290.524,93 | 100 | 170.586.656,23 | 100 | 334.877.181,16 | Kecamatan Bogor Utara |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | 100 | 5.784.794.900,00 | 100 | 3.837.890.256,79 | 100 | 3.984.970.320,97 | 100 | 7.822.860.577,76 | Kecamatan Bogor Utara |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan | 88 | 98.999.700,00 | 88,10 | 88.047.221,74 | 88,20 | 91.421.469,08 | 88,20 | 179.468.690,82 | Kecamatan Bogor Utara |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 25,9 | | 27,01 | | 27,34 | | 27,34 | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | Kecamatan Bogor Selatan |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 25,5 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 10,02 | | 12,48 | | 13 | | 13 | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 22,5 | | 22,51 | | 22,52 | | 22,52 | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | |
| | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah | |
| | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Secara Tepat Waktu | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | 93 | | 94 | | 94 | | 94 | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD) | |
| | Persentase Kepatuhan Anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Persentase Kepatuhan Anggaran | |
| | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | 96,16 | | 96,17 | | 96,18 | | 96,18 | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 83 | | 87,11 | | 87,87 | | 87,87 | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM | 88,25 | | 88,75 | | 89,25 | | 89,25 | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 85,75 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | |
| | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 85,25 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur | 100 | 339.660.900,00 | 100 | 302.343.538,89 | 100 | 323.859.737,66 | 100 | 626.203.276,54 | Kecamatan Bogor Selatan |
| | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 20 | 8.507.180.970,00 | 20 | 5.732.706.924,72 | 20 | 6.140.673.511,85 | 20 | 11.873.380.436,57 | Kecamatan Bogor Selatan |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | NA | 8.507.180.970,00 | 100 | 5.732.706.924,72 | 100 | 6.140.673.511,85 | 100 | 11.873.380.436,57 | Kecamatan Bogor Selatan |
| | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan | NA | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan | NA | | 2 | | 2 | | 2 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan | NA | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | NA | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan | 88 | 119.999.000,00 | 88,10 | 57.216.717,76 | 88,20 | 61.288.530,49 | 88,20 | 118.505.248,25 | Kecamatan Bogor Selatan |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 28,86 | 17.192.983.944,00 | 28,87 | 13.374.937.367,62 | 28,88 | 13.887.507.168,92 | 28,88 | 27.262.444.536,54 | Kecamatan Bogor Timur |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 28,88 | | 28,89 | | 28,9 | | 28,9 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 11,17 | | 11,18 | | 11,19 | | 11,19 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 18,55 | | 18,56 | | 18,57 | | 18,57 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100% | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | 93 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 94,68 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 90,75 | | 90,76 | | 90,77 | | 90,77 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 94,45 | | 94,46 | | 94,47 | | 94,47 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 93,05 | | 93,06 | | 93,07 | | 93,07 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 90 | | 90,1 | | 90,2 | | 90,2 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur | 100 | 165.623.600,00 | 100 | 342.907.773,96 | 100 | 356.049.081,82 | 100 | 698.956.855,77 | Kecamatan Bogor Timur |
| | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | kecamatan (kumulatif kelurahan) | | | | | | | | | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase layanan kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | 100 | 4.035.350.234,00 | 100 | 2.511.931.291,89 | 100 | 2.608.196.424,79 | 100 | 5.120.127.716,68 | Kecamatan Bogor Timur |
| | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 1 | | 1 | | 1 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan | 88 | 73.999.800,00 | 88,10 | 42.662.958,29 | 88,20 | 44.297.937,47 | 88,20 | 86.960.895,76 | Kecamatan Bogor Timur |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 29,12 | 33.591.141.660,00 | 29,13 | 25.505.055.367,39 | 29,14 | 27.310.672.483,98 | 29,14 | 52.815.727.851,37 | Kecamatan Bogor Barat |
| | Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 25,5 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 14,16 | | 14,17 | | 14,18 | | 14,18 | | |
| | Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 20,20 | | 20,21 | | 20,22 | | 20,22 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | 93 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 95,37 | | 95,38 | | 95,39 | | 95,39 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 94,70 | | 94,70 | | 94,71 | | 94,71 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 94,39 | | 94,40 | | 94,41 | | 94,41 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 94,86 | | 94,87 | | 94,88 | | 94,88 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 94,84 | | 94,85 | | 94,86 | | 94,86 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur | 100 | 108.540.000,00 | 100 | 339.088.569,05 | 100 | 363.094.167,76 | 100 | 702.182.736,81 | Kecamatan Bogor Barat |
| | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | N/A | 8.509.700.210,00 | 20 | 6.040.729.712,17 | 20 | 6.468.380.027,29 | 20 | 12.509.109.739,45 | Kecamatan Bogor Barat |
| | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | N/A | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang | N/A | | 2 | | 2 | | 2 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | kecamatan (kumulatif kelurahan) | | | | | | | | | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | 100 | 8.509.700.210,00 | 100 | 6.040.729.712,17 | 100 | 6.468.380.027,29 | 100 | 12.509.109.739,45 | Kecamatan Bogor Barat |
| | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan | NA | | 20 | | 20 | | 20 | | Kecamatan Bogor Barat |
| | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan | NA | | 2 | | 2 | | 2 | | Kecamatan Bogor Barat |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan | NA | | 1 | | 1 | | 1 | | Kecamatan Bogor Barat |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | NA | | 100 | | 100 | | 100 | | Kecamatan Bogor Barat |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan | 88 | 126.803.900,00 | 88,10 | 72.817.869,55 | 88,20 | 77.972.972,72 | 88,20 | 150.790.842,27 | Kecamatan Bogor Barat |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja | 28,51 | 27.909.320.866,00 | 28,52 | 19.478.206.057,50 | 28,53 | 21.104.931.088,67 | 28,53 | 40.583.137.146,18 | Kecamatan Bogor Tengah |
| | Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja | 22,13 | | 22,14 | | 22,15 | | 22,15 | | |
| | Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja | 11,2 | | 11,21 | | 11,22 | | 11,22 | | |
| | Rata Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal | 21,05 | | 21,06 | | 21,07 | | 21,07 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | 93 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 96,84 | | 96,85 | | 96,86 | | 96,86 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 91,60 | | 91,61 | | 91,62 | | 91,62 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 93,44 | | 93,45 | | 93,46 | | 93,46 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 91,19 | | 91,20 | | 91,21 | | 91,21 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 90,64 | | 90,65 | | 90,66 | | 90,66 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur | 100 | 215.500.000,00 | 100 | 251.074.362,30 | 100 | 272.042.871,86 | 100 | 523.117.234,16 | Kecamatan Bogor Tengah |
| | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | N/A | 4.677.146.260,00 | 100 | 3.185.859.158,71 | 100 | 3.451.926.620,16 | 100 | 6.637.785.778,87 | Kecamatan Bogor Tengah |
| | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 1 | | 1 | | 1 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan | 88 | 60.500.000,00 | 88,10 | 56.983.685,58 | 88,20 | 61.742.685,84 | 88,20 | 118.726.371,42 | Kecamatan Bogor Tengah |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 29,12 | 29.231.898.005,00 | 30,01 | 20.249.571.959,51 | 30,34 | 21.025.599.449,61 | 30,34 | 41.275.171.409,12 | Kecamatan Tanah Sareal |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 26,55 | | 26,55 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 14,16 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | N/A | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | 93 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 95,37 | | 95 | | 95 | | 95 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 94,70 | | 94,00 | | 94,00 | | 94,00 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 94,39 | | 94,00 | | 94,00 | | 94,00 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 94,86 | | 94,00 | | 94,00 | | 94,00 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 94,84 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur | 100 | 278.432.100,00 | 100 | 328.973.221,88 | 100 | 341.580.513,74 | 100 | 670.553.735,63 | Kecamatan Tanah Sareal |
| | Persentase keterwakilan perempuan dan musrenbag kecamatan (kumulatif kelurahan) | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | Kecamatan Tanah Sareal |
| | Persentase keterwakilan anak dalam musrebang kecamatan (kumulatif kelurahan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Kecamatan Tanah Sareal |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Kecamatan Tanah Sareal |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | kecamatan (kumulatif kelurahan) | | | | | | | | | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Kecamatan Tanah Sareal |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Layanan Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan SOP | N/A | 7.281.147.504,00 | 100 | 4.767.243.822,01 | 100 | 4.949.939.647,15 | 100 | 9.717.183.469,16 | Kecamatan Tanah Sareal |
| | Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 20 | | 20 | | 20 | | Kecamatan Tanah Sareal |
| | Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan | 86 | 125.786.500,00 | 5 | 54.455.093,59 | 5 | 56.541.984,59 | 5 | 110.997.078,18 | Kecamatan Tanah Sareal |
| **Unsur Pemerintahan Umum** | | | | | | | | | | |
| **Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 23,53 | 9.639.208.735,00 | 27,01 | 6.381.053.753,32 | 27,34 | 6.710.053.720,37 | 27,34 | 13.091.107.473,69 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 26,78 | | 26,80 | | 26,82 | | 26,82 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah | 12,05 | | 12,48 | | 13 | | 13 | | |
| | Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah | 19,79 | | 21,97 | | 21,98 | | 21,98 | | |
| | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | N/A | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan | 100 | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Persentase kepatuhan anggaran | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase realisasi anggaran terhadap DPA | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Transparansi pengelolaan keuangan daerah | N/A | | 94 | | 94 | | 94 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana | 99,5 | | 99,6 | | 99,7 | | 99,7 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM | 92,5 | | 93 | | 94 | | 94 | | |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan | 95 | | 95,50 | | 95,75 | | 95,75 | | |
| | Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan | 75,5 | | 88,38 | | 89,39 | | 89,39 | | |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk | 13 | 1.179.058.650,00 | 13 | 483.825.131,96 | 13 | 508.770.612,54 | 13 | 992.595.744,51 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Partisipasi Partai Politik dalam Pemilu | 0 | 43.288.188.200,00 | 100 | 16.527.392.595,93 | 100 | 17.379.526.401,67 | 100 | 33.906.918.997,60 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Persentase partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif | 22 | | 22 | | 0 | | 0 | | |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif | 51,98 | 967.521.600,00 | 52,51 | 1.159.071.780,50 | 52,60 | 1.218.832.220,13 | 52,60 | 2.377.904.000,63 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Akhir | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Jumlah Kebijakan dalam Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | N/A | 248.721.100,00 | 1 Dokumen | 122.993.355,97 | 1 Dokumen | 129.334.755,31 | 1 Dokumen | 252.328.111,27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Potensi Konflik Sara yang Tertangani | 100 | 24.732.958.185,00 | 100 | 12.051.610.516,74 | 100 | 12.672.978.023,77 | 100 | 24.724.588.540,51 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **TOTAL PAGU INDIKATIF** | | | | | **2.559.883.571.313,76** | | **2.887.001.411.659,03** | | | |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2024*

Pada tanggal 14 Desember 2023, telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik RPD Kota Bogor 2025-2026. Setelah dilakukan sesi penjaringan aspirasi dan pendapat, maka Pemerintah Kota Bogor menyusun akomodasi dalam program-program prioritas pembangunan RPD Kota Bogor 2025-2026. Perinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.2. 2 Akomodasi Hasil FKP dalam Program Prioritas Pembangunan RPD Kota Bogor 2025-2026**

| Peserta | Perihal | Bidang Urusan | Program |
|---|---|---|---|
| Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Pengembangan WP Bodebekpunjur (*agroforestry*, pariwisata, industry manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis, dan agrowisata) | Pariwisata | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | | | Program Pemasaran Pariwisata |
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | Perindustrian | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri |
| | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional |
| | | Perikanan | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |
| | | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | | Perdagangan | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan |
| | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |
| | | | Program Pengembangan Ekspor |
| | | | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen |
| | | | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| Diskominfo Kota Bogor | Korelasi antara tren digitalisasi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka | Ketenagakerjaan | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | Program Hubungan Industrial |
| Forum Anak Kota Bogor | Dampak pergaulan bebas terhadap anak | Perlindungan anak | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak |
| | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| | | | Program Perlindungan Khusus Anak |
| | Kualitas penyelenggaraan pendidikan | Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan |
| Bapak Ucok (Budayawan) | Ketersediaan ruang terbuka hijau | Perumahan dan Permukiman | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) |
| | Pelestarian nilai sosial-budaya pada generasi muda di Kota Bogor | Kebudayaan | Program Pengembangan Kebudayaan |
| | | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional |
| | | | Program Pembinaan Sejarah |
| | | | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya |
| DPRD Kota Bogor | Penguatan regulasi (mencegah penumpukan regulasi) | Sekretariat Daerah | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | Program Perekonomian Dan Pembangunan |

| Peserta | Perihal | Bidang Urusan | Program |
|---|---|---|---|
| | | Pengawasan | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi |
| Ibu Saras (Masyarakat Kota Bogor) | Pembangunan manusia yang dimulai dari kualitas keluarga dan edukasi keshatan ibu hamil | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| | | Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2023*

# BAB VIII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target pemerintah daerah yang harus dicapai yang merupakan target selama dua (2) tahun dalam RPD Kota Bogor tahun 2025–2026.

## 8.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator makro merupakan gabungan dari indikator atas berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro tersebut terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan PDRB per Kapita. Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8.1. 1 Indikator Kinerja Makro Kota Bogor Tahun 2025-2026**

| No. | Uraian Indikator Makro | Satuan | Capaian | | | | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 76,11 | 76,59 | 77,17 | 77,85 | 78,81* | 79,35 |
| 2 | Jumlah Penduduk | dalam Ribu Jiwa | 1.126 | 1.052 | 1.114 | 1.070 | 1.090 | 1.100 |
| 3 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) | % | 1,33 | 1,19 | 2,07 | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
| 4 | Angka Kemiskinan (%) | % | 6,68 | 7,24 | 7,1 | 6,67 | 6,05 | 5,9 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 12,68 | 11,79 | 10,78 | 9,39 | 8,11 | 7,96 |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | -0,41 | 3,76 | 5,65 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| 7 | Indeks Gini Rasio | Angka | 0,412 | 0,441 | 0,43 | 0,464 | 0,43 | 0,41 |
| 8 | Tingkat Inflasi | % | 2,18 | 2,18 | 5,82 | 3,36 | 2-4 | 2-4 |
| 9 | PDRB per Kapita (AdhB) | Juta Rupiah | 44,1 | 45,92 | 49,76 | 53,24 | 58,86 | 60,17 |

*Sumber: *) Hasil analisis tim KEM Bapperida, 2024*

## 8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program untuk penjabarantugas dan fungsi organisasi. Lebih jelasnya dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8.2. 1 Indikator Kinerja Utama Kota Bogor**

| No. | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2023) | Target Kinerja | | Kondisi Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| **1** | **Indikator Tujuan** | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 77,85 | 78,7 | 79,35 | 79,35 | Dinkes |
| 2 | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 61,81 | 61,98 | 62,08 | 62,08 | DPPKB |
| 3 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persentase | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | Setda |
| 4 | Indeks Daya Saing Daerah | Indeks | 3,42 (Tinggi) | 3,55 (Tinggi) | 3,75 (Tinggi) | 3,75 (Tinggi) | Bapperida |
| 5 | Indeks Infrastruktur Pilar IDSD | Indeks | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,35 | Bapperida |
| 6 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | A | A | A | A | Setda |
| **2** | **Indikator Sasaran** | | | | | | |
| 1 | Indeks Pendidikan | Indeks | 72,74 | 76,17 | 77,19 | 77,19 | Disdik |
| 2 | Indeks Kesehatan | Indeks | 83,28 | 83,74 | 83,88 | 83,88 | Dinkes |
| 3 | Predikat Kota Sehat | Predikat | Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi) | Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi) | Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi) | Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi) | Dinkes |
| 4 | Gini Ratio | Rasio | 0,464 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | Bapperida |
| 5 | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 61,81 | 61,98 | 62,08 | 62,08 | DPPKB |
| 6 | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0,434 | 0,419 | 0,414 | 0,414 | DP3A |
| 7 | Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun | Persentase | 20,94 | 21,25 | 21,88 | 21,88 | DPMPTSP |
| 8 | Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD | Persentase | -0,26 | 0,5 | 1 | 1 | Bapenda |
| 9 | Incremental Capital Output Ratio (ICOR) | Rasio | 6 | 6 | 5,9 | 5,9 | Bapperida |
| 10 | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Persentase | 16,57 | 12,33 | 17,43 | 17,43 | Bapenda |
| 11 | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 63,49 | 65 | 65 | 65 | BPBD |
| 12 | Volume to Capacity Ratio | Rasio | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | Dishub |
| 13 | Rasio konektivitas | Rasio | 0,78 | 0,79 | 0,8 | 0,8 | Dishub |
| 14 | Maturitas SPIP | Predikat | Level 3 (3,296) | Level 3 (3,326) | Level 3 (3,356) | Level 3 (3,356) | Inspektorat |
| 15 | Indeks SPBE | Indeks | 3,72 | 3,75 | 3,8 | 3,8 | Diskominfo |
| 16 | Nilai SAKIP Tingkat Kota | Skor | BB (76,73) | A | A | A | Setda |

| No. | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2023) | Target Kinerja | | Kondisi Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 17 | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) | Indeks | 97,23 | 98 | 98,5 | 98,5 | Setda |
| 18 | Manajemen Resiko Indeks | Indeks | Level 3 (3,045) | Level 3 (3,055) | Level 3 (3,060) | Level 3 (3,060) | Inspektorat |
| 19 | Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang | Persentase | 48 | 60 | 65 | 65 | PUPR |
| 20 | Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks | 65 | 70 | 70 | 70 | Bapperida |
| 22 | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK) | Persentase | 3,96 | 4,5 | 5 | 5 | DisKUKM Dagin |
| | | | | | | | |
| 23 | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK) | Persentase | 3,73 | 3,79 | 4 | 4 | DisKUKM Dagin |
| 24 | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK) | Persentase | 3,20 | 3,89 | 4,42 | 4,42 | DisKUKM Dagin |
| 25 | Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) | Persentase | 5,26 | 6,14 | 7,74 | 7,74 | DisKUKM Dagin |
| 26 | Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) diatas rata-rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat | Angka | 71,29 | 72 | 72,72 | 72,72 | Inspektorat |
| 27 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | BKAD |
| 28 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 79,98 | 80 | 80,9 | 80,9 | Kesbangpol |
| 29 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persentase | 9,39 | 8,11 | 7,96 | 7,96 | Disnaker |
| 30 | Angka Kemiskinan | Angka | 6,67 | 6,12 | 6,01 | 6,01 | Dinsos |
| 31 | Pengeluaran Per Kapita | Ribu Rp | 12.656 | 12.700 | 12.750 | 12.750 | Bapperida |
| 32 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 58,4 | 57,84 | 58,09 | 58,09 | DLH |
| 34 | Indeks Ber-Akhlak | Indeks | 60,5 | 62,5 | 62,7 | 62,7 | BKPSDM |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2024*

Berdasarkan tabel di atas, secara umum Indikator Kinerja Utama Kota Bogor sudah terpetakan. Indikator Kinerja Utama Bogor memiliki 4 tujuan, yaitu:

1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing

   Indikator:

   a. Indeks Pendidikan

      Indeks Pendidikan menunjukkan dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia.

   b. Indeks Kesehatan

      Indeks Kesehatan adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk

menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat.

c. Predikat Kota Sehat

KKS merupakan suatu kondisi kabupaten atau kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dan pemerintah daerah

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan kemampuan daya beli.

e. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran

g. Gini Ratio

Gini Ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0 - 1. Indeks 0 menunjukan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidak merataan atau ketimpangan sama sekali.

h. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam

upaya membangun kualitas keluarga

i. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

2. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan

Indikator:

a. Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun

Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu

b. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Persentase peningkatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD

Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD adalah kontribusi yang diberikan BUMD kepada kepada BAD yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap Kabupaten/Kota di Indonesia.

e. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

*Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan

kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/ menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

3. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah

   Indikator:

   a. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)

      PDRB ADHK atau PDRB riil dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sector/ lapangan usaha dari tahun ke tahun. Jadi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dihitung berdasarkan data PDRB ADHK atau PDRB riil, yaitu perubahan dari tahun ke tahun PDRB ADHK tersebut.

   b. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)

      PDRB ADHK atau PDRB riil dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sector/ lapangan usaha dari tahun ke tahun. Jadi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dihitung berdasarkan data PDRB ADHK atau PDRB riil, yaitu perubahan dari tahun ke tahun PDRB ADHK tersebut.

   c. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)

      PDRB ADHK atau PDRB riil dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sector/ lapangan usaha dari tahun ke tahun. Jadi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dihitung berdasarkan data PDRB ADHK atau PDRB riil, yaitu perubahan dari tahun ke tahun PDRB ADHK tersebut.

   d. Laju Pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan Makan Minum (ADHK)

      PDRB ADHK atau PDRB riil dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sector/ lapangan usaha dari tahun ke tahun. Jadi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dihitung

berdasarkan data PDRB ADHK atau PDRB Riil, yaitu perubahan dari tahun ke tahun PDRB ADHK tersebut.

e. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan.

f. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan. Hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRBI.

4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Indikator:

a. Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang

b. Volume to Capacity Ratio

Volume to Capacity Ratio menjadi instrumen analisis yang dilakukan dengan cara membandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas.

c. Rasio konektivitas

Rasio konektivitas transportasi perkotaan merupakan perbandingan layanan transportasi pada kawasan perkotaan yang telah ditetapkan.

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

e. Indeks SPBE

Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

f. Nilai AKIP Tingkat Kota

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

g. Opini BPK

Opini BPK adalah pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

h. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas SPIP adalah kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

i. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)

Persepsi Kualitas Pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan dan evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). SPKP dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada.

j. Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen yang dikembangkan oleh LAN untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah.

k. Indeks Ber-Akhlak

Indeks BerAKHLAK merupakan pengukuran yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dalam mengukur hasil dari implementasi *Core Values* BerAKHLAK dan *Employer Branding* "Bangga Melayani Bangsa" yang dilaksanakan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun

daerah.

l. Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas

Survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Bertujuan membantu organisasi/lembaga menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, adil, serta bebas korupsi.

### 8.3 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang target dan capaian atas pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, merupakan gambaran atas target yang akan menjadi ukuran keberhasilan khususnya dalam periode sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan terkait yaitu RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, sebagai berikut:

## Tabel 8.3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| **I** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | |
| 1 | Laju Inflasi | Persentase | 3,36 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Bapperida |
| 2 | PDRB per kapita | Persentase | 53,24 | 58,86 | 60,17 | 55,91 | Bapperida |
| 3 | Indeks Gini | Poin | 0,464 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | Bapperida |
| 4 | Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan | Persentase | 93,33 | 93,88 | 93,99 | 93,99 | Bapperida |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UHH menggunakan hasil long form SP 2020) | Poin | 78,36 | 79,5 | 80,14 | 80,14 | Bapperida |
| 6 | Jumlah Penduduk | Jumlah | 1,070,719 | 1,090,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | Bapperida |
| 7 | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persentase | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | Bapperida |
| 8 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persentase | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | Sekretariat Daerah |
| 9 | Angka melek huruf | Persentase | 99,98 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | Dinas Pendidikan |
| 10 | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 10,64 | 10,65 | 10,67 | 10,67 | Dinas Pendidikan |
| 11 | Harapan lama sekolah | Tahun | 13,45 | 13,46 | 13,48 | 13,48 | Dinas Pendidikan |
| 12 | Angka usia harapan hidup | Tahun | 74,45 | 74,55 | 74,60 | 74,60 | Dinas Kesehatan |
| 13 | Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs | Persentase | 18,19 | 15,93 | 14,97 | 14,97 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight) | Persentase | 4,16 | 4,13 | 4,11 | 4,11 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Cakupan desa siaga aktif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 16 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | Persentase | 64,81 | 68,53 | 69,97 | 69,97 | Dinas Tenaga Kerja |
| 17 | Tingkat pengangguran terbuka | Persentase | 9,39 | 8,11 | 7,96 | 7,96 | Dinas Tenaga Kerja |
| 18 | Rasio penduduk yang bekerja | Persentase | 42,96 | 64,73 | 67,02 | 67,02 | Dinas Tenaga Kerja |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 19 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas | Persentase | 90,61 | 90,88 | 91,22 | 91,22 | Dinas Tenaga Kerja |
| 21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 3,57 | 3,62 | 3,67 | 3,67 | Sekretariat Daerah |
| 22 | Persentase PAD terhadap pendapatan | Persentase | 45,09 | 51,74 | 55,11 | 55,11 | Bapenda |
| 23 | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | BKAD |
| 24 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Poin | 83,1 | 84,7 | 85,7 | 85,7 | DKPP |
| 25 | Penguatan cadangan pangan | Ton | 27,40 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | DKPP |
| 26 | Kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Persentase | 0,68 | 0,63 | 0,6 | 0,6 | DKPP |
| 27 | Kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Konstan | Persentase | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | DKPP |
| 28 | Produksi Pertanian (Padi) | Ton | 2.831,90 | 3.541,42 | 3.647,26 | 3.647,26 | DKPP |
| 29 | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Persentase | 18,7 | 18,27 | 19,24 | 19,24 | DKUKMDagin |
| 30 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Persentase | 19,23 | 20,87 | 20,98 | 20,98 | DKUKMDagin |
| 31 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Persentase | 18,7 | 18,88 | 19,06 | 19,06 | DKUKMDagin |
| 32 | Kontribusi sektor perdagangan besar, ecern, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Persentase | 19,23 | 15,94 | 17,33 | 17,33 | DKUKMDagin |
| 33 | Kontribusi sektor perdagangan besar, ecern, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar konstan | Persentase | 3,73 | 18,26 | 22,76 | 22,76 | DKUKMDagin |
| 34 | Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Persentase | N/A | 13,12 | 13,48 | 13,48 | Dinas Perhubungan |
| 35 | Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar konstan | Persentase | N/A | 14,52 | 16,05 | 16,05 | Dinas Perhubungan |
| **II** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi perkapita | Ribu Rp. | 12.656 | 12.700 | 12.750 | 12.750 | Bapperida |
| 2 | Angka kriminalitas | Angka | N/A | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 | Satpol PP |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Rasio ketergantungan | Persentase | 43 | 43,52 | 43,81 | 43,81 | Disdukcapil |
| 4 | Indeks Pemberdayaan Gender | Poin | 72,56 | 73,81 | 74 | 74 | DP3A |
| 5 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | Persentase | 64,81 | 68,53 | 69,97 | 69,97 | Dinas Tenaga Kerja |
| **III** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | |
| **A** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | |
| **1** | **PENDIDIKAN** | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persentase | 61,9 | 62 | 62,3 | 62,3 | Dinas Pendidikan |
| 2 | Angka partisipasi sekolah | Angka | 98,75 | 98,85 | 99 | 99 | Dinas Pendidikan |
| 3 | Angka pendidikan yang ditamatkan | Angka | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| 4 | Angka Partisipasi Murni | | | | | | |
| a | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Angka | 90 | 90,3 | 90,5 | 90,5 | Dinas Pendidikan |
| b | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Angka | 90 | 90,3 | 90,5 | 90,5 | Dinas Pendidikan |
| 5 | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | |
| a | Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A | Angka | 95,5 | 96 | 96,5 | 96,5 | Dinas Pendidikan |
| b | Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | Angka | 95,5 | 96 | 96,5 | 96,5 | Dinas Pendidikan |
| 6 | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A | Angka | 91,92 | 92 | 92,5 | 92,5 | Dinas Pendidikan |
| a | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B | Angka | 89,48 | 90 | 90,5 | 90,5 | Dinas Pendidikan |
| 7 | Angka Putus Sekolah | | | | | | |
| a | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Angka | 0,02 | 0,015 | 0,012 | 0,012 | Dinas Pendidikan |
| b | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Angka | 0,02 | 0,015 | 0,012 | 0,012 | Dinas Pendidikan |
| 8 | Angka kelulusan | | | | | | |
| a | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Angka | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| b | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Angka | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 9 | Angka Melanjutkan (AM) | | | | | | |
| a | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Angka | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| b | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Angka | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| 10 | Fasilitas Pendidikan | | | | | | |
| a | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | Persentase | 98,73 | 98,8 | 99 | 99 | Dinas Pendidikan |
| b | Sekolah pendidikan SMP/MTs | Persentase | 98 | 98,2 | 98,4 | 98,4 | Dinas Pendidikan |
| c | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Rasio | 44 | 44,2 | 44,3 | 44,3 | Dinas Pendidikan |
| d | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | Rasio | 31 | 31,2 | 31,4 | 31,4 | Dinas Pendidikan |
| e | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | Rasio | 0,064 | 01.31 | 01.30 | 01.30 | Dinas Pendidikan |
| f | Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP | Rasio | 01.23 | 01.16 | 01.15 | 01.15 | Dinas Pendidikan |
| g | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| h | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | Persentase | 99,98 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | Dinas Pendidikan |
| i | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara) | Persentase | 97,5 | 97,91 | 98,08 | 98,08 | Dinas Pendidikan |
| j | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persentase | 92,3 | 92,78 | 92,93 | 92,93 | Dinas Pendidikan |
| k | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persentase | 61,9 | 62 | 62,3 | 62,3 | Dinas Pendidikan |
| l | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persentase | 91,92 | 92 | 92,2 | 92,2 | Dinas Pendidikan |
| m | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persentase | 89,48 | 90 | 90,2 | 90,2 | Dinas Pendidikan |
| n | Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persentase | 75,3 | 75,4 | 75,6 | 75,6 | Dinas Pendidikan |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| **2** | **KESEHATAN** | | | | | | |
| 1 | Rasio Kematian Ibu per 10.000 Kelahiran Hidup | Rasio | 59,89 | 54,5 | 54 | 54 | Dinas Kesehatan |
| 2 | Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup | Angka | 6,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | Dinas Kesehatan |
| 3 | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup | Angka | 7,08 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | Dinas Kesehatan |
| 4 | Rasio rumah sakit per satuan penduduk | Rasio | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Dinas Kesehatan |
| 5 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | Rasio | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | Dinas Kesehatan |
| 6 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persentase | 97,5 | 98 | 98,5 | 98,5 | Dinas Kesehatan |
| 7 | Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk | Rasio | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | Dinas Kesehatan |
| 8 | Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Persentase | 92,65 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 9 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 10 | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | Persentase | 94,10 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 11 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | Non polio AFP rate | 25,12/ 100.000 | ≥ 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun | ≥ 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun | ≥ 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun | Dinas Kesehatan |
| 12 | Cakupan pneumonia balita yang ditangani | Persentase | 98,31 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 13 | Prevalensi Hipertensi | Persentase | 9,66 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Prevalensi Diabetes Militus | Persentase | 2,5 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Persentase kesembuhan TB Paru | Persentase | 74,28 | 90 | 90 | 90 | Dinas Kesehatan |
| 16 | Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk) | Angka | 128,17 | 60,5 | 60 | 60 | Dinas Kesehatan |
| 17 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 18 | Angka bebas jentik nyamuk DBD | Persentase | 94,38 | 95,5 | 96 | 96 | Dinas Kesehatan |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 19 | Persentase penemuan penderita diare pada balita | Persentase | 52,27 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 20 | Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 21 | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | Persentase | 0,47 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Dinas Kesehatan |
| 22 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | Persentase | 109.9 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 23 | Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80) | Persentase | 96 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 24 | Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota) | Persentase | 94 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 25 | Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) | Persentase | 99,7 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 26 | Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi | Persentase | 116 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 27 | Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 28 | Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 29 | Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM) | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 30 | Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM) | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 31 | Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani | Persentase | 85,8 | 86 | 86,5 | 86,5 | Dinas Kesehatan |
| 32 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 33 | Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 34 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | Persentase | 165,4 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 35 | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 36 | Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 37 | Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk | Persentase | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Dinas Kesehatan |
| 38 | Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 39 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 40 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 41 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 42 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 43 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 44 | Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 45 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 46 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 47 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 48 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 49 | Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 50 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| **3** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| **PEKERJAAN UMUM** | | | | | | | |
| 1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persentase | 88,95 | 89 | 89,2 | 89,2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2 | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Persentase | 0,197 | 0,198 | 0,199 | 0,199 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3 | Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam) | Persentase | 88,95 | 89 | 89,2 | 89,2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4 | Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | Meter | 96.121 | 97,221 | 98,321 | 98,321 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 5 | Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman | Persentase | 5,49 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 6 | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | Persentase | 62 | 75 | 80 | 80 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 7 | Tidak terjadi genangan >2 kali setahun | Persentase | 0,89 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 8 | Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya | Jumlah | 191 | 293 | 443 | 443 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 9 | Persentase irigasi kota dalam kondisi baik | Persentase | 53,66 | 62,21 | 66,49 | 66,49 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 10 | Rasio jaringan irigasi | Rasio | 0,36 | 0,39 | 0,405 | 0,405 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 11 | Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik | Persentase | 82,46 | 87,97 | 93,64 | 93,64 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 12 | Persentase penduduk berakses air minum | Persentase | 91,91 | 93,68 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 13 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,perkotaan dan perdesaan | Persentase | 91,90 | 93,68 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 14 | Persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota | Persentase | 3,52 | 3,15 | 2,98 | 2,98 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 15 | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | Persentase | 20,61 | 21,09 | 21,92 | 21,92 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 16 | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | Rasio | 9,42 | 9,84 | 9,93 | 9,93 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 17 | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | Rasio | 1,52 | 1,52 | 1,55 | 1,55 | Dinas Perumahan dan Permukiman/ Sekretariat Daerah |
| **PENATAAN RUANG** | | | | | | | |
| 1 | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan | Rasio | 0,0038 | 0,0065 | 0,01 | 0,01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2 | Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Persentase | 99,71 | 99,80 | 99,85 | 99,85 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **4** | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | |
| 1 | Rasio rumah layak huni | Rasio | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Dinas Perumahan dan Permukiman |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 2 | Rasio pemukiman layak huni | Rasio | 89,14 | 90,24 | 90,79 | 90,79 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 3 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Persentase | 92,82 | 96,12 | 97,77 | 97,77 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 4 | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | Persentase | 3,52 | 3,15 | 2,98 | 2,98 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 5 | Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat) | Persentase | 1,07 | 1,43 | 1,61 | 1,61 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 6 | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | Persentase | 1,00 | 0,67 | 0,50 | 0,50 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 7 | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 8 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 9 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 10 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani | Persentase | 72,36 | 65,92 | 62,71 | 62,71 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 11 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni) | Persentase | 7,18 | 5,53 | 3,88 | 3,88 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 12 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum) | Persentase | 12,04 | 12,71 | 13,38 | 13,38 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 13 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | Persentase | 7,85 | 6,02 | 5,40 | 5,40 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 14 | Persentase pemukiman yang tertata | Persentase | 12,04 | 12,71 | 13,38 | 13,38 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 15 | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | Persentase | 21,16 | 21,21 | 21,26 | 21,26 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| **5** | **KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | |
| 1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Rasio | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | Satpol PP |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Satpol PP |
| 3 | Persentase Penegakan PERDA | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Satpol PP |
| 4 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota | Persentase | 50 | 50 | 50 | 50 | DPKP |
| 5 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persentase | NA | 100 | 100 | 100 | DPKP |
| 6 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Menit | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | DPKP |
| 7 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jiwa | 28.200 | 31.100 | 32.600 | 32.600 | BPBD |
| 8 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana | Jiwa | 3.869 | 4.062 | 4.265 | 4.265 | BPBD |
| 9 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jiwa | 13.230 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | BPBD |
| 10 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Satpol PP |
| 11 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Satpol PP |
| **6** | **SOSIAL** | | | | | | |
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 2 | Persentase PMKS yang tertangani | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 3 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 4 | Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesos) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | Persentase | 75 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 5 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 6 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 7 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 8 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 9 | Persentase korban bencana alam dan sosial yg kebutuhan dasarnya terpenuhi pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 10 | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | Persentase | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | Dinas Sosial |
| **B** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | |
| **1** | **TENAGA KERJA** | | | | | | |
| 1 | Tingkat Kesempatan kerja (%) | Persentase | 90,61 | 93,11 | 93,41 | 93,41 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja | Orang | 6.729 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Dinas Tenaga Kerja |
| 3 | Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan | Orang | 303.941 | 315.733 | 321.902 | 321.902 | Dinas Tenaga Kerja |
| 4 | Penetapan besaran UMK | Rupiah | 4.813.988 | 4.813.988 | 4.833.988 | 4.833.988 | Dinas Tenaga Kerja |
| 5 | Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Tenaga Kerja |
| 6 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan | Tenaga kerja | 176 | 200 | 220 | 220 | Dinas Tenaga Kerja |
| 7 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | Tenaga kerja | 50 | 50 | 50 | 50 | Dinas Tenaga Kerja |
| 8 | Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Persentase | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | Dinas Tenaga Kerja |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 9 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | Persentase | 18,62 | 19 | 20 | 20 | Dinas Tenaga Kerja |
| 10 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Juta/Pekerja/Tahun | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | Dinas Tenaga Kerja |
| 12 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan | Persentase | 72,05 | 72,05 | 72,25 | 72,25 | Dinas Tenaga Kerja |
| 13 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota | Persentase | 82,9 | 82,9 | 83,5 | 83,5 | Dinas Tenaga Kerja |
| **2** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persentase | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | DP3A |
| 2 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bogor | Persentase | 22 | 22 | 22 | 22 | DP3A |
| 3 | Rasio KDRT | Persentase | 0,00015 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00012 | DP3A |
| 4 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persentase | 47,66 | 47,70 | 47,80 | 47,80 | DP3A |
| 5 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | DP3A |
| 6 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | DP3A |
| 7 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | DP3A |
| 8 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persentase | 48,48 | 49,01 | 49,54 | 49,54 | DP3A |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 9 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | DP3A |
| 10 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | DP3A |
| 11 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | DP3A |
| 12 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | Rasio | 99,84 | 99,85 | 99,86 | 99,86 | DP3A |
| 13 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP | Rasio | 95,94 | 95,95 | 95,96 | 95,96 | DP3A |
| 14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA | Rasio | 92,26 | 92,27 | 92,28 | 92,28 | DP3A |
| 15 | Persentase ARG pada Belanja langsung APBD | Persentase | 15,51 | 15,55 | 15,60 | 15,60 | DP3A |
| 16 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten /kota | Persentase | 0,0236 | 0,0235 | 0,0232 | 0,0232 | DP3A |
| 17 | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Rasio | 17,27 | 17,26 | 17,25 | 17,25 | DP3A |
| **3** | **PANGAN** | | | | | | |
| 1 | Ketersediaan pangan utama | Kg/kap/tahun | 161,00 | 162,40 | 163,81 | 163,81 | DKPP |
| 2 | Ketersediaan energi perkapita | kkal/kap/hr | 2.318,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | DKPP |
| 3 | Ketersediaan protein perkapita | Gram/kap/hr | 76,40 | 63 | 63 | 63 | DKPP |
| 4 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persentase | 92,96 | 95,5 | 95,8 | 95,8 | DKPP |
| **4** | **PERTANAHAN** | | | | | | |
| 1 | Penyelesaian kasus tanah Negara | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| **5** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | |
| 1 | Tersusunnya RPPLH kota | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Dinas Lingkungan Hidup |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota | Ada/tidak | Ada | Tidak Ada | Ada | Ada | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air | Poin | 46,67 | 71,30 | 71,50 | 71,50 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 5 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara | Poin | 95,92 | 55,63 | 56,03 | 56,03 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | Persentase | 57,14 | 56,32 | 57,45 | 57,45 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 7 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | Pelatihan | Ada | Ada | Ada | Ada | Dinas Lingkungan Hidup |
| 8 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Dinas Lingkungan Hidup |
| 9 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti. | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 10 | Timbulan sampah yang ditangani | Persentase | 79,03 | 79,25 | 79,5 | 79,5 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 11 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R | Persentase | 7,81 | 8 | 8,1 | 8,1 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 12 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Persentase | 86,84 | 87,25 | 87,6 | 87,6 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 13 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota | Poin | 58,4 | 57,84 | 58,09 | 58,09 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 14 | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota | Poin | 79,03 | 79,25 | 79,5 | 79,5 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 15 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota | Persentase | 57,14 | 56,32 | 57,45 | 57,45 | Dinas Lingkungan Hidup |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| **6** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | |
| 1 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Rasio | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | Disdukcapil |
| 2 | Rasio bayi berakte kelahiran | Rasio | 1: 0,98 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | Disdukcapil |
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah | Rasio | 1: 0,55 | 1: 0,65 | 1: 0,7 | 1: 0,7 | Disdukcapil |
| 4 | Ketersediaan database kependudukan skala Kota | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Disdukcapil |
| 5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/ belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Disdukcapil |
| 6 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Persentase | 100,5 | 100 | 100 | 100 | Disdukcapil |
| 7 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | Persentase | 98 | 99,20 | 99,50 | 99,50 | Disdukcapil |
| 8 | Kepemilikan KTP | Persentase | 100,86 | 100 | 100 | 100 | Disdukcapil |
| 9 | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun | Persentase | 98 | 100 | 100 | 100 | Disdukcapil |
| 10 | Cakupan pasangan non muslim berakte kawin | Persentase | 55 | 65 | 70 | 70 | Disdukcapil |
| 11 | Penyajian data kependudukan skala kota dalam satu tahun | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Disdukcapil |
| 12 | Pemanfaatan data kependudukan | Persentase | 63,89 | 66,67 | 69,44 | 69,44 | Disdukcapil |
| 13 | Perekaman KTP elektronik | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Disdukcapil |
| 14 | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Persentase | 70,10 | 82 | 84 | 84 | Disdukcapil |
| 15 | Kepemilikan akta kelahiran | Persentase | 98 | 99,2 | 99,5 | 99,5 | Disdukcapil |
| 18 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Persentase | 63,89 | 66,67 | 69,44 | 69,44 | Disdukcapil |
| **7** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | |
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Kelompok | 75 | 75 | 75 | 75 | DP3A |
| **8** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | |
| 1 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persentase | N/A | 1,98 | 1,97 | 1,97 | DPPKB |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 2 | Total Fertility Rate (TFR) | Persentase | 1,87 | 1,97 | 1,975 | 1,975 | DPPKB |
| 3 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB | Persentase | 61,11 | 66,67 | 69,44 | 69,44 | DPPKB |
| 4 | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | Persentase | 44,44 | 47,22 | 50 | 50 | DPPKB |
| 5 | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Jumlah | 13 | 14 | 15 | 15 | DPPKB |
| 6 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan | Jumlah | 1 | 2 | 3 | 3 | DPPKB |
| 7 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Persetase | 1,37 | 1,39 | 1,43 | 1,43 | DPPKB |
| 8 | Ratio Akseptor KB | Angka | 64,70 | 64,73 | 64,76 | 64,76 | DPPKB |
| 9 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 | Persentase | 64,70 | 64,73 | 64,76 | 64,76 | DPPKB |
| 10 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | Persentase | 9,30 | 9,35 | 9,40 | 9,40 | DPPKB |
| 11 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | Persentase | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | DPPKB |
| 12 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persentase | 15,95 | 15,91 | 15,88 | 15,88 | DPPKB |
| 13 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persentase | 19,79 | 19,84 | 19,86 | 19,86 | DPPKB |
| 14 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persentase | 64,7 | 64,73 | 64,76 | 64.76 | DPPKB |
| 15 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | DPPKB |
| 16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persentase | 71,90 | 72 | 72,50 | 72,50 | DPPKB |
| 17 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persentase | 75,93 | 75,95 | 76 | 76 | DPPKB |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 18 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | DPPKB |
| 19 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | Persentase | 114,71 | 114,73 | 114,74 | 114,74 | DPPKB |
| 20 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | DPPKB |
| 21 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | Persentase | 79,83 | 79,85 | 80 | 80 | DPPKB |
| 22 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | DPPKB |
| 23 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | DPPKB |
| 24 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | DPPKB |
| 25 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | Persentase | 26,47 | 32,35 | 35,29 | 35,29 | DPPKB |
| 26 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persentase | 81,63 | 82 | 83 | 83 | DPPKB |
| 27 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Persentase | 49,89 | 50 | 51 | 51 | DPPKB |
| 28 | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Tahun | 21 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | DPPKB |
| 29 | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) | Persentase | 64,37 | 64,43 | 64,46 | 64,46 | DPPKB |
| 30 | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) | Persentase | 15,95 | 15,91 | 15,88 | 15,88 | DPPKB |
| **9** | **PERHUBUNGAN** | | | | | | |
| 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Orang | 30.841.459 | 34.496.720 | 36.483.731 | 36.483.731 | Dinas Perhubungan |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 2 | Rasio ijin trayek | Rasio (/Jml Pddk) | 0,0114894 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0022 | Dinas Perhubungan |
| 3 | Jumlah uji kir angkutan umum | kendaraan | 5.738 | 1.911 | 1.720 | 1.720 | Dinas Perhubungan |
| 4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit terminal bis | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas Perhubungan |
| 5 | Persentase layanan angkutan darat | Persen | 0,04 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | Dinas Perhubungan |
| 6 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perhubungan |
| 7 | Pemasangan rambu-rambu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perhubungan |
| 8 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 1,8 | 0,00178 | 0,00178 | 0,00178 | Dinas Perhubungan |
| 9 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Penumpang | 19.770.026 | 12.490.810 | 12.101.617 | 12.101.617 | Dinas Perhubungan |
| 10 | Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal | Penumpang | 848.773 | 800.000 | 802.000 | 802.000 | Dinas Perhubungan |
| 11 | Rasio konektivitas Kabupaten / Kota | Rasio | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | Dinas Perhubungan |
| 12 | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota | Rasio | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | Dinas Perhubungan |
| **10** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | |
| 1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persentase | 94 | 95 | 97 | 97 | Diskominfo |
| 2 | Hasil Penilaian SPBE | Poin | 3,72 | 3,75 | 3,8 | 3,8 | Diskominfo |
| 3 | Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi | Persentase | 37 | 43 | 47 | 47 | Diskominfo |
| 4 | Persentase Keterbukaan Informasi publik | Persentase | 86,4 | 80 | 80 | 80 | Diskominfo |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| | Predikat Keterbukaan Informasi Publik | Predikat | Menuju Informatif | Menuju Informatif (80-89,9) | Menuju Informatif (80-89,9) | Menuju Informatif (80-89,9) | Diskominfo |
| 5 | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Diskominfo |
| 6 | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Diskominfo |
| 7 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | Persentase | 86,07 | 86,5 | 87 | 87 | Diskominfo |
| **11** | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | |
| 1 | Persentase Koperasi Aktif | Persentase | 21,4 | 23,4 | 24,18 | 24,18 | DinKUKMdagin |
| 2 | Persentase Koperasi berkualitas | Persentase | 10,14 | 11,21 | 12,26 | 12,26 | DinKUKMdagin |
| 3 | Jumlah UMKM (wirausaha) baru | Jumlah | 370 | 380 | 390 | 390 | DinKUKMdagin |
| 4 | Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun | Milyar Rupiah | 194 | 200 | 210 | 210 | DinKUKMdagin |
| 5 | Jumlah PKL yang direlokasi | Jumlah | 682 | - | - | - | DinKUKMdagin |
| 6 | Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM | Jumlah | 87 | - | - | - | DinKUKMdagin |
| 7 | Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar | Jumlah | - | 50 | 55 | 55 | DinKUKMdagin |
| 8 | Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti | Persentase | - | 90 | 90 | 90 | DinKUKMdagin |
| 9 | Meningkatnya koperasi yang berkualitas | Angka | 86 | 106 | 116 | 116 | DinKUKMdagin |
| 10 | Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha | Angka | - | 4500 | 5207 | 5207 | DinKUKMdagin |
| **12** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | |
| 1 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Trilyun rupiah | 1.934 | 1.940 | 1.950 | 1.950 | DPMPTSP |
| 2 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN | Persen | 22,02 | 24,29 | 25 | 25 | DPMPTSP |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Persentasi peningkatan investasi di Kabupaten / Kota | Persen | 20,94 | 21,25 | 21,88 | 21,88 | DPMPTSP |
| **13** | **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | | |
| 1 | Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan | Persentase | 20 | 30 | 35 | 35 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2 | Persentase Wirausaha muda | Persentase | 11,07 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 3 | Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) | Persentase | 57,3 | 59 | 60 | 60 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 4 | Cakupan Pembinaan Olah Raga | Persentase | 29,62 | 33,33 | 88,88 | 88,88 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 5 | Jumlah Atlet/Perolehan Medali Tingkat Provinsi | Jumlah | 74 | | 68 | 68 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 6 | Peningkatan prestasi olahraga (Kejuaran Nasional dan Internasional) | Jumlah | 9 | 15 | 10 | 10 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 7 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Poin | 3.031 | 3.312 | 3.335 | 3.335 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 8 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persentase | 21,17 | 25 | 27 | 27 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 9 | Peningkatan prestasi olahraga | Jumlah | 9 | 15 | 10 | 10 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| **14** | **STATISTIK** | | | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Diskominfo |
| 2 | Data basis pembangunan daerah | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Diskominfo |
| 3 | Buku ”Kota Bogor Dalam Angka” | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Diskominfo |
| 4 | Buku ”PDRB” | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Diskominfo |
| 5 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Diskominfo |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 6 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Diskominfo |
| **15** | **PERSANDIAN** | | | | | | |
| 1 | Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah | Persentase | 86 | 91 | 92 | 92 | Diskominfo |
| 2 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persentase | 81 | 82 | 82 | 82 | Diskominfo |
| **16** | **KEBUDAYAAN** | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya | Persentase | 76,5 | 78 | 80 | 80 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Cagar budaya non bangunan | 25 | 26 | 27 | 27 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | Jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni | Jumlah | 41 | 43 | 45 | 45 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 4 | Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya | Persentase | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| **17** | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | |
| 1 | Rasio pengunjung perpustakaan per tahun | Rasio | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 2 | Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Rasio | 0,490 | 0,493 | 0,495 | 495 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Rasio | 0,44 | 0,66 | 0,78 | 0,78 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 4 | Rata-rata pengunjung perpustakaan | Orang/Hari | 331 | 421 | 465 | 465 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 5 | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul Buku | 39,615 | 40,865 | 41,865 | 41,865 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 6 | Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Persentase | 20 | 50 | 64,29 | 64,29 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 7 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | Nilai | 52 | 71.41 | 74.41 | 74.41 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 8 | NIlai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) | Nilai | 65,20 | 68,34 | 69,91 | 69,91 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| **18** | **KEARSIPAN** | | | | | | |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Persentase | 41,17 | 51,42 | 57,14 | 57,14 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 2 | Persentase realisasi kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 3 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat | Persentase | 93 | 95 | 96 | 96 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 4 | Tingkat kesediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggung jawaban nasional | Persentase | 66,81 | 68 | 69 | 69 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| **C** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | |
| **1** | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | |
| 1 | Produksi Ikan Konsumsi | Ton | 3.364,51 | 1.710,56 | 1.727,66 | 1.727,66 | DKPP |
| 2 | Jumlah Konsumsi Ikan | Kg | 30.076.148 | 32.378.540 | 32.469.145 | 32.469.145 | DKPP |
| 3 | Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) wilayah kabupaten/kota (sumber data: One data KKP) | Ton | 3.364,51 | 1.710,56 | 1.727,66 | 1.727,66 | DKPP |
| **2** | **PARIWISATA** | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Kunjungan wisata | Orang | 5,650,637 | 7.038.999 | 7.742.899 | 7.742.899 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | Lama kunjungan Wisata | Hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | PAD sektor pariwisata | Rupiah | 328,283,584,610 | 322.263.722.867 | 338.376.908.821 | 338.376.908.821 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| **3** | **PERTANIAN** | | | | | | |
| 1 | Produktivitas padi per hektar | Ton/ha | 7,28 | 7,44 | 7,49 | 7,49 | DKPP |
| 2 | Cakupan bina kelompok petani | Persentase | 93,08 | 93,41 | 93,57 | 93,57 | DKPP |
| 3 | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persentase | 79,75 | 47,62 | 54,55 | 54,55 | DKPP |
| 4 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Ton/Ha | 10,81 | 14,09 | 14,38 | 14,38 | DKPP |
| **4** | **PERDAGANGAN** | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor | Persentase | 8,7 | 11,2 | 14,2 | 14,2 | DinKUKMdagin |
| 2 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan (IUUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko/swalayan) | Persentase | 76.2 | 77 | 77,81 | 77,81 | DinKUKMdagin |
| 3 | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persentase | 55,43 | 57,44 | 61,55 | 61,55 | DinKUKMdagin |
| 4 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan nya (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku | Persentase | 38,67 | 39,44 | 40,21 | 40,21 | DinKUKMdagin |
| **5** | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | |
| 1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | Persentase | 86,66 | 100 | 100 | 100 | DinKUKMdagin |
| 2 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi | Persentase | 45,6 | 52,38 | 52,38 | 52,38 | DinKUKMdagin |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang yang ditetapkan dalam RPIP | Persentase | 10 | 30 | 30 | 30 | DinKUKMdagin |
| 4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persentase | 2,8 | 7,2 | 8,9 | 8,9 | DinKUKMdagin |
| 5 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persentase | 2,8 | 7,2 | 8,9 | 8,9 | DinKUKMdagin |
| 6 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persentase | 0 | 0 | 0 | 0 | DinKUKMdagin |
| 7 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten / Kota | Persentase | 0 | 0 | 0 | 0 | DinKUKMdagin |
| 8 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | Persentase | 70 | 50 | 55 | 55 | DinKUKMdagin |
| **D** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | |
| **1** | **SEKRETARIT DPRD** | | | | | | |
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Sekretariat DPRD |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Sekretariat DPRD |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Sekretariat DPRD |
| **E** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH** | | | | | | |
| **1** | **PERENCANAAN** | | | | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Bapperida |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan deng an PERDA/PERKADA | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Bapperida |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Bapperida |
| 4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Bapperida |
| 5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Persentase | 99,27 | 100 | 100 | 100 | Bapperida |
| 6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Bapperida |
| 7 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Persentase | 58,85 | 100 | 100 | 100 | Bapperida |
| 8 | Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | - | 1 | - | 1 | Bapperida |
| 9 | Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | - | 1 | - | 1 | Bapperida |
| 10 | Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | Bapperida |
| 11 | Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | - | - | - | - | Bapperida |
| 12 | Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | Persentase | 99,27 | 100 | 100 | 100 | Bapperida |
| 13 | Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Bapperida |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 14 | Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | Persentase | 58,85 | 100 | 100 | 100 | Bapperida |
| **2** | **KEUANGAN** | | | | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | BKAD |
| 2 | Persentase SILPA | Persentase | 1,77 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | BKAD |
| 3 | Persentase SILPA terhadap APBD | Persentase | 1,77 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | BKAD |
| 4 | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | Persentase | 0 | 0 | 0 | 0 | BKAD |
| 5 | Persentase belanja pendidikan (20%) | Persentase | 21,67 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | BKAD |
| 6 | Persentase belanja kesehatan (10%) | Persentase | 22,89 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | BKAD |
| 7 | Penetapan APBD | Tepat Waktu/ Tidak | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | BKAD |
| 8 | Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) | Persentase | 80,61 | 81 | 81 | 81 | BKAD |
| 9 | Opini Laporan keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | BKAD |
| 10 | Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Persentase | 4,32 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | BKAD |
| 11 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD setahun sebelumnya | Persentase | 5,4 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | BKAD |
| 12 | Devisiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Persentase | 0,99 | 0 | 0 | 0 | BKAD |
| 13 | Manajemen Aset | | | | | | |
| 14 | Adanya Daftar Aset Tetap | Predikat | Ya | Ya | Ya | Ya | BKAD |
| 15 | Penyusunan Manual daftar aset tetap | Predikat | Ya | Ya | Ya | Ya | BKAD |
| 16 | Adanya proses inventarisasi aset tahunan | Predikat | Ya | Ya | Ya | Ya | BKAD |
| 17 | Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran | Predikat | Ya | Ya | Ya | Ya | BKAD |
| **3** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Orang | 35 | 35 | 35 | 35 | BKPSDM |
| 2 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Orang | 150 | 150 | 150 | 150 | BKPSDM |
| 3 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 4723 | 4723 | 4723 | 4723 | BKPSDM |
| 4 | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | Persentase | 58,83 | 58,83 | 60 | 60 | BKPSDM |
| 5 | Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | Persentase | 21,16 | 25,96 | 27,78 | 27,78 | BKPSDM |
| 6 | Rasio pegawai fungsional bersetifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan | Persentase | 57,76 | 58 | 58,75 | 58,75 | BKPSDM |
| **4** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | |
| 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Waktu/JP | 22 | 22 | 22,5 | 22,5 | BKPSDM |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Persentase | 85,47 | 86,5 | 87 | 87 | BKPSDM |
| 3 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural | Persentase | 35,31 | 40 | 45 | 45 | BKPSDM |
| **5** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | |
| 1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Bapperida |
| 2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Bapperida |
| 3 | Penerapan SIDa: | | | | | | |
| a | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | Bapperida |
| b | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | Persentase | 63 | 64 | 65 | 65 | Bapperida |
| **F** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | |
| **1** | **INSPEKTORAT** | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target | | Kondisi Kinerja Akhir | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Maturitas SPIP | Predikat | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Inspektorat |
| 2 | Peningkatan kapabilitas APIP | Predikat | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Inspektorat |
| 3 | Persentase pelanggaran pegawai | Persentase | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | Inspektorat |
| 4 | Persentase tindak lanjut temuan internal | Persentase | 94,1 | 94,2 | 94,25 | 94,25 | Inspektorat |
| 5 | Persentase tindak lanjut temuan eksternal | Persentase | 90,2 | 91 | 91,5 | 91,5 | Inspektorat |
| 6 | Persentase peningkatan kapabilitas APIP | Persentase | 4,14 | 0,141 | 0,142 | 0,142 | Inspektorat |

*Sumber: Diolah Bapperida, 2024*

Target Indikator Kinerja Daerah RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, secara umum terbagi atas tiga (3) aspek besar yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, serta dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan tabel di atas, pada aspek kesejahteraan masyarakat secara garis besar menunjukkan kondisi awal yang cukup baik dengan dicerminkan dari kondisi awal yang didapat dari realisasi dari kinerja tahun 2022. Beberapa indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat tersebut seperti laju inflasi dan indeks gini yang menunjukkan angka 3,36% dan 0,430. Kemudian, indikator indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, dan angka usia harapan hidup berturut-turut yaitu 77.85, 5.65, dan 74.45. Laju inflasi pada tahun 2022 dengan kondisi awal 3,36 adalah kondisi yang menunjukkan capaian positif dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kemudian pada indeks pembangunan manusia, kondisi tersebut dikelompokkan pada kategori tinggi. Kondisi dari beberapa indikator aspek kesejahteraan masyarakat ini menjadi data dasar yang dapat ditingkatkan pada pembangunan daerah Kota Bogor di tahun 2025-2026.

Kemudian, kaitannya dengan aspek daya saing daerah. Pada beberapa indikator penyerta di dalam aspek tersebut seperti pengeluaran konsumsi per-kapita dan indeks pemberdayaan gender yaitu Rp 12.656 ribu dan 72,33. Pengeluaran konsumsi per kapita yang berarti menunjukkan kemampuan daya beli memperlihatkan bahwa pada kondisi awal tersebut menunjukkan daya beli yang cukup tinggi, sehingga secara tidak langsung memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Kota Bogor. Kemudian pada indeks pemberdayaan gender yang menggambarkan peran perempuan dalam hal ekonomi dan politik dengan meliihat kondisi awal pada tabel di atas menandakan semakin meningkatnya peran perempuan di Kota Bogor. Dari beberapa indikator tersebut menyajikan kondisi yang baik namun tetap dapat ditingkatkan dalam pembangunan Kota Bogor ke depan.

Sedangkan pada aspek pelayanan umum yang terbagi atas tiga fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar, fokus layanan urusan wajib non pelayanan dasar, dan fokus layanan urusan pilihan. Fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar seperti

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Pada unsur pendidikan masih dapat ditingkatkan lagi pada beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B yang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), faktor guru (rasio murid terhadap guru), faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).

Selanjutnya pada urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat ditingkatkan seperti pada penyelesaian pelanggaran K3 yang di mana Kota Bogor sebagai kota metropolitan yang menjadi tujuan masyarakat luar daerah dalam mencari peruntungan sehingga berpeluang menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertban umum. Sehingga hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dalam pembangunan oleh Kota Bogor berikutnya. Kemudian pada fokus layanan urusan wajib non pelayanan dasar pada urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Pada urusan tenaga kerja yang kemudian harus ditingkatkan yaitu pada tingkat pengangguran terbuka.

Selain itu, pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah yang diakibatkan juga oleh sejumlah rintangan pada aspek politis, hukum, sosial maupun ekonomi. Selanjutnya pada fokus layanan urusan pilihan yang terdiri atas urusan pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, kelautan dan perikanan. Pada fokus layanan urusan pilihan pada urusan perindustrian dapat ditingkatkan lagi pada cakupan bina kelompok pengrajin. Dan terakhir yaitu fokus penunjang urusan dengan urusan perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian dan diklat, penelitian dan pengembangan, pengawasan, dan Sekretariat

DPRD. Pada unsur penelitian dan pengembangan yaitu pemanfaatan hasil kelitbangan yang dapat dimaksimalkan pada pembangunan Kota Bogor 2025-2026.

# BAB IX
# PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 berisikan kebijakan menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dokumen RPD ini merupakan penjabaran kebijakan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025. RPD ini memiliki peran strategis karena memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu tahun 2025-2026, sesuai kondisi keuangan daerah dan dinamika lingkungan dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas.

RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Bogor serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan. Untuk itu diperlukan komitmen, kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggungjawab yang tinggi demi mencapai target-target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setiap unsur pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif, masyarakat hingga dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam mensukseskan program-program pada RPD.

## 9.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah Kota Bogor dalam menyusun RKPD mulai tahun 2025 sampai dengan 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah Kota Bogor berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta masyarakat maupun dunia usaha;
b. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 diperlukan

langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan RKPD; dan

c. Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPD Tahun 2025-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

## 9.2 Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan bila RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan maka RPD 2025-2026 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada dokumen RPJPN, RPJPD Kota Bogor, dan RPJMN.

Proses keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin pada kualitas manusianya, integritas birokrasi yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif. Dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah tersebut, diharapkan Kota Bogor akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya yaitu “Kota Jasa yang Nyaman dengan masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah”.

Pemerintah **Kota Bogor**

**BAPPERIDA KOTA BOGOR**
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Bogor

Jl. Kapten Muslihat No.21 - Bogor 16121
bapperida@kotabogor.go.id
0251-8338052